

SISTEM AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI SEKTOR PUBLIK

Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT.
Dr. Emi Yulia Siska, S.E., M.Si., Ak.
Wukuf Dilvan Rafa, M.Ak.
Zulkifli, S.E., M.M.
Lilik Ambarwati, S.E., M.M.

Dra. Sulastiningsih, M.Si.
Dra. Sapinah, M.Si.
Dr. Priyastlwi, M.Si., Ak. CA.
Dr. Maria Magdalena Pur Dwiastuti, S.E., M.M.
Andri Widiyanto, S.E., M.Si., Ak.

Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT.

Dr. Emi Yulia Siska, S.E., M.Si., Ak.

Wukuf Dilvan Rafa, M. Ak.

Zulkifli, S.E., M.M.

Lilik Ambarwati, S.E., M.M.

Dra. Sulastiningsih, M.Si.

Dra. Sapinah, M.Si.

Dr. Priyastiwi, M.Si., Ak. CA.

Dr. Maria Magdalena Pur Dwiastuti, S.E., M.M.

Andri Widiyanto, S.E., M.Si., Ak.

SISTEM AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI SEKTOR PUBLIK

Diterbitkan oleh



PT. Samudra Solusi Profesional

KREATOR	Abdul Gafur Rinaldi (penulis)
JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	SISTEM AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI SEKTOR PUBLIK / Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT., Dr. Emi Yulia Siska, S.E., M.Si., Ak., Wukuf Dilvan Rafa, M. Ak., Zulkifli, S.E., M.M., Lilik Ambarwati, S.E., M.M., Dra. Sulastiningsih, M.Si., Dra. Sapinah, M.Si., Dr. Priyastiw, M.Si., Ak. CA., Dr. Maria Magdalena Pur Dwiastuti, S.E., M.M., Andri Widiyanto, S.E., M.Si., Ak.; editor: Muhammad Syafiq S.E., M.S.A.
EDISI	Cetakan pertama
PUBLIKAS	Malang : PT. Samudra Solusi Profesional, 2024
IDENTIFIKASI	ISBN 978-623-10-2295-0
SUBJEK	Sistem Akuntansi

SISTEM AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI SEKTOR PUBLIK

Copyright ©2024

Penulis

Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT.
 Dr. Emi Yulia Siska, S.E., M.Si., Ak.
 Wukuf Dilvan Rafa, M. Ak.
 Zulkifli, S.E., M.M.
 Lilik Ambarwati, S.E., M.M.
 Dra. Sulastiningsih, M.Si.
 Dra. Sapinah, M.Si.
 Dr. Priyastiw, M.Si., Ak. CA.
 Dr. Maria Magdalena Pur Dwiastuti, S.E., M.M.
 Andri Widiyanto, S.E., M.Si., Ak.

Editor : Muhammad Syafiq, S.E., M.S.A.

Layouter : Wiwik Nisworo

Desain Cover : M. Shahrur Alfattah Desky

Diterbitkan Oleh:



Anggota IKAPI

No. Registrasi Keanggotaan: 385/JTI/2023

Kantor Pusat

Bukit Cemara Tidar Blok K1 No. 14
 Desa/Kelurahan Karangbestuki, Kec. Sukun,
 Kota Malang, Jawa Timur
 Telp/Fax: 0822-3118-6542
 Email: samudrasolusiprofesional@gmail.com

Kantor Cabang

- Workshop Jasmine, Jasmine Valley Blok 3 No. 2, Araya, Malang
- Jalan Magelang, No. 118 Karangwaru, Tegalrejo, D.I Yogyakarta
- Regus, Graha Pena Lt. 5, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Kecamatan Panakukan Kelurahan Karuwisi Utara, Makassar, Sulawesi Selatan

Cetakan Pertama, Juli 2024

ISBN: 978-623-10-2295-0

Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau memfotocopy baik sebagian atau seluruh isi buku ini, serta menjual belikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul "Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan di Sektor Publik" ini dapat terselesaikan. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan di sektor publik, yang merupakan bagian penting dalam mengelola keuangan negara dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pemerintahan.

Dalam buku ini, kami berusaha untuk menyajikan berbagai konsep dan praktik terbaik yang digunakan dalam sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan sektor publik. Pembaca akan menemukan penjelasan mengenai berbagai metode akuntansi yang diterapkan, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta reformasi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik.

Kami menyadari bahwa sektor publik memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari sektor swasta. Oleh karena itu, buku ini juga membahas perbedaan mendasar antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta, serta implikasi dari perbedaan tersebut terhadap pengelolaan keuangan. Selain itu, buku ini juga menyajikan studi kasus dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sistem akuntansi sektor publik diterapkan di berbagai belahan dunia.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Terima kasih kepada para ahli dan praktisi yang telah berbagi ilmu dan pengalaman mereka, serta kepada para penerbit yang telah memberikan dukungan penuh dalam proses penerbitan buku ini.

Kami berharap, buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca, baik dari kalangan akademisi, mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan di sektor publik. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga dan bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan akuntansi serta pengelolaan keuangan di sektor publik.

Malang, Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	1
A. Pendahuluan	2
B. Selayang Pandang Akuntansi Sektor Publik	3
C. Akuntansi Sektor Publik & Akuntansi Pemerintahan	4
D. Jenis- Jenis Akuntansi Sektor Publik	6
E. Tujuan Akuntansi Sektor Publik	8
F. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.....	10
G. Transformasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia	12
Rangkuman.....	15
Latihan Soal.....	17
BAB 2 AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK	18
A. Pendahuluan	20
B. Definisi Akuntansi Manajemen.....	21
C. Jenis- jenis Organisasi Sektor Publik	23
D. Penerapan Akuntansi Manajemen Sektor Publik	24
E. Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik.....	24

F.	Proses Perencanaan dan Pengendalian Manajerial Organisasi Sektor Publik.....	31
G.	Pengendalian Manajemen Sektor Publik.....	32
H.	Peranan Teknologi Dalam Akuntansi Manajemen Sektor Publik	33
	Rangkuman.....	35
	Latihan Soal.....	37
BAB 3	ANGGARAN SEKTOR PUBLIK.....	38
	Pendahuluan	40
	Sistem Kontrol Anggaran	50
	Konsep Sektor Publik	52
	Siklus Anggaran	57
	Rangkuman.....	59
	Latihan Soal.....	60
BAB 4	APBN DAN APBD.....	61
A.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	63
B.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	73
C.	Komponen APBD	75
D.	Belanja Daerah.....	83
E.	Prosedur Penyusunan APBD.....	90
	Rangkuman.....	95
	Latihan Soal.....	96
BAB 5	TEKNIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	102
A.	Pengantar Akuntansi Sektor Publik.....	104
B.	Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik.....	105

	C. Sistem Akuntansi Pemerintahan.....	108
	D. Laporan Keuangan Pemerintah	113
	E. Basis Akuntansi di Sektor Publik.....	117
	Rangkuman.....	129
	Latihan Soal.....	130
BAB 6	STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH.....	132
	A. Pendahuluan.....	134
	B. Kerangka Konseptual	134
	C. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah	136
	Rangkuman.....	176
	Latihan Soal.....	178
BAB 7	LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	179
	A. Definisi Laporan Keuangan Sektor Publik.....	181
	B. Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik.....	184
	C. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	187
	D. Standar Akuntansi yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik.....	190
	E. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik	191
	F. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik	192
	G. Gangguan Teknologi dalam Penyusunan Laporan Keuangan	193
	Rangkuman.....	198
	Latihan Soal.....	200
BAB 8	PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK.....	201
	A. Pendahuluan.....	203

B.	Pengertian Kinerja Sektor Publik dan Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	203
C.	Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik	205
D.	Proses Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	206
E.	Indikator Pengukuran Kinerja Sektor Publik	207
F.	Informasi yang Digunakan untuk Pengukuran Kinerja Sektor Publik	210
G.	Metode Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	211
	Rangkuman.....	215
	Latihan Soal.....	216
BAB 9	SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT	217
A.	Pengertian dan Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat.....	219
B.	Landasan Hukum Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat	220
C.	Prinsip-Prinsip Akuntansi Pemerintahan.....	222
D.	Komponen Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat	224
E.	Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	226
F.	Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat.....	229
G.	Pengendalian Intern dalam Sistem Akuntansi Pemerintah.....	231
H.	Sistem Informasi dan Teknologi dalam Akuntansi Pemerintahan.....	234
I.	Masalah dan Tantangan dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat.....	237
J.	Reformasi dan Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat.....	240
	Rangkuman.....	243

	Latihan Soal.....	245
BAB 10	AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.....	246
	A. Pengertian Akuntansi Daerah.....	248
	B. Landasan Hukum Akuntansi Keuangan Daerah.....	248
	C. Prinsip Akuntansi Keuangan Daerah	249
	D. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah.....	250
	E. Komponen Laporan Keuangan Daerah	255
	F. Sumber Pendapatan Daerah	258
	G. Pengelolaan Belanja Daerah.....	263
	H. Pembiayaan Daerah.....	267
	I. Pengendalian Intern Keuangan Daerah	271
	Rangkuman.....	275
	Latihan Soal.....	277
BAB 11	AKUNTANSI KEUANGAN DESA	280
	A. Akuntansi Keuangan Desa	282
	Rangkuman.....	298
	Latihan Soal.....	299
BAB 12	AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA.....	300
	A. Pendahuluan	302
	B. Karakteristik dan Ruang Lingkup Organisasi Nirlaba	304
	C. Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba	308
	D. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba	310
	E. Laporan Posisi Keuangan.....	312
	F. Laporan Aktivitas.....	312
	G. Laporan Arus Kas	313

H.	Akuntansi Sektor Yayasan	314
I.	Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).....	319
J.	Akuntansi Partai Politik	320
	Rangkuman.....	323
	Latihan Soal.....	324
BAB 13	KONSEP OTONOMI DAERAH	325
A.	Pendahuluan.....	237
B.	Kewenangan Daerah dalam Akuntansi Sektor Publik.....	334
C.	Struktur Pemerintahan Daerah dalam Akuntansi Sektor Publik	337
D.	Sumber Pendapatan Daerah dalam Akuntansi Sektor Publik.	340
E.	Evaluasi dan Pengawasan Otonomi Daerah dalam Akuntansi Sektor Publik.....	342
	Rngkuman	346
	Latihan Soal.....	347
BAB 14	REGULASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.....	348
	Standar Akuntansi Sektor Publik.....	350
	Akuntansi kas versus akuntansi akrual di sektor public	352
	Implementasi reformasi akuntansi sektor public	353
	Sumber tekanan pada proses pengambilan Keputusan	354
	Pengaturan Standar Akuntansi Sektor Publik Indonesia	358
	Perkembangan Regulasi Tekait Otonomi Daerah.....	361
	Kebijakan Regulasi Yang Diterapkan Oleh Pemerintah Terhadap Praktik Bisnis Korporasi Di Indonesia	362
	Rangkuman.....	365
	Latihan Soal.....	367

BAB 15	KOMPARASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VS	
	AKUNTANSI SWASTA	368
A.	Sekilas Akuntansi Sektor Publik	370
B.	Tujuan Komparasi Akuntansi Sektor Publik Versus Sektor Bisnis (Swasta).....	370
C.	Asumsi-Asumsi Akuntansi Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta).....	371
D.	Perbandingan Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta)	373
E.	Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas	376
F.	Dasar Hukum Organisasi Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta).....	379
G.	Hal-hal yang Dikomparasikan.....	380
	Rangkuman.....	390
	Latihan Soal.....	391
KUNCI JAWABAN		392
DAFTAR PUSTAKA		430
GLOSARIUM.....		xv
TENTANG PENULIS.....		xxxviii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 8.1	Proses Pengukuran Kinerja Sektor Publik	206
Gambar 11.1	Susunan Organisasi Pemerintahan Desa	286
Gambar 11.2	Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	290
Gambar 11.3	Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa	291
Gambar 11.4	Tahapan Penyusunan RPJM Desa.....	292
Gambar 11.5	Tahapan Penyusunan RKP Desa.....	293
Gambar 11.6	alur penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa	296
Gambar 11.7	alur penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa	297
Gambar 12.1	Siklus Transaksi Akuntansi Rumah Sakit	315
Gambar 15.1	Keunikan Akuntansi Sektor Publik.....	372
Gambar 15.2	Konsep <i>Value For Money</i> Publik Sektor.....	379

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tabel Jenis-jenis Pajak Daerah	76
Tabel 4.2	Jenis-jenis Retribusi Daerah	78
Tabel 4.3	Perubahan Komposisi Belanja Daerah.....	85
Tabel 8.1	Contoh Indikator Kinerja pada Organisasi Sektor Publik.....	208
Tabel 10.1	250
Tabel 10.2	251
Tabel 10.3	251
Tabel 10.4	252
Tabel 10.5	253
Tabel 10.6	153
Tabel 10.7	253
Tabel 11.1	Tipe/Kedudukan Desa.....	283
Tabel 11.2	Tugas dan Fungsi Organisasi Pemerintahan Desa	286
Tabel 12.1	Perbedaan Karakteristik Organisasi Nirlaba dan Organisasi Bisnis	306
Tabel 15.1	Perbandingan Sektor Publik Dan Sektor Swasta	374
Tabel 15.2	Dasar Hukum Organisasi Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)	379
Tabel 15.3	Pengambilan Keputusan dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)	381

Tabel 15.4	Proses Perencanaan Organisasi Sektor Publik dan Organisasi Bisnis (Swasta)	384
Tabel 15.5	Penganggaran Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)	385
Tabel 15.6	Realisasi Anggaran Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)....	386
Tabel 15.7	Laporan Keuangan Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)	388

DUMNMY



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran

- ❖ Mampu memahami konsep akuntansi sektor publik.
- ❖ Menguasai ilmu akuntansi sektor publik.

Tujuan Pembelajaran

- ❖ Sejarah dan berkembangnya Akuntansi Sektor Publik.
- ❖ Perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan.
- ❖ Jenis-jenis akuntansi sektor publik.
- ❖ Tujuan akuntansi sektor publik.
- ❖ Karakteristik akuntansi sektor publik.
- ❖ Transformasi akuntansi sektor publik di Indonesia.

A. Pendahuluan

Akuntansi sektor publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan akuntansi dalam entitas publik. Akuntansi dalam lingkup privat tidak seperti akuntansi sektor publik dimana memiliki cakupan yang lebih luas dan kompleks karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Secara umum, konsep dari akuntansi sektor publik tidak jauh berbeda dari praktik akuntansi pada sektor privat yaitu mengelola, mencatat dan melaporkan informasi keuangan, hanya saja bentuk pelaporan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur dalam pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud dapat berupa lembaga pemerintah maupun non-profit yang bersifat publik.

Beberapa perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik dan privat dapat dilihat dalam berbagai aspek diantaranya:

1. Tujuan organisasi
2. Regulasi dan standar
3. Transparansi
4. Siklus anggaran dan akuntansi
5. Pengukuran kinerja
6. Stakeholders

Karakteristik tersebut apabila dipahami dengan baik diharapkan dapat memberikan informasi kredibel dan transparan serta relevan atas pemakaian dana publik kepada pemangku kepentingan termasuk didalamnya masyarakat, legislator, pengambil kebijakan dan pihak yang terlibat dalam pengawasan keuangan publik. *Value for money* dan *good practice* merupakan dasar dalam aktivitas pada sektor publik sehingga tercapainya tujuan dari organisasi.

Pada praktiknya, akuntansi sektor publik memiliki tahapan yang harus dilalui diantaranya:

1. Perencanaan.
2. Penganggaran.
3. Realisasi anggaran.
4. Pengadaan barang dan jasa.
5. Pelaporan.
6. Audit.
7. Pertanggungjawaban.

B. Selang Pandang Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik sudah lebih dulu ada bahkan sebelum era modern seperti sekarang, hanya saja pada peradaban kuno lebih kepada proses perkembangan akuntansinya tidak spesifik untuk sektor publik. Barulah pada abad ke-19 hingga saat ini akuntansi sektor publik mulai menjadi perhatian.

1. Abad ke-19: Tersusunnya struktur negara dan pemerintahan serta amanah yang diberikan untuk menjalankan aktivitas ekonomi menjadi titik awal berkembangnya akuntansi sektor publik. Prinsip akuntansi mulai dikenalkan dan diterapkan dalam pola penganggaran untuk memastikan penggunaan dana publik yang tepat sasaran.
2. Awal Abad ke-20: Perkembangan akuntansi sektor publik semakin cepat berkat adanya standar akuntansi dan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan publik. Negara dalam hal ini pemerintahannya mulai menggunakan sistem akuntansi yang lebih jelas dengan harapan terjadinya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
3. Pasca perang dunia II: Setelah Perang Dunia II, terjadi transformasi akuntansi publik dengan menggunakan teknologi informasi yang diakibatkan adanya kompleksitas terhadap kebutuhan administrasi publik dan pengelolaan keuangan negara.

4. Era modern: Munculnya standar akuntansi internasional mempengaruhi praktik akuntansi sektor publik di seluruh dunia sehingga terciptanya standar yang seragam berkaitan dengan pengelolaan dana publik.

C. Akuntansi Sektor Publik & Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan seringkali dianggap sama. Padahal terdapat beberapa cakupan yang membedakan kedua istilah tersebut. Akuntansi pemerintahan erat kaitannya dengan bagaimana cara pemerintahan menjalankan pemerintahan yang baik, bersih dan juga individu di dalamnya agar bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan sektor publik merupakan sebuah institusi di dalam pemerintahan atau pemerintahan yang sedang berkuasa yang memiliki beberapa industri bersifat publik baik yang berbadan hukum maupun badan usaha milik pemerintah.

Akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan dapat dibedakan melalui fokus dan ruang lingkup diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

	Akuntansi Sektor Publik	Akuntansi Pemerintahan
Fokus Utama	Cakupan lebih luas seperti entitas non-pemerintahan pelayanan publik (Badan Usaha Milik Negara),	Cakupan terbatas (kementerian, lembaga, dan badan lainnya).
Tujuan Pelaporan	Fokus terhadap akuntabilitas publik serta transparansi dalam	Fokus terhadap pengelolaan dana publik yang efektif, efisien

	pengelolaan dana publik.	serta akuntabel.
Regulasi	PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).	SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan.
Sumber Pendanaan	Dana dari pemerintah, swasta dan sumbangan dari masyarakat.	Pajak, hasil usaha, pendapatan lain yang dikumpulkan oleh pemerintah.
Tujuan operasional	Menyediakan informasi keuangan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya publik.	Pemanfaatan dana publik dalam menciptakan infrastruktur yang diperlukan masyarakat.

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa baik akuntansi sektor publik maupun akuntansi pemerintahan masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda serta tujuan yang berbeda dalam pemenuhan kebutuhan akan pengelolaan dana publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan mencerminkan kompleksitas dan variasi dalam pengelolaan keuangan publik meskipun tujuan utamanya tetap sama yakni memastikan transparansi dan akuntabilitas.

D. Jenis-Jenis Akuntansi Sektor Publik

Kompleksitas serta bidang yang luas pada akuntansi sektor publik mencerminkan bahwa terdapat beragam entitas serta tujuan dari pengelolaan dana publik. Dewasa ini, perkembangan akuntansi sektor publik sangat pesat dimana munculnya peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus di pemerintahan. Terdapat tiga konsentrasi utama dalam akuntansi sektor publik meliputi:

1. Akuntansi keuangan.
2. Akuntansi manajemen.
3. Auditing.

Tiga konsentrasi ini merupakan garansi yang diberikan oleh pemerintah kepada publik sebagai bentuk dari *good practice* dalam pemerintahan sebagai pihak yang mengelola dana publik.

Akuntansi keuangan pada sektor publik telah mengalami banyak perkembangan dalam beberapa dekade ke belakang, tuntutan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana adalah pelecut berkembangnya akuntansi keuangan pada dalam pengelolaan dana publik. Terdapat tujuh faktor yang melatarbelakangi perkembangan tersebut diantaranya:

1. Adaptasi dan adopsi standar internasional seperti *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
3. Perkembangan teknologi dan sistem informasi.
4. *Good Governance*.

5. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
6. Aspek hukum dan regulasi.
7. Aksesibilitas informasi publik.

Selain pada aspek akuntansi keuangan, akuntansi manajemen juga memiliki peran terhadap perkembangan akuntansi pada sektor publik. Akuntansi manajemen lebih menitikberatkan kepada kepentingan internal sebuah organisasi.

Meskipun dapat dikatakan mirip dengan tujuan akuntansi manajemen dalam sektor privat, akuntansi manajemen dalam sektor publik memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Pengambilan keputusan yang efektif.
2. Perencanaan dan penganggaran.
3. Pengendalian biaya dan efisiensi.
4. Evaluasi kinerja.
5. Akuntabilitas dan transparansi.
6. Peningkatan tata kelola.
7. Peningkatan kinerja organisasi.

Proses auditing (pemeriksaan) dalam sektor publik dibarengi dengan terbitnya standar pemeriksaan keuangan negara dimana hal ini dilakukan untuk menjamin informasi keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan dana publik telah berjalan dengan baik, benar dan memiliki akuntabilitas tinggi. Praktik audit tersebut meliputi:

1. Audit keuangan.
2. Audit kinerja.
3. Audit tujuan tertentu.

Ketiga praktik audit tersebut dapat memastikan kegiatan aktivitas, operasi, keuangan yang dilakukan entitas publik seperti lembaga pemerintahan. Audit tersebut memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Memastikan kepatuhan dan akuntabilitas.
2. Evaluasi efisiensi dan efektifitas.
3. Pencegahan dan deteksi fraud.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan.
5. Menjadi garansi keterbukaan dan kepercayaan publik.

Berdasarkan tujuan diatas, audit sektor publik menjadi sebuah *key poin* dalam menjaga tata kelola yang baik, transparansi dana publik dan memastikan dana publik telah digunakan secara efektif dan efisien.

Setelah memahami bagaimana akuntansi sektor publik bekerja, terdapat banyak konteks akuntansi sektor publik yang relevan diantaranya:

1. Akuntansi pemerintahan.
2. Akuntansi lembaga nirlaba.
3. Akuntansi BUMN.
4. Akuntansi pajak dan penerimaan negara.
5. Akuntansi pembiayaan dan hutang publik.

Lima poin diatas merupakan yang paling sangat diperhatikan dalam proses pelaksanaan akuntansinya, meskipun masih terdapat beberapa konteks akuntansi sektor publik lainnya.

E. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Seperti halnya ilmu akuntansi yang memiliki tujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, akuntansi sektor publik juga memiliki tujuan yang kurang lebih sama yaitu menyajikan

informasi keuangan atas penggunaan keuangan dan operasional dari entitas publik atau pemerintahan.

Akuntansi sektor publik memiliki tujuan diantaranya:

1. Transparansi Keuangan

Akuntansi sektor publik memiliki tujuan utama untuk transparansi atas pengelolaan dana publik. Hal ini memiliki arti bahwa informasi keuangan yang dapat dipahami oleh masyarakat secara jelas dalam bentuk laporan keuangan. Transparansi merupakan sesuatu yang utama dalam akuntansi agar masyarakat dapat memantau aktivitas dari entitas publik.

2. Akuntabilitas Publik

Aspek akuntabilitas yang akan dipenuhi dengan penerapan akuntansi sektor publik adalah pelaporan keuangan yang jelas. Pelaporan keuangan yang jelas dilakukan melalui mekanisme audit.

3. Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya

Tujuan akuntansi sektor publik lainnya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya publik, yang mencakup tidak hanya administrasi keuangan yang sehat tetapi juga pengelolaan aset, personel, dan sumber daya lainnya. Akuntansi sektor publik memainkan peran penting dalam memungkinkan entitas publik mengalokasikan sumber daya mereka secara optimal, sehingga mencapai tujuan pelayanan publik mereka dengan efisiensi maksimum.

4. Perencanaan dan Penganggaran yang Tepat

Perencanaan keuangan yang baik dan proses penganggaran yang efektif juga difasilitasi oleh akuntansi sektor publik. Pengumpulan dan analisis informasi keuangan dengan cara yang tepat memungkinkan terciptanya anggaran yang

realistis, penentuan prioritas pengeluaran, dan identifikasi sumber pendanaan yang sesuai.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Tujuannya juga untuk membekali individu dengan sumber daya dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi dan mengelola aspek keuangan dan operasional organisasi publik secara efektif. Hal ini mencakup penerapan sistem pengendalian internal yang kuat untuk melindungi terhadap potensi penyalahgunaan atau aktivitas penipuan.

6. Peningkatan Kinerja dan Evaluasi

Untuk tercapainya peningkatan kerja serta melakukan evaluasi atas progress yang telah dilakukan. Akuntansi sektor publik dapat memberikan indikator tersebut melalui informasi keuangan.

7. Kepatuhan terhadap Standar dan Regulasi

Akuntansi sektor publik juga bertujuan untuk memastikan bahwa entitas publik mematuhi standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Hal ini termasuk adopsi standar akuntansi internasional seperti *IPSAS (International Public Sector Accounting Standards)* untuk memfasilitasi perbandingan dan kepatuhan internasional.

F. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik pada badan pemerintahan di negara Indonesia diatur melalui Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana tertuang dalam UU No 17 tahun 2003 pasal 32, UU No 1 tahun 2004 pasal 53 ayat (1) dan Peraturan pemerintah no 24 tahun 2005. Karakteristik akuntansi sektor publik lebih

menitikberatkan kepada pelayanan masyarakat meskipun dalam praktiknya melibatkan beberapa faktor meliputi ekonomi, politik, kultural serta demografi.

1. Faktor Ekonomi

Setiap negara memiliki keadaan ekonomi yang tidak sama, hal ini dapat mempengaruhi praktik pengelolaan dana publik karena kondisi yang berbeda serta selalu berubah. Kondisi seperti ini mempengaruhi pendapatan.

2. Faktor Politik

Kekuasaan dapat mempengaruhi keputusan baik dalam hal penganggaran dan prioritasnya, hal ini mendorong akuntansi sektor publik untuk tetap memastikan transparansi dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan ke publik.

3. Faktor Kultural

Dalam hal membangun kepercayaan terhadap publik, akuntansi juga melibatkan nilai-nilai budaya dalam pengelolaan dana publik termasuk didalamnya menentukan skala prioritas pengeluaran.

4. Faktor Demografi

Kondisi demografi suatu negara seperti pertumbuhan penduduk, usia dan lainnya juga menjadi pertimbangan dalam penerapan akuntansi sektor publik terutama dalam proses perencanaan kebijakan jangka panjang serta pengambilan keputusan yang berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, praktik akuntansi sektor publik harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan, serta untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Akuntansi sektor publik dapat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik berikut diantaranya:

1. Tujuan pelayanan publik.
2. Sifat non-publik.
3. Prinsip akuntansi berbasis akrual.
4. Regulasi dan standar akuntansi.
5. Akuntabilitas dan transparansi.
6. Manajemen risiko dan pengendalian internal.
7. Pengelolaan dana publik.
8. Pengungkapan informasi non-finansial.
9. Auditor eksternal.

Dengan memahami karakteristik-karakteristik ini, dapat dipahami bahwa akuntansi sektor publik memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola dan melaporkan informasi keuangan secara transparan dan akurat, serta untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pelayanan publik.

G. Transformasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Akuntansi sektor publik kurang dikenal di Indonesia. Masyarakat lebih banyak mengenalnya sebagai akuntansi pemerintahan. Pemerintah melakukan adopsi standar dari *IPSAS* dalam melakukan praktik akuntansi pengelolaan dana publik. Transformasi akuntansi sektor publik awalnya dilakukan oleh beberapa negara Eropa dan diadopsi oleh negara-negara lainnya.

Pada praktiknya, akuntansi sektor publik melibatkan dua hal utama yang pertama adalah para ahli di bidang akuntansi sektor publik untuk memastikan transfer pengetahuan yang dilakukan minim dari kesalahan dan yang kedua pemikiran dari ahli harus dibarengi dengan pemikiran terhadap realitas alam dan

budaya indonesia sehingga perkembangan akuntansi sektor publik dapat memberikan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dalam hal ini aspek keuangan.

Setidaknya terdapat tujuh langkah kunci dalam transformasi akuntansi sektor publik di Indonesia yaitu:

1. Adopsi standar internasional.
2. Pengembangan sistem informasi keuangan.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
4. Penguatan pengawasan dan audit.
5. Implementasi *e-government*.
6. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
7. Reformasi kebijakan dan keuangan publik.

Transformasi ini adalah bagian dari upaya lebih luas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasi dan pengawasan, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencapai standar internasional dalam akuntansi sektor publik.

Tata kelola yang baik atau biasa lebih banyak dikenal dengan istilah *good governance* merupakan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Prinsip yang terkandung di dalam *good governance* dapat menilai baik atau buruknya kualitas pengelolaan dana publik yang dilakukan oleh pemerintah.

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa prinsip *good governance* adalah merupakan sebuah kunci dalam pengelolaan pemerintahan, berikut adalah beberapa prinsip utamanya yaitu:

1. **Transparansi**, Menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan mudah diakses kepada semua pihak yang berkepentingan.

2. **Akuntabilitas**, Memastikan bahwa para pemimpin dan pelaksana bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, dan bahwa mereka dapat dipertanggungjawabkan atas kinerja dan hasilnya.
3. **Partisipasi**, Melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan keputusan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.
4. **Keadilan**, Memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa diskriminasi.
5. **Efektivitas dan Efisiensi**, Menjamin bahwa sumber daya yang terbatas digunakan dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.
6. **Kepemimpinan yang Baik**, Memiliki pemimpin yang memiliki integritas, visi jangka panjang, dan kemampuan untuk mengelola perubahan dan kompleksitas.
7. **Keterbukaan**, Membangun proses pengambilan keputusan yang inklusif dan terbuka untuk memungkinkan perdebatan yang terbuka dan mendalam.
8. **Penghargaan terhadap Hukum**, Memastikan bahwa kebijakan dan tindakan organisasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
9. **Pengelolaan Risiko**, Mengelola risiko dengan baik untuk menghindari atau meminimalkan dampak negatif pada organisasi dan pihak-pihak yang terlibat.
10. **Kepatuhan dan Etika**, Mematuhi standar etika tinggi dan menjaga kepercayaan publik dengan menghindari konflik kepentingan dan perilaku yang tidak etis.

Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks pemerintahan dan sektor publik, tetapi juga penting untuk organisasi swasta, LSM, dan entitas lainnya untuk mencapai tujuan mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Rangkuman

Akuntansi sektor publik adalah suatu sistem yang mengatur dan mengelola keuangan negara, termasuk pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan, dan lembaga-lembaga non-pemerintahan yang berfungsi sebagai pelaku dalam sektor publik.

Prinsip Akuntansi Sektor Publik

Transparansi: Keterbukaan informasi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah.

Akuntabilitas: Kepastian dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan sumber daya yang digunakan.

Keteraturan: Adanya regulasi dan standar yang jelas untuk mengatur kegiatan akuntansi sektor publik.

Efisiensi: Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sektor publik.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Mengumpulkan pendapatan: Mengumpulkan pendapatan dari sumber-sumber yang berbeda-beda.

Mengelola pengeluaran: Mengelola pengeluaran untuk mencapai tujuan sektor publik.

Menyajikan informasi: Menyajikan informasi keuangan yang jelas dan akurat kepada masyarakat.

Meningkatkan akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan sumber daya.

Komponen Akuntansi Sektor Publik

Keuangan Pemerintah: Keuangan pemerintah, termasuk anggaran, pengeluaran, dan pendapatan.

Lembaga-Lembaga Pemerintahan: Lembaga-lembaga pemerintahan, seperti kementerian, departemen, dan badan usaha milik negara.

Lembaga-Lembaga Non-Pemerintahan: Lembaga-lembaga non-pemerintahan, seperti yayasan, LSM, dan korporasi.

Korporasi Milik Negara: Korporasi milik negara, seperti BUMN dan BUMD.

Jenis Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Biaya: Mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Akuntansi Hasil: Mengukur hasil-hasil yang diperoleh oleh pemerintah.

Akuntansi Aktiva: Mengukur aktiva-aktiva yang dimiliki oleh pemerintah.

Peranan Akuntansi Sektor Publik

Mengawasi Penggunaan Dana Publik: Menguji apakah penggunaan dana publik sesuai dengan tujuan sektor publik.

Menyajikan Informasi Keuangan: Menyajikan informasi keuangan yang jelas dan akurat kepada masyarakat.

Meningkatkan Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan sumber daya.

Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan akuntansi sektor publik ?
2. Jelaskan perbedaan masing-masing tiga konsentrasi utama dalam akuntansi sektor publik !
3. Jelaskan tujuan dari akuntansi sektor publik !
4. Sebut dan jelaskan faktor yang melatarbelakangi perkembangan akuntansi sektor publik !
5. Menurut pendapat anda apa manfaat menggunakan sistem akuntansi modern dalam sektor publik ?

DUMNMY



2

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran

- ❖ Menguasai materi manajemen sektor publik dengan baik.
- ❖ Menguasai akuntansi manajemen sektor publik.

Capaian Pembelajaran

- ❖ Definisi akuntansi manajemen.
- ❖ Jenis-jenis organisasi sektor publik.
- ❖ Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik.
- ❖ Penerapan akuntansi manajemen sektor publik.
- ❖ Peran akuntansi manajemen sektor publik.
- ❖ Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik.

- ❖ Pengendalian manajemen sektor publik.
- ❖ Peranan teknologi dalam akuntansi manajemen sektor publik.

DUMMYY

A. Pendahuluan

Organisasi dan lembaga publik selalu dituntut agar pengelolaan biaya sosial dan biaya ekonomi dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Jika tuntutan pertanggungjawaban publik oleh berbagai lembaga publik menguat, akuntansi manajemen sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk mengelola keuangan publik. Proses pengklasifikasian dan analisis laporan pengelolaan keuangan yang dilakukan sektor publik berbeda dengan proses yang dilakukan sektor swasta. Perbedaan ini terjadi karena memiliki standar sistem akuntansi masing-masing, selain itu perbedaan dari karakteristik dalam lingkup sektor publik, sehingga untuk menerapkannya diperlukan beberapa penyesuaian.

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan ketidakpastian (turbulensi). Beberapa faktor atau komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik diantaranya faktor ekonomi, politik, kultur dan demografi.

Akuntansi manajemen sektor publik digunakan oleh organisasi sektor publik, seperti universitas/sekolah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, masjid, rumah sakit, puskesmas dan partai politik. Peran utama akuntansi manajemen adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer di organisasi sektor publik untuk perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Sebaliknya tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak bermakna karena tidak ada target yang digunakan sebagai pembanding. Akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan dan pengendalian.

B. Definisi Akuntansi Manajemen

Menurut *Institute of Management Accountants* (1981), Akuntansi Manajemen didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, pengendalian organisasi serta untuk menjamin ketepatan penggunaan sumber-sumber dan pertanggungjawaban atas sumber-sumber tersebut. Akuntansi Manajemen juga meliputi penyiapan laporan finansial untuk kelompok-kelompok non manajemen seperti para pemegang saham, para direktur, Lembaga-lembaga pengawas dan kantor pajak.

Menurut *Chartered Institute of Management Accountants* (CIMA) merupakan organisasi profesi Akuntan Manajemen yang berada di Amerika Serikat, mendefinisikan akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyusunan, interpretasi dan komunikasi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi dan pengendalian dalam suatu entitas serta memastikan akuntabilitas sesuai penggunaan sumber daya tersebut. Berdasarkan CIMA tersebut akuntansi manajemen didefinisikan sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk:

- Perumusan strategi
- Perencanaan dan pengendalian aktifitas
- Pengambilan keputusan
- Pengoptimalan sumber daya
- Pengungkapan (disclosure) kepada shareholders dan pihak luar organisasi.
- Pengungkapan kepada karyawan
- Perlindungan aset.

Akuntansi manajemen sebagai profesi, melibatkan kemitraan dalam pengambilan keputusan manajemen, penyusunan rencana dan sistem manajemen kinerja, penyediaan keahlian dalam pelaporan keuangan serta pengendalian untuk membantu manajemen dalam perumusan dan pelaksanaan strategi organisasi.

Sektor publik dari sudut pandang ilmu ekonomi sering didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen.

Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stakeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal dan relevan untuk pengambilan keputusan. Keberadaan sektor publik merupakan bagian dari pemenuhan hak publik yaitu berupa pelayanan publik dan produk barang berupa barang publik. Selain itu, sektor publik merujuk pada organisasi publik (terutama pemerintah), yaitu organisasi yang menggunakan dana masyarakat dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tugas dan tanggungjawab akuntan pada sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal.

Akuntansi Manajemen Strategik (AMS) adalah pendekatan akuntansi yang mengintegrasikan teknik akuntansi manajemen tradisional dengan analisis strategis dan informasi eksternal untuk membantu organisasi dalam pengambilan keputusan strategis. Pendekatan ini melibatkan pemahaman tentang pasar, pesaing, dan lingkungan eksternal organisasi serta penggunaan informasi ini untuk memandu strategi jangka panjang dan kinerja organisasi. Dengan kata lain AMS merupakan penyediaan dan analisis data akuntansi manajemen tentang bisnis dan pesaingnya, untuk digunakan dalam mengembangkan dan memantau strategi bisnis.

Fokus AMS tidak hanya fokus pada informasi internal tetapi juga pada komponen eksternal yang berkaitan dengan operasi organisasi. Tujuan utama AMS adalah untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan kinerja organisasi. Penerapan AMS dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penetapan harga target, penghitungan biaya produk, analisis profitabilitas lini produk, analisis profitabilitas pelanggan, dan penetapan harga layanan. Manfaat AMS termasuk peningkatan pemahaman tentang biaya dan keuntungan, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan peningkatan kinerja organisasi.

Peran akuntansi manajemen pada sektor publik tidak lagi sebatas pemberi informasi kepada manajemen publik tetapi telah menjadi partner bisnis strategis bagi manajemen publik dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, pengendalian internal, pelaporan keuangan, evaluasi kinerja serta manajemen biaya untuk membantu organisasi publik mencapai kesuksesan dan bersaing lebih kompetitif.

C. Jenis-jenis Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik dapat dibatasi pada organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu pertanggungjawaban ke masyarakat.

Di Indonesia, jenis organisasi sektor publik yang dikenal antara lain (Bastian, 2010: 11) yaitu:

- a. Organisasi Pemerintah Pusat
- b. Organisasi Pemerintah Daerah
- c. Organisasi Partai Politik
- d. Organisasi LSM
- e. Organisasi Yayasan
- f. Organisasi Pendidikan

- g. Organisasi Kesehatan
- h. Organisasi Tempat Peribadatan.

D. Penerapan Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Penerapan akuntansi manajemen sektor publik merupakan langkah untuk mengelola semua sumber daya dalam organisasi publik. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berusaha memberikan pelayanan kepada publik. Supaya publik tidak kecewa maka pihak intern organisasi harus dikelola dengan baik.

Tujuan penerapan akuntansi manajemen sektor publik pada dasarnya tidak terlepas dari upaya untuk memperbaiki kinerja manajemen dan meningkatkan akuntabilitas intern yang berdampak pada masyarakat (Mardiamo (2002:28).

E. Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi.

Menurut Bastian (2009) peran fundamental akuntansi manajemen di organisasi sektor publik adalah membantu manajer/pimpinan dengan informasi akuntansi yang dibutuhkan agar fungsi perencanaan dan pengendalian dapat dilakukan. Secara rinci, tujuan umum tersebut dapat diturunkan menjadi:

- Membantu manajemen memformulasikan kebijakan organisasi
- Membantu manajemen dalam proses perencanaan organisasi
- Membantu manajemen dalam mengendalikan operasi/kegiatan organisasi.

Peran Akuntansi Manajemen menurut *Chartered Institute of Management Accountants* (1981) digunakan untuk:

- a. Perumusan strategi
- b. Perencanaan dan pengendalian aktivitas
- c. Pengambilan keputusan
- d. Pengoptimalan penggunaan sumber daya
- e. Pengungkapan kepada stakeholder dan pihak luar organisasi
- f. Pengungkapan kepada karyawan
- g. Perlindungan aset

Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi: perencanaan strategik, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, penentuan biaya pelayanan (*cost of servies*) dan penentuan tarif pelayanan (*charging for service*) dan penilaian kinerja. Penjelasan lebih lanjut peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2002:37-43) diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Strategik

Pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Program-program tersebut diseleksi dan dipilih program yang sesuai dengan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program (*cost of program*) dan berapa biaya suatu aktivitas (*cost of activity*), sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya input secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi manajemen yang akurat, relevan dan handal untuk menghitung besarnya biaya program, aktivitas atau proyek. Sistem informasi akuntansi manajemen yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan

mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Keandalan sistem informasi akuntansi manajemen sangat penting dimiliki seiring dengan adanya paradigma baru organisasi pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kepentingan publik (*putting the customer first*).

Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada tiga permasalahan utama yaitu efisiensi biaya, kualitas produk, dan pelayanan (*cost, quality, and service*). Untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah, pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akuntansi manajemen yang modern.

Pada dasarnya organisasi publik juga dapat menerapkan teknik akuntansi manajemen yang diterapkan di sektor swasta, seperti teknik *activity-based costing*, *job costing*, *batch costing*, *standart costing* untuk menentukan biaya produk atau pelayanan. Terdapat sedikit perbedaan antara sektor swasta dengan sektor publik dalam hal penentuan biaya produk atau pelayanan (*product costing*). Hal tersebut disebabkan sebagian besar biaya pada sektor swasta cenderung merupakan *engineered costs* yang memiliki hubungan secara langsung dengan *output* yang dihasilkan, sementara biaya pada sektor publik sebagian besar merupakan *discretionary costs* yang ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan *output* yang dihasilkan. Kebanyakan *output* yang dihasilkan di sektor publik merupakan *intangible output* yang diukur.

Akuntansi manajemen sektor publik sangat erat dengan proses pemilihan program, penentuan biaya dan manfaat program serta penganggaran. Akuntansi manajemen sektor publik juga berfungsi untuk memfasilitasi dihasilkannya anggaran sektor publik yang efektif, efisien dan ekonomis (*value for money budget*).

2. Pemberian informasi biaya

Biaya dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Biaya input. Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku.
- 2) Biaya output. Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik output diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan. Sebagai misal untuk perusahaan Damri, biaya diukur berdasarkan biaya per penumpang.
- 3) Biaya proses. Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi.

Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi, misalnya biaya departemen produksi, departemen personalia, biaya dinas-dinas, dan sebagainya.

Akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran yang strategis dalam perencanaan finansial terkait dengan identifikasi biaya-biaya yang terjadi. Dalam hal ini, akuntansi manajemen sektor publik membutuhkan akuntansi biaya untuk pengambilan keputusan biaya. Akuntansi biaya pada sektor publik berperan untuk memberikan informasi mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan oleh pihak internal (pemerintah) dan pihak eksternal (masyarakat, DPRD, LSM, universitas dan sebagainya) untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Peran akuntansi manajemen dalam pemberian informasi biaya meliputi penentuan klasifikasi biaya, biaya apa saja yang masuk dalam kategori biaya rutin (*recurrent expenditure*) dan yang masuk kategori biaya modal (*capital expenditure*), *controllable* dan *uncontrollable*, biaya tetap dan variabel. Informasi akuntansi manajemen diharapkan dapat membantu manajer publik dalam

menentukan dan melaporkan biaya. Proses penentuan biaya meliputi lima aktivitas, yaitu: *cost finding*, *cost recording*, *cost analyzing*, *strategic cost reduction*, dan *cost reporting*.

- *Cost finding*. Pada tahap *cost finding*, pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi atau jasa pelayanan.
- *Cost recording*. Setelah berhasil dilakukan *cost finding*, tahap berikutnya adalah melakukan *cost recording* yang meliputi kegiatan pencatatan data kedalam sistem akuntansi organisasi.
- *Cost analyzing*. Setelah dilakukan pencatatan biaya, tahap berikutnya adalah melakukan analisis biaya, yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Manajemen organisasi harus dapat menentukan pemicu biaya (*cost driver*) agar dapat dilakukan strategi efisiensi biaya.
- *Strategic cost management*. Setelah dilakukan analisis biaya, tahap berikutnya adalah menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai *value for money*.
- *Cost reporting*. Tahap terakhir adalah memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk *internal report* yang kemudian diagresikan ke dalam suatu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal.

3. Penilaian investasi

Akuntansi Manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk

dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Faktor yang harus diperhatikan akuntan manajemen adalah tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat risiko dan ketidakpastian (termasuk *country risk* dan *political risk*), dan sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan. Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta. Pada sektor swasta, terdapat beberapa teknik penilaian investasi, misalnya dengan menggunakan *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Accounting Rate of Return* (ARR), *Payback Period* (PP) dan sebagainya. Teknik-teknik penilaian investasi yang digunakan di sektor swasta berbeda dengan sektor publik, hal ini dikarenakan sektor swasta berorientasi mengejar laba, sedangkan sektor publik tidak, disamping itu sulit untuk mengeluarkan output yang dihasilkan, sehingga untuk menentukan keuntungan dimasa depan dalam ukuran finansial sulit dilakukan. Penilaian investasi dalam organisasi sektor publik dilakukan menggunakan analisis biaya-manfaat (*cost benefit*). Menentukan biaya sosial dan manfaat sosial dalam satuan moneter sulit dilakukan, oleh karena itu untuk memudahkan, kemudian digunakan analisis efektivitas biaya (*cost- effertiveness analysis*). Penilaian investasi dengan menggunakan analisis efektivitas biaya menekankan pada seberapa besar *outcome* yang dicapai dari suatu proyek atau investasi dengan biaya tertentu.

4. Penganggaran

Akuntansi manajemen berbicara tentang perencanaan dan pengendalian, sedangkan salah satu fungsi anggaran adalah untuk alat perencanaan dan pengendalian. Dengan demikian, akuntansi manajemen sangat erat hubungannya dengan penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu

sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata.

5. Penentuan Biaya Pelayanan (*Cost of Services*) dan Penentuan Tarif Pelayanan (*Charging for Services*)

Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya untuk memberikan pelayanan dan tarif yang akan dibebankan pada pemakai pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi. Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan, keinginan masyarakat tersebut agar kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat semakin baik.

Penentuan biaya pelayanan (*cost of services*) dan penentuan tarif (*charging for service*) merupakan satu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi. Sebagai contoh, pemerintah daerah harus dapat menentukan berapa biaya untuk membangun Pelabuhan, terminal bus atau stasiun kereta api yang tertib, aman dan nyaman serta biaya operasionalnya. Berdasarkan informasi tersebut pemerintah setempat dapat menentukan berapa tarif pelayanan yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan terminal atau stasiun kereta api tersebut.

6. Penilaian Kinerja

Pada tahap ini, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem

pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Peran akuntansi manajemen pada sektor publik tidak lagi sebatas pemberi informasi kepada manajemen publik tetapi telah menjadi partner bisnis strategis bagi manajemen publik dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, pengendalian internal, pelaporan keuangan, evaluasi kinerja serta manajemen biaya untuk membantu organisasi publik mencapai kesuksesan dan bersaing lebih kompetitif.

F. Proses Perencanaan dan Pengendalian Manajerial Organisasi Sektor Publik

Perencanaan dan pengendalian sebaiknya dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut (follow-up) untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapai. Sebaliknya tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga suatu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam satu organisasi.

Jones and Pendlebury (1996) membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu:

1. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar
2. Perencanaan operasional
3. Penganggaran
4. Pengendalian dan pengukuran, dan
5. Pelaporan, analisis, dan umpan balik

G. Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Pengendalian manajemen sektor publik perlu untuk menjamin terlaksananya strategi organisasi publik secara efektif dan efisien. Pengendalian manajemen meliputi aktivitas: Perencanaan, Koordinasi, Komunikasi informasi, Pembuatan Keputusan, Motivasi, Pengendalian dan Penilaian Kinerja.

Dalam konteks manajemen untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi diperlukan strategi. Kemudian untuk mempengaruhi orang-orang dalam organisasi publik agar mereka mau melaksanakan strategi manajemen dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien, manajer menggunakan mekanisme pengendalian manajemen. Manajemen publik terkait dengan manajemen aktivitas pegawai pemerintah dan politisi serta penggunaan struktur dan proses pengendalian manajemen oleh eksekutif pemerintahan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah.

Governance atau tata kelola merupakan suatu konsepsi pengelolaan organisasi dalam lingkup luas tidak seperti manajemen yang lebih berfokus pada internal organisasi saja. Governance melibatkan institusi lain dan peran masyarakat untuk mengontrol organisasi agar transparan. Sebagai contoh aplikasi tata kelola adalah dalam sektor bisnis sebagai salah satu unsur pelaksanaan *good corporate*.

Governance dibentuk komisararis independen dan komite audit yang berperan dalam mengontrol direksi. Dalam hal ini masyarakat juga bisa terlibat dalam pengawasan dan pemantauan organisasi. Selain berbeda dengan *governance*, manajemen publik juga memiliki pengertian dan konsep yang berbeda dengan administrasi publik. Secara etimologi, administrasi mengandung pengertian mengikuti prosedur-prosedur, aturan dan perintah sedangkan manajemen mengandung arti pencapaian hasil, tujuan, visi dan misi. Manajemen memiliki

cakupan yang lebih luas dibandingkan administrasi namun lebih sempit dibandingkan *governance*.

H. Peranan Teknologi Dalam Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Perkembangan teknologi telah membawa dampak dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan terhadap efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap organisasi baik profit dan non-profit merasa perlu menerapkan teknologi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi dalam sistem informasi organisasi publik memiliki beberapa peranan sebagai berikut:

- a. Meminimalkan risiko
- b. Mengurangi biaya
- c. Penambahan nilai
- d. Menciptakan realitas baru

Teknologi tentu dapat membantu penerapan akuntansi manajemen pada sektor publik. Akuntansi pada sektor publik merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga publik. Setiap lembaga publik tentunya mendapatkan tuntutan dari masyarakat agar pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan.

Menurut *World Bank*, interaksi antara warga negara atau pelaku usaha dengan lembaga pemerintahan selalu berlangsung dan seiring dengan kemunculan teknologi informasi dan komunikasi (Informations Communications Technology). Mengacu pada definisi yang diajukan oleh *World Bank*, *E-Government* mengarahkan pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi-instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan untuk mempermudah dan meningkatkan kemampuan transformasi hubungan diantara warga negara, pelaku bisnis dan lembaga pemerintahan. Teknologi informasi ini dapat melayani segala bentuk kebutuhan berbeda seperti:

- a. Layanan yang lebih baik dari pemerintah kepada warganya
- b. Peningkatan interaksi diantara pelaku bisnis dan industri
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi
- d. Efisiensi manajemen pemerintahan.

Penggunaan teknologi informasi memberikan hasil sebagai berikut:

- a. Penurunan jumlah korupsi
- b. Meningkatkan transparansi
- c. Kesenangan yang lebih baik.
- d. Pertumbuhan pajak dan penghasilan dan atau pengurangan sejumlah biaya.
- e. Sektor ini dirancang untuk memfasilitasi interaksi antara pemerintah dengan warganya dan hal ini merupakan tujuan utama dari *E-Government*.

Beberapa interaksi yang dilakukan seperti:

- a. Memperbaharui perizinan dan sertifikasi
- b. Pembayaran pajak
- c. Akses terhadap informasi publik
- d. Interaksi Antara Pemerintah dan Pelaku Bisnis
- e. Interaksi Antara Pemerintah dan Pegawai

Pada prinsipnya *E-Government* adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online misalnya situs resmi atau laman website pemerintahan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah kepada pelayanan publik.

Rangkuman

Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi.

Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer sektor publik menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Fungsi manajemen seperti perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengendalian tidak dapat dilakukan tanpa informasi yang memadai. Informasi dalam sebuah organisasi publik merupakan perekat yang mengikat fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah sistem sehingga memungkinkan organisasi publik bertindak koheren dan harmonis antar berbagai fungsi.

Institute of Management Accountants maupun *Chartered Institute of Management Accountants* secara bersama-sama menyatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan bagian yang integral dari sistem pengendalian manajemen. Oleh karena akuntansi manajemen merupakan bagian yang integral maka pengembangan akuntansi manajemen tidak dapat dilakukan secara parsial dan terisolasi dari sistem yang lain. Desain pengembangan akuntansi manajemen harus dikaitkan dengan orang-orang yang akan menjalankan sistem tersebut. Apa yang dikehendaki personel dalam organisasi dan bagaimana reaksi mereka terhadap sistem pengendalian akuntansi yang akan diterapkan harus menjadi perhatian utama dalam mendesain akuntansi manajemen.

Peran akuntansi manajemen pada sektor publik tidak lagi sebatas pemberi informasi kepada manajemen publik tetapi telah menjadi partner bisnis strategis bagi manajemen publik dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, pengendalian internal, pelaporan keuangan, evaluasi kinerja serta manajemen biaya untuk membantu organisasi publik mencapai kesuksesan dan bersaing lebih kompetitif.

Perkembangan teknologi telah membawa dampak dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan terhadap efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap organisasi baik profit dan non-profit merasa perlu menerapkan teknologi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi dalam sistem informasi organisasi public memiliki peranan untuk meminimalkan risiko, mengurangi biaya, penambahan nilai dan menciptakan realitas baru.

Latihan Soal

1.
 - a. Jelaskan definisi akuntansi manajemen sektor publik?
 - b. Sebutkan dan jelaskan peran akuntansi manajemen sektor publik!
 - c. Jelaskan manfaat Akuntansi Manajemen Strategik (AMS)!
2. Jelaskan peran sistem pengendalian manajemen sektor publik?
3. Apakah yang dimaksud dengan manajemen sektor publik?
4. Sebutkan beberapa contoh organisasi sektor publik di Indonesia!
5. Jelaskan definisi manajemen publik dan berikan contohnya?
6. Jelaskan proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menurut Jones and Pendlebury!
7. Jelaskan prinsip *E-Government*!



3

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran

- ❖ Memahami Konsep Dasar Penganggaran Sektor Publik.
- ❖ Menganalisis Fungsi Anggaran.
- ❖ Memahami Kompleksitas Penganggaran.
- ❖ Mengidentifikasi Tantangan dan Tren Penganggaran Publik.
- ❖ Memahami Pilar Sistem Penganggaran.

Capaian Pembelajaran

- ❖ Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi berbagai fungsi dan peran anggaran dalam sektor publik.

- ❖ Mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar, fungsi, dan kompleksitas penganggaran sektor publik.
- ❖ Mahasiswa mampu menerapkan konsep penganggaran terpadu, berbasis kinerja, dan KPJM dalam simulasi penganggaran.
- ❖ Mahasiswa mampu bekerja dalam kelompok untuk menganalisis dan mempresentasikan kasus penganggaran sektor publik.
- ❖ Mahasiswa mampu mengembangkan argumen yang kuat mengenai pengaruh berbagai paradigma dan tren dalam penganggaran sektor publik.

DUMNMY

Pendahuluan

Penganggaran secara tradisional merupakan proses yang digunakan pemerintah untuk memutuskan berapa banyak yang akan dibelanjakan untuk apa, membatasi pengeluaran pada pendapatan yang tersedia dan mencegah pengeluaran berlebih. Seiring berjalannya waktu, anggaran publik telah mengambil peran yang berbeda, menjadi alat untuk tawar-menawar dan mengalokasikan kekuasaan, untuk perencanaan dan pengendalian, untuk memberikan dorongan pada lingkungan ekonomi dan sosial dan untuk memastikan transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan (Saliterer, Sicilia, dan Steccolini, Akan Datang). Dengan demikian, anggaran memainkan, antara lain, fungsi politik, ekonomi, manajerial dan akuntabilitas. Anggaran menjalankan fungsi politik karena mencerminkan preferensi dan posisi kekuasaan pemangku kepentingan, yang pada saat yang sama mewakili hasil keputusan dan tawar-menawar masa lalu, dan dasar untuk diskusi di masa mendatang. Anggaran mendefinisikan batas-batas intervensi publik dalam ekonomi, dan tingkat redistribusi kekayaan dalam sistem ekonomi, yang memenuhi fungsi ekonomi. Anggaran juga semakin banyak digunakan untuk meminta pertanggungjawaban manajer atas pencapaian hasil dan penggunaan sumber daya publik, sehingga memenuhi fungsi manajerial, dan untuk meminta pertanggungjawaban organisasi publik kepada masyarakat umum, yang memenuhi fungsi akuntabilitas eksternal.

Sifat penganggaran yang beraneka ragam secara umum telah diterjemahkan menjadi subjek minat abadi oleh berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu politik, administrasi publik, akuntansi, psikologi, manajemen, dan studi organisasi. Pada saat yang sama, penganggaran adalah arena tempat berbagai rasionalitas, logika, kompetensi, dan identitas profesional berinteraksi. Kompleksitas dan keragaman fungsi penganggaran, dan keberadaannya sebagai arena interaksi berbagai aktor, budaya, identitas profesional, dan disiplin ilmu mungkin menjelaskan keragaman

pendekatan dan bentuk yang diambil oleh dokumen anggaran dan proses penganggaran (Saliterer, Sicilia, dan Steccolini Akan Datang) dan oleh sifatnya yang bervariasi dari waktu ke waktu.

Fitur-fitur yang sama ini juga berkontribusi untuk menjadikan penganggaran publik sebagai bidang dan topik investigasi yang sangat menarik, yang dapat memberikan sejumlah wawasan tentang proses politik, sosial, ekonomi, dan psikologis. Maka, hal itu dapat menjadi latar yang ideal untuk menghadirkan pandangan dari berbagai komunitas ilmiah dan disiplin ilmu untuk menunjukkan apa yang dapat dipelajari dengan menerima bahwa proses sosial, politik, dan ekonomi merupakan arena yang kompleks dan kaya, di mana penjelasan yang *deterministik* dan sederhana membatasi pandangan dan kemungkinan kita, dan menerima bahwa tantangan kompleksitas dapat berisiko dalam budaya 'terbitkan dan musnah' saat ini, tetapi juga sangat bermanfaat dan merangsang.

Inilah tantangan yang diterima untuk diambil oleh para penulis edisi khusus ini, dengan memberikan kontribusi untuk memberikan pandangan yang kaya dan mendalam mengenai tren terkini dalam studi dan praktik penganggaran publik pada saat pengaruh Manajemen Publik Baru (NPM) tampaknya masih tetap penting (Lapsley, 2009), tetapi klaim semakin muncul bahwa paradigma lain mungkin tengah muncul (misalnya, Osborne, 2006, 2009), atau bahwa kita mungkin tengah menyaksikan kesenjangan paradigma (Coen dan Roberts, 2012).

Tinjauan terkini studi penganggaran publik di Eropa (Anessi et al. 2016) mengonfirmasi bahwa NPM dan gerakan modernisasi telah memengaruhi studi dan praktik penganggaran publik secara signifikan selama dua dekade terakhir, yang menunjukkan bahwa sebagian besar studi Eropa tentang penganggaran publik yang diterbitkan dalam jurnal administrasi publik dan akuntansi utama merujuk ke NPM tidak hanya sebagai konteks analisisnya, tetapi sangat sering sebagai kerangka konseptual utama yang menginformasikannya. Sementara ini tampaknya telah

menawarkan peluang bagus untuk memicu perdebatan tentang manajerialisme di sektor publik, dan untuk mengumpulkan pengetahuan kontekstual tentang reformasi sektor publik, hal ini mungkin juga telah menggeser perhatian akademis dari pengembangan kerangka konseptual alternatif. Selain itu, jauh dari memberikan bukti bahwa reformasi tipe NPM telah memecahkan masalah administrasi publik, sebagian besar studi telah menyoroti bahwa perubahan dalam penganggaran publik, termasuk pergeseran ke penganggaran berbasis kinerja dan berbasis akrual, masih berlangsung, atau manfaat yang diharapkan belum sepenuhnya diperoleh dan dipahami, sementara sejumlah efek yang tidak terduga dan bahkan tidak diinginkan telah muncul.

Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan dan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengeksplorasi proses penganggaran di sektor publik saat ini, baik sebagai konsekuensi dari gelombang reformasi manajerial yang telah terjadi selama beberapa dekade terakhir, maupun mengingat tren yang muncul saat ini. Konteks pasca-krisis dan penghematan, meningkatnya kesenjangan yang muncul di banyak negara, meningkatnya penekanan pada bentuk-bentuk baru pemberian layanan seperti produksi bersama dan kolaborasi antar-organisasi, pergeseran luas dari demokrasi representatif ke demokrasi partisipatif, merupakan beberapa tren saat ini yang dapat menghadirkan tantangan baru bagi organisasi publik dan proses penganggaran terkait. Mengingat sifatnya yang multifaset, penganggaran mungkin menjadi tempat yang ideal untuk melihat dampak dan implikasi dari tren tersebut di ranah publik.

Pertama, reformasi manajerial telah menyarankan perpindahan ke peningkatan ketergantungan pada anggaran berbasis akrual dan kinerja. Namun, integrasi aspek keuangan dan non-keuangan dari kinerja, dan penganggaran dan manajemen kinerja masih berlangsung dan belum sepenuhnya dipahami oleh para akademisi. Memang, semakin banyak literatur menunjukkan bahwa data akrual tidak selalu disukai oleh

manajer atau politisi (untuk tinjauan literatur yang relevan, lihat Liguori, Sicilia, dan Steccolini 2012, 2014), karena ukuran kinerja non-keuangan dan data berbasis kas mungkin lebih menarik bagi kebutuhan penggunanya. Dalam hal ini, beberapa penulis menyarankan bahwa basis akrual akuntansi mungkin berguna untuk pelaporan dan sebagai alat analitis, tetapi mungkin masih tidak diperlukan sebagai dasar untuk penganggaran (Caiden 2010). Dengan demikian, sementara literatur tentang adopsi akuntansi akrual telah menjadi semakin luas, sejauh ini perhatian yang diberikan jauh lebih sedikit, baik dalam literatur maupun praktik, terhadap bagaimana penganggaran berbasis akrual seharusnya bekerja dan benar-benar bekerja, atau terhadap dampaknya terhadap pengambilan keputusan politik maupun manajerial (untuk beberapa pengecualian penting, lihat Ezzamel et al. 2007 ; Hyndman dan Connolly 2011). Demikian pula, peran informasi kinerja nonfinansial dalam tahap formulasi dan pelaksanaan tujuan penganggaran masih belum jelas.

Kedua, penghematan dan konsekuensi krisis keuangan global sering kali menyebabkan sentralisasi ulang proses penganggaran (Bracci et al. 2015), sementara munculnya masalah yang semakin kompleks dan tidak rutin untuk ditangani mungkin telah menghasilkan pengambilan keputusan yang *terfragmentasi* dan perlunya perubahan dan penyesuaian anggaran yang berkelanjutan, baik dalam formulasi maupun pelaksanaannya. Praktisi dan akademisi harus lebih memperhatikan persyaratan stabilitas, dan bagaimana aturan dan kendala fiskal, dan pencarian stabilitas dalam keuangan publik (penganggaran makro), dapat berjalan beriringan, atau bahkan memerlukan, peningkatan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran (penganggaran mikro).

Ketiga, reformasi manajemen publik telah menekankan pentingnya akuntabilitas dan telah mempromosikan transparansi dan komunikasi angka-angka tentang organisasi publik. Logika ini awalnya telah dipromosikan dalam situasi di mana warga negara terutama dipandang sebagai aktor pasif yang menerima layanan

dan memilih perwakilan mereka. Dengan munculnya ide-ide 'kewarganegaraan aktif' dan bentuk-bentuk baru demokrasi partisipatoris (Hendriks 2010), serta pandangan yang lebih luas tentang produksi bersama sebagai perencanaan bersama dan desain bersama (Bovaird 2007 ; Sicilia et al. 2016 ; Barbera, Sicilia, dan Steccolini 2016) warga negara semakin dilihat sebagai pemain aktif dalam tata kelola publik, yang terlibat langsung dalam musyawarah dan penyediaan layanan. Mengingat perkembangan tersebut, kontribusi potensial penganggaran terhadap akuntabilitas eksternal, baik dalam hal transparansi dan komunikasi maupun dalam hal keterlibatan dan partisipasi pemangku kepentingan memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Keempat, penyediaan layanan publik semakin membutuhkan keterlibatan banyak aktor, termasuk pemerintah lain atau entitas sektor publik, serta organisasi swasta dan nirlaba. Penganggaran dapat memainkan peran penting dalam distribusi dan representasi sumber daya dan tanggung jawab, serta dalam pemenuhan akuntabilitas dalam pengaturan antar-organisasi yang muncul tersebut. Namun, perannya dalam hubungan antar-organisasi sebagian besar telah diabaikan (misalnya, Marvel dan Marvel 2007 ; Miller, Kurunmäki, dan O'Leary 2008 ; Cristofoli et al. 2010 ; Ditillo et al. 2015). Kesenjangan ini perlu diisi melalui analisis mendalam tentang penggunaan dan dampak alat-alat baru seperti anggaran gabungan atau konsolidasi, serta pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi pilihan dan desain praktik dan proses terkait.

Lembaga sektor publik dalam mencapai tujuannya dengan baik harus dapat merancang anggaran secara periodik. Anggaran menjadi kunci utama dalam perencanaan. Selaras dengan Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (Bappenas, 2009), dalam menyusun anggaran, pemerintah mengacy pada tiga pilar system penganggaran yaitu penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja,

dan rerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM). Tiga pilar ini diharapkan membuat proses penganggaran menjadi fungsional, menegakkan tanggung jawab manerial dan melaksanakan akuntabilitas eksternal. Penganggaran berbasis kinerja masih menjadi primadona sistem penganggaran terbaik (kemenkeu). Dalam beberapa tahun terakhir, terlebih lagi, meningkatnya beban hak, tuntutan lembaga supra dan internasional, serta krisis fiskal dan ekonomi telah memberikan tekanan yang sangat besar untuk memangkas pengeluaran, memastikan anggaran berimbang, dan mengurangi jumlah utang publik yang terakumulasi. Pada saat yang sama, pemerintah diharapkan untuk memenuhi permintaan layanan yang semakin kuat, canggih, dan heterogen dan memainkan peran dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi (Kickert 2012, 2013; Lodge and Hood, 2012; Peters, 2011; Peters *et al.*, 2011).

Penganggaran dan pengendalian anggaran merupakan instrumen dasar yang menjamin pengendalian keuangan, penggunaan sumber daya yang efektif, dan kinerja organisasi secara keseluruhan (Otieno, 2019). Penganggaran dan pengendalian anggaran sangat penting untuk pencapaian tujuan pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan dari ekonomi mana pun. Namun, mekanisme pengendalian anggaran mengawasi dan mengatur pengeluaran untuk memastikannya tetap sejalan dengan kegiatan dan tujuan yang direncanakan. Penganggaran, di sisi lain, bertindak sebagai cetak biru untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi tujuan organisasi dan memberikan layanan publik. Singkatnya, ini meningkatkan tanggung jawab dengan memastikan sumber daya dibelanjakan secara bijak dan efisien (Ahwera, 2021).

Laporan keuangan yang menguraikan pendapatan, pengeluaran, dan pemanfaatan sumber daya yang diantisipasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya disebut anggaran, dan dibuat serta disahkan sebelum periode tertentu. Menurut (Institute of Cost and Management Accountants, 2019),

pernyataan ini penting untuk menjamin penggunaan sumber daya yang efektif dan mencapai tujuan perusahaan. Meskipun penganggaran pernah dianggap sebagai cara untuk mengendalikan pengeluaran, kini penganggaran memainkan lebih banyak fungsi. Tujuan alat saat ini adalah untuk menjaga dan mengatur respons proposal manajemen, yang memerlukan penilaian ide dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat langsung dan jangka panjangnya, sehingga menjamin pengambilan keputusan keuangan yang bijaksana (Romenska, et. al., 2023). Meskipun demikian, anggaran adalah dokumen dinamis yang harus cukup adaptif untuk memperhitungkan kejadian yang tidak diantisipasi dan memerlukan modifikasi untuk memperbaiki perbedaan dan menjamin penggunaan sumber daya yang efisien (de Queiroz Alves, 2022).

Pola dasar model pra-anggaran dicontohkan di Prancis pra-revolusioner, tempat sistem tersebut mungkin mencapai puncaknya. Karakteristik utamanya adalah desentralisasi, privatisasi, kontinuitas, dan fleksibilitas. Sketsa singkat dari fitur-fitur ini merupakan prolog transformasi yang ditimbulkan oleh pengenalan penganggaran dan pemahaman tentang reformasi selanjutnya.

1. Desentralisasi

Kendala utama dalam penganggaran ketika komunikasi hampir tidak ada dan uang harus benar-benar disalurkan adalah menghubungkan pendapatan dan pengeluaran tertentu. Perbendaharaan pusat kurang berfungsi dibandingkan sistem yang terdesentralisasi, di mana pemungut dan pembayar pendapatan mengumpulkan dan membayarkan pendapatan yang dialokasikan di tempat dan terkadang merupakan individu yang sama. Padanan modernnya adalah dana bergulir.

2. Privatisasi

Sementara beberapa fungsi keuangan dikelola secara langsung, sebagian besar keuangan monarki dijalankan oleh individu swasta, yang mewarisi, membeli, atau menawar jabatan mereka. Keuntungan bagi individu atau perusahaan ini terletak pada kemampuan mereka untuk memperoleh laba dari "selisih" antara jumlah yang disepakati yang mereka serahkan dan apa yang mereka kumpulkan, dari bunga yang dibayarkan kepada mereka atas uang muka yang mereka berikan kepada negara untuk melakukan pembayaran tepat waktu, dan dari penggunaan uang negara yang menganggur atas nama mereka sendiri. Negara diuntungkan dari pendapatan yang terjamin, tidak perlu lagi mempertahankan birokrasi yang rakus, dan solusi dari masalah arus kas. Manfaat serupa diklaim saat ini dari privatisasi fungsi pemerintah tertentu.

3. Kontinuitas

Karena akuntabilitas, seperti yang ada, hanya perlu bersifat internal dan bukan publik, anggaran tahunan tidaklah penting. Akun-akun terus berlanjut tanpa "penutupan yang disepakati," yang penting adalah menjaga arus kas, dan estimasi defisit dapat dengan mudah dialihkan. Dana perwalian beroperasi dengan kesinambungan yang sama.

4. Fleksibilitas

Sistem praanggaran sangat cerdas dalam mencari sumber daya. Pajak dikenakan dengan segala cara yang dapat dibayangkan: pada jendela dan kereta; melalui bea cukai dan tol; pada tanaman dan warisan; melalui pengangkatan paksa; pada komunitas agama dan orang asing; melalui denda dan penyitaan singkatnya di mana-mana kecuali di tempat kekayaan dan kekuasaan negara yang sebenarnya berada. Namun, keragaman dalam pengumpulan pendapatan ini memberikan

sistem fleksibilitas yang besar. Pemerintah saat ini menunjukkan kecerdikan yang sama dalam mengenakan semua jenis biaya.

Tentu saja setelah semuanya runtuh, cacatnya terlihat jelas. Desentralisasi berarti kurangnya kontrol; privatisasi berarti korupsi dan pengalihan pendapatan secara besar-besaran; kontinuitas berarti kurangnya transparansi; dan fleksibilitas berarti perpajakan yang regresif dan sewenang-wenang. Sistem ini hanya dapat dipertahankan dengan ancaman penuntutan pidana berkala, dan mengingat ketergantungan raja yang berkelanjutan pada orang-orang yang dituntutnya, metode ini sangat tidak efektif. Waktunya sudah tepat untuk jenis administrasi keuangan yang sangat berbeda berdasarkan pemerintahan konstitusional, transparansi akun, dan proses kontrol yang teratur. Namun, sebelum kita menutup pintu pada era pra-anggaran, perlu dicatat bahwa dalam bagian-bagian penyusunnya, sistem tersebut merupakan sistem yang sangat terkelola. Akuntan yang menjalankannya untuk keuntungan mereka sendiri adalah para ahli di bidangnya dan tahu apa yang mereka lakukan. Runtuhnya sistem pada akhirnya bukanlah akibat dari ketidakmampuan manajerial mereka.

Era anggaran klasik, yang ditandai oleh beberapa perkembangan seperti berakhirnya sistem perpajakan dan pembentukan perbendaharaan pusat di Inggris, dapat ditelusuri dari pernyataan Baron Louis, menteri keuangan Prancis yang menjabat saat pemulihan monarki setelah Perang Napoleon. Pada tahun 1815, ia mengumumkan pemutusan total terhadap kekacauan keuangan, kemanfaatan, dan korupsi sebelumnya:

Kami akan menyampaikan evaluasi yang paling tepat mengenai kebutuhan kami, jumlah yang diperlukan untuk mengoperasikan departemen kementerian. Kemudian kami akan mengajukan usulan mengenai cara dan sarana untuk memenuhinya. Setiap kementerian dijamin penggunaan dana yang tersedia secara

teratur. Dana ini digunakan dalam proporsi yang paling tepat sesuai dengan kebutuhannya untuk layanan yang diberikan. Jika klarifikasi diperlukan, setiap menteri harus menyampaikan kepada Anda semua unsur yang diperlukan agar Anda dapat membentuk pendapat (Caiden, N. 1982).

Dari titik ini, teori anggaran menjadi cukup jelas. Penganggaran klasik mencakup empat, mungkin lima, elemen kardinal. *Annualitas* berarti bahwa anggaran akan dibuat setiap tahun untuk menentukan dan mengendalikan pengeluaran untuk tahun mendatang, dan akun akan ditutup dan disajikan untuk setiap tahun tepat waktu. *Kesatuan* berarti dana pusat atau perbendaharaan untuk semua pendapatan, sehingga pilihan tentang pengeluaran dapat dibuat secara terpusat, dan bahwa semua pencairan harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan dari dana tersebut. *Apropriasi* berarti bahwa tidak ada dana yang dapat dicairkan kecuali oleh hukum, yaitu, yang ditetapkan dalam anggaran tahunan, dan dengan demikian legislatif memiliki kata akhir tentang perpajakan dan pengeluaran yang bersifat *publik* dan terbuka untuk pengawasan publik. *Audit* berarti bahwa semua pengeluaran akan diperiksa secara teratur terhadap anggaran tahunan untuk memastikan bahwa pengeluaran tersebut dilakukan dengan jujur dan benar. Akhirnya, pada hal ini dapat ditambahkan unsur *keseimbangan* : dengan merencanakan pendapatan dan pengeluaran terlebih dahulu (bukan hanya menjumlahkannya kemudian), adalah mungkin untuk mengatur keseimbangan di antara keduanya.

Sulit untuk melebih-lebihkan pengaruh dan kegunaan mekanisme yang relatif sederhana ini. Gagasan anggaran, dan khususnya gagasan penganggaran eksekutif, sangat berpengaruh. Itu adalah elemen kunci dalam mendapatkan dan mempertahankan tanggung jawab pemerintah untuk diperintah. Meskipun pendapatan pajak tumbuh pesat selama abad kesembilan belas, kerusuhan pajak yang endemik pada abad-abad sebelumnya mengering. Anggaran memungkinkan

pengendalian administrasi keuangan dan mendasarkan keputusan keuangan pada informasi yang akurat. Itu memberikan kapasitas untuk perluasan pemerintah ke bidang regulasi dan kesejahteraan baru dan peningkatan fungsi lama. Itu adalah fondasi penting bagi kebijakan fiskal Keynesian. Itu menawarkan janji pengambilan keputusan yang lebih analitis oleh pemerintah melalui berbagai teknik yang dianjurkan.

Meskipun ada banyak kemenangan, penganggaran saat ini mengecewakan. Mungkin terlalu dibesar-besarkan dan orang-orang berharap terlalu banyak. Mungkin juga karena keberhasilannya sendiri, yang mendorong klaim yang jauh melampaui potensi kinerja. Mungkin kinerja sebenarnya tidak disadari atau diremehkan; atau mungkin telah dikalahkan oleh berbagai peristiwa. Apa pun penjelasannya, penganggaran publik saat ini dipandang sebagai masalah, dan teori penganggaran klasik dan teori yang dibangun di atasnya, tampaknya tidak lagi memadai untuk zaman kita.

Sistem Kontrol Anggaran

Menggunakan anggaran sebagai alat untuk mengarahkan dan menilai operasi organisasi merupakan strategi manajemen penting yang dikenal sebagai pengendalian anggaran. Hal ini melibatkan lebih dari sekadar membuat anggaran; untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah baru, pejabat anggaran dan manajemen atas harus berpartisipasi secara aktif. Mekanisme pengendalian anggaran berfungsi sebagai struktur yang memungkinkan entitas, seperti pemerintah dan perusahaan, untuk mengawasi distribusi pendapatan dan pengeluaran mereka sesuai dengan anggaran yang disetujui (Augustine, 2022). Dengan menerapkan pengendalian anggaran yang efisien, suatu organisasi dapat mencegah penyalahgunaan sumber daya dan meningkatkan tanggung jawab.

Pentingnya Mekanisme Pengendalian Anggaran

Menurut Asosiasi Pejabat Keuangan Pemerintah, (2023) berikut ini adalah beberapa pentingnya mekanisme pengendalian anggaran.

Akuntabilitas yang Ditingkatkan

Mekanisme pengendalian anggaran menyediakan pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa individu dan departemen bertanggung jawab atas kinerja keuangan mereka terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini mendorong pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan mencegah pemborosan pengeluaran.

Peningkatan Efisiensi Operasional

Dengan mengukur kinerja aktual secara berkala dengan angka yang dianggarkan, organisasi dapat dengan mudah mengidentifikasi beberapa area yang perlu ditingkatkan dan jika perlu mengambil tindakan korektif untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Pemantauan berkelanjutan ini membantu menyederhanakan operasi dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Pengambilan Keputusan Strategis

Kontrol anggaran yang efektif memberikan data dan wawasan yang sangat berharga dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, analisis varians antara kinerja yang dianggarkan dan kinerja aktual memastikan bahwa organisasi memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang status keuangan dan mampu membuat keputusan yang tepat dalam hal alokasi sumber daya, serta memanfaatkan peluang investasi, dan menerapkan strategi bisnis masa depan.

Mekanisme Pengendalian Anggaran

Perencanaan Anggaran: Menetapkan anggaran yang realistis dan dapat dicapai merupakan dasar pengendalian yang efektif. Hal ini melibatkan penetapan tujuan keuangan yang jelas, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, dan proyeksi pendapatan dan pengeluaran di masa mendatang.

Koordinasi Anggaran: Menyelaraskan rencana anggaran di berbagai departemen dan memastikan setiap orang memahami tanggung jawab masing-masing sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi.

Implementasi Anggaran: Ini melibatkan penerapan anggaran dan pemantauan kinerja aktual terhadap angka yang direncanakan. Ini termasuk melacak pengeluaran, memantau varians, dan mengambil tindakan korektif sesuai kebutuhan.

Konsep Sektor Publik

Istilah "sektor publik" menggambarkan unit-unit yang berada di bawah kepemilikan dan regulasi pemerintah yang menyediakan layanan dasar bagi warga negara. Berfungsi sebagai penghubung penting antara masyarakat dan pemerintah, industri ini menawarkan layanan yang mendukung regulasi ekonomi, kesejahteraan, keamanan, pembangunan infrastruktur, dan keadilan sosial (Rosenbloom et al., 2022). Organisasi sektor publik sangat penting bagi pengelolaan urusan pemerintahan negara karena, mereka secara efisien dan berhasil mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan material yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Lebih jauh, sektor publik yang sehat mendorong kesejahteraan sosial, memastikan stabilitas ekonomi, dan membangun serta memelihara infrastruktur penting yang semuanya merupakan pendorong utama pembangunan nasional (Rosenbloom et al., 2022).

Persetujuan anggaran

Tahap persetujuan anggaran berlangsung di badan legislatif melalui penetapan konstitusional. Akan tetapi, partisipasi bahkan dalam tahap ini dipastikan oleh Undang-Undang Dasar, pasal 48. Warga negara bahkan dapat memantau pembahasan politik RUU di badan legislatif, yang mencakup pelacakan amandemen RUU. Peran badan legislatif dalam anggaran telah diperluas di negara ini dalam dekade terakhir, melalui pembentukan “anggaran yang memaksakan” untuk amandemen parlemen (EC 86/2015 dan 100/2019), seperti yang baru-baru ini dibahas oleh Pereira dan Figueira (2020), di mana warga negara berpartisipasi aktif dalam mengusulkan amandemen.

Peran warga negara dalam proses partisipatif telah terlihat mengalami penolakan oleh badan legislatif, sering kali karena mereka dianggap bersaing dengan inisiatif legislatif itu sendiri selain mengancam pola pengaruh lokal badan legislatif (Grin, 2018), dan karena anggota dewan merasa terpinggirkan dari proses penganggaran partisipatif (Baicocchi & Ganuza, 2014), karena umumnya merupakan inisiatif yang berpusat pada Kekuasaan Eksekutif.

Fungsi Anggaran Sektor Publik

1. *Planning Tools* (sebagai perencanaan)

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.

- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat Pencapaian strategi.

2. Control Tools (sebagai pengendalian)

Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan -pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *Underspending* dan salah sasaran (misappropriation) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan.

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

- a) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;
- b) Menghitung selisih anggaran (favorable dan unfavorable variances);
- c) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians;
- d) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya

3. ***Fiscal Tools*** (sebagai alat kebijakan fiskal)

Sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arahan kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. ***Political Tools***

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik (*political tool*). Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

5. ***Coordination and Communication Tools*** (sebagai alat Koordinasi dan Komunikasi)

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat berkomunikasi antar unit kerja dalam

lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. *Performance Measurement Tools* (Sebagai Alat Penilaian Kinerja)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajemen publik dinilai berdasarkan beberapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. *Motivation Tool* (Sebagai Alat Motivasi)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable* maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

8. *Publik Share* (Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada.

Pengangguran, tuna wisma dan kelompok lain yang tak terorganisir akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan kamsuara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme, dan sebagainya.

Siklus Anggaran

Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Pada dasarnya prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor publik. Siklus anggaran (budget cycle) pada sektor publik adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran (APBN) disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang.

Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas:

- a) Tahap persiapan anggaran (preparation)
 - b) Tahap ratifikasi (approval/ratification)
 - c) Tahap implementasi (implementation) dan,
 - d) Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting & evaluation).
-
- a) Tahap Persiapan Anggaran (Budget Preparation)

Tahap persiapan anggaran ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapat yangtersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu harus dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Dalam persoalan estimasi, yangperlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor “uncertainty” (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran.

b) Tahap Ratifikasi Anggaran (Budget Ratification)

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill tetapi juga harus mempunyai political skill, salesmanship dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini.

c) Tahap Pelaksanaan Anggaran (Budget Implementation)

Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya

d) Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (Budget Reporting and Evaluation)

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran. Sedangkan, tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap *budget reporting and evaluation* tidak akan menemui banyak masalah

Rangkuman

Dalam pengantar yang diberikan, dosen menggambarkan penganggaran publik sebagai sebuah proses yang telah berkembang dari fungsi tradisionalnya untuk mengontrol pengeluaran menjadi alat yang lebih kompleks dan multifungsi. Penganggaran tidak hanya membatasi pengeluaran pada pendapatan yang tersedia, tetapi juga digunakan untuk tawar-menawar kekuasaan, perencanaan ekonomi dan sosial, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas. Proses ini mencerminkan preferensi politik, mendorong pengembangan ekonomi, dan menuntut pertanggungjawaban manajerial dan organisasional.

Selain itu, yang menjadi sorotan adalah kompleksitas penganggaran sebagai subjek interdisipliner yang menarik minat dari berbagai bidang seperti ilmu politik, administrasi publik, akuntansi, manajemen, dan psikologi. Pengembangan teori dan praktik penganggaran terus berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti reformasi manajerial dan kondisi ekonomi global. Oleh karena itu, penelitian tentang penganggaran publik tidak hanya menawarkan wawasan tentang proses politik dan ekonomi, tetapi juga menantang para akademisi untuk memahami kompleksitasnya dan menemukan solusi inovatif dalam konteks saat ini.

Latihan Soal

1. Ada berapa fungsi Anggaran Sektor publik? Sebut dan jelaskan!
2. Karakteristik anggaran sektor publik ada apa saja?
3. Apakah anggaran memiliki prioritas yang sama dengan rencana pembangunan daerah?
4. Sepenting apa mekanisme anggaran sektor publik dilakukan?
5. Apakah anggaran berbeda dengan pengeluaran rutin dan pengeluaran Pembangunan?

DUMANNY



APBN DAN APBD

Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran

- ❖ Memahami Konsep APBN dan APBD: Mengerti definisi, fungsi, dan tujuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- ❖ Menganalisis Komponen APBN dan APBD: Mengenal komponen-komponen yang membentuk APBN dan APBD termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- ❖ Memahami Proses Penyusunan APBN dan APBD: Mengerti tahapan penyusunan, pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN dan APBD.
- ❖ Menganalisis Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah: Mampu menjelaskan bagaimana pengelolaan keuangan negara dan daerah dilakukan serta peran administrator dalam pengelolaan tersebut.

Capaian Pembelajaran

- ❖ Menguasai Teori dan Konsep APBN dan APBD: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, fungsi, dan tujuan dari APBN dan APBD.
- ❖ Mengidentifikasi Komponen APBN dan APBD: Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan komponen utama dari APBN dan APBD.
- ❖ Memahami Proses Siklus APBN dan APBD: Mahasiswa mampu menggambarkan proses penyusunan hingga pengawasan APBN dan APBD.
- ❖ Mengkritisi Kebijakan Fiskal dan Keuangan Daerah: Mahasiswa dapat memberikan analisis kritis terhadap kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

DUMMMY

Perumusan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara meliputi keseluruhan pelaku yang terkait dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Pada bab ini akan membahas pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD)

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

1. Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan negara selama satu tahun anggaran. APBN dapat mengalami satu atau dua kali perubahan dalam satu tahun, tergantung kondisi perekonomian dan perubahan asumsi dalam tahun tersebut. APBN dan perubahan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu terdapat Pertanggungjawaban APBN yang merupakan laporan realisasi yang juga ditetapkan dengan undang-undang.

Pada tingkat nasional manajemen anggaran tercermin dalam kebijakan fiskal dan APBN dari pemerintah pusat. Pada prinsipnya APBN adalah keseluruhan anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah selama satu tahun untuk dapat mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah ditetapkan. Kebijakan

fiskal dan APBN juga mencerminkan arah kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dalam rangka mencapai target-target makro yang hendak dicapai oleh pemerintah.

2. Fungsi APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus memenuhi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

1) Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi pada dasarnya adalah menggunakan berbagai sumber pendapatan untuk menyediakan pelayanan publik. Di dalam APBN diuraikan sumber pendapatan dan pendistribusiannya. Pendapatan yang paling besar dari pemerintah berasal dari pajak. Pendapatan dari pajak dapat dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan.

2) Fungsi Distribusi

Pendapatan negara dari pajak dan bukan pajak tidak semua digunakan secara langsung untuk menyediakan pelayanan publik. Tetapi dapat juga didistribusikan dalam bentuk dana subsidi dan dana pensiun. Pengeluaran pemerintah semacam ini disebut *transfer payment*.

3) Fungsi Stabilisasi

APBN sebagai ujud kebijakan fiskal bersama-sama kebijakan moneter berfungsi untuk menjaga stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan lain-lain. Perekonomian yang stabil adalah prasyarat dapat berjalannya berbagai aktifitas masyarakat.

3. Tujuan Penyusunan APBN

Tujuan Penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan Negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. APBN merupakan wujud tahunan dari rencana jangka menengah dan jangka panjang negara (RPJM dan RPJP) negara, dan APBN adalah produk hukum berupa undang-undang yang harus dipatuhi oleh segenap lembaga negara.

4. Asumsi Penyusunan APBN

Dalam penyusunan APBN, indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*), dan lifting minyak.

Indikator-indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Apabila realisasi variabel-variabel tersebut berbeda dengan asumsinya, maka besaran-besaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBN juga akan berubah. Oleh karena itu, variasi-variasi ketidakpastian dari indikator ekonomi makro merupakan faktor risiko yang akan memengaruhi APBN.

Mengingat peranan pemerintah yang cukup besar sebagai regulator perekonomian, kebijakan fiskal pemerintah pada gilirannya juga akan mempengaruhi besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro. Dengan demikian, besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai langkah awal untuk menghitung besaran APBN sudah mempertimbangkan rencana kebijakan fiskal yang akan diambil pemerintah. Lembaga yang bertanggung jawab

menyusun rerangka ekonomi makro adalah Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan. Rerangka ekonomi makro ini sebaiknya memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga dapat digunakan oleh para investor dalam memperkirakan kondisi perekonomian ke depan. Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro tersebut dapat mengalami perubahan sesuai dengan kinerja perekonomian Indonesia dan berbagai perkembangan kondisi perekonomian dunia terkini. Indikator-indikator tersebut merupakan asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan bagi perhitungan besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN, yang meliputi:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Produksi tersebut diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)* yang menghitung nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah suatu negara dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDB hanya mencakup nilai akhir suatu barang, yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah (*value added*) barang dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi.

2) Inflasi

Pengertian inflasi adalah kecenderungan naiknya tingkat harga sekelompok barang dan jasa secara umum dan terjadi secara terus menerus selama periode waktu tertentu. Nilai inflasi dihitung berdasarkan kenaikan harga sekelompok barang dan jasa di 66 kota. Sekelompok barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung konsumsi rumah tangga seluruhnya berjumlah 774 komoditas. Inflasi digunakan sebagai salah satu asumsi dasar makro ekonomi karena inflasi mempengaruhi postur

RAPBN/RAPBN-P, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja. Karakteristik inflasi dapat digambarkan melalui penjelasan mengenai sebab terjadinya inflasi.

3) Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar (kurs) adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Pengertian lain nilai tukar atau yang biasa disebut *exchange rate* adalah nilai tukar suatu negara diukur dari perbandingan antara harga dari mata uang domestik dengan harga dari mata uang internasional/negara lain. Valuta asing (*foreign exchange*) adalah mata uang negara lain (*foreign currency*) dari suatu perekonomian. Penilaian kurs yang lebih relevan menggunakan nilai tukar riil (*real exchange rate*). *Real exchange rate* menunjukkan nilai dimana seseorang dapat membeli barang dan jasa dari suatu negara dibandingkan nilai barang dan jasa di negara lain.

4) Suku bunga SPN 3 bulan

Secara sederhana, bunga dapat diartikan sebagai bentuk imbalan jasa atau kompensasi atas pinjaman yang diberikan oleh suatu pihak. Uang, yang dipinjam disebut pokok utang. Sedangkan, persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai balas jasa disebut suku bunga. Dalam hubungannya dengan perbankan, suku bunga dibedakan atas suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Suku bunga SPN 3 bulan digunakan dalam asumsi dasar ekonomi makro. Sebagai informasi, suku bunga SPN diperkirakan lebih rendah dari suku bunga SBI, sehingga hal ini akan meringankan beban APBN.

5) Harga Minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP)

ICP atau harga minyak mentah Indonesia merupakan basis harga minyak mentah yang digunakan dalam APBN. (penerimaan PNBPN Migas, PPh Migas, dan Subsidi BBM), ICP ini juga merupakan harga patokan minyak mentah Indonesia yang digunakan sebagai dasar monetisasi minyak Indonesia. ICP adalah harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak. (biasanya memakai standar harga *Mid Oil Platts Singapore* (MOPS) atau biasa disebut *Singapore Platts* yang ditetapkan setiap bulan dan dievaluasi setiap semester.

6) Lifting Minyak Bumi Indonesia

Pengertian lifting minyak bumi antara lain adalah sejumlah minyak mentah dan atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (*custody transfer point* atau *point of sales*) atau kepemilikan sebuah perusahaan secara fisik dan legal atas hak minyak mentah yang dalam kontrak bagi hasil biasanya mengandung dua komponen yang terdiri atas: biaya dan keuntungan, produksi minyak hasil tambang siap jual, atau tingkat produksi hasil tambang minyak. Asumsi lifting minyak tersebut dalam APBN difungsikan sebagai dasar perhitungan penerimaan PNBPN migas.

5. Format dan Struktur APBN

Format dan struktur APBN Indonesia mengalami perubahan yang sangat fundamental sejak tahun 2000. APBN dipresentasikan dengan format yang mengikuti standar *Government Finance Statistics* (GFS). Konsep yang dikembangkan oleh Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund, IMF) dan dipublikasikan di dalam GFS Manual 1986 ini. Penyusunan format APBN 2000 dengan standar internasional tersebut merupakan bagian dari upaya

pembaharuan dan penyesuaian kebijakan fiskal (fiscal adjustment and reform program) agar sesuai dengan praktik di negara-negara maju lainnya. Dengan format baru tersebut APBN Indonesia menjadi sama dengan negara-negara lain sehingga dapat dibandingkan dengan negara-negara lain secara konsisten dan setara.

Komponen utama APBN terdiri atas:

- a. Pendapatan negara adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah;
- b. Belanja negara merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja;
- c. Keseimbangan primer adalah pendapatan negara dikurangi dengan belanja negara, namun dari komponen belanja negara tersebut komponen pembayaran bunga utang dikeluarkan (tidak diperhitungkan);
- d. Surplus/defisit adalah selisih pendapatan negara dikurangi total belanja negara;
- e. Pembiayaan anggaran adalah penerimaan atau pengeluaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran dalam APBN atau kebutuhan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, dan karakteristiknya adalah tidak merubah posisi kekayaan bersih pemerintah.

6. Siklus APBN

Secara garis tahapan penyusunan APBN dalam proses perencanaan dan penyusunan APBN dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap pendahuluan

Sebagai tahap awal, Menteri Negara PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan menetapkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang pagu indikatif, yang merupakan ancar-ancar pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) untuk setiap program sebagai acuan penyusunan rencana kerja K/L. Sementara itu, pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya ke DPR selambat-lambatnya pertengahan Mei tahun berjalan. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah bersama-sama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran sebagai acuan K/L dalam penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Dalam proses itu dihasilkan angka-angka pagu sementara (masih akan berubah sesuai dengan hasil pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN antara Pemerintah dan DPR-RI).

Setelah menerima keputusan mengenai pagu sementara melalui Surat Edaran Menteri Keuangan, K/L menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL) dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah (RKP) dan menggunakan pendekatan: (a) kerangka pengeluaran jangka menengah (RPJM); (b) penganggaran terpadu; dan (c) penganggaran berbasis kinerja.

Dalam rencana kerja diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan dan keluaran yang diharapkan. Sedangkan di dalam anggaran diuraikan biaya untuk masing-masing program dan kegiatan, serta sumber dan sasaran pendapatan K/L yang bersangkutan. Rencana kerja dan anggaran yang disusun K/L disampaikan ke DPR untuk dibahas dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN. Dalam periode tersebut, K/L bersama dengan komisi mitra kerja terkait (Komisi I s.d XI) di DPR membahas rencana kerja dan kebutuhan anggaran masing-masing K/L yang bersangkutan. Hasil pembahasan RKA-KL disampaikan ke Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Bappenas selambat-lambatnya pada

bulan Juli. Kementerian Negara PPN/Bappenas akan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan RKP. Sementara Kementerian Keuangan akan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang pagu sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan standar biaya yang telah ditetapkan. Hasil pembahasan RKA-KL tersebut dijadikan sebagai bahan penyusunan RUU APBN.

b. Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN

Tahapan dimulai dengan pidato presiden pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan selambat-lambatnya Agustus. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan antara Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran DPR, yang pengambil keputusannya dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Hasil keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan pembahasan antara komisi dengan kementerian/lembaga mitra kerja menjadi RKA-KL.

Selanjutnya, RKA-KL yang telah disepakati DPR kemudian ditetapkan dalam Keputusan Presiden tentang Rincian APBN selambat-lambatnya akhir November untuk dijadikan dasar oleh K/L dalam menyusun konsep dokumen anggaran (DIPA). Konsep DIPA disampaikan kepada Menteri Keuangan (c.q. Ditjen Perbendaharaan) selaku Bendahara Umum Negara selambat-lambatnya minggu kedua Desember sehingga dapat disahkan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. DIPA yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan tersebut merupakan dokumen anggaran yang berlaku sebagai otorisasi pengeluaran untuk masing-masing kegiatan pada K/L yang dirinci ke dalam belanja pegawai, barang, modal, dan bantuan sosial.

c. Tahap pengawasan APBN

Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, pemerintah menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila hasil pemeriksaan perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU LKPP disetujui oleh BPK, maka RUU LKPP tersebut diajukan ke DPR guna mendapat pengesahan oleh DPR menjadi UU Perhitungan Anggaran Negara (UU LKPP) tahun anggaran berkenaan.

7. Revisi APBN

Beberapa faktor yang menyebabkan diperlukannya revisi APBN yaitu:

- a. Adanya perubahan asumsi dasar penyusunan APBN yang terjadi selama tahun anggaran berjalan,
- b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal,
- c. Adanya kebutuhan pengeluaran yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan tidak dapat dihindari yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta
- d. Adanya target penerimaan yang tidak tercapai, sehingga perlu penyesuaian pengeluaran atau pembiayaan APBN yang mengakibatkan harus digunakannya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya.

8. Peran Administratur

Administratur harus memahami terkait APBN pada setiap tahun anggaran, memahami arah kebijakan pemerintah, kondisi keuangan negara secara makro,

sasaran-sasaran pembangunan yang hendak dicapai pemerintah dan merumuskan peran organisasi yang dipimpinnya dengan tujuan nasional sesuai dengan APBN tahun tersebut.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan, (Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya), Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus serta Pendapatan lain-lain yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.

Pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk penenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan pengertian tersebut, pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk penenuhan kebutuhan keuangan di daerah.

Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2. Fungsi APBD

Fungsi dan kedudukan APBD yaitu: Sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masa tertentu yaitu satu tahun anggaran. Sebagai pemberian kuasa dari pihak legislatif yaitu DPRD kepada kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif untuk melakukan pengeluaran dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah. Sebagai penetapan kewenangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bahan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berhak melaksanakan pengawasan bisa lebih baik. Pada Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Thn 2006 menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. **Fungsi Otorisasi** – Anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah ditahun bersangkutan.
- b. **Fungsi Perencanaan** – Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen didalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. **Fungsi Pengawasan** – Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

- d. **Fungsi Alokasi** – Anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya, dan juga meningkatkan efisiensi & efektivitas perekonomian.
- e. **Fungsi Distribusi** – Anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan.
- f. **Fungsi Stabilisasi** – Anggaran daerah tersebut menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah.

C. **Komponen APBD**

1) **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keuangan Daerah” menyebutkan bahwa PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah.

PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah. Sumber-sumber PAD berasal dari:

Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah daerah memiliki hak untuk menarik pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga apabila wajib pajak tidak melunasinya maka akan dianggap sebagai utang pajak. Untuk ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak daerah, maka diberlakukan sanksi administrasi berupa denda pajak bagi pajak terutang yang dibayarkan melewati batas waktu pembayaran.

Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak yang dikelolanya pun berbeda seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tabel Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah yang Dikelola Pemerintah Provinsi	Pajak Daerah yang Dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
c. Pajak Alat Berat (PAB)	c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
d. Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	

<ul style="list-style-type: none"> e. Pajak Air Permukaan (PAP) f. Pajak Rokok g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) 	<ul style="list-style-type: none"> d. Pajak Reklame e. Pajak Air Tanah f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) g. Pajak Sarang Burung Walet h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
---	--

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD menambahkan jenis pajak daerah berupa opsen pajak. Opsen pajak merupakan tambahan pajak menurut persentase tertentu untuk kepentingan kas daerah. Keberadaan opsen pajak diharapkan mampu mendorong penerimaan yang minim sehingga bergantung pada dana transfer.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak daerah, pemungutan retribusi daerah terdapat kontraprestasi yang secara langsung bisa ditunjuk. Wajib retribusi menggunakan atau menikmati jasa yang diberikan atas pungutannya.

Jenis retribusi daerah terdiri atas:

Tabel 4.2 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kesehatan b. Pelayanan kebersihan c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum d. Pelayanan pasar e. Pengendalian lalu lintas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila e. Pelayanan rumah potong hewan ternak f. Pelayanan jasa kepelabuhanan g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga h. Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan bangunan gedung b. Penggunaan tenaga kerja asing c. Pengelolaan pertambangan rakyat

	<p>menggunakan kendaraan di air</p> <p>i. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah</p> <p>j. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan</p>	
--	--	--

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/ deviden.

Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah diluar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari:

- a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan.
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
- c. Hasil kerjasama daerah.
- d. Jasa giro.
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir.
- f. Pendapatan bunga.

- g. Penerimaan atas tuntutan gati kerugian keuangan daerah.
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa.
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- k. Pendapatan denda pajak daerah.
- l. Pendapatan denda retribusi daerah.
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- n. Pendapatan dari pengembalian.
- o. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Celah fiskal daerah merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga untuk menutupi kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, perlu adanya tambahan pendapatan berupa transfer ke daerah. Pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat dalam APBN dan berasal dari APBD antar daerah. Jenis pendapatan transfer terdiri dari dana perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa:

Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun dalam APBN dan alokasi ke daerah ditetapkan dengan peraturan presiden tentang rincian APBN. Dana Perimbangan terdiri dari:

a. Dana Transfer Umum (DTU)

Dana Transfer Umum (DTU) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer umum meliputi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH berasal dari pajak dan pengelolaan sumber daya alam.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b. Dana Transfer Khusus (DTK)

Dana Transfer Khusus (DTK) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik. Dana Transfer Khusus dikenal juga dengan istilah Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk

memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah.

Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Tiga provinsi yang mendapatkan dana otonomi khusus adalah Papua Barat, Papua dan Aceh.

Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Dana keistimewaan diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi:

a. Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan

usaha dalam atau luar negeri yang tidak mengikat. Pendapatan hibah diberikan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana Darurat

Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendapatan lainnya yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (MT)

D. Belanja Daerah

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap belanja daerah pada penyusunan APBD yang mulai diimplementasikan pada tahun anggaran 2021.

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Tujuan belanja daerah adalah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari:

1) Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Terdapat 2 (dua) jenis urusan wajib pemerintahan daerah yaitu yang berkaitan dengan

pelayanan dasar meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; serta kearsipan.

2) Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian dan transmigrasi.

Belanja daerah disusun dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu : (a) rerangka pengeluaran jangka menengah daerah; (b). penganggaran terpadu; dan (c). Penganggaran berbasis kinerja. Disamping itu belanja daerah harus disusun berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap belanja daerah pada penyusunan APBD yang mulai diimplementasikan pada tahun anggaran 2021.

Perubahan tersebut terletak pada komposisi belanja daerah yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010. Sehingga Pemerintah Daerah tidak perlu lagi melakukan mapping terhadap komposisi belanja daerah yang dapat dilihat perbedaannya pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Perubahan Komposisi Belanja Daerah

PMDN Nomor 13 Tahun 2006	PMDN Nomor 77 Tahun 2020
<p>A. Belanja Tidak Langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Bunga 3. Belanja Subsidi 4. Belanja Hibah 5. Belanja Bantuan Sosial 6. Belanja Bantuan Keuangan 7. Belanja Tidak Terduga <p>B. Belanja Langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal 	<p>A. Belanja Operasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Baran dan Jasa 3. Belanja Bunga 4. Belanja Subsidi 5. Belanja Hibah 6. Belanja Bantuan Sosial <p>B. Belanja Modal</p> <p>C. Belanja Transfer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Bagi Hasil 2. Belanja Bantuan Keuangan <p>D. Belanja Tidak Terduga</p>

Belanja daerah menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN serta dianggarkan pada SKPD yang bersangkutan. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Tambahan penghasilan tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Belanja Subsidi

Belanja subsidi diberikan kepada BUMN, BUMD atau badan usaha milik swasta yang bertujuan untuk meningkatkan harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan.

Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, BUMN atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia. Belanja hibah bersifat spesifik yang telah ditetapkan peruntukannya, tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakata. Penganggaran belanja hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Tujuan diberikannya bantuan sosial yaitu untuk melindungi penerima bantuan sosial dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Penganggaran belanja bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap harus memenuhi kriteria antara lain: (a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; (b). digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan (c) memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

aset sampai aset siap digunakan. Aset yang dianggarkan dalam belanja modal meliputi:

- a. Belanja tanah.
- b. Belanja peralatan dan mesin.
- c. Belanja bangunan dan gedung.
- d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan.
- e. Belanja aset tetap lainnya.
- f. Belanja aset lainnya.

Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya.

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan terdiri dari:

- a. Bantuan keuangan antar daerah provinsi.
- b. Bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota.
- c. Bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya atau di luar wilayahnya.
- d. Bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya atau daerah provinsi lainnya.
- e. Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembangan atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Keadaan darurat dimaksud meliputi :

- a. Bencana alam. Bencana non-alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa.
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- d. Sedangkan keperluan mendesak meliputi:
- e. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- f. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- g. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan.
- h. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Mandatory Spending

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menganggarkan belanja daerah dalam APBD dalam memenuhi *mandatory spending* yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah yang meliputi:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1).

- b. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari APBD diluar gaji sesuai amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- d. Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah atau desa sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 147.
- e. Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah paling tinggi 30% dari total belanja APBD sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 146.

E. Prosedur Penyusunan APBD

Tahap proses penyusunan anggaran sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimulai dari proses penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk lebih memahami prosedur penyusunan APBD.

Setelah RPJP Daerah ditetapkan, tugas selanjutnya adalah Pemerintah Daerah menetapkan uraian dan penjabaran mengenai visi, misi dan program kepala daerah dengan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan memuat hal-hal tentang arah kebijakan umum daerah, program serta kegiatan SKPD yang dituangkan dalam Renstra dengan acuan rangkai pagu indikatif.

RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kepala daerah dilantik berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 pasal 19 ayat (3). Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan RKPD yang ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan acuan RPJMD, Renstra, Renja dan memperhatikan RKP dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar untuk penyusunan APBD. Proses perencanaan dari RPJP Daerah, RPJM Daerah, sampai dengan RKP Daerah sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2005 berada di BAPPEDA.

Langkah selanjutnya adalah penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) RKA disusun dengan menggunakan pendekatan rerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan rerangka jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Berkenaan dengan itu maka dalam menganggarkan belanja untuk mendanai kegiatan pencapaian sasaran program, supaya mencantumkan perkiraan kebutuhan anggaran pada tahun mendatang yang dituangkan dalam RKA-SKPD 2.1 dan RKA-SKPD 2.2. Proyeksi kebutuhan anggaran belanja untuk mendanai kegiatan tersebut pada tahun anggaran berikutnya, supaya dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan ketersediaan dana.

Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan mengkaitkan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan

keluaran tersebut dengan didasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

Penganggaran belanja tidak langsung pada SKPD dan SKPKD

- a. Belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam SKPD hanya belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam SKPKD (dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset), mencakup belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial termasuk bantuan untuk partai politik, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Bagi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh departemen teknis terkait, supaya dijadikan pedoman dalam menganggarkan setiap program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKA-SKPD.

Dalam sistem anggaran berbasis prestasi kerja, setiap usulan program kegiatan dan anggaran perlu dinilai kewajarannya. Dalam kaitan itu, perlu ditetapkan terlebih dahulu analisis standar belanja (ASB) sebagai pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penilaian kewajaran dalam ASB mencakup kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya.

RKA SKPD, memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang

direncanakan dirinci sampai dengan rincian-rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya. Selain itu juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Pada akhirnya pelaksanaan dipertanggungjawabkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Dokumen ini juga merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.

Teknis Perubahan APBD

Perubahan APBD merupakan penyesuaian terhadap capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam melakukan perubahan APBD harus dilandasi dengan perubahan Kebijakan Umum APBD dan PPAS yang disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, mencakup:
 - a) Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah.
 - b) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.

- c) Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah.
 - d) Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan perubahan APBD.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berkenaan, antara lain untuk:
- a) Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - b) Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c) Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - d) Mendanai kegiatan lanjutan;
 - e) Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan;
 - f) Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berkenaan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan pula.
 - g) Keadaan darurat.

Rangkuman

1. Definisi dan Fungsi:

- **APBN:** Rencana keuangan tahunan pemerintah yang mencakup penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Fungsinya meliputi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- **APBD:** Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

2. Komponen Utama:

- **APBN:** Pendapatan negara (pajak, bukan pajak, hibah), belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit, dan pembiayaan anggaran.
- **APBD:** Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3. Proses Penyusunan dan Pengawasan:

- **APBN:** Dimulai dari tahap pendahuluan, penyusunan RKA-KL, pembahasan dan penetapan di DPR, hingga pengawasan oleh BPK.
- **APBD:** Melibatkan penyusunan oleh pemerintah daerah, pembahasan di DPRD, penetapan dalam Peraturan Daerah, dan pengawasan oleh BPKP dan Inspektorat Daerah.

Latihan Soal

1. APBN adalah...
 - a. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.
 - b. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan.
 - c. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu.
 - d. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu.
 - e. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementerian dan lembaga selama periode tertentu.

2. APBN diatur dalam perundang-undangan, salah satu undang-undang yang mengatur tentang APBN adalah...
 - a. UU No. 14 Tahun 2019
 - b. UU No. 20 Tahun 2019
 - c. UU No. 4 Tahun 2020
 - d. UU No. 11 Tahun 2020
 - e. UU No. 20 Tahun 2020

3. Tujuan penyusunan APBN adalah...
 - a. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
 - b. Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
 - c. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dikementerian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
 - d. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
 - e. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

4. Berikut pernyataan dari fungsi otoritas adalah...
 - a. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya.
 - b. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
 - c. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan.
 - d. APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

- e. APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
5. APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran adalah fungsi APBN yang dimaksud adalah...
- a. Fungsi Otoritas
 - b. Fungsi Perencanaan
 - c. Fungsi Alokasi
 - d. Fungsi Distribusi
 - e. Fungsi Pengawasan
6. Menciptakan efisiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal merupakan perwujudan dari fungsi...
- a. Fungsi Otoritas
 - b. Fungsi Perencanaan
 - c. Fungsi Alokasi
 - d. Fungsi Distribusi
 - e. Fungsi Pengawasan
7. APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan di bawah ini. Yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah...
- a. Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - b. Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai RAPBN.
 - c. Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas.
 - d. DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak.

- e. RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah yang dilaksanakan.
8. Landasan hukum dibuatnya APBN, yaitu...
- UUD 1945 Pasal 23
 - UUD 1945 Pasal 28
 - UUD 1945 Pasal 29
 - UUD 1945 Pasal 30
 - UUD 1945 Pasal 33
9. Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu...
- DPRD
 - MPR
 - DPD
 - MA
 - BPK
10. Melalui APBN tercermin gambaran pembagian anggaran negara untuk setiap sektor dan wilayah pembangunan. Hal tersebut menunjukkan salah satu fungsi APBN yaitu yaitu...
- Alokasi
 - Regulasi
 - Distribusi
 - Stabilisasi
 - Evaluasi

11. Pihak yang membuat APBD di tingkat daerah adalah...
 - a. Gubernur
 - b. Walikota atau Bupati
 - c. Presiden
 - d. Menteri Keuangan

12. Sumber pembiayaan APBD di antaranya yaitu...
 - a. Pajak, bunga pinjaman, dan hibah
 - b. Pajak, bunga pinjaman, dan subsidi
 - c. Pajak, bunga pinjaman, dan transfer dari APBN
 - d. Pajak, bunga pinjaman, dan keuntungan perusahaan BUMD

13. Apa yang menjadi sumber pembiayaan APBN?
 - a. Pajak, bunga pinjaman, dan hibah
 - b. Pajak, bunga pinjaman, dan subsidi
 - c. Pajak, bunga pinjaman, dan transfer ke daerah
 - d. Pajak, bunga pinjaman, dan keuntungan perusahaan BUMN

14. Defisit anggaran adalah...
 - a. Jumlah penerimaan lebih besar dari jumlah pengeluaran
 - b. Jumlah penerimaan sama dengan jumlah pengeluaran
 - c. Jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah penerimaan
 - d. Tidak ada sedikitpun penerimaan dan pengeluaran

15. Jika terjadi defisit anggaran, maka yang dilakukan pemerintah adalah...
 - a. Meningkatkan pajak
 - b. Memotong anggaran belanja negara
 - c. Meningkatkan jumlah subsidi bagi rakyat

- d. Menjual aset pemerintah ke swasta
16. Apa yang dimaksud dengan belanja modal?
- a. Belanja untuk memperoleh aset tetap
 - b. Belanja untuk membayar gaji pegawai
 - c. Belanja untuk subsidi kepada rakyat
 - d. Belanja untuk memperoleh barang dan jasa
17. Apa yang dilakukan pemerintah jika terjadi surplus anggaran?
- a. Mengalokasikan lebih banyak dana untuk program sosial
 - b. Menambah subsidi bagi rakyat
 - c. Menurunkan jumlah pajak
 - d. Menambah dana bagi program Pembangunan

Esai

- 1. Jelaskan perbedaan antara fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam APBN!
- 2. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan primer dalam APBN dan mengapa penting?
- 3. Jelaskan proses tahapan penyusunan APBN dari tahap pendahuluan hingga penetapan!
- 4. Apa saja komponen utama dalam APBD dan bagaimana peran PAD dalam APBD?



5

TEKNIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran

- ❖ Memahami konsep dasar akuntansi sektor publik.
- ❖ Menguasai regulasi dan standar akuntansi sektor publik.
- ❖ Mampu mengimplementasikan sistem akuntansi pemerintahan.
- ❖ Menyiapkan dan menganalisis laporan keuangan pemerintah.
- ❖ Mengenali tantangan dan solusi dalam implementasi akuntansi sektor publik.

Capaian Pembelajaran

- ❖ Mahasiswa mengenal prinsip-prinsip dasar dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- ❖ Mahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data keuangan sektor publik.
- ❖ Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengusulkan solusi atas tantangan dalam implementasi akuntansi sektor publik.
- ❖ Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan regulasi dan standar akuntansi yang berlaku di sektor publik.
- ❖ Mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

DUMNMY

A. Pengantar Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan cabang akuntansi yang khusus mengelola dan melaporkan keuangan entitas publik, seperti pemerintah dan lembaga nirlaba yang menggunakan dana publik. Berikut adalah poin-poin utama yang mencakup pengantar akuntansi sektor publik:

1. **Definisi Akuntansi Sektor Publik:** Akuntansi sektor publik adalah sistem pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan entitas yang menggunakan sumber daya yang berasal dari masyarakat, termasuk pajak, retribusi, dan hibah.
2. **Tujuan Akuntansi Sektor Publik:**
 - **Transparansi:** Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang pengelolaan keuangan entitas publik kepada masyarakat.
 - **Akuntabilitas:** Menjamin bahwa penggunaan dana publik dipertanggungjawabkan dengan tepat kepada pemangku kepentingan, seperti masyarakat umum dan badan legislatif.
 - **Efisiensi dan Efektivitas:** Membantu entitas sektor publik dalam mengelola dan menggunakan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan pelayanan publik.
3. **Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik:**
 - Meliputi pemerintahan pusat dan daerah, lembaga nirlaba yang menggunakan dana publik, seperti rumah sakit umum, sekolah negeri, dan badan-badan pemerintah lainnya.
 - Memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dan non-keuangan yang berhubungan dengan dana publik dicatat dan dilaporkan dengan benar.

4. Perbedaan dengan Akuntansi Sektor Swasta:

- **Tujuan Utama:** Sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara sektor swasta bertujuan untuk mencapai keuntungan.
- **Sumber Dana:** Sektor publik mendapatkan dana dari pajak dan hibah, sedangkan sektor swasta dari penjualan produk atau layanan.
- **Standar Akuntansi:** Sektor publik mengikuti standar akuntansi sektor publik yang umumnya berbeda dengan standar yang digunakan oleh sektor swasta.

5. Tantangan dalam Akuntansi Sektor Publik:

- Kompleksitas pengelolaan berbagai sumber dana yang berasal dari pajak dan hibah.
- Memastikan akuntabilitas yang tinggi dan transparansi dalam penggunaan dana publik.
- Menyusun laporan keuangan yang dapat dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

B. Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik

Regulasi dan standar akuntansi sektor publik memainkan peran penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi pelaporan keuangan oleh entitas publik. Berikut adalah poin-poin materi terkait regulasi dan standar akuntansi sektor publik:

1. Regulasi Akuntansi Sektor Publik:

- Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang:
 - Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur pelaporan keuangan entitas publik, seperti Undang-

Undang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Pedoman Teknis dari Badan Pengawas Keuangan:
 - Badan Pengawas Keuangan, seperti BPK di Indonesia, mengeluarkan pedoman teknis yang harus diikuti oleh entitas publik dalam menyusun laporan keuangan.

2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP):

- Prinsip-Prinsip Dasar SAP:
 - Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah kerangka kerja yang digunakan oleh entitas pemerintah untuk menyusun laporan keuangan. Prinsip dasar SAP mencakup relevansi, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
- Penerapan SAP:
 - SAP diterapkan oleh semua entitas pemerintah, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara/daerah.
- Format Laporan Keuangan:
 - SAP menentukan format dan isi laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

3. Standar Akuntansi Internasional untuk Sektor Publik (IPSAS):

- Pengenalan IPSAS:
 - IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) adalah standar akuntansi internasional yang dirancang untuk entitas sektor

publik. IPSAS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik secara global.

- Adopsi IPSAS:
 - Banyak negara mengadopsi atau menyesuaikan IPSAS untuk disesuaikan dengan kondisi lokal mereka. Adopsi ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sektor publik.
- Prinsip-Prinsip IPSAS:
 - IPSAS didasarkan pada prinsip akrual, yang mencatat transaksi keuangan pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan.

4. Standar Akuntansi Indonesia (SAI):

- Konvergensi dengan IFRS:
 - Standar Akuntansi Indonesia (SAI) untuk sektor publik mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat dalam International Financial Reporting Standards (IFRS) untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.
- Peran Ikatan Akuntan Indonesia (IAI):
 - IAI berperan dalam mengembangkan dan mengeluarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, termasuk untuk sektor publik.

5. Pelaporan Keuangan dan Pengawasan:

- Transparansi dalam Pelaporan Keuangan:
 - Regulasi dan standar akuntansi menekankan pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan untuk memastikan bahwa

informasi keuangan dapat diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan.

- Akuntabilitas Publik:
 - Akuntabilitas adalah kunci dalam sektor publik, dan regulasi serta standar akuntansi membantu memastikan bahwa entitas publik bertanggung jawab atas penggunaan dana publik.

6. Implementasi dan Tantangan:

- Penerapan Standar:
 - Implementasi standar akuntansi sektor publik memerlukan komitmen dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, auditor, dan entitas publik itu sendiri.
- Tantangan dalam Implementasi:
 - Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan standar akuntansi sektor publik mencakup keterbatasan sumber daya, perubahan regulasi, dan kebutuhan akan pelatihan yang berkelanjutan bagi staf akuntansi.

C. Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan sistem yang digunakan oleh entitas pemerintah untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan secara akurat dan transparan. Berikut adalah poin-poin utama terkait dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

1. Definisi dan Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan:

- Definisi:
 - Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rerangka kerja yang digunakan oleh entitas pemerintahan untuk mengelola transaksi keuangan, mulai dari pencatatan hingga pelaporan keuangan.
- Tujuan:
 - Menyediakan informasi keuangan yang andal dan relevan untuk pengambilan keputusan.
 - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
 - Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku.

2. Komponen Sistem Akuntansi Pemerintahan:

- Sistem Pencatatan:
 - Sistem yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran.
 - Pencatatan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, seperti akrual atau kas.
- Sistem Pelaporan:
 - Menyusun laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas pemerintah.
 - Laporan ini meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

- Sistem Pengendalian Internal:
 - Prosedur dan kebijakan yang diterapkan untuk mengendalikan transaksi dan memastikan keandalan informasi keuangan.
 - Mencegah kecurangan, kesalahan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

3. Jenis-Jenis Sistem Akuntansi Pemerintahan:

- Sistem Berbasis Kas:
 - Pencatatan transaksi dilakukan pada saat kas diterima atau dibayarkan.
 - Mudah diterapkan tetapi kurang mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya.
- Sistem Berbasis Akrua:
 - Pencatatan transaksi dilakukan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas.
 - Menyediakan informasi yang lebih akurat dan lengkap tentang kinerja keuangan.

4. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan:

- Relevansi:
 - Informasi keuangan harus relevan untuk pengambilan keputusan oleh pengguna.
- Keandalan:
 - Informasi harus dapat diandalkan, bebas dari kesalahan material, dan dapat diverifikasi.

- Komparabilitas:
 - Informasi harus dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan entitas lain.
- Dapat Dipahami:
 - Informasi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna.

5. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP):

- Peraturan Pemerintah dan Standar Akuntansi:
 - Mengacu pada peraturan dan standar akuntansi yang ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia.
- Adopsi IPSAS:
 - Beberapa negara mengadopsi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

6. Proses Penyusunan Laporan Keuangan:

- Langkah-Langkah Penyusunan:
 - Identifikasi dan pengakuan transaksi.
 - Pencatatan dalam jurnal dan buku besar.
 - Penyusunan neraca saldo.
 - Penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan.
- Jenis Laporan Keuangan:
 - Laporan Realisasi Anggaran
 - Neraca

- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan atas Laporan Keuangan

7. Teknologi dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan:

- Sistem Informasi Keuangan:
 - Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data keuangan.
 - Mendukung proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan transaksi keuangan.
- Integrasi dengan Sistem Lain:
 - Integrasi dengan sistem manajemen lainnya, seperti sistem perencanaan dan penganggaran, untuk memastikan aliran informasi yang konsisten dan akurat.

8. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi SAP:

- Tantangan:
 - Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.
 - Perubahan regulasi dan standar akuntansi.
 - Kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan kapasitas.
- Solusi:
 - Pengembangan kapasitas dan pelatihan bagi staf akuntansi.
 - Peningkatan investasi dalam teknologi informasi.
 - Penyesuaian regulasi dan standar untuk mendukung implementasi yang efektif.

D. Laporan Keuangan Pemerintah

1. Jenis-Jenis Laporan Keuangan Sektor Publik:

Laporan keuangan sektor publik menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas pemerintah. Berikut adalah jenis-jenis utama laporan keuangan sektor publik:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA):
 - o Menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
 - o Mengidentifikasi selisih antara anggaran dan realisasinya (varian).
- b. Neraca:
 - o Menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas entitas pemerintah pada akhir periode pelaporan.
 - o Memberikan gambaran posisi keuangan pemerintah.
- c. Laporan Operasional (LO):
 - o Menyajikan pendapatan dan beban selama periode pelaporan untuk menunjukkan surplus atau defisit operasional.
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE):
 - o Menyajikan perubahan dalam ekuitas selama periode pelaporan, termasuk surplus atau defisit operasional dan transaksi lain yang mempengaruhi ekuitas.
- e. Laporan Arus Kas (LAK):
 - o Menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan, yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

- f. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK):
 - o Memberikan penjelasan rinci dan tambahan informasi yang relevan untuk memahami laporan keuangan lainnya.
 - o Menyajikan kebijakan akuntansi yang digunakan dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan.

2. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA):

Laporan Realisasi Anggaran mencerminkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi pendapatan serta belanja pemerintah. Berikut adalah langkah-langkah penyusunannya:

- a. Pengumpulan Data:
 - o Mengumpulkan data mengenai anggaran yang telah ditetapkan serta data realisasi pendapatan dan belanja dari berbagai unit kerja.
- b. Pengakuan Pendapatan dan Belanja:
 - o Mengakui pendapatan ketika hak untuk menerima pendapatan timbul dan belanja ketika kewajiban untuk membayar timbul sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
- c. Pencatatan Transaksi:
 - o Mencatat transaksi pendapatan dan belanja dalam jurnal sesuai dengan periode terjadinya.
- d. Pengelompokan dan Pengikhtisaran:
 - o Mengelompokkan data pendapatan dan belanja sesuai dengan kategori anggaran yang telah ditetapkan.

- e. Penyusunan Laporan:
 - o Menyusun LRA dengan format yang menunjukkan anggaran, realisasi, dan varian untuk setiap pos pendapatan dan belanja.

3. Penyusunan Neraca Pemerintah:

Neraca Pemerintah menyajikan posisi keuangan entitas pemerintah pada akhir periode pelaporan. Berikut adalah langkah-langkah penyusunannya:

- a. Pengumpulan Data Aset dan Kewajiban:
 - o Mengumpulkan data mengenai semua aset (berupa kas, piutang, persediaan, investasi, dan aset tetap) dan kewajiban (berupa utang, biaya yang masih harus dibayar, dan kewajiban jangka panjang).
- b. Penilaian dan Pengakuan:
 - o Menilai aset dan kewajiban berdasarkan nilai wajar atau nilai historis sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.
 - o Mengakui aset dan kewajiban dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
- c. Pengelompokan Aset dan Kewajiban:
 - o Mengelompokkan aset dan kewajiban dalam kategori jangka pendek dan jangka panjang.
- d. Penyusunan Neraca:
 - o Menyusun neraca dengan format yang menunjukkan total aset, total kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan.

4. Penyusunan Laporan Arus Kas:

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Berikut adalah langkah-langkah penyusunannya:

- a. Pengumpulan Data Kas:
 - o Mengumpulkan data mengenai semua transaksi kas masuk dan keluar dari berbagai aktivitas (operasi, investasi, dan pendanaan).
- b. Klasifikasi Arus Kas:
 - o Mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.
- c. Penghitungan Arus Kas Bersih:
 - o Menghitung arus kas bersih dari setiap kategori aktivitas (operasional, investasi, dan pendanaan).
- d. Penyusunan Laporan:
 - o Menyusun Laporan Arus Kas dengan format yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar, serta saldo kas awal dan akhir periode.

5. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK):

Catatan atas Laporan Keuangan memberikan penjelasan rinci dan tambahan informasi mengenai pos-pos yang tercantum dalam laporan keuangan utama. Berikut adalah langkah-langkah penyusunannya:

- a. Pengumpulan Data:
 - o Mengumpulkan data yang relevan untuk penjelasan tambahan mengenai pos-pos laporan keuangan.
- b. Penyusunan Kebijakan Akuntansi:
 - o Menyusun dan menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

- c. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan:
 - o Menyusun penjelasan rinci untuk setiap pos laporan keuangan, termasuk metode penilaian, dasar pengakuan, dan estimasi yang digunakan.
- d. Penyusunan Catatan:
 - o Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan dengan format yang jelas dan rinci, mencakup semua informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

E. Basis Akuntansi di Sektor Publik

Basis akuntansi yang digunakan di sektor publik menentukan kapan transaksi keuangan diakui dan dicatat dalam laporan keuangan. Ada dua basis utama yang digunakan: basis akuntansi kas dan basis akuntansi akrual. Selain itu, banyak entitas pemerintah saat ini sedang bertransisi dari basis kas ke basis akrual.

1. Basis Akuntansi Kas

Basis akuntansi kas adalah metode di mana transaksi keuangan diakui dan dicatat pada saat kas diterima atau dibayarkan.

Karakteristik Utama:

- Pendapatan: Diakui saat kas diterima.
- Belanja: Diakui saat kas dibayarkan.
- Sederhana: Basis kas lebih mudah diterapkan dan dipahami.
- Kurang Akurat: Tidak mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya karena tidak mencatat aset dan kewajiban yang belum direalisasi.

Keuntungan:

- Sederhana dan mudah diterapkan: Memerlukan lebih sedikit sumber daya dan keahlian teknis.

- **Transparansi:** Menggambarkan aliran kas aktual, yang berguna untuk mengelola likuiditas.

Kekurangan:

- **Kurang Akurat:** Tidak mencerminkan kewajiban dan piutang yang belum diselesaikan.
- **Tidak Komprehensif:** Tidak memberikan gambaran lengkap tentang aset dan kewajiban.

2. Basis Akuntansi Akrua

Basis akuntansi akrual adalah metode di mana transaksi keuangan diakui dan dicatat pada saat terjadinya, terlepas dari kapan kas diterima atau dibayarkan.

Karakteristik Utama:

- **Pendapatan:** Diakui saat hak untuk menerima pendapatan timbul.
- **Belanja:** Diakui saat kewajiban untuk membayar timbul.
- **Komprehensif:** Mencatat semua aset, kewajiban, pendapatan, dan beban.
- **Relevansi:** Memberikan gambaran yang lebih akurat dan relevan tentang posisi keuangan dan kinerja.

Keuntungan:

- **Akurasi dan Relevansi:** Memberikan informasi yang lebih akurat tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan.
- **Transparansi:** Mencatat semua aset dan kewajiban, memberikan gambaran lengkap tentang keuangan.

Kekurangan:

- **Kompleksitas:** Memerlukan sumber daya dan keahlian teknis yang lebih tinggi.

- Biaya Implementasi: Biaya lebih tinggi dalam penerapan dan pemeliharaan.

3. Transisi dari Basis Kas ke Basis Akrual

Transisi dari basis kas ke basis akrual adalah proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang matang. Banyak pemerintah di seluruh dunia sedang atau telah melakukan transisi ini untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Langkah-Langkah Transisi:

- a. Perencanaan dan Persiapan:
 - Analisis Kebutuhan: Menilai kebutuhan dan manfaat dari transisi.
 - Pengembangan Rencana: Membuat rencana transisi yang mencakup langkah-langkah, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan.
- b. Pengembangan Kapasitas:
 - Pelatihan: Memberikan pelatihan kepada staf akuntansi dan keuangan tentang prinsip dan praktek akuntansi akrual.
 - Peningkatan Sistem: Mengembangkan atau mengupgrade sistem informasi keuangan untuk mendukung pencatatan akrual.
- c. Penyesuaian Kebijakan dan Prosedur:
 - Revisi Kebijakan: Menyesuaikan kebijakan akuntansi dan prosedur pencatatan sesuai dengan prinsip akrual.
 - Sosialisasi: Mengkomunikasikan perubahan kepada semua pemangku kepentingan.
- d. Implementasi Bertahap:
 - Tahap Uji Coba: Memulai dengan pilot project atau uji coba di beberapa unit kerja.

- Evaluasi dan Penyesuaian: Mengevaluasi hasil uji coba dan membuat penyesuaian yang diperlukan.
- e. Penerapan Penuh:
- Implementasi Penuh: Menerapkan basis akrual secara penuh di seluruh entitas pemerintah.
 - Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan kelancaran transisi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi.

Tantangan dalam Transisi:

- Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan.
- Kompleksitas Teknis: Memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip akrual.
- Resistensi Perubahan: Penolakan atau resistensi dari staf yang terbiasa dengan basis kas.

Manfaat Transisi:

- Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
- Keputusan yang Lebih Baik: Memberikan informasi yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan.
- Kepatuhan Internasional: Memungkinkan kepatuhan dengan standar internasional, seperti IPSAS.

Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Anggaran dan pengelolaan keuangan pemerintah mencakup perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan penggunaan sumber daya keuangan pemerintah

untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah poin-poin penting mengenai anggaran dan pengelolaan keuangan pemerintah:

1. Anggaran Pemerintah

Anggaran pemerintah adalah rencana keuangan tahunan yang mencerminkan kebijakan fiskal dan prioritas program pemerintah.

Proses Penyusunan Anggaran:

- a. Perencanaan:
 - o Identifikasi Prioritas: Mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas program serta proyek pemerintah.
 - o Estimasi Pendapatan: Memproyeksikan pendapatan yang akan diterima selama periode anggaran.
 - o Estimasi Belanja: Merencanakan alokasi belanja untuk program dan proyek berdasarkan prioritas yang telah ditentukan.
- b. Penyusunan:
 - o Rancangan Anggaran: Menyusun rancangan anggaran yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - o Pembahasan: Melakukan pembahasan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan persetujuan.
- c. Persetujuan:
 - o Pengajuan kepada Legislatif: Mengajukan rancangan anggaran kepada badan legislatif untuk disetujui.
 - o Persetujuan Anggaran: Mendapatkan persetujuan dari badan legislatif untuk diimplementasikan.

- d. Implementasi:
 - Penggunaan Anggaran: Menggunakan anggaran sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
 - Pengawasan dan Pengendalian: Melakukan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien.
- e. Pelaporan dan Evaluasi:
 - Pelaporan Realisasi: Melaporkan realisasi anggaran secara berkala.
 - Evaluasi: Mengevaluasi kinerja anggaran untuk perbaikan di masa mendatang.

2. Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Pengelolaan keuangan pemerintah mencakup semua aspek pengelolaan dana publik untuk memastikan penggunaan yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Komponen Pengelolaan Keuangan:

- a. Perencanaan Keuangan:
 - Strategi Fiskal: Menyusun strategi fiskal jangka pendek dan jangka panjang.
 - Proyeksi Keuangan: Membuat proyeksi pendapatan dan belanja untuk perencanaan anggaran yang lebih baik.
- b. Pengelolaan Pendapatan:
 - Kebijakan Pajak: Menetapkan kebijakan perpajakan untuk mengoptimalkan pendapatan.
 - Manajemen Penerimaan: Mengelola penerimaan dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dan hibah.

- c. Pengelolaan Belanja:
 - o Alokasi Belanja: Mengalokasikan dana untuk program dan proyek sesuai dengan prioritas.
 - o Kontrol Belanja: Melakukan kontrol dan pengawasan terhadap belanja untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan.

- d. Pengelolaan Utang:
 - o Strategi Pembiayaan: Menyusun strategi pembiayaan untuk mengelola utang pemerintah.
 - o Manajemen Utang: Mengelola utang dengan cara yang efektif untuk memastikan keberlanjutan fiskal.

- e. Pelaporan Keuangan:
 - o Laporan Keuangan: Menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.
 - o Transparansi: Menyajikan laporan keuangan dengan transparan untuk memastikan akuntabilitas.

- f. Pengendalian Internal dan Audit:
 - o Sistem Pengendalian Internal: Menerapkan sistem pengendalian internal untuk mengamankan aset dan memastikan keakuratan laporan keuangan.
 - o Audit Internal: Melakukan audit internal untuk memeriksa kepatuhan dan efisiensi pengelolaan keuangan.
 - o Audit Eksternal: Melibatkan auditor eksternal untuk memastikan keandalan laporan keuangan.

3. Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah

a. Transparansi dan Akuntabilitas:

- Menjamin bahwa semua transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan dengan benar.
- Meningkatkan transparansi untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana.

b. Efisiensi dan Efektivitas:

- Menggunakan sumber daya dengan cara yang paling efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- Mengukur kinerja untuk memastikan efektivitas program dan proyek.

c. Kepatuhan Terhadap Regulasi:

- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku.
- Menyesuaikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan perubahan regulasi.

d. Pengelolaan Risiko Keuangan:

- Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan.
- Menyusun strategi mitigasi risiko untuk melindungi keuangan pemerintah.

e. Kapabilitas SDM:

- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan dan akuntansi.
- Memberikan pelatihan dan pengembangan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan.

Teknologi Informasi dalam Akuntansi Sektor Publik

Penggunaan teknologi informasi (TI) dalam akuntansi sektor publik telah membawa berbagai perubahan signifikan yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai teknologi informasi dalam akuntansi sektor publik:

1. Sistem Informasi Keuangan Pemerintah (*Government Financial Management Information System - GFMS*)

Sistem Informasi Keuangan Pemerintah adalah platform berbasis teknologi yang digunakan untuk mengelola dan memproses data keuangan pemerintah.

Fungsi Utama:

- **Pengelolaan Anggaran:** Memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran.
- **Pencatatan Akuntansi:** Menyediakan modul akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- **Pelaporan Keuangan:** Menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif dan tepat waktu.

Keuntungan:

- **Efisiensi:** Mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk pemrosesan transaksi keuangan.
- **Akurasi:** Mengurangi kesalahan manual dalam pencatatan dan perhitungan.
- **Transparansi:** Memungkinkan akses yang mudah dan cepat ke informasi keuangan.

2. *E-Government* dan *E-Procurement*

E-Government: Implementasi teknologi informasi untuk menyediakan layanan pemerintah secara elektronik.

E-Procurement: Penggunaan platform digital untuk proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Manfaat:

- **Transparansi:** Mengurangi peluang korupsi dengan memberikan visibilitas penuh terhadap proses pengadaan.
- **Efisiensi:** Mempercepat proses pengadaan dan mengurangi biaya administrasi.
- **Aksesibilitas:** Memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari penyedia barang dan jasa.

3. Sistem Pengendalian Internal Berbasis TI

Penerapan teknologi informasi dalam sistem pengendalian internal membantu meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional.

Komponen Utama:

- **Otomatisasi Proses:** Mengotomatiskan proses pengawasan dan kontrol untuk mengurangi kesalahan manusia.
- **Pemantauan Real-Time:** Memungkinkan pemantauan aktivitas keuangan secara real-time untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan.
- **Pelacakan dan Audit Trail:** Menyediakan jejak audit yang lengkap untuk setiap transaksi keuangan, meningkatkan akuntabilitas.

4. Business Intelligence (BI) dan Data Analytics

Penggunaan alat *Business Intelligence* dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Fungsi Utama:

- **Analisis Kinerja:** Menganalisis data keuangan untuk mengukur kinerja program dan proyek pemerintah.

- **Prediksi dan Proyeksi:** Menggunakan analisis prediktif untuk memproyeksikan pendapatan dan belanja di masa mendatang.
- **Pengambilan Keputusan:** Memberikan informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung keputusan manajerial.

Keuntungan:

- **Insight yang Lebih Dalam:** Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tren dan pola dalam data keuangan.
- **Keputusan yang Lebih Cepat:** Mempercepat proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang mudah diakses dan diinterpretasikan.

5. *Cloud Computing* dalam Akuntansi Sektor Publik

Penerapan teknologi *cloud computing* untuk mengelola data dan aplikasi keuangan pemerintah.

Keuntungan:

- **Fleksibilitas:** Memungkinkan akses data keuangan dari mana saja dan kapan saja.
- **Skalabilitas:** Menyesuaikan kapasitas penyimpanan dan komputasi sesuai dengan kebutuhan.
- **Penghematan Biaya:** Mengurangi biaya infrastruktur TI dengan memanfaatkan layanan cloud.

6. *Blockchain* untuk Transparansi dan Keamanan

Penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pencatatan transaksi keuangan.

Keuntungan:

- Keamanan: Menyediakan mekanisme pencatatan yang aman dan tidak dapat diubah.
- Transparansi: Memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk melihat dan memverifikasi transaksi secara *real-time*.
- Keandalan: Meningkatkan keandalan data dengan menghilangkan risiko pemalsuan dan manipulasi data.

7. Tantangan dalam Penerapan Teknologi Informasi**Kompleksitas Implementasi:**

- Kebutuhan Sumber Daya: Memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur dan pelatihan SDM.
- Penyesuaian Kebijakan dan Prosedur: Perlu menyesuaikan kebijakan dan prosedur yang ada untuk mendukung teknologi baru.

Keamanan dan Privasi:

- Risiko Keamanan: Menghadapi risiko serangan siber dan pelanggaran data.
- Perlindungan Data: Memastikan perlindungan data sensitif dan privasi informasi keuangan.

Rangkuman

- Regulasi dan standar akuntansi sektor publik penting dalam mengatur pelaporan keuangan entitas publik melalui peraturan pemerintah dan undang-undang. Pedoman teknis dari badan pengawas keuangan, seperti BPK di Indonesia, juga turut mengarahkan praktik akuntansi sektor publik. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengikat semua entitas pemerintah untuk menyusun laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, termasuk format laporan seperti laporan realisasi anggaran dan neraca. Di samping itu, Standar Akuntansi Internasional untuk Sektor Publik (IPSAS) dirancang untuk meningkatkan kualitas pelaporan global, sering kali diadopsi atau disesuaikan oleh banyak negara untuk meningkatkan transparansi.
- Sistem Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang andal dan relevan, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Komponen utama sistem ini meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengendalian internal, dengan jenis-jenis sistem seperti kas dan akrual. Akrual khususnya memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan. Implementasi SAP menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan teknologi, dengan solusi termasuk pengembangan kapasitas dan peningkatan investasi teknologi untuk memperbaiki efisiensi dan akurasi.

Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan tujuan utama dari akuntansi sektor publik?
2. Apa perbedaan utama antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta?
3. Apa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan apa tujuan penerapannya?
4. Apa perbedaan utama antara basis akuntansi kas dan basis akuntansi akrual dalam konteks pengakuan pendapatan?
 - a. Basis kas mengakui pendapatan saat kas diterima, sedangkan basis akrual mengakui pendapatan saat hak untuk menerima pendapatan timbul.
 - b. Basis kas mengakui pendapatan saat kas diterima, sedangkan basis akrual mengakui pendapatan saat kas dibayarkan.
 - c. Basis kas lebih sederhana dibandingkan basis akrual dalam pengakuan pendapatan.
 - d. Basis akrual mengakui pendapatan sesuai dengan realisasi fisik, sedangkan basis kas tidak memperhatikan realisasi fisik.
5. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan keuntungan dari penggunaan basis akuntansi kas dalam sektor publik?
 - a. Sederhana dan mudah diterapkan.
 - b. Mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya.
 - c. Menggambarkan aliran kas aktual.
 - d. Memerlukan lebih sedikit sumber daya dan keahlian teknis.

6. Apa yang dimaksud dengan transisi dari basis akuntansi kas ke basis akuntansi akrual dalam sektor publik?
 - a. Proses pengalihan pengakuan pendapatan dari saat kas diterima menjadi saat hak untuk menerima pendapatan timbul.
 - b. Proses pengalihan pengakuan belanja dari saat kas dibayarkan menjadi saat kewajiban untuk membayar timbul.
 - c. Implementasi teknologi informasi dalam pencatatan keuangan.
 - d. Penyesuaian kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran.

7. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam transisi dari basis akuntansi kas ke basis akuntansi akrual?
 - a. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan.
 - b. Biaya lebih rendah dalam implementasi.
 - c. Kompleksitas yang lebih rendah dalam pengelolaan keuangan.
 - d. Penurunan akuntabilitas dan transparansi.



STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran

- ❖ Pembaca memahami prinsip dasar dan konsep yang mendasari Akuntansi Sektor Publik.
- ❖ Pembaca menguasai regulasi Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku di Indonesia.

Capaian Pembelajaran

- ❖ Pembaca mampu menerapkan serta memiliki keterampilan teknis dalam proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

- ❖ Mampu menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non keuangan serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi sektor publik.

DUMNMY

A. Pendahuluan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diharapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dan merupakan pedoman yang digunakan oleh pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terstruktur dalam system mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran dan pelaporan posisi keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 menggantikan PP. No. 24 Tahun 2005.

Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia mengalami beberapa kali pembaharuan dan penyesuaian yaitu:

1. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2016.
3. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2019.
4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2020.
5. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2021.
6. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2022.
7. *Government Accounting Standards Republik of Indonesia (handbook 2019)*
8. *Government Accounting Standards Republik of Indonesia (handbook 2020)*

B. Kerangka Konseptual

Tujuan Dan Ruang Lingkup

Rerangka konseptual akuntansi pemerintahan merupakan merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta sebagai acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan

keuangan, pemeriksaan, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan masalah

1. Tujuan Rerangka Konseptual Akuntansi Keuangan Pemerintah adalah sebagai acuan untuk:
 - a. Penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar.
 - c. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar
 - d. Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.
2. Rerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan.
3. Apabila terjadi pertentangan antara rerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap rerangka konseptual. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi pemerintahan di masa depan.

Ruang lingkup rerangka konseptual akuntansi pemerintah ini terdiri dari:

1. Tujuan rerangka konseptual,
2. Lingkungan akuntansi pemerintah,
3. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna,
4. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan,
5. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan dan dasar hukum,
6. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi

7. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya.

Pemakai Laporan Keuangan

Pemakai laporan keuangan pemerintah yaitu:

1. Masyarakat.
2. Wakil rakyat.
3. Lembaga pengawas.
4. Lembaga pemeriksa.
5. Donatur.
6. Investor.
7. Kreditur.
8. Pemerintah.
9. Pihak lainnya.

C. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

PSAP No. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Pernyataan No 01 Standar Akuntansi Pemerintah tentang Penyajian Laporan Keuangan mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, basis akuntansi, komponen laporan keuangan, struktur dan isi laporan keuangan.

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Umum Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi bagi para pengguna yang berkepentingan terhadap informasi entitas. Akuntansi pemerintah menyusun laporan keuangan yang bertujuan menyajikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, serta laporan perubahan ekuitas. Informasi keuangan yang disajikan bermanfaat bagi para pengguna untuk dapat mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya

pemerintah serta mendukung program akuntabilitas dan transparansi pemerintah.

Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan terdiri dari:

1. Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
2. Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
3. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Ketaatan realisasi terhadap anggaran.
5. Cara pemerintah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Untuk memenuhi tujuan umum laporan keuangan, maka laporan keuangan menyediakan informasi yang terdiri dari:

1. Aset.
2. Kewajiban.
3. Ekuitas.
4. Pendapatan – LRA (Laporan Realisasi Anggaran).
5. Belanja.
6. Transfer.
7. Pembayaran.
8. Saldo anggaran lebih.
9. Pendapatan – LO (Laporan Operasional).
10. Beban.
11. Arus Kas.

Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk mencapai tujuan umum laporan keuangan, akan tetapi masih perlu tambahan informasi non keuangan sebagai tambahan informasi yang lebih komprehensif tentang aktivitas entitas.

2. Komponen - Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan pertanggungjawaban kegiatan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sudah diatur dalam APBN dan APBD. Dalam laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber dan alokasi penggunaan dana atau sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari:

1. Pendapatan – LRA.
2. Belanja.
3. Transfer.
4. Surplus/defisit-LRA.
5. Pembiayaan.
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal.
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih.
3. Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan.
4. Koreksi/Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya.
5. Lain-lain.
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Entitas pelapor juga wajib menyajikan rincian lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan untuk unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih.

c. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelapor yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur-unsur yang disajikan dalam neraca yaitu:

1. Aset.
2. Kewajiban.
3. Ekuitas.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset terbagi kedalam aset lancar dan aset tidak lancar.

Kewajiban yaitu hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kategori kewajiban yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah. Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban.

Pos-pos dalam neraca juga menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, yaitu:

1. Kas dan setara kas.
2. Investasi jangka pendek.

3. Piutang pajak dan bukan pajak.
4. Persediaan.
5. Investasi jangka panjang.
6. Aset tetap.
7. Kewajiban jangka pendek.
8. Kewajiban jangka panjang.
9. Ekuitas.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional adalah laporan yang menunjukkan kinerja pemerintah dalam periode tertentu. Laporan operasional menyajikan pos-pos berikut:

1. Pendapatan LO dari kegiatan operasional.
2. Beban dari kegiatan operasional.
3. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional (apabila ada).
4. Pos luar biasa (apabila ada).
5. Surplus/defisit LO.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitor.

Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

1. Ekuitas Awal.
2. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan.
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir. Entitas pelaporan juga menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, yang harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Supaya dapat digunakan oleh pengguna, maka catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
3. Ikhtisar tentang pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
5. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam halaman depan laporan keuangan.
6. Informasi yang lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelapor, kecuali:

- a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas pelaporan yang Menyusun laporan keuangan konsolidasian.

PSAP 02: LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PSAP No. 02 mengatur tentang penyajian laporan realisasi anggaran.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan Standar Laporan Realisasi Anggaran adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah ditetapkan antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur dan Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan tentang informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus dan defisit LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Struktur laporan realisasi anggaran terdiri dari:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya.
- b. Cakupan entitas pelaporan.
- c. Periode yang dicakup.
- d. Mata uang pelaporan.
- e. Satuan angka yang digunakan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya dalam waktu satu tahun satu kali pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran mencakup:

- a. Pendapatan LRA.
- b. Belanja.
- c. Transfer.
- d. Surplus/defisit LRA.
- e. Penerimaan pembiayaan.
- f. Pengeluaran pembiayaan.
- g. Pembiayaan netto.
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA).

PSAP No.03 LAPORAN ARUS KAS

PSAP 03 mengatur tentang penyajian laporan arus kas.

Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar Laporan adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas

suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Arus Kas Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan pendanaan dari luar.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi diantaranya adalah:

- a. Penerimaan perpajakan.
- b. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
- c. Penerimaan hibah.
- d. Penerimaan bagian laba perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya.
- e. Penerimaan lain-lain/penerimaan dari pendapatan luar biasa.
- f. Penerimaan transfer.

Arus kas keluar dari aktivitas operasi diantaranya adalah:

- a. Pembayaran pegawai.
- b. Pembayaran barang.
- c. Pembayaran bunga.
- d. Pembayaran subsidi.
- e. Pembayaran hibah.
- f. Pembayaran bantuan sosial.
- g. Pembayaran lain-lain/kejadian luar biasa.
- h. Pembayaran transfer.

Arus Kas Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas. Arus aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas masuk dari aktivitas investasi diantaranya:

- a. Penjualan aset tetap.
- b. Penjualan aset lainnya.
- c. Pencairan dana cadangan.
- d. Penerimaan dan divestasi.
- e. Penjualan investasi dalam bentuk sekuritas.

Arus kas keluar dari aktivitas investasi adalah:

- a. Perolehan aset tetap.
- b. Perolehan aset lainnya.
- c. Pembentukan dana cadangan.
- d. Penyertaan modal pemerintah.
- e. Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas.

Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka Panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan atau utang jangka panjang. Arus kas aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka Panjang.

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan diantaranya:

- a. Penerimaan utang luar negeri.
- b. Penerimaan dari utang obligasi.
- c. Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah.
- d. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan diantaranya:

- a. Pembayaran utang luar negeri.
- b. Pembayaran pokok utang obligasi.
- c. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah.
- d. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.

Arus Kas Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PSAP No.04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PSAP No.04 mengatur tentang penyajian dan pengungkapan yang diperlukan dalam catatan atas laporan keuangan. Isi dari PSAP No. 04 terdiri dari ketentuan umum serta struktur dan isi dari catatan atas laporan keuangan.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan Pernyataan Standar Catatan Atas Laporan Keuangan adalah untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, sedangkan tujuan penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

Standar harus diterapkan pada:

1. Laporan Keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan
2. Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk tujuan umum entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan.

Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan.

Struktur dan Isi

Catatan Atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Informasi Yang Diungkapkan

Informasi yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi:

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan dan ekonomi makro.

- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam laporan keuangan.
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

PSAP No. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN

PSAP No. 05 mengatur tentang perlakuan akuntansi terhadap persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah yang meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian, pengungkapannya. Dalam PSAP No. 05 persediaan adalah aset yang berupa: barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Jenis-jenis persediaan meliputi:

- a. Barang konsumsi.
- b. Amunisi.
- c. Bahan untuk pemeliharaan.
- d. Suku cadang.
- e. Persediaan untuk tujuan strategis (berjaga-jaga).

- f. Pita cukai dan leges.
- g. Bahan baku.
- h. Barang dalam proses atau setengah jadi
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c. Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya (misalnya dari donasi).

Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode:

- a. *First In First Out* (FIFO) .
- b. Rata-rata tertimbang.
- c. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Pengungkapan Persediaan

Laporan keuangan mengungkapkan tentang:

- a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, serta barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

PSAP No. 06 AKUNTANSI INVESTASI

Investasi yaitu aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, dan manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. PSAP No. 06 mengatur tentang perlakuan akuntansi terhadap investasi yang terdiri dari: pengakuan pengukuran, penilaian serta pelepasan investasi.

Pengakuan Investasi

Investasi diakui sebesar pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi apabila:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara handal.

Pengukuran Investasi

Beberapa jenis pengukuran investasi yang dapat digunakan adalah:

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga seperti saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehan.

- b. Investasi dalam surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan maka dicatat sebesar nilai wajar.
- c. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (misal: deposito angka pendek) dicatat sebesar nilai nominal.
- d. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, dicatat sebesar harga perolehan.
- e. Investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat sebesar nilai perolehan.

Penilaian Investasi

Metode penilain investasi terdiri dari:

- a. Metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan serta hasil investasi tidak mempengaruhi besarnya investasi.
- b. Metode ekuitas, adalah metode penilaian dimana investasi awalnya dicatat berdasarkan harga perolehan, dan bagian laba atau rugi akan menambah atau mengurangi investasi.
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu investasi dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Pelepasan Investasi

Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berupa penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit surat berharga obligasi, dan lain-lain.

PSAP No.07 AKUNTANSI ASET TETAP

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk

digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. PSAP No.07 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap aset tetap seperti: pengakuan, penentuan nilai tercatat, penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Klasifikasi Aset Tetap

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasional pemerintah, seperti bahan (material) dan perlengkapan. Klasifikasi aset tetap terdiri dari:

- a. Tanah.
- b. Peralatan dan mesin.
- c. Gedung dan bangunan.
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan.
- e. Aset tetap lainnya.
- f. Konstruksi dalam pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria:

- a. Berwujud.
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- c. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal.
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan, yaitu kas atau setara dengan kas yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperoleh aset tetap baik yang dibeli atau dibangun.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap akan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan sudah tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PSAP No.08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah dan masih dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu. Perolehannya melalui suatu kontrak konstruksi yang disepakati. PSAP No.08 mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan. Perolehan aset tetap jenis konstruksi dalam pengerjaan dengan cara dibangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan apabila:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara handal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan dicatat berdasarkan biaya perolehan. Apabila konstruksi dikerjakan secara swakelola, maka biaya konstruksi terdiri dari:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi
Biaya yang berhubungan langsung adalah:
 - Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia.
 - Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi.
 - Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke dalam lokasi pelaksanaan konstruksi.
 - Biaya penyewaan sarana dan peralatan.
 - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut. Kategori biaya yang diatribusikan adalah:
 - Asuransi.
 - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
 - Biaya-biaya yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi seperti biaya inspeksi.
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya konstruksi melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi yang dibiayai dengan pinjaman, maka bunga pinjaman yang timbul selama masa konstruksi akan dikapitalisasi dan menambah biaya perolehan kontrak konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara handal.

PSAP No.09 AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak pada masa lalu.

Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kewajiban jangka pendek, adalah kewajiban yang diharapkan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Jenis kewajiban jangka pendek:

- Utang kepada pihak ketiga
- Utang transfer
- Utang bunga
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- Bagian lancar utang jangka panjang
 - Kewajiban lancar lainnya
- b. Kewajiban jangka Panjang, adalah kewajiban yang diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan handal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah, atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban akan dicatat sebesar nilai nominal, yaitu nilai kewajiban pemerintah pertama kali pada saat berlangsungnya transaksi yang menimbulkan kewajiban seperti misalnya nilai yang tercantum dalam lembar utang pemerintah (obligasi). Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos kewajiban, antara lain:

- a. Utang kepada pihak ketiga, kewajiban dicatat sebesar jumlah yang belum dibayar oleh pemerintah.
- b. Utang transfer, nilai kewajiban dicatat sebesar kewajiban yang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c. Utang bunga, akan dicatat senilai biaya bunga yang telah terjadi dan belum terbayar.

- d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dicatat sebesar jumlah pungutan atau potongan PFK yang dilakukan pemerintah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
- e. Bagian lancar utang jangka panjang, dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang dari tanggal pelaporan.
- f. Kewajiban lancar lainnya dicatat sebesar biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
- g. Utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan, dicatat sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian.
- h. Utang pemerintah yang diperjualbelikan, dicatat sebesar nilai pari dengan mempertimbangkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari, sedangkan sekuritas yang dijual dengan diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo. Sekuritas yang dijual dengan harga premium, akan berkurang nilainya.

Perubahan Valuta Asing

Utang pemerintah dalam valuta asing atau mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyelusian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (call future) oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya

maka selisih antara harga perolehan Kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

PSAP No.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Kebijakan Akuntansi

Standar Akuntansi Pemerintahan menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tidak perlu diterapkan Ketika dampak penerapannya tidak material. Ketika suatu PSAP secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi tertentu, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan PSAP yang dimaksud. Dalam hal tidak ada PSAP yang spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu entitas menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi dengan mengacu pada sumber-sumber berikut:

- a. Ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait.
- b. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam Rerangka Konseptual.

Konsistensi Kebijakan Akuntansi

Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengijinkan pengelompokkan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang

berbeda merupakan hal yang tepat. Apabila suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diharapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu entitas mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:

- a. Disyaratkan oleh suatu PSAP.
- b. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Suatu perubahan dari satu basis akuntansi ke basis akuntansi lainnya termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Penerapan perubahan kebijakan akuntansi tergantung pada:

- a. Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut (jika ada).
- b. Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.

Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan saldo awal ekuitas dan setiap komponen yang terpengaruh untuk periode penyajian tahun berjalan seolah-olah kebijakan akuntansi baru sudah

diterapkan sebelumnya. Apabila terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian Kembali laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk diterbitkan.

PSAP No.11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PSAP No.11 mengatur tentang penyajian laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintah dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Dalam PSAP No.11 diatur tentang penyajian laporan keuangan konsolidasian, entitas pelaporan, entitas akuntansi badan layanan umum, prosedur konsolidasian, dan pengungkapan.

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Pemerintah pusat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua kementerian negara/Lembaga kepada lembaga legislatif, sedangkan pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada Lembaga legislatif.

Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran.
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau dipilih oleh rakyat.
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Prosedur Konsolidasi

Konsolidasi dilakukan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan saldo masing-masing akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Pengungkapan

Pengungkapan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tentang nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing entitas pelapor maupun entitas akuntansi. Apabila konsolidasian tidak disertai dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik, serta disebutkan alasan belum dilaksanakannya eliminasi

PSAP No. 12 LAPORAN OPERASIONAL

Definisi Laporan Operasional

Laporan operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Penyusunan laporan operasional dilakukan untuk melengkapi siklus pelaporan yang saling terkait diantara laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintah.

Periode Pelaporan

Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pada situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, maka entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat dibandingkan.

Manfaat laporan operasional berkurang apabila laporan tersebut tidak tersedia tepat waktu, sehingga diharapkan entitas akan menyusun laporan operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Standar Akuntansi Pemerintah.

Struktur Laporan Operasional

Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan LO
- b. Beban

- c. Surplus/defisit dari operasi
- d. Kegiatan non operasional
- e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
- f. Pos luar biasa
- g. Surplus/defisit LO

Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan operasional wajar.

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi (adanya aliran masuk sumber daya ekonomi). Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan seperti jenis pendapatan (pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, pendapatan hibah).

Beban diakui pada saat timbul kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Surplus/defisit non operasi adalah surplus atau defisit yang timbul dari transaksi kegiatan non operasi. Contoh surplus/defisit non operasi adalah surplus penjualan aset non lancar atau defisit penjualan aset non lancar.

Surplus/Defisit kegiatan operasi adalah selisih lebih atau selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik:

- Kejadian yang tidak dapat diprediksi kejadiannya pada awal tahun anggaran.
- Tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang

- Kejadian yang terjadi diluar kendali entitas pemerintah.

PSAP No.13 AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Definisi Dan Karakteristik BLU

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi pemerintah di lingkungan pemerintah pusat/daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan serta dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Sebagai instansi pemerintah, BLU menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangan. Badan Layanan Umum adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBN/APBD.
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk.
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.
- e. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan.
- f. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga.
- g. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

- h. Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah.
- i. Laporan keuangan BLU diaudit dan diberikan opini oleh auditor eksternal.

Tujuan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan BLU bertujuan untuk:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas BLU.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi BLU untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLU.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLU dalam mendanai aktivitasnya.

Komponen Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan Keuangan BLU merupakan laporan yang memberikan informasi tentang sumber ekonomi dan kewajiban BLU, serta arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Komponen Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- c. Neraca.

- d. Laporan Operasional.
- e. Laporan Arus Kas.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas.
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

PSAP No. 14 AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD

Definisi dan Jenis Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset yang dimiliki oleh pemerintah yang berupa aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Jenis-jenis aset tak berwujud:

- a. Perangkat lunak.
- b. *Franchise*.
- c. Hak Paten dan Hak Cipta.
- d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka Panjang.
- e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
- f. ATB dalam pengerjaan.

Berdasarkan cara pemeroleh, ATB dapat berasal dari:

- a. Pembelian.
- b. Pengembangan secara internal.
- c. Pertukaran.
- d. Kerjasama.
- e. Donasi/Hibah.
- f. Warisan Budaya/Sejarah.

Pengakuan Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud diakui jika:

- a. Dapat diidentifikasi.
- b. Dikendalikan, dikuasi, atau dimiliki oleh entitas.
- c. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada entitas.
- d. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan handal.

Pengakuan aset tak berwujud yang diperoleh secara internal apabila memenuhi kriteria untuk pengakuan perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

- a. Tahap penelitian/riset.
- b. Tahap pengembangan.

Aktiva tak berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika pemerintah dapat memperlihatkan seluruh seluruh kondisi berikut:

- Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- Manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan;
- Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
- Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Pengeluaran untuk kegiatan atau aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai ATB.

Pengendalian Aset Tak Berwujud

Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset, maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Pengendalian aset ini adalah dari sisi dokumen hukum yang sah dari lembaga berwenang.

Pengukuran Aset Tak Berwujud

Pengukuran awal aktiva tak berwujud (ATB) dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar nilai wajar saat perolehan. Aktiva tak berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasar biaya perolehan yang terdiri dari harga beli termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tak berwujud tersebut.

Aset tak berwujud disajikan sebesar nilai tercatatnya yaitu biaya perolehan aktiva tak berwujud dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB sama dengan penyusutan aktiva tetap berwujud yang dipengaruhi oleh masa manfaat, Masa manfaat dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Amortisasi hanya dapat diterapkan untuk ATB yang memiliki masa manfaat yang terbatas.

Penghentian dan Pelepasan Aktiva Tak Berwujud

Aktiva tak berwujud yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya. ATB yang

dihentikan secara permanen atau dilepaskan harus dikeluarkan dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pelepasan atau penghentian secara permanen dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

PSAP No. 15 PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

1. Definisi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan merupakan peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan.
- b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan.

2. Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan yaitu tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan, sedangkan tanggal laporan keuangan diotorisasi adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor.

Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda, tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

3. Pengakuan dan Pengukuran

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit pemerintah kemungkinan akan mengumumkan kebijakan yang dapat berampak pada penyajian atau pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan akan tetapi hal ini akan tergantung pada:

- a. Apakah kejadian atau peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan.
- b. Apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

PSAP No.16 PERJANJIAN KONSENSI JASA-PEMBERI KONSENSI

Definisi Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa layanan publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi. Perjanjian konsesi jasa mengikat antara pemberi konsesi dengan mitra dalam hal:

- a. Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu.
- b. Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Entitas pemberi konsesi adalah entitas pemerintah pusat/daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa pada mitra. Sedangkan mitra merupakan operator yang berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan alat konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya.
- b. Pemberi konsesi mengendalikan setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui sebesar nilai wajar. Pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikan tersebut sebagai aset konsesi sebesar nilai tercatat aset.

Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban

Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra .

Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa dan disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dengan mitra.

Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

- a. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan.
- b. Pemberian hak usaha kepada mitra, misalnya:

- Pemberian kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa.
- Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, sebagai contoh: pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik.

PSAP No.17 PROPERTI INVESTASI

PSAP No.17 mengatur tentang perlakuan akuntansi properti investasi yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum.

Definisi Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset keduanya dan tidak untuk:

- a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi untuk penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif;
- b. Dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Sebagai contoh pemerintah mengelola portfolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini properti yang dimiliki oleh entitas, selain digunakan sendiri atau dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi sebagai properti investasi.

Contohnya properti investasi:

- a. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka Panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan.
- c. Bangunan yang dimiliki oleh entitas dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- d. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- e. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi.

Pengakuan Properti Investasi

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi.
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan handal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut

Pengukuran Awal Properti Investasi

Pengukuran awal properti investasi adalah sebesar biaya perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas untuk memperoleh properti investasi (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal). Jika properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, maka properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat di distribusikan secara langsung.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Setelah pengakuan awal properti investasi, maka pengukurannya adalah sebagai berikut:

- Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- Properti investasi kecuali tanah, disusutkan dengan metode depresiasi sesuai PSAP yang mengatur Aset Tetap.
- Revaluasi atau penilaian kembali properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi

dilaksanakan, jika dan hanya jika properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

- Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai pada tanggal yang berbeda.
- Pada saat revaluasi properti investasi dinilai berdasarkan nilai wajar.

Alih Guna Properti Investasi

Alih guna dari atau ke dalam properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- a. Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap.
- b. Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan.
- c. Berakhirnya pemakaian aset oleh pemerintah atau entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi.
- d. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Pelepasan Properti Investasi

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

Rangkuman

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diharapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dan merupakan pedoman yang digunakan oleh pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terstruktur dalam system mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran dan pelaporan posisi keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 menggantikan PP No.24 Tahun 2005.

Standar Akuntansi Pemerintah yang digunakan di Indonesia saat ini menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2022, yang di dalamnya berisi tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1-17. PSAP mengatur tentang Penyajian Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Akuntansi Persediaan, Akuntansi Investasi, Akuntansi Aset Tetap, Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, Akuntansi Kewajiban, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan, Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Operasional, Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Akuntansi Aset Tak Berwujud, Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, Perjanjian Konsensi Jasa-Pemberi Konsesi, dan Akuntansi Properti Investasi.

Dalam setiap PSAP mengatur tentang bagaimana penyajian laporan keuangan, cara-cara penyusunan laporan keuangan (pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan dari setiap akun), serta kebijakan akuntansi yang digunakan. Tujuan dari PSAP ini agar entitas pemerintah mampu Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar dan prosedur yang sudah ditetapkan.

DUMNMY

Latihan Soal

1. Apa yang anda ketahui tentang rerangka konseptual akuntansi pemerintahan?
2. Sebutkan bentuk-bentuk laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)!
3. Apa yang dimaksud dengan transaksi transitoris?
4. Jelaskan siapa saja pengguna laporan keuangan pemerintah!
5. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan laporan keuangan konsolidasi pemerintah?

DUMMMY



LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran

- ❖ Memahami Konsep Dasar Laporan Keuangan Sektor Publik.
- ❖ Menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- ❖ Mengerti Proses Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik.

Capaian Pembelajaran

- ❖ Menjelaskan secara komprehensif konsep dan komponen utama laporan keuangan sektor publik.
- ❖ Mengidentifikasi perbedaan utama antara laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta.

- ❖ Memahami penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam konteks penyusunan laporan keuangan.
- ❖ Menguraikan proses penyusunan laporan keuangan sektor publik dari pencatatan transaksi.

DUMNMY

A. Definisi Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan sektor publik adalah laporan yang disusun oleh entitas publik (pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah, dan lembaga publik lainnya) untuk memberikan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel mengenai penggunaan dan pengelolaan sumber daya publik. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang posisi keuangan, kinerja, serta arus kas suatu entitas publik dalam satu periode tertentu, yang berguna bagi para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan dan pengawasan.

1. Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan sektor publik terdiri dari berbagai komponen utama, antara lain:

- **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**
Menginformasikan mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.
- **Neraca**
Menunjukkan posisi keuangan entitas publik pada akhir periode, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas.
- **Laporan Operasional**
Menggambarkan kinerja keuangan entitas publik dengan menginformasikan pendapatan dan beban yang diakui dalam periode tertentu.
- **Laporan Perubahan Ekuitas**
Menyajikan perubahan ekuitas entitas publik selama periode tertentu.
- **Laporan Arus Kas**
Menunjukkan aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu, dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan.

- Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
Memberikan penjelasan rinci dan tambahan informasi terkait dengan pos-pos dalam laporan keuangan.

2. Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta

a. Tujuan Laporan:

- Sektor Publik

Menyediakan informasi untuk akuntabilitas publik dan pengambilan keputusan oleh masyarakat, parlemen, dan auditor. Fokus pada transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana publik.

- Sektor Swasta

Memberikan informasi kepada pemegang saham, kreditur, dan investor untuk pengambilan keputusan ekonomi. Fokus pada profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan.

b. Sumber Pendapatan:

- Sektor Publik

Pendapatan utama berasal dari pajak, retribusi, hibah, dan pendapatan lainnya yang tidak bersifat komersial.

- Sektor Swasta

Pendapatan utama berasal dari penjualan barang atau jasa dalam aktivitas komersial.

c. Basis Akuntansi:

- Sektor Publik

Sering menggunakan basis akrual atau basis kas, tergantung pada kebijakan pemerintah atau regulasi yang berlaku.

- Sektor Swasta

Umumnya menggunakan basis akrual, di mana pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan.

d. Pengguna Laporan:

- Sektor Publik

Masyarakat umum, legislatif, auditor, dan lembaga pengawas lainnya.

- Sektor Swasta

Pemegang saham, investor, kreditur, dan manajemen perusahaan.

e. Regulasi dan Standar Akuntansi:

- Sektor Publik

Mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh badan standar akuntansi pemerintahan, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia.

- Sektor Swasta

Mengikuti standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh badan standar akuntansi, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

f. Kepemilikan dan Akuntabilitas:

- Sektor Publik

Dimiliki oleh publik dan bertanggung jawab kepada masyarakat serta lembaga pengawas.

- Sektor Swasta

Dimiliki oleh individu atau kelompok swasta dan bertanggung jawab kepada pemegang saham serta kreditur.

B. Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi keuangan yang terjadi selama periode tertentu. Laporan ini penting karena memberikan gambaran tentang bagaimana dana publik digunakan dan sejauh mana realisasi tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- Tujuan
Memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah.
- Komponen Utama
Pendapatan, belanja, surplus/defisit anggaran, pembiayaan, dan saldo anggaran lebih/kurang.
- Fungsi
Membantu pengambilan keputusan, memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi tentang perubahan dalam Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang terjadi selama periode tertentu. SAL adalah saldo dari anggaran yang tidak terpakai yang dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

- Tujuan
Menyediakan informasi mengenai penambahan atau pengurangan dalam SAL.
- Komponen Utama
Saldo awal, penambahan SAL dari surplus anggaran, penggunaan SAL untuk pembiayaan, dan saldo akhir.

- Fungsi

Memberikan gambaran mengenai fleksibilitas keuangan pemerintah dan potensi pembiayaan di masa depan.

3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan pemerintah pada akhir periode akuntansi tertentu. Laporan ini mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.

- Tujuan

Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah yang mencerminkan aset yang dimiliki dan kewajiban yang harus dibayar.

- Komponen Utama:

Aset: Aset lancar (kas, piutang), aset tetap (bangunan, tanah), dan aset lainnya.

Kewajiban: Kewajiban jangka pendek (utang jangka pendek), kewajiban jangka panjang (utang jangka panjang).

Ekuitas: Saldo anggaran lebih, cadangan, dan ekuitas lainnya.

- Fungsi

Menilai stabilitas dan likuiditas keuangan pemerintah, serta dasar untuk penilaian kinerja keuangan.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi tentang hasil operasional pemerintah dalam satu periode, termasuk pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan dalam menjalankan fungsinya.

- Tujuan
Menyediakan informasi tentang kinerja operasional dan efisiensi penggunaan sumber daya.
- Komponen Utama:
Pendapatan (pajak, retribusi), beban operasional (belanja pegawai, belanja barang dan jasa), surplus/defisit operasional.
- Fungsi:
Membantu dalam mengevaluasi kinerja operasional dan efisiensi pengelolaan sumber daya publik.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi tentang aliran kas masuk dan keluar dalam periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana arus kas digunakan untuk aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan.

- Tujuan
Menyediakan informasi mengenai kemampuan pemerintah dalam menghasilkan dan menggunakan kas.
- Komponen Utama:
Arus Kas dari Aktivitas Operasi: Penerimaan dari pajak, pembayaran gaji.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi: Pembelian aset tetap, penjualan aset.
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan: Penerimaan pinjaman, pembayaran utang.
- Fungsi
Menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan pemerintah.

6. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah komponen yang memberikan informasi tambahan dan penjelasan yang lebih rinci mengenai pos-pos dalam laporan keuangan utama.

- Tujuan

Memberikan konteks dan penjelasan yang lebih mendalam mengenai angka-angka dalam laporan keuangan.

- Komponen Utama:

Penjelasan Pos-Pos Utama: Detail mengenai aset, kewajiban, pendapatan, dan belanja.

Kebijakan Akuntansi: Metode akuntansi yang digunakan.

Informasi Tambahan: Penjelasan mengenai kejadian luar biasa, komitmen, dan kontingensi.

- Fungsi

Meningkatkan transparansi dan pemahaman mengenai laporan keuangan, serta mendukung keputusan ekonomi yang lebih baik.

C. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1. Pengertian dan Tujuan SAP

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip dan prosedur yang ditetapkan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan oleh entitas pemerintah, sehingga dapat diandalkan, relevan, dan dapat dibandingkan. Tujuan utama dari penerapan SAP adalah untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Tujuan-tujuan spesifik dari SAP meliputi:

a. Penyajian Informasi yang Andal:

Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan pemerintah.

b. Relevansi Informasi

Menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

c. Komparabilitas

Memungkinkan perbandingan kinerja keuangan antar periode dan antar entitas pemerintah.

d. Konsistensi

Mendorong penggunaan metode akuntansi yang konsisten dari waktu ke waktu.

e. Transparansi

Meningkatkan keterbukaan dalam pelaporan keuangan sehingga dapat diaudit dan diverifikasi.

2. Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Diterapkan dalam SAP

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam SAP mencakup beberapa elemen dasar yang harus diikuti oleh entitas pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Prinsip Akrua

Dalam prinsip ini, pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Hal ini berarti pendapatan diakui saat diperoleh dan beban diakui saat terjadi.

b. Prinsip Konsistensi

Metode dan prosedur akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten dari periode ke periode untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dibandingkan secara berarti.

c. Prinsip Materialitas

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus cukup penting sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Item yang tidak material tidak perlu dipisahkan secara khusus dalam laporan keuangan.

d. Prinsip Kehati-hatian (Prudence)

Dalam menghadapi ketidakpastian, pemerintah harus berhati-hati dalam membuat estimasi dan pengakuan pendapatan atau beban, untuk memastikan bahwa aset dan pendapatan tidak terlalu dilebih-lebihkan dan kewajiban serta beban tidak terlalu diremehkan.

e. Prinsip Entitas

Laporan keuangan harus mencerminkan kegiatan ekonomi dari entitas yang menyusunnya dan tidak boleh mencampurkan dengan kegiatan ekonomi entitas lain.

f. Prinsip Kelangsungan Usaha

Dalam penyusunan laporan keuangan, diasumsikan bahwa entitas pemerintah akan terus beroperasi dalam jangka panjang dan tidak ada niat atau kebutuhan untuk melikuidasi atau secara material mengurangi skala operasi.

D. Standar Akuntansi yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik mencakup beberapa standar utama yang harus dipatuhi oleh entitas pemerintah. Beberapa standar utama tersebut adalah:

1. Penyajian Laporan Keuangan

Pemerintah Mengatur tentang struktur, format, dan isi laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas pemerintah, termasuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Menyediakan panduan tentang penyajian anggaran dan realisasi anggaran, termasuk format dan komponen-komponen yang harus ada dalam laporan ini.

3. Laporan Arus Kas

Mengatur penyajian laporan arus kas, termasuk klasifikasi arus kas dalam aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan.

4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Menyediakan pedoman untuk penyusunan laporan yang menggambarkan perubahan dalam saldo anggaran lebih selama periode tertentu.

5. Laporan Operasional

Menyediakan panduan penyusunan laporan operasional yang mencakup pendapatan dan beban operasional pemerintah.

6. Neraca

Mengatur penyajian posisi keuangan pemerintah, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menyediakan panduan untuk menyusun catatan tambahan yang mendukung informasi dalam laporan keuangan utama, memberikan penjelasan dan rincian yang diperlukan.

E. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik

Penyusunan laporan keuangan sektor publik melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut adalah tahapan penyusunan laporan keuangan sektor publik beserta deskripsi singkatnya:

1. Pencatatan Transaksi Keuangan

- a. Mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode akuntansi.
- b. Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran.
- c. Menyusun jurnal dan buku besar.

2. Penyusunan dan Konsolidasi Laporan Keuangan

- a. Menyusun laporan keuangan individual untuk setiap unit organisasi.
- b. Menggabungkan laporan keuangan dari berbagai unit menjadi satu laporan keuangan konsolidasi.
- c. Menyusun laporan posisi keuangan, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

3. Review dan Audit Internal

- a. Melakukan review awal atas laporan keuangan untuk memastikan tidak ada kesalahan.
- b. Mengadakan audit internal untuk memverifikasi keakuratan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi.

4. Penyajian dan Publikasi Laporan Keuangan
 - a. Menyusun laporan keuangan dalam format yang sesuai dengan regulasi dan standar akuntansi.
 - b. Menyampaikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, dewan pengawas, dan masyarakat.
 - c. Mempublikasikan laporan keuangan untuk transparansi dan akuntabilitas.

F. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik

Penyusunan laporan keuangan sektor publik melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut adalah tahapan penyusunan laporan keuangan sektor publik beserta deskripsi singkatnya:

1. Pencatatan Transaksi Keuangan
 - Mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode akuntansi.
 - Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran.
 - Menyusun jurnal dan buku besar.
2. Penyusunan dan Konsolidasi Laporan Keuangan
 - Menyusun laporan keuangan individual untuk setiap unit organisasi.
 - Menggabungkan laporan keuangan dari berbagai unit menjadi satu laporan keuangan konsolidasi.
 - Menyusun laporan posisi keuangan, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

3. Review dan Audit Internal

- Melakukan review awal atas laporan keuangan untuk memastikan tidak ada kesalahan.
- Mengadakan audit internal untuk memverifikasi keakuratan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi.

4. Penyajian dan Publikasi Laporan Keuangan

- Menyusun laporan keuangan dalam format yang sesuai dengan regulasi dan standar akuntansi.
- Menyampaikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, dewan pengawas, dan masyarakat.
- Mempublikasikan laporan keuangan untuk transparansi dan akuntabilitas.

G. Penggunaan Teknologi dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Teknologi telah memainkan peran yang semakin penting dalam penyusunan laporan keuangan, memberikan berbagai manfaat yang signifikan dan memfasilitasi proses yang lebih efisien dan akurat. Berikut adalah penjelasan rinci tentang manfaat teknologi dalam proses penyusunan laporan keuangan, penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMDA), dan implementasi *e-budgeting* serta *e-reporting*.

Manfaat Teknologi dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan

1. Efisiensi Proses

- Otomatisasi

Teknologi memungkinkan otomatisasi proses pencatatan transaksi, pengolahan data, dan penyusunan laporan keuangan, yang mengurangi kebutuhan akan intervensi manual dan mempercepat penyelesaian tugas.

- Penghematan Waktu
Dengan sistem otomatis, pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam dapat diselesaikan dalam hitungan menit.
2. Akurasi dan Konsistensi
 - Pengurangan Kesalahan Manusia
Otomatisasi dan sistem berbasis teknologi mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pencatatan dan penghitungan.
 - Validasi Data
Teknologi memungkinkan validasi otomatis data, memastikan bahwa informasi yang dicatat akurat dan konsisten.
 3. Aksesibilitas dan Transparansi
 - *Real-Time Reporting*
Teknologi memungkinkan pelaporan keuangan secara *real-time*, memberikan gambaran terkini tentang kondisi keuangan.
 - Akses Jarak Jauh
Dengan sistem berbasis *cloud*, pengguna dapat mengakses informasi keuangan dari mana saja dan kapan saja.
 4. Analisis yang Lebih Mendalam
 - *Big Data Analytics*
Teknologi memungkinkan pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar, memberikan wawasan yang lebih mendalam dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis.

- *Forecasting dan Modelling*

Sistem berbasis teknologi dapat digunakan untuk melakukan peramalan keuangan dan model keuangan yang lebih kompleks.

Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMDA)

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien. Fungsi SIMDA yaitu :

1. Perencanaan dan Penganggaran

Membantu dalam menyusun anggaran daerah, memastikan alokasi dana yang tepat dan sesuai dengan rencana kerja.

2. Pencatatan Transaksi Keuangan

Mencatat semua transaksi keuangan secara sistematis dan akurat.

3. Pelaporan Keuangan

Menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

4. Monitoring dan Evaluasi

Memungkinkan pemantauan penggunaan anggaran dan evaluasi kinerja keuangan secara berkala.

Manfaat SIMDA

1. Peningkatan Efisiensi

Mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi proses pengelolaan keuangan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Kemudahan Akses Data

Memberikan akses mudah dan cepat ke data keuangan yang diperlukan.

Implementasi *e-Budgeting* dan *e-Reporting*

a) *e-Budgeting*

e-Budgeting adalah sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk menyusun, mengelola, dan memonitor anggaran secara elektronik.

Implementasi

- Perencanaan Anggaran

Sistem ini memungkinkan perencanaan anggaran yang lebih akurat dan terintegrasi.

- Pengawasan

Memungkinkan pengawasan real-time terhadap alokasi dan penggunaan anggaran.

Manfaat:

- Transparansi

Meningkatkan transparansi dalam proses penganggaran.

- Efisiensi

Mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran.

b) *e-Reporting*

e-Reporting adalah sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara elektronik.

Implementasi

- Penyusunan Laporan
Mengotomatiskan proses penyusunan laporan keuangan.
- Distribusi Laporan
Memungkinkan distribusi laporan keuangan kepada pemangku kepentingan secara cepat dan efisien.

Manfaat

- *Real-Time Reporting*
Memungkinkan pelaporan keuangan secara *real-time*, memberikan informasi terkini kepada pengguna.
- Aksesibilitas
Memudahkan akses ke laporan keuangan dari berbagai lokasi dan perangkat.

DUMINY

Rangkuman

Laporan keuangan sektor publik disusun oleh entitas publik (pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan lembaga publik lainnya) untuk memberikan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel mengenai penggunaan dan pengelolaan sumber daya publik. Laporan ini bertujuan untuk menggambarkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas publik selama periode tertentu, yang memfasilitasi pengambilan keputusan dan pengawasan oleh para pemangku kepentingan.

Komponen-komponen dari laporan keuangan sektor publik termasuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang memberikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan; Neraca yang menunjukkan posisi keuangan entitas publik pada akhir periode, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas; Laporan Operasional yang menggambarkan kinerja keuangan entitas publik dengan melaporkan pendapatan dan biaya yang diakui dalam periode tertentu; Laporan Perubahan Ekuitas yang mempresentasikan perubahan ekuitas entitas publik selama periode tertentu; dan Laporan Arus Kas yang mengindikasikan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu, yang dikategorikan menjadi aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) memberikan penjelasan rinci dan informasi tambahan terkait dengan item-item dalam laporan keuangan utama.

Perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan swasta terletak pada tujuan, sumber pendapatan, dasar akuntansi, pengguna, regulasi, dan standar akuntansi yang digunakan. Sektor publik menitikberatkan pada akuntabilitas dan

transparansi pengambilan keputusan, sementara sektor swasta lebih menekankan pada profitabilitas dan pengambilan keputusan ekonomi. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik, menetapkan prinsip-prinsip seperti basis akrual, konsistensi, materialitas, kewaspadaan, entitas, dan keberlanjutan entitas.

DUMNMY

Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian dari Laporan Keuangan Sektor Publik beserta tujuannya!
2. Apa saja komponen utama yang terdapat dalam Laporan Keuangan Sektor Publik? Jelaskan masing-masing komponen secara singkat!
3. Bandingkan perbedaan antara tujuan penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Laporan Keuangan Sektor Swasta!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan apa tujuan dari penerapannya dalam sektor publik!
5. Bagaimana proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam konteks penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik?
6. Mengapa penting bagi entitas pemerintah untuk menggunakan basis akuntansi akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan? Jelaskan secara singkat!



PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran

- ❖ Menjelaskan pengertian dan pengukuran kinerja sektor publik.
- ❖ Menjelaskan tujuan pengukuran kinerja sektor publik.
- ❖ Menjelaskan proses pengukuran kinerja sektor publik.
- ❖ Menjelaskan indikator pengukuran kinerja sektor publik.
- ❖ Menguraikan Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja sektor publik.
- ❖ Menjelaskan metode pengukuran kinerja sektor publik.

Capaian Pembelajaran

- ❖ Mahasiswa mampu mendefinisikan konsep kinerja sektor publik.
- ❖ Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya pengukuran kinerja di sektor publik untuk transparansi dan akuntabilitas.
- ❖ Mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai tujuan pengukuran kinerja di sektor publik.
- ❖ Mahasiswa mampu menguraikan langkah-langkah dalam proses pengukuran kinerja sektor publik.
- ❖ Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis indikator kinerja yang relevan di sektor publik.
- ❖ Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menguraikan berbagai jenis informasi yang dibutuhkan untuk pengukuran kinerja.
- ❖ Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode dan alat yang digunakan untuk mengukur kinerja di sektor publik.

A. Pendahuluan

Pengukuran kinerja sektor publik merupakan sebuah proses penting dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari program-program dan kebijakan pemerintah. Pada era di mana sumber daya publik menjadi semakin terbatas, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan dapat memberikan hasil yang diharapkan dan memberikan nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat.

Pengukuran kinerja sektor publik memungkinkan pemerintah memahami suatu program atau kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja sektor publik tidak hanya terletak pada aspek evaluasi, tetapi juga pada pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Dengan menganalisis data kinerja secara teratur, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam merancang program-program yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan manfaat yang diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam konteks yang semakin dinamis dan kompleks, pengukuran kinerja sektor publik menjadi landasan penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan pemerintahan yang baik.

B. Pengertian Kinerja Sektor Publik dan Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Organisasi sektor publik adalah entitas yang setiap kegiatannya berfokus pada pemberian layanan kepada masyarakat. Pelayanan publik mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan publik untuk memenuhi kebutuhan individu penerima layanan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, 2003).

Pemerintah memberikan layanan publik melalui pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, termasuk yang bersifat wajib atau opsional. Setiap tugas pemerintah

didanai melalui program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun. Evaluasi kinerja harus dilakukan terhadap setiap program dan kegiatan tersebut. Pentingnya perumusan dan pengukuran kinerja adalah untuk mencapai efisiensi (*Efficiency*) dan efektivitas (*Effectiveness*) layanan publik.

Kinerja sektor publik mengacu pada evaluasi dan penilaian mengenai sejauh mana pemerintah atau organisasi sektor publik berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup pengukuran efisiensi, efektivitas, dan dampak dari kebijakan, program, atau layanan yang disediakan oleh entitas sektor publik (Wardhana et al., 2023).

Pengukuran kinerja sektor publik (*Performance Measurement in the Publik Sector*) adalah proses evaluasi kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi sektor publik. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan masukan guna perbaikan dan peningkatan kualitas layanan organisasi di masa depan. Pengukuran kinerja pada organisasi dianggap penting karena pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat. Dengan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam sektor publik, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik (Fanggidae et al., 2022).

Pada dasarnya, kinerja menitikberatkan pada hasil (output) atau manfaat (outcome) yang diperoleh dari pelaksanaan fungsi-fungsi pekerjaan melalui pengelolaan input. Untuk menilai efektivitas kinerja tersebut, diperlukan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini adalah bagian dari siklus sistem manajemen kinerja (performance management system (Hartati et al., 2022).

C. Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Tujuan utama dari pengukuran kinerja sektor publik antara lain:

1. Meningkatkan tingkat akuntabilitas lembaga atau instansi. Hal ini untuk memastikan bahwa lembaga atau instansi mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada publik atau masyarakat.
2. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik (*Publik Resources*) seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu dengan mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.
3. Mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Mengambil keputusan yang lebih baik dan berdasarkan bukti sehingga dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan dan program.
6. Mendorongan untuk melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam sektor publik. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi area yang memerlukan inovasi dan memberikan insentif bagi instansi untuk terus melakukan perbaikan dan menemukan cara baru yang lebih efektif untuk melayani masyarakat.

D. Proses Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. *Setting Goals and Objectives*

Langkah awal dalam pengukuran kinerja adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh lembaga atau instansi publik. Tujuan tersebut harus spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), relevan (*relevant*), dan terbatas pada waktu tertentu (*Time-bound*) (SMART).



Gambar 8.1 Proses Pengukuran Kinerja Sektor Publik

2. *Identification of Performance Indicators*

Langkah berikutnya setelah tujuan dan sasaran ditetapkan adalah mengidentifikasi indikator kinerja yang dapat mengukur pencapaian tujuan

tersebut. Indikator kinerja haruslah dapat diukur secara objektif dan terkait langsung dengan tujuan yang ingin dicapai.

3. *Data Collection*

Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti laporan internal, survei, dan data administratif lainnya.

4. *Analysis and Data Interpretation*

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk mengevaluasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Analisis ini membantu dalam memahami pencapaian tujuan, identifikasi tren, dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.

5. *Reporting*

Hasil analisis kinerja kemudian dilaporkan kepada pemangku kepentingan terkait, baik internal maupun eksternal. Pelaporan kinerja yang transparan dan jelas, penting untuk memastikan akuntabilitas dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

6. *Continuous Improvement and Development*

Berdasarkan hasil analisis kinerja, langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Hal ini meliputi identifikasi peluang perbaikan, pengembangan strategi baru, dan implementasi tindakan perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

E. Indikator Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, harus mampu mencerminkan tingkat pencapaian tujuan dan target organisasi, mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, hingga setelah kegiatan selesai. Selain itu, pengukuran kinerja juga berperan dalam memastikan bahwa setiap hari kinerja menunjukkan perkembangan menuju pencapaian sasaran dan tujuan organisasi yang bersangkutan.

Menurut Mutia dalam (Hartati et al., 2022), terdapat beberapa indikator dalam pengukuran kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Masukan (*input*), yaitu faktor-faktor yang diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan dan menghasilkan keluaran yang diinginkan, seperti dana, sumber daya manusia, informasi, dan lainnya.
2. Keluaran (*output*), yaitu hasil yang diharapkan secara langsung dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.
3. Hasil (*outcome*), yaitu indikator yang menitikberatkan pada dampak atau hasil akhir yang akan dicapai oleh suatu organisasi, proyek, atau kegiatan.
4. Manfaat (*benefit*), yaitu terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Dampak (*impact*), yaitu pengaruh atau dampak yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Contoh Penerapan Indikator Kinerja pada organisasi sektor publik dapat dilihat pada tabel 8.1.

Tabel 8.1 Contoh Indikator Kinerja pada Organisasi Sektor Publik

No	Nama Program	Indikator Input	Indikator Output	Indikator Outcome	Indikator Benefit	Indikator Impact
1	Program Pendidikan di Perguruan Tinggi	• Jumlah Mahasiswa	• Jumlah mahasiswa yang lulus	• Durasi waktu yang diperlukan bagi lulusan	• Tingkat peningkatan pendapatan alumni	• Peningkatan kemampuan inovasi dan

		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dosen dan Staf Lainnya • Jumlah dan mutu perpustakaan, buku dan literatur. 	<ul style="list-style-type: none"> • IPK rata-rata mahasiswa yang lulus • Jumlah publikasi yang dihasilkan dosen • Jumlah penelitian yang dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • untuk mendapatkan pekerjaan • Jumlah penulis yang mengutip publikasi yang dihasilkan oleh dosen • Peran Alumni dalam dunia bisnis, akademik, atau pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi dalam riset dan inovasi • Peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi • Peningkatan kualitas layanan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • kewirausahaan • Kontribusi pada pemecahan masalah sosial dan lingkungan. • Peningkatan kapasitas institusi dan jaringan kerjasama
2	Program vaksinasi Balita	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah obat vaksin • Jumlah peralatan medis • Jam kerja dokter dan tenaga medis • Jumlah balai kesehatan yang tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anak yang divaksinasi • Jumlah dan mutu materi informasi yang disebarakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penurunan penderita penyakit/kematian pada kelompok target 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penurunan angka kematian balita • Peningkatan kualitas hidup balita 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan harapan hidup balita • Peningkatan kesehatan masyarakat

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

F. Informasi yang Digunakan untuk Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Informasi yang diperlukan dalam pengukuran kinerja sektor publik menurut (Hartoto et al., 2023) adalah:

1. Informasi Finansial

Penilaian kinerja finansial dilakukan dengan mengukur perbedaan antara kinerja aktual dan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Secara umum analisis anggaran meliputi:

a. Varians Pendapatan (*revenue variance*)

Varians Pendapatan adalah selisih antara pendapatan aktual yang diperoleh oleh suatu organisasi atau entitas dengan perkiraan atau anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini adalah perbedaan antara jumlah pendapatan yang sebenarnya tercapai dalam suatu periode dengan jumlah yang diharapkan atau direncanakan dalam periode yang sama. Varians pendapatan memberikan gambaran tentang seberapa baik atau buruk kinerja pendapatan dalam mencapai target yang ditetapkan.

b. Varians Pengeluaran (*expenditure variance*)

Varians pengeluaran adalah perbedaan antara jumlah pengeluaran aktual yang terjadi dalam suatu periode waktu dengan jumlah yang direncanakan atau dianggarkan untuk periode yang sama. Varians pengeluaran memungkinkan organisasi atau entitas untuk mengevaluasi seberapa baik mereka mengelola pengeluaran mereka sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Varians pengeluaran biasanya dibagi menjadi varian belanja rutin dan varian belanja investasi atau modal, yang membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dana digunakan dan apakah penggunaannya sejalan dengan rencana yang telah dibuat.

2. Informasi Non Finansial

Informasi non finansial dalam pengukuran kinerja merujuk pada data atau metrik yang tidak terkait dengan angka keuangan, namun tetap penting untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi atau entitas. Informasi ini memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang aspek-aspek non keuangan dari kinerja organisasi, seperti kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, inovasi, keberlanjutan lingkungan, kualitas produk atau layanan, dan keterlibatan karyawan.

G. Metode Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja dalam sektor publik dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dirancang khusus untuk konteks pelayanan publik dan organisasi pemerintah. Berikut adalah beberapa metode umum yang digunakan dalam pengukuran kinerja sektor publik antara lain:

1. **Balanced Scorecard (BSC):** Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *Balanced Scorecard* adalah pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk mengukur kinerja organisasi dengan mempertimbangkan empat perspektif yang berimbang: keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. *Balanced Scorecard* dapat diadaptasi dengan baik untuk digunakan dalam sektor publik dengan menyesuaikan metrik dan tujuan yang relevan dengan misi dan tujuan organisasi pemerintah (Bolivar et al., 2019).
2. **Key Performance Indicators (KPIs):** KPIs adalah metrik kunci untuk mengukur kinerja organisasi atau program. Dalam sektor publik, KPIs dapat berkisar dari efisiensi penggunaan anggaran hingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. (Ferrer et al., 2020)
3. **Benchmarking:** Metode ini melibatkan perbandingan kinerja organisasi dengan organisasi sejenis atau terbaik dalam industri atau sektor yang sama.

Benchmarking dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan (Hodge et al., 2018).

4. ***Cost-Benefit Analysis (CBA)***: Metode ini digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas program atau kebijakan sektor publik dengan membandingkan manfaat yang dihasilkan dari suatu keputusan atau tindakan dengan biaya yang dikeluarkan (Rodríguez et al., 2019).
5. ***Comparative Performance Analysis (CPA)***: Metode ini melibatkan perbandingan kinerja sektor publik dengan entitas lain, seperti organisasi sejenis, daerah lain, atau standar terbaik industri (Barbieri et al., 2017)
6. ***Surveys dan Publik Feedback (SPF)***: Metode ini digunakan untuk mendapatkan umpan balik kinerja sektor publik melalui survei pendapat publik, wawancara, kelompok fokus, atau alat pengumpulan umpan balik lainnya. (Kowalski et al., 2020)
7. ***Program dan Project Evaluation (PPE)***: Metode ini dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan dampak dari program atau proyek sektor publik (Mosesova & Kota, 2005)
8. ***SWOT Analysis***: digunakan untuk mengevaluasi kinerja sektor publik dengan mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi kinerja organisasi. (Rangkuti, 2008)
9. ***Customer Satisfaction Index (CSI)***: digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh sektor publik (Hadiyati, 2014).
10. ***Cost-Effectiveness Analysis (CEA)***: Metode ini melibatkan perbandingan biaya dengan hasil yang diperoleh dari program atau kebijakan sektor publik.

11. ***Economic Impact Assessment (EIA)***: Metode ini digunakan untuk mengukur dampak kegiatan atau kebijakan sektor publik terhadap perekonomian secara keseluruhan seperti peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pendapatan, dan investasi.
12. ***Qualitative Analysis (QA)***: Metode ini melibatkan pengumpulan, interpretasi, dan evaluasi data yang bersifat deskriptif dan tidak terukur secara numerik guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sektor publik melalui observasi, wawancara, studi kasus, dan analisis isi dokumen.
13. ***Value Chain Analysis (VCA)***: Metode ini melibatkan pemahaman dan pengukuran kinerja sektor publik melalui perspektif rantai nilai dari program atau kegiatan yang dilakukan guna mengidentifikasi tahapan-tahapan nilai tambah, pengukuran efisiensi di setiap tahap, dan identifikasi peluang perbaikan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
14. ***Transparency Measurement Method (TMM)***: Metode ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat transparansi dan akuntabilitas sektor publik dalam pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya, dan penyediaan layanan dengan melibatkan pengukuran aksesibilitas informasi, partisipasi publik, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Saat ini, *Balanced Scorecard* adalah salah satu metode pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi (Lumbanbatu, 2020). *Balanced Scorecard* merupakan metode pengukuran kinerja organisasi yang melibatkan aspek finansial dan non-finansial. Metode ini terbukti sesuai untuk organisasi sektor publik, di mana penekanan pada layanan yang lebih bersifat kualitatif dan bukan hanya pada keuntungan finansial. Pengukuran kinerja dengan metode *Balanced Scorecard* melibatkan empat aspek utama, yaitu:

1. Perspektif Keuangan (*Financial Perspective*):
 - a. Fokus pada hasil keuangan yang diinginkan oleh organisasi dan pemangku kepentingan eksternal.
 - b. Contoh metrik: Pendapatan bersih, laba kotor, margin keuntungan, tingkat pertumbuhan pendapatan, *return on investment* (ROI), dan nilai pasar saham.

2. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*):
 - a. Fokus pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
 - b. Contoh metrik: Tingkat kepuasan pelanggan, waktu penyelesaian layanan, tingkat retensi pelanggan, pangsa pasar, dan tingkat keluhan pelanggan.

3. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*):
 - a. Fokus pada proses internal yang krusial untuk mencapai tujuan strategis.
 - b. Contoh metrik: Efisiensi operasional, waktu siklus produksi, tingkat pemakaian sumber daya, tingkat kegagalan proses, dan kualitas produk atau layanan.

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth Perspective*):
 - a. Fokus pada kemampuan organisasi untuk mempelajari, beradaptasi, dan berkembang.
 - b. Contoh metrik: Tingkat keterlibatan karyawan, tingkat kepuasan karyawan, tingkat kompetensi karyawan, inovasi produk atau proses, dan kemampuan manajemen pengetahuan.

Rangkuman

Pengukuran kinerja memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh organisasi pemerintah terarah dan terukur. Dalam dunia yang terus berubah dengan tuntutan yang semakin kompleks, evaluasi kinerja memberikan pandangan yang mendalam tentang sejauh mana keberhasilan telah dicapai dan di mana perbaikan perlu dilakukan. Dari penilaian terhadap efektivitas program-program pemerintah hingga evaluasi atas efisiensi penggunaan sumber daya publik, pengukuran kinerja memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan yang cerdas dan berdasarkan bukti. Ini bukan hanya tentang menghitung angka-angka, tetapi tentang memahami dampak nyata dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan, dan bagaimana mereka memengaruhi masyarakat yang dilayani. Lebih dari sekadar alat manajemen, pengukuran kinerja adalah jalan menuju akuntabilitas yang lebih tinggi, transparansi yang lebih besar, dan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Melalui evaluasi yang berkelanjutan dan terstruktur, sektor publik dapat terus meningkatkan layanan mereka, mengidentifikasi praktik terbaik, dan menyesuaikan strategi mereka dengan kebutuhan yang berkembang dari masyarakat.

Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan organisasi sektor publik?
2. Apa itu pengukuran kinerja sektor publik dan Mengapa pengukuran kinerja penting bagi organisasi sektor publik?
3. Jelaskan minimal 3 tujuan utama dari pengukuran kinerja sektor publik?
4. Jelaskan tahapan pertama dalam proses pengukuran kinerja?
5. Bagaimana indikator kinerja masukan (*input*) dan keluaran (*output*) saling berkaitan dalam proses pengukuran kinerja?
6. Apa yang dimaksud dengan informasi non finansial dalam pengukuran kinerja sektor publik?
7. Apa yang dimaksud dengan *Balanced Scorecard* dalam konteks pengukuran kinerja sektor publik?



SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT

Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran

- ❖ Memahami konsep dasar sistem akuntansi pemerintahan pusat.
- ❖ Menguasai landasan hukum dan prinsip akuntansi pemerintahan.
- ❖ Memahami komponen-komponen sistem akuntansi pemerintahan pusat.
- ❖ Mampu menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat.
- ❖ Memahami fungsi dan manfaat laporan keuangan pemerintahan pusat.

Capaian Pembelajaran

- ❖ Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan tujuan utama dari Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat.

- ❖ Mahasiswa mampu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mendasari Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan.
- ❖ Mahasiswa dapat menguraikan komponen-komponen utama dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat dan menjelaskan peran masing-masing komponen.
- ❖ Mahasiswa mampu menggambarkan proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan yang disusun.
- ❖ Mahasiswa dapat mengidentifikasi fungsi dan manfaat laporan keuangan pemerintah pusat bagi transparansi, akuntabilitas, pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi kinerja.

A. Pengertian dan Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat

Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat adalah rangkaian prosedur, perangkat, dan aturan yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan negara. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disajikan dengan benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat yaitu:

1. Transparansi Keuangan

Meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintah untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dapat diakses dan dipahami oleh publik.

2. Akuntabilitas

Memastikan bahwa semua transaksi keuangan pemerintah dicatat dan dilaporkan secara akurat, sehingga memungkinkan pengawasan dan audit yang efektif untuk menghindari penyalahgunaan dana.

3. Pengelolaan Keuangan yang Efektif

Membantu dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan efisien dengan memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat.

4. Kepatuhan terhadap Peraturan

Memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan.

5. Penyajian Informasi Keuangan

Menyediakan laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah.

6. Pengendalian Intern

Meningkatkan sistem pengendalian internal untuk meminimalisir risiko kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

B. Landasan Hukum Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat

Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum untuk pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa landasan hukum utama yang mendasari Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara, termasuk prinsip-prinsip dasar akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. UU ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Menetapkan ketentuan mengenai perbendaharaan negara dan pelaksanaan APBN, termasuk tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Mengatur tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan yang harus digunakan oleh entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. PP. ini menggantikan PP. Nomor 24 Tahun 2005.

5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Memberikan pedoman teknis bagi kementerian negara/lembaga dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Meskipun lebih berfokus pada pemerintah daerah, peraturan ini juga memberikan panduan terkait sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat diadopsi oleh pemerintah pusat.

7. Instruksi Presiden dan Surat Edaran terkait

Instruksi dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Presiden dan kementerian terkait juga sering kali memberikan petunjuk tambahan dan penegasan mengenai pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan pusat.

C. Prinsip-Prinsip Akuntansi Pemerintahan

Prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan adalah panduan dasar yang digunakan untuk menyusun, mencatat, mengklasifikasi, dan melaporkan transaksi keuangan dalam sektor pemerintahan. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Berikut adalah beberapa prinsip utama akuntansi pemerintahan:

1. Basis Akuntansi

- Basis Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual Basis): Transaksi dicatat pada saat kas diterima atau dibayarkan, namun laporan keuangan disusun berdasarkan akrual untuk menyajikan posisi keuangan yang lebih lengkap.
- Basis Akrual (Accrual Basis): Transaksi dicatat pada saat terjadinya, terlepas dari waktu kas diterima atau dibayarkan. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan dan kinerja pemerintah.

2. Entitas Akuntansi

Setiap entitas pemerintahan yang mengelola keuangan negara atau daerah wajib menyusun laporan keuangan tersendiri. Entitas ini bisa berupa kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah.

3. Konsolidasi

Laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah harus mencakup laporan keuangan semua entitas di bawahnya yang dikonsolidasikan untuk memberikan gambaran keuangan yang menyeluruh.

4. Penyajian Wajar

Laporan keuangan harus menyajikan informasi keuangan secara wajar sesuai dengan kenyataan, lengkap, dan tidak menyesatkan. Informasi harus disajikan secara jujur dan transparan.

5. Konsistensi

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pemerintah harus konsisten dari tahun ke tahun. Perubahan kebijakan harus diungkapkan dan dijelaskan dalam laporan keuangan.

6. Relevansi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus relevan bagi para pengguna laporan tersebut untuk membuat keputusan yang tepat.

7. Materialitas dan Signifikansi

Laporan keuangan harus mencakup semua informasi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan.

8. Komparabilitas

Laporan keuangan harus disajikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan perbandingan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan entitas lain yang serupa.

9. Keandalan

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya, akurat, dan dapat diverifikasi. Pengukuran dan penyajian informasi harus bebas dari kesalahan dan bias.

10. Pengungkapan Lengkap

Semua informasi penting yang relevan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Ini termasuk penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, serta informasi tambahan yang diperlukan untuk pemahaman penuh laporan keuangan.

11. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan standar akuntansi yang telah ditetapkan.

12. Keberlanjutan

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pemerintah akan terus beroperasi di masa mendatang dan tidak ada niat atau kebutuhan untuk likuidasi atau mengurangi secara signifikan skala operasinya.

D. Komponen Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat

Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dicatat, dikelola, dan dilaporkan dengan benar. Berikut adalah komponen-komponen utama tersebut:

1. Rencana Akun (*Chart of Accounts*)

Daftar sistematis dari semua akun yang digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan. Setiap akun memiliki kode unik dan deskripsi yang memudahkan klasifikasi dan pencatatan transaksi.

2. Dokumen Sumber (*Source Documents*)

Bukti fisik atau elektronik dari transaksi yang terjadi, seperti faktur, kwitansi, nota, dan kontrak. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan dalam sistem akuntansi.

3. Buku Harian (Jurnal)

Buku atau perangkat lunak yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal umum atau jurnal khusus sesuai dengan jenis transaksi.

4. Buku Besar (*General Ledger*)

Kumpulan akun-akun yang merangkum semua transaksi keuangan yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar berfungsi sebagai sumber utama untuk penyusunan laporan keuangan.

5. Buku Pembantu (*Subsidiary Ledgers*)

Buku yang digunakan untuk merinci akun-akun tertentu dari buku besar. Misalnya, buku pembantu piutang usaha merinci semua transaksi piutang dengan pelanggan.

6. Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*)

Mekanisme dan prosedur yang dirancang untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efisiensi operasi. Ini termasuk pengamanan aset dan pemisahan tugas untuk mencegah kecurangan.

7. Prosedur Akuntansi (*Accounting Procedures*)

Instruksi dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Prosedur ini mencakup cara penanganan transaksi dari awal hingga akhir.

8. Laporan Keuangan (*Financial Statements*)

Laporan yang disusun berdasarkan buku besar dan mencerminkan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan entitas pemerintah. Laporan utama meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

9. Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi (*Accounting Software Applications*)

Perangkat lunak yang digunakan untuk memfasilitasi pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan. Sistem ini dapat mencakup modul-modul untuk penganggaran, pembayaran, penerimaan, aset tetap, dan lainnya.

10. Pelaporan dan Evaluasi (*Reporting and Evaluation*)

Proses untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan, serta evaluasi terhadap kinerja keuangan dan kepatuhan terhadap anggaran.

11. Audit dan Pengawasan (*Audit and Oversight*)

Proses pemeriksaan atas laporan keuangan dan sistem akuntansi oleh auditor internal atau eksternal untuk memastikan keakuratan, kepatuhan, dan integritas data keuangan.

E. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat merupakan proses yang sistematis dan terstruktur, yang melibatkan beberapa tahapan penting. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah tahapan utama dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat:

1. Pengumpulan Data dan Dokumen Sumber

Mengumpulkan semua dokumen sumber yang mendukung transaksi keuangan, seperti faktur, kwitansi, nota, kontrak, dan bukti penerimaan atau pengeluaran lainnya.

2. Pencatatan Transaksi dalam Jurnal

Mencatat semua transaksi keuangan ke dalam jurnal umum atau jurnal khusus sesuai dengan jenis transaksi secara kronologis. Setiap transaksi harus dicatat berdasarkan dokumen sumber yang valid.

3. Posting ke Buku Besar

Memindahkan (posting) data dari jurnal ke akun-akun terkait dalam buku besar. Buku besar mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis akun, seperti kas, piutang, utang, pendapatan, dan beban.

4. Rekonsiliasi Akun

Melakukan rekonsiliasi antara catatan akuntansi dengan data eksternal, seperti rekonsiliasi bank, untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar dan saldo akun-akun sesuai dengan kenyataan.

5. Penyesuaian (*Adjusting Entries*)

Membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi yang belum tercatat atau untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Penyesuaian ini bisa termasuk akrual, penangguhan, penyusutan, dan penyisihan.

6. Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (*Adjusted Trial Balance*)

Menyusun neraca saldo setelah semua jurnal penyesuaian telah dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara total debit dan total kredit.

7. Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian, menyusun laporan keuangan utama, yang meliputi:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- Neraca.
- Laporan Operasional (LO).
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- Laporan Arus Kas (LAK).
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8. Pengungkapan (*Disclosure*)

Menyertakan catatan atas laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan untuk membantu pengguna memahami laporan keuangan secara lebih mendalam. Catatan ini mencakup kebijakan akuntansi, rincian pos-pos penting, dan penjelasan terhadap angka-angka yang disajikan.

9. Review dan Audit Internal

Melakukan review internal atas laporan keuangan yang telah disusun untuk memastikan akurasi dan kelengkapan. Unit audit internal atau inspektorat akan memeriksa dan menguji laporan keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi.

10. Pengajuan untuk Audit Eksternal

Mengajukan laporan keuangan yang telah disusun dan direview kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan audit eksternal. BPK akan memeriksa dan memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah pusat.

11. Penyampaian Laporan Keuangan

Setelah audit eksternal selesai, laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada DPR dan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Laporan ini biasanya dipublikasikan untuk transparansi dan akuntabilitas.

12. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Melakukan evaluasi terhadap hasil audit dan opini BPK untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Tindak lanjut atas rekomendasi audit dilakukan untuk meningkatkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di masa mendatang.

F. Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat

Laporan keuangan pemerintah pusat disusun untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari entitas pemerintah. Berikut adalah jenis-jenis laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan selama satu periode anggaran dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. LRA menunjukkan seberapa efektif dan efisien anggaran telah dilaksanakan.

2. Neraca

Menyajikan posisi keuangan entitas pemerintah pusat pada tanggal tertentu, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca memberikan gambaran mengenai sumber daya ekonomi yang dimiliki dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

3. Laporan Operasional (LO)

Menyajikan informasi mengenai seluruh pendapatan-LO dan beban-LO selama satu periode pelaporan. Laporan ini menggambarkan kinerja operasional pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Menyajikan informasi mengenai perubahan dalam ekuitas selama satu periode pelaporan. LPE mencakup kontribusi pemilik, surplus/defisit, dan penyesuaian lainnya yang mempengaruhi ekuitas pemerintah.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode pelaporan. Laporan ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Menyajikan penjelasan atau rincian lebih lanjut mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama. CaLK mencakup kebijakan akuntansi, rincian pos-pos penting, dan informasi tambahan yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai laporan keuangan.

Fungsi dan Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat:

1. Transparansi

Memberikan informasi yang transparan mengenai keuangan pemerintah kepada publik dan pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas

Memungkinkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik.

3. Pengambilan Keputusan

Menyediakan data yang relevan untuk pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dan manajer publik.

4. Pengawasan dan Pengendalian

Memudahkan audit dan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara.

5. Evaluasi Kinerja

Membantu dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam penggunaan sumber daya ekonomi.

G. Pengendalian Intern dalam Sistem Akuntansi Pemerintah

Pengendalian intern dalam sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai. Tujuan utama pengendalian intern adalah untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta efisiensi dan efektivitas operasi. Berikut adalah beberapa komponen utama pengendalian intern dalam sistem akuntansi pemerintah:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Merupakan dasar dari semua elemen pengendalian intern, mencakup sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen serta dewan pengawas terhadap pengendalian intern. Elemen ini meliputi integritas, nilai-nilai etika, kompetensi, dan gaya operasi manajemen.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko mencakup identifikasi

risiko internal dan eksternal serta evaluasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko telah diambil. Aktivitas pengendalian mencakup otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, pemisahan tugas, pengamanan aset, dan review kinerja.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Sistem informasi harus mampu menangkap dan menyajikan data yang relevan dan dapat dipercaya untuk mendukung pengambilan keputusan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi yang penting sampai ke pihak yang membutuhkan, baik secara internal maupun eksternal.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Proses untuk menilai kualitas kinerja sistem pengendalian intern dari waktu ke waktu. Pemantauan dapat dilakukan melalui kegiatan audit internal, review manajemen, dan aktivitas pemantauan lainnya untuk memastikan bahwa pengendalian intern berfungsi dengan baik dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Tujuan dan Manfaat Pengendalian Intern:

1. Keandalan Pelaporan Keuangan

Menjamin bahwa laporan keuangan disusun secara akurat, lengkap, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini mencakup pencegahan dan deteksi kesalahan serta kecurangan dalam pelaporan keuangan.

2. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan

Memastikan bahwa entitas pemerintah mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta kebijakan internal yang telah ditetapkan.

3. Efisiensi dan Efektivitas Operasi

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional melalui penggunaan sumber daya yang optimal, pengelolaan risiko yang baik, dan peningkatan kinerja operasional.

4. Perlindungan Aset

Menjaga aset pemerintah dari kerugian akibat kecurangan, penyalahgunaan, dan kerusakan. Ini mencakup pengamanan fisik, asuransi, dan pemeliharaan aset.

5. Peningkatan Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas di semua tingkat organisasi dengan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab jelas, serta pelaporan kinerja yang transparan.

Implementasi Pengendalian Intern dalam Sistem Akuntansi Pemerintah:

1. Pemisahan Tugas (*Segregation of Duties*)

Memisahkan tanggung jawab utama dalam proses akuntansi dan pelaporan untuk mengurangi risiko kecurangan dan kesalahan. Misalnya, orang yang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi tidak boleh bertanggung jawab untuk mengotorisasi atau menyetujui transaksi tersebut.

2. Otorisasi dan Persetujuan (*Authorization and Approval*)

Menetapkan kebijakan otorisasi untuk semua transaksi dan aktivitas keuangan. Semua transaksi harus disetujui oleh pihak yang berwenang sebelum dilaksanakan.

3. Dokumentasi dan Rekaman (*Documentation and Record Keeping*)

Menyimpan dokumentasi yang memadai untuk semua transaksi dan aktivitas keuangan. Dokumentasi harus lengkap, akurat, dan mudah diakses untuk keperluan audit dan review.

4. Kontrol Fisik (*Physical Controls*)

Mengamankan aset fisik seperti uang tunai, persediaan, dan peralatan. Ini mencakup penggunaan brankas, kunci, dan sistem keamanan lainnya.

5. Verifikasi dan Rekonsiliasi (*Verification and Reconciliation*)

Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi rutin terhadap data keuangan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan catatan. Ini mencakup rekonsiliasi bank, inventarisasi persediaan, dan review akun.

6. Review Kinerja (*Performance Reviews*)

Melakukan review kinerja secara rutin untuk menilai efektivitas pengendalian intern dan kinerja operasional. Review ini dapat dilakukan oleh manajemen atau unit audit internal.

H. Sistem Informasi dan Teknologi dalam Akuntansi Pemerintahan

Sistem Informasi dan Teknologi (SI/TI) memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam akuntansi pemerintahan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari SI/TI dalam konteks akuntansi pemerintahan:

Manfaat Sistem Informasi dan Teknologi dalam Akuntansi Pemerintahan.

1. Automatisasi Proses Akuntansi

SI/TI memungkinkan otomatisasi proses pencatatan transaksi keuangan, pembuatan laporan, dan analisis data. Hal ini mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan kecepatan dalam pengolahan informasi.

2. Integrasi Data dan Basis Data Terpusat

Memiliki basis data terpusat untuk semua transaksi keuangan memungkinkan penggunaan informasi secara konsisten dan terintegrasi. Ini membantu dalam penyusunan laporan yang akurat dan *real-time* monitoring atas keuangan pemerintah.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

SI/TI memungkinkan publik untuk mengakses informasi keuangan pemerintah secara lebih mudah dan transparan. Data yang tersedia secara online dapat memperkuat akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik.

4. Pengendalian Intern yang Lebih Kuat

Implementasi SI/TI dapat meningkatkan pengendalian intern dengan menerapkan otomatisasi dalam proses otorisasi, pemisahan tugas secara efektif, dan monitoring secara *real-time* terhadap aktivitas keuangan.

5. Analisis Data dan Pengambilan Keputusan

Sistem informasi yang baik memungkinkan analisis data yang mendalam terhadap kinerja keuangan pemerintah. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis berdasarkan informasi yang relevan.

6. Keamanan Informasi

SI/TI membantu dalam menjaga keamanan data keuangan pemerintah melalui penggunaan kontrol akses, enkripsi data sensitif, dan pemantauan terhadap potensi ancaman keamanan.

7. Pemenuhan Standar dan Regulasi

Dengan SI/TI yang baik, pemerintah dapat lebih mudah mematuhi standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Sistem ini mendukung audit dan pemeriksaan internal serta eksternal dengan lebih efisien.

Teknologi Spesifik dalam SI/TI Akuntansi Pemerintahan:

1. Perangkat Lunak Akuntansi Pemerintahan

Penggunaan perangkat lunak khusus untuk akuntansi pemerintahan membantu dalam pencatatan transaksi, penyusunan laporan, dan pemantauan anggaran.

2. Sistem Manajemen Keuangan

Sistem ini membantu dalam manajemen anggaran, pemantauan realisasi anggaran, dan analisis keuangan secara menyeluruh.

3. Pengelolaan Aset dan Persediaan

SI/TI membantu dalam pengelolaan aset pemerintah, termasuk inventarisasi, penilaian, dan pemeliharaan, untuk memastikan efisiensi penggunaan sumber daya.

4. Sistem *e-Procurement*

Memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pengawasan dalam pengeluaran pemerintah.

5. Sistem *e-Budgeting*

Memungkinkan penyusunan dan monitoring anggaran secara elektronik, termasuk alokasi dan penggunaan dana secara tepat waktu dan efisien.

Tantangan dalam Implementasi SI/TI dalam Akuntansi Pemerintahan:

1. Biaya Implementasi dan Pemeliharaan

Memiliki biaya awal yang tinggi untuk pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem SI/TI yang canggih.

2. Kesesuaian dengan Regulasi

Memastikan bahwa sistem SI/TI yang diimplementasikan mematuhi semua regulasi dan standar keamanan yang berlaku.

3. Pengelolaan Perubahan

Menghadapi tantangan dalam mengelola perubahan budaya organisasi dan kebutuhan pelatihan untuk penggunaan efektif dari sistem baru.

4. Keamanan Informasi dan Privasi

Menjaga keamanan data sensitif pemerintah dari ancaman keamanan siber dan memastikan kepatuhan terhadap standar privasi yang ketat.

I. Masalah dan Tantangan dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat

Implementasi dan operasionalisasi sistem akuntansi pemerintahan pusat seringkali dihadapkan pada sejumlah masalah dan tantangan yang perlu diatasi agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Beberapa masalah dan tantangan utama yang sering muncul termasuk:

1. Kompleksitas Regulasi dan Standar Akuntansi

Pemerintahan pusat sering harus mematuhi regulasi yang kompleks dan beragam, baik dari tingkat lokal maupun nasional, serta standar akuntansi yang

berlaku. Hal ini dapat menyulitkan penyusunan laporan keuangan yang konsisten dan memadai.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Keahlian

Ketersediaan staf yang terlatih dalam akuntansi pemerintahan kadang-kadang menjadi masalah. Tantangan ini meliputi kekurangan sumber daya manusia dengan pengetahuan yang memadai tentang akuntansi sektor publik dan keuangan pemerintahan.

3. Integrasi Sistem dan Keterbatasan Teknologi

Tidak semua pemerintahan pusat memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung sistem akuntansi yang kompleks. Integrasi sistem yang kurang baik antara berbagai aplikasi dan *database* juga dapat menjadi hambatan.

4. Pengelolaan Risiko dan Keamanan Informasi

Risiko keamanan informasi sangat penting dalam sistem akuntansi pemerintahan, terutama karena sensitivitas data yang diolah. Pemerintahan pusat harus memastikan perlindungan data dan informasi dari ancaman keamanan siber dan penyalahgunaan.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik merupakan tuntutan yang semakin meningkat dari publik dan lembaga pengawas. Sistem akuntansi pemerintahan harus mampu memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses.

6. Perubahan Kebijakan dan Lingkungan Eksternal

Perubahan kebijakan pemerintah atau lingkungan eksternal (misalnya perubahan dalam kebijakan fiskal atau ekonomi) dapat mempengaruhi sistem

akuntansi pemerintahan. Fleksibilitas dalam menyesuaikan sistem dengan perubahan ini menjadi tantangan tersendiri.

7. Keterbatasan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan

Keterbatasan anggaran untuk investasi dalam teknologi informasi dan pengelolaan keuangan sering menjadi penghalang dalam pengembangan sistem akuntansi yang lebih baik.

8. Auditor dan Pemeriksaan Eksternal

Keterlibatan badan pemeriksa eksternal dalam memverifikasi laporan keuangan pemerintah dapat menjadi tantangan. Koordinasi yang baik dengan badan pemeriksa diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan akurasi laporan keuangan.

Strategi Mengatasi Tantangan dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat:

- Peningkatan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memperluas pengetahuan mereka tentang akuntansi pemerintahan.
- Penggunaan Teknologi yang Tepat: Menyesuaikan dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung kebutuhan sistem akuntansi pemerintahan yang kompleks.
- Pengembangan Kebijakan dan Prosedur yang Jelas: Memastikan kejelasan dan konsistensi dalam kebijakan dan prosedur akuntansi, serta mematuhi regulasi yang berlaku.
- Peningkatan Transparansi dan Komunikasi: Memperkuat komunikasi dan dialog dengan publik serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

- Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap sistem akuntansi untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat.

J. Reformasi dan Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat

Reformasi dan pengembangan sistem akuntansi pemerintahan pusat menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi yang dapat dilakukan dalam reformasi dan pengembangan sistem akuntansi pemerintahan pusat:

Langkah-Langkah Reformasi dan Pengembangan:

1. Evaluasi dan Analisis Kebutuhan

Langkah awal adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem akuntansi yang ada, termasuk identifikasi kekurangan dan tantangan yang dihadapi. Analisis kebutuhan harus mencakup pemahaman mendalam terhadap regulasi yang berlaku dan harapan publik terkait transparansi dan akuntabilitas.

2. Perumusan Kebijakan dan Rencana Strategis

Berdasarkan evaluasi kebutuhan, perumuskan kebijakan dan rencana strategis untuk reformasi sistem akuntansi pemerintahan pusat. Kebijakan ini harus memperkuat kontrol internal, memperbaiki proses pelaporan keuangan, dan meningkatkan integrasi teknologi informasi.

3. Penguatan Pengendalian Intern

Fokus pada penguatan pengendalian intern untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan diproses dengan tepat, terdokumentasi dengan baik, dan dipantau secara efektif. Pemisahan tugas yang jelas, otorisasi yang tepat, dan rekonsiliasi rutin harus diterapkan.

4. Implementasi Teknologi Informasi yang Tepat

Investasi dalam teknologi informasi yang sesuai untuk mendukung sistem akuntansi yang lebih efisien dan terintegrasi. Ini meliputi penggunaan perangkat lunak akuntansi pemerintahan, sistem manajemen keuangan, dan alat analisis data yang canggih.

5. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Memberdayakan sumber daya manusia dengan pelatihan yang sesuai dan pengembangan keahlian dalam akuntansi sektor publik dan penggunaan teknologi informasi. Karyawan harus terampil dalam menggunakan sistem baru dan memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.

6. Transparansi dan Komunikasi

Meningkatkan transparansi melalui penyediaan akses yang lebih mudah terhadap informasi keuangan pemerintah kepada publik dan pemangku kepentingan. Komunikasi yang efektif tentang perbaikan dalam sistem akuntansi akan memperkuat kepercayaan publik.

7. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

Menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan implementasi reformasi. Review rutin atas kinerja sistem akuntansi akan membantu dalam mengidentifikasi area perbaikan dan mengatasi masalah dengan cepat.

8. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Melibatkan badan pemeriksa eksternal, auditor independen, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses reformasi. Kolaborasi ini akan membantu memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi internasional dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

Manfaat dari Reformasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat:

- Meningkatkan Efisiensi Operasional: Dengan proses yang lebih terstruktur dan terotomatisasi, pengelolaan keuangan publik dapat dilakukan dengan lebih efisien.
- Memperkuat Akuntabilitas dan Transparansi: Reformasi akan meningkatkan kemampuan untuk memantau dan melaporkan penggunaan dana publik secara transparan, yang esensial untuk membangun kepercayaan publik.
- Meningkatkan Pengambilan Keputusan: Dengan sistem akuntansi yang lebih baik, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis berdasarkan data keuangan yang akurat dan *real-time*.
- Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan: Laporan keuangan yang lebih akurat dan komprehensif akan membantu dalam evaluasi kinerja keuangan pemerintah serta dalam menarik investor dan pemangku kepentingan lainnya.
- Kepatuhan terhadap Standar Internasional: Meningkatkan kesesuaian dengan standar akuntansi internasional akan membuka pintu bagi lebih banyak investasi dan dukungan internasional.

Rangkuman

Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat adalah rangkaian prosedur, perangkat, dan aturan yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi keuangan, memastikan akuntabilitas, mengelola keuangan secara efektif, mematuhi peraturan, menyajikan informasi keuangan yang akurat, meningkatkan pengendalian intern, dan memenuhi standar akuntansi pemerintahan.

Landasan hukum sistem ini termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan peraturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan seperti basis akrual, konsolidasi laporan, penyajian wajar, konsistensi, relevansi, dan kepatuhan.

Prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan mencakup basis akrual, entitas akuntansi, konsolidasi, penyajian wajar, konsistensi, relevansi, materialitas dan signifikansi, komparabilitas, keandalan, pengungkapan lengkap, kepatuhan peraturan, dan keberlanjutan.

Komponen sistem ini meliputi rencana akun, dokumen sumber, buku harian, buku besar, buku pembantu, sistem pengendalian internal, prosedur akuntansi, aplikasi perangkat lunak akuntansi, pelaporan dan evaluasi, serta audit dan pengawasan.

Proses penyusunan laporan keuangan melibatkan pengumpulan data, pencatatan transaksi, posting ke buku besar, rekonsiliasi akun, penyesuaian,

penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, pengungkapan, *review* dan audit internal, audit eksternal, penyampaian laporan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Jenis-jenis laporan keuangan pemerintahan pusat meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan meliputi transparansi, akuntabilitas, dukungan pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi kinerja.

Pengendalian intern dalam sistem ini terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan.

DUMNMY

Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat dan tujuan utamanya!
2. Apa saja landasan hukum yang mengatur Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat di Indonesia?
3. Jelaskan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan!
4. Apa saja komponen utama dari Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat?
5. Jelaskan tahapan-tahapan utama dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat!
6. Apa saja jenis-jenis laporan keuangan pemerintahan pusat yang disusun dan fungsinya bagi entitas pemerintah?

10

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran

- ❖ Memahami Konsep Dasar Akuntansi Keuangan Daerah.
- ❖ Meningkatkan Kemampuan Analitis dan Evaluatif.
- ❖ Mengembangkan Keterampilan Praktis dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- ❖ Menanamkan Sikap Profesional dan Etis dalam Akuntansi Keuangan Daerah.

Capaian Pembelajaran

- ❖ Peserta didik mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar akuntansi pemerintahan dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

- ❖ Peserta didik mampu mengidentifikasi elemen-elemen utama dari laporan keuangan daerah.
- ❖ Peserta didik mampu menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- ❖ Peserta didik mampu melakukan pencatatan transaksi keuangan daerah secara akurat dan lengkap dalam sistem akuntansi pemerintahan.

DUMNMY

A. Pengertian Akuntansi Daerah

Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses yang melibatkan pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan yang terjadi di pemerintah daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan utama Akuntansi Keuangan Daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk membantu dalam pengambilan keputusan oleh manajemen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi ini juga berguna untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, mendukung pengelolaan sumber daya yang efektif, dan memfasilitasi evaluasi kinerja pemerintah daerah.

B. Landasan Hukum Akuntansi Keuangan Daerah

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang ini mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Ini menjadi dasar utama bagi pengelolaan keuangan di semua tingkat pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang ini mengatur tentang perbendaharaan negara, termasuk pengelolaan dan tanggung jawab bendahara serta mekanisme pelaporan keuangan negara dan daerah. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAP ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. SAP bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan praktik akuntansi di lingkungan pemerintah, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan dan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

C. Prinsip Akuntansi Keuangan Daerah

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya pelaporan yang jelas dan lengkap mengenai bagaimana dana publik digunakan, memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Transparansi

Menyediakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

3. Keandalan

Menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Prinsip ini menuntut agar semua data dan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah adalah benar dan tepat waktu, sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja.

4. Komparabilitas

Informasi dapat dibandingkan antar periode dan antar entitas. Prinsip ini memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk melakukan analisis tren dan perbandingan antara satu periode dengan periode lainnya, atau antara satu entitas dengan entitas lainnya, sehingga dapat menilai kinerja dan efektivitas pengelolaan keuangan secara lebih baik.

D. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

1. Pencatatan Transaksi

Proses ini melibatkan pencatatan semua transaksi keuangan secara kronologis dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Setiap transaksi yang terjadi, baik pemasukan maupun pengeluaran, harus dicatat secara sistematis untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data keuangan.

a. Jurnal Umum

Tabel 10.1

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
01/07/2021	Pembelian Persediaan	J1	Rp10.000.000	
01/07/2021	Kas Bank	J1		Rp10.000.000

02/07/2021	Penerimaan Pendapatan	J2	Rp5.000.000	
02/07/2021	Piutang Usaha	J2		Rp5.000.000

b. Jurnal Khusus

Tabel 10.2

Tanggal	Jenis Transaksi	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
01/07/2021	Pembelian	Pembelian Persediaan	J1	Rp10.000.000	
01/07/2021	Pembayaran Kas	Kas Bank	J1		Rp10.000.000
02/07/2021	Penerimaan	Penerimaan Pendapatan	J2	Rp5.000.000	
02/07/2021	Piutang	Piutang Usaha	J2		Rp5.000.000

2. Penggolongan Akun

Setelah transaksi dicatat, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan transaksi tersebut dalam akun-akun yang relevan. Penggolongan ini memudahkan dalam pengelolaan dan pelacakan transaksi, serta mempersiapkan data untuk pelaporan keuangan.

Tabel 10.3

Akun	Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Persediaan	01/07/2021	Pembelian Persediaan	J1	Rp10.000.000		Rp10.000.000

Kas Bank	01/07/2021	Pembayaran Kas	J1		Rp10.000.000	-Rp10.000000
Pendapatan	02/07/2021	Penerimaan Pendapatan	J2	Rp5.000.000		Rp. 5.000.000
Piutang Usaha	02/07/2021	Piutang Usaha	J2		Rp5.000.000	-Rp. 5.000.000

3. Pelaporan Keuangan

Menyusun laporan keuangan daerah, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Laporan Operasional.

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyajikan informasi tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 10.4

Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih
Pendapatan	Rp50.000.000	Rp45.000.000	Rp5.000.000
Belanja	Rp40.000.000	Rp38.000.000	Rp2.000.000
Surplus/Defisit	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Rp3.000.000

b. Neraca

Menyajikan posisi keuangan pemerintah daerah pada suatu titik waktu tertentu.

Tabel 10.5

Uraian	30/06/2021	01/07/2021
Aset	Rp100.000.000	Rp105.000.000
Kewajiban	Rp40.000.000	Rp42.000.000
Ekuitas	Rp60.000.000	Rp63.000.000

c. Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi tentang arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu.

Tabel 10.6

Uraian	Jumlah
Arus Kas dari Operasi	Rp7.000.000
Arus Kas dari Investasi	Rp2.000.000
Arus Kas dari Pembiayaan	Rp1.000.000
Kenaikan/Penurunan Kas	Rp10.000.000

d. Laporan Operasional

Menyajikan informasi tentang pendapatan dan beban operasional selama periode tertentu.

Tabel 10.7

Uraian	Jumlah
Pendapatan Operasional	Rp45.000.000
Beban Operasional	Rp38.000.000
Surplus/Defisit Operasional	Rp7.000.000

4. Analisis dan Evaluasi

Menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan dan membuat rekomendasi perbaikan.

Contoh Analisis

1) Kinerja Pendapatan

Realisasi pendapatan mencapai 90% dari anggaran, menunjukkan performa yang cukup baik. Namun, ada selisih yang perlu dianalisis lebih lanjut.

2) Kinerja Belanja

Realisasi belanja mencapai 95% dari anggaran, menunjukkan efisiensi dalam pengeluaran.

3) Arus Kas

Kenaikan kas menunjukkan peningkatan likuiditas daerah, namun perlu diimbangi dengan pengelolaan investasi yang baik.

Rekomendasi Perbaikan

1) Peningkatan Pendapatan

Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru dan meningkatkan efisiensi dalam penagihan.

2) Pengendalian Belanja

Menerapkan kontrol yang lebih ketat untuk memastikan belanja tetap efisien dan sesuai anggaran.

3) Pengelolaan Kas

Meningkatkan pengelolaan kas agar dapat mendukung investasi dan kebutuhan operasional secara optimal.

E. Komponen Laporan Keuangan Daerah

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menunjukkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pendapatan dan belanja selama periode tertentu. Laporan ini mencakup detail mengenai pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, belanja yang telah dilakukan, dan surplus atau defisit yang terjadi sebagai hasil dari aktivitas keuangan selama periode pelaporan.

Fungsi:

a. Memantau Kinerja Anggaran

LRA berfungsi sebagai alat untuk memantau apakah pemerintah daerah menjalankan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Identifikasi Selisih Anggaran

LRA membantu mengidentifikasi perbedaan (selisih) antara anggaran yang diharapkan dan realisasi yang terjadi, baik dalam hal pendapatan maupun belanja.

c. Evaluasi dan Perencanaan

Informasi dari LRA digunakan untuk mengevaluasi kinerja anggaran periode berjalan dan untuk perencanaan anggaran periode mendatang, dengan tujuan memperbaiki manajemen keuangan daerah.

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan. Laporan ini mencakup tiga komponen utama yaitu aset (sumber daya yang dimiliki daerah), kewajiban (utang atau kewajiban yang harus dilunasi daerah), dan ekuitas (kekayaan bersih daerah).

Fungsi:

a. Menunjukkan Kekayaan Bersih

Neraca memberikan gambaran tentang kekayaan bersih daerah pada akhir periode pelaporan.

b. Menilai Likuiditas

Informasi aset dan kewajiban membantu dalam menilai kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

c. Menilai Solvabilitas

Neraca juga membantu dalam menilai kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

d. Menilai Kinerja Keuangan

Informasi dalam neraca berguna untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah secara keseluruhan, termasuk kemampuan dalam mengelola aset dan kewajiban.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menggambarkan aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu, yang dikategorikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Aktivitas operasi mencakup kas yang dihasilkan dari operasi sehari-hari pemerintah daerah, investasi mencakup pembelian dan penjualan aset tetap, dan pembiayaan mencakup penerimaan dan pembayaran pinjaman serta transaksi ekuitas.

Fungsi:

a. Informasi Kemampuan Menghasilkan Kas

Laporan ini memberikan informasi tentang kemampuan daerah dalam menghasilkan kas dari operasi utamanya.

b. Penggunaan Kas

Menunjukkan bagaimana kas digunakan dalam berbagai aktivitas, seperti pembelian aset, pembayaran utang, dan lain-lain.

c. Evaluasi Kesehatan Keuangan

Laporan arus kas membantu dalam mengevaluasi kesehatan keuangan daerah, khususnya dalam hal likuiditas dan arus kas bersih.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menunjukkan hasil operasional pemerintah daerah selama periode tertentu, meliputi pendapatan operasional dan beban operasional. Pendapatan operasional mencakup pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama pemerintah daerah, sementara beban operasional mencakup biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas tersebut.

Fungsi:

a. Gambaran Kinerja Operasional

Laporan ini menyediakan gambaran tentang kinerja operasional daerah, termasuk efisiensi dan efektivitas dari operasi pemerintah daerah.

b. Evaluasi Efisiensi

Informasi mengenai beban operasional membantu dalam mengevaluasi efisiensi pengeluaran daerah.

c. Pengambilan Keputusan

Data operasional berguna untuk pengambilan keputusan manajerial dan strategis, serta untuk perencanaan jangka pendek dan panjang.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menyediakan informasi tambahan dan penjelasan terkait laporan keuangan utama. Ini mencakup kebijakan akuntansi yang diterapkan, rincian dan penjelasan dari pos-pos laporan keuangan, serta informasi lainnya yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pengguna laporan keuangan.

Fungsi:

a. Konteks Tambahan

CALK memberikan konteks yang lebih mendalam dan rinci untuk membantu pengguna memahami informasi yang disajikan dalam laporan utama.

b. Kebijakan Akuntansi

Menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan, yang penting untuk memahami dasar penyusunan laporan keuangan.

c. Penjelasan Rinci

Menyediakan rincian tambahan mengenai pos-pos laporan keuangan, seperti rincian aset, kewajiban, pendapatan, dan beban.

d. Informasi Relevan

Memberikan informasi tambahan yang mungkin tidak tercakup dalam laporan keuangan utama tetapi relevan untuk pemahaman keseluruhan laporan keuangan.

F. Sumber Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, tanpa bergantung pada pemerintah pusat. PAD mencakup beberapa komponen utama, yaitu:

a. Pajak Daerah

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak yang dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor di wilayah tertentu.

- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan.

- Pajak Hotel

Pajak yang dikenakan kepada pengelola hotel atas pendapatan yang diperoleh dari penyediaan akomodasi.

- Pajak Restoran

Pajak yang dikenakan kepada pengelola restoran atas pendapatan yang diperoleh dari penyediaan makanan dan minuman.

- Pajak Hiburan

Pajak yang dikenakan pada penyelenggaraan kegiatan hiburan, seperti bioskop, konser, dan sebagainya.

- Pajak Reklame

Pajak yang dikenakan atas penggunaan media reklame di daerah tersebut.

- Pajak Penerangan Jalan

Pajak yang dikenakan pada pengguna listrik untuk penerangan jalan di wilayah tertentu.

- Pajak Parkir

Pajak yang dikenakan kepada pengelola tempat parkir atas pendapatan yang diperoleh dari jasa parkir.

- Pajak Air Tanah

Pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah oleh individu atau perusahaan.
- b. Retribusi Daerah
 - Retribusi Jasa Umum

Biaya yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, seperti retribusi kebersihan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan sebagainya.
 - Retribusi Jasa Usaha

Biaya yang dikenakan atas penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk kegiatan usaha, seperti retribusi pasar, retribusi tempat rekreasi, dan retribusi terminal.
 - Retribusi Perizinan Tertentu

Biaya yang dikenakan atas pelayanan pemberian izin oleh pemerintah daerah, seperti retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan), retribusi izin trayek, dan retribusi izin gangguan (HO).
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - Dividen dari BUMD

Pembagian keuntungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola oleh pemerintah daerah.
 - Keuntungan dari Investasi Daerah

Pendapatan yang diperoleh dari investasi pemerintah daerah dalam berbagai bentuk, seperti saham, obligasi, atau investasi lainnya.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- Pendapatan dari Denda dan Sanksi Administratif

Pendapatan yang diperoleh dari denda atas pelanggaran peraturan daerah dan sanksi administratif lainnya.

- Pendapatan dari Sewa Aset Daerah

Pendapatan yang diperoleh dari penyewaan aset milik pemerintah daerah, seperti gedung, tanah, dan fasilitas lainnya.

- Pendapatan dari Jasa Lainnya

Pendapatan dari jasa-jasa lain yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti jasa laboratorium, jasa konsultasi, dan sebagainya.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Dana Perimbangan terdiri dari:

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Fungsi: Dana yang diberikan tanpa ada ikatan penggunaan tertentu, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Besaran: Ditentukan berdasarkan formula yang mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan variabel lainnya.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fungsi: Dana yang diberikan dengan ikatan penggunaan tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Jenis DAK: DAK Fisik dan DAK Non-Fisik, dimana DAK Fisik digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana, sedangkan DAK Non-Fisik digunakan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan.

c. Dana Bagi Hasil (DBH)

Fungsi: Dana yang dibagikan kepada daerah berdasarkan hasil dari pajak pusat dan sumber daya alam yang diperoleh dari daerah tersebut.

Jenis DBH: DBH Pajak (seperti DBH PPh, DBH PBB) dan DBH Sumber Daya Alam (seperti DBH Minyak Bumi, DBH Gas Bumi, DBH Pertambangan Umum).

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Selain PAD dan Dana Perimbangan, pemerintah daerah juga dapat memperoleh pendapatan dari sumber-sumber lain yang sah, termasuk:

a. Dana Hibah

- Hibah dari Pemerintah Pusat

Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tanpa kewajiban pengembalian, biasanya untuk proyek-proyek tertentu.

- Hibah dari Pemerintah Daerah Lain

Dana yang diberikan oleh pemerintah daerah satu kepada pemerintah daerah lainnya.

- Hibah dari Pihak Ketiga

Dana yang diberikan oleh organisasi internasional, NGO, atau pihak swasta kepada pemerintah daerah.

b. Dana Darurat

- Bantuan Keuangan Darurat

Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah lain dalam situasi darurat, seperti bencana alam, untuk membantu pemerintah daerah menangani kondisi darurat tersebut.

c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat atau Daerah Lain

- Bantuan Khusus

Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk tujuan khusus yang telah disepakati, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

G. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai aktivitas rutin sehari-hari dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belanja Operasi mencakup beberapa komponen utama:

a. Belanja Pegawai

- Gaji dan Tunjangan

Pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah daerah.

- Insentif dan Bonus

Pembayaran insentif dan bonus kepada pegawai yang berprestasi atau yang bekerja di daerah dengan kondisi khusus.

- Jaminan Sosial Pegawai
Pembayaran kontribusi untuk program jaminan sosial bagi pegawai, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Belanja Barang dan Jasa
- Pembelian Barang
Pengadaan barang yang digunakan untuk mendukung operasional pemerintah daerah, seperti alat tulis kantor, peralatan kerja, dan bahan bakar.
 - Pembayaran Jasa
Pembayaran untuk jasa yang digunakan oleh pemerintah daerah, seperti jasa konsultasi, jasa kebersihan, jasa keamanan, dan jasa penyelenggaraan acara.
- c. Belanja Bunga
- Pembayaran Bunga Pinjaman
Pembayaran bunga atas pinjaman yang diterima oleh pemerintah daerah dari lembaga keuangan atau pemerintah pusat.
 - Pembayaran Bunga Obligasi
Pembayaran bunga atas obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk mendanai proyek-proyek tertentu.
- d. Subsidi
- Subsidi Transportasi
Pemberian subsidi kepada penyedia layanan transportasi publik untuk menjaga tarif tetap terjangkau bagi masyarakat.

- **Subsidi Pangan**

Pemberian subsidi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

e. **Hibah**

- **Hibah kepada Organisasi**

Pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga lainnya yang berkontribusi dalam pembangunan daerah.

- **Hibah kepada Individu**

Pemberian hibah kepada individu, biasanya untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti kegiatan sosial dan keagamaan.

f. **Bantuan Sosial**

- **Bantuan Langsung**

Pemberian bantuan langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan, seperti bantuan untuk keluarga miskin, bantuan bencana, dan bantuan pendidikan.

- **Program Sosial**

Pendanaan program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program kesehatan, program pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi.

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal mencakup:

a. Pengadaan Aset Tetap

- Pembelian Tanah

Pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, dan taman.

- Pembangunan Gedung

Pembangunan gedung pemerintah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya.

- Pengadaan Infrastruktur

Pembangunan jalan, jembatan, saluran air, dan infrastruktur lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

b. Pengadaan Aset Lainnya

- Peralatan dan Mesin

Pembelian peralatan dan mesin yang digunakan untuk operasional pemerintah daerah, seperti kendaraan dinas, alat berat, dan mesin industri.

- Inventaris Kantor

Pengadaan inventaris kantor seperti meja, kursi, komputer, dan peralatan kantor lainnya.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran yang dialokasikan untuk keperluan yang tidak terduga dan tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja Tak Terduga mencakup:

a. Penanggulangan Bencana Alam

- Bantuan Darurat

Pemberian bantuan darurat kepada korban bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran.

- Pemulihan Infrastruktur

Pendanaan untuk perbaikan dan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.

b. Keperluan Mendesak Lainnya

- Situasi Darurat

Pembiayaan situasi darurat lainnya yang memerlukan respons cepat, seperti wabah penyakit, kerusakan, dan keadaan darurat lainnya.

- Perubahan Kebijakan

- Pembiayaan perubahan kebijakan yang mendesak dan belum teranggarkan sebelumnya.

H. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana di luar pendapatan dan belanja rutin. Pembiayaan ini penting untuk memastikan kelangsungan operasional dan mendukung proyek pembangunan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari dua komponen utama: Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah sumber-sumber dana yang diperoleh oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengeluaran di luar anggaran pendapatan rutin. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan mencakup:

a. Pinjaman Daerah

- Pinjaman Dalam Negeri

Dana yang dipinjam dari lembaga keuangan dalam negeri seperti bank, lembaga pembiayaan, atau pinjaman dari pemerintah pusat.

- Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari satu tahun, biasanya digunakan untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek.

- Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman dengan jangka waktu pelunasan lebih dari satu tahun, biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur dan investasi jangka panjang.

- Pinjaman Luar Negeri

Dana yang dipinjam dari lembaga keuangan internasional atau negara lain.

- Pinjaman Bilateral

Pinjaman yang diberikan oleh satu negara kepada negara lain.

- Pinjaman Multilateral

Pinjaman yang diberikan oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, atau Asian Development Bank.

b. Penerbitan Obligasi Daerah

- Obligasi Pemerintah Daerah

Surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat atau investor institusi.

- Obligasi Jangka Pendek
Obligasi dengan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun.
- Obligasi Jangka Panjang
Obligasi dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun, digunakan untuk proyek-proyek besar dan infrastruktur.

c. Lain-lain Sumber Pembiayaan

- Dana Cadangan
Penggunaan dana cadangan yang telah diakumulasikan oleh pemerintah daerah dari tahun-tahun sebelumnya.
- Transfer dari Pemerintah Pusat
Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai bantuan atau alokasi khusus untuk tujuan tertentu.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah penggunaan dana yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pemerintah daerah. Komponen utama pengeluaran pembiayaan mencakup:

a. Pembayaran Kembali Pinjaman

- Pelunasan Pokok Pinjaman
Pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo. Ini adalah pembayaran utama yang mengurangi saldo utang.
- Pinjaman Dalam Negeri
Pembayaran pokok atas pinjaman yang diterima dari lembaga keuangan dalam negeri.

- Pinjaman Luar Negeri
Pembayaran pokok atas pinjaman yang diterima dari lembaga keuangan internasional atau negara lain.
 - Pembayaran Bunga Pinjaman
Pembayaran bunga yang dikenakan atas pinjaman yang diterima oleh pemerintah daerah.
 - Bunga Pinjaman Dalam Negeri
Pembayaran bunga atas pinjaman dari bank atau lembaga keuangan dalam negeri.
 - Bunga Pinjaman Luar Negeri
Pembayaran bunga atas pinjaman dari lembaga keuangan internasional atau negara lain.
- b. Pengeluaran untuk Pembelian Kembali Obligasi Daerah
- Pelunasan Obligasi
Pengeluaran untuk membayar kembali obligasi yang telah diterbitkan dan jatuh tempo.
 - Obligasi Jangka Pendek
Pembayaran obligasi yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun.
 - Obligasi Jangka Panjang
Pembayaran obligasi yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

c. **Pembayaran Kewajiban Lainnya**

- **Kewajiban Non-Pinjaman**

Pembayaran untuk kewajiban lainnya yang tidak termasuk pinjaman, seperti pembayaran kontrak, kewajiban komersial, atau pembayaran utang jangka pendek yang bersifat operasional.

I. Pengendalian Intern Keuangan Daerah

Pengendalian intern keuangan daerah merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat mencapai tujuan-tujuan keuangan dan operasionalnya dengan cara yang efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern ini melibatkan beberapa komponen utama, yaitu Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Audit Internal.

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah rangkaian kebijakan, prosedur, dan tindakan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pemerintah daerah dapat dicapai dengan keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efisiensi operasional. Komponen utama dari SPI mencakup:

a. **Lingkungan Pengendalian**

- **Nilai dan Etika**

Budaya organisasi yang menekankan pentingnya integritas, etika kerja, dan perilaku yang sesuai dengan peraturan.

- **Struktur Organisasi**

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, termasuk pemisahan fungsi yang mencegah konflik kepentingan.

- Kebijakan Sumber Daya Manusia
Proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan yang memastikan pegawai memiliki kompetensi yang diperlukan.
- b. Penilaian Risiko
- Identifikasi Risiko
Mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
 - Analisis Risiko
Menilai kemungkinan dan dampak dari risiko yang teridentifikasi.
 - Tindakan Mitigasi
Menentukan dan menerapkan tindakan untuk mengurangi atau mengelola risiko.
- c. Aktivitas Pengendalian
- Prosedur dan Kebijakan
Menetapkan kebijakan dan prosedur yang memastikan transaksi dicatat dengan benar dan sesuai dengan peraturan.
 - Pemisahan Tugas
Memisahkan tugas-tugas yang terkait untuk mencegah penipuan dan kesalahan.
 - Pengawasan
Melakukan pengawasan dan pengendalian atas aktivitas keuangan untuk memastikan kepatuhan dan integritas.

d. Informasi dan Komunikasi

- Sistem Informasi

Memastikan bahwa sistem informasi keuangan mampu menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu.

- Komunikasi Internal

Menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk menyampaikan kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab pengendalian.

e. Pemantauan

- Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengendalian intern dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

- Audit dan *Review*

Melibatkan audit internal dan *review* oleh manajemen untuk memastikan pengendalian berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Audit Internal

Audit Internal adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan keandalan dan integritas laporan keuangan serta efektivitas dan efisiensi operasional. Komponen utama dari audit internal mencakup:

a. Perencanaan Audit

- Penentuan Risiko

Mengidentifikasi area-area yang memiliki risiko tinggi dan memerlukan perhatian lebih.

- Rencana Audit

Menyusun rencana audit yang mencakup tujuan, lingkup, dan metodologi yang akan digunakan.
- b. Pelaksanaan Audit
 - Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dan informasi yang relevan melalui observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen.
 - Analisis dan Evaluasi

Menganalisis data yang diperoleh untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta efektivitas pengendalian.
- c. Pelaporan Audit
 - Laporan Temuan

Menyusun laporan yang merangkum temuan audit, termasuk kekuatan dan kelemahan pengendalian intern.
 - Rekomendasi

Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan sistem pengendalian intern.
- d. Tindak Lanjut Audit
 - Implementasi Rekomendasi

Memastikan bahwa rekomendasi audit diimplementasikan oleh manajemen.
 - Pemantauan Tindak Lanjut

Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi untuk memastikan perbaikan dilakukan secara efektif.

Rangkuman

Ringkasan mengenai "Akuntansi Keuangan Daerah" di Indonesia menguraikan proses penting dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Akuntansi ini melibatkan pengumpulan, pencatatan, pengelompokan, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan untuk memastikan akurasi dan pertanggungjawaban yang tepat terhadap dana publik. Dasar hukum yang mengatur praktik ini meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengawasi manajemen keuangan negara dan perencanaan keuangan di semua tingkatan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan tanggung jawab manajemen dalam operasi perbendaharaan negara, dengan fokus pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 lebih lanjut mengatur prosedur pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan yang berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, mengarahkan penyusunan laporan keuangan yang konsisten dan dapat diandalkan untuk tujuan pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Secara prinsipil, akuntansi keuangan daerah di Indonesia didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, keandalan, dan komparabilitas. Prinsip akuntabilitas menjamin bahwa dana publik dipertanggungjawabkan secara jelas dan komprehensif melalui pelaporan yang terperinci tentang penggunaannya. Prinsip transparansi memastikan informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh semua

pihak terkait untuk mengawasi dan mengevaluasi manajemen keuangan daerah. Keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja keuangan. Sementara itu, komparabilitas memfasilitasi perbandingan informasi keuangan antar periode dan entitas untuk menilai efektivitas dari manajemen keuangan yang dijalankan.

Siklus akuntansi keuangan daerah mencakup pencatatan transaksi, klasifikasi akun, penyusunan laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Laporan Operasional, serta analisis mendalam untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan membuat rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak, retribusi, dan dividen dari perusahaan daerah, serta Dana Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) guna mendukung desentralisasi fiskal dan mengurangi disparitas ekonomi antar daerah.

Latihan Soal

Pilihan Ganda

Pengertian Akuntansi Daerah

1. Apa tujuan utama dari Akuntansi Keuangan Daerah?
 - a. Mengurangi pengeluaran pemerintah daerah.
 - b. Memastikan semua transaksi keuangan dicatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Menghilangkan kebutuhan akan audit eksternal.
 - d. Meningkatkan jumlah pendapatan daerah.

Landasan Hukum Akuntansi Keuangan Daerah

2. Undang-Undang yang mengatur tentang perbendaharaan negara adalah:
 - a. UU No. 17 Tahun 2003.
 - b. UU No. 1 Tahun 2004.
 - c. PP No. 12 Tahun 2019.
 - d. SAP.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan oleh:
 - a. Presiden
 - b. Kementerian Keuangan
 - c. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
 - d. Badan Pemeriksa Keuangan

Prinsip Akuntansi Keuangan Daerah

4. Prinsip yang menekankan pentingnya pelaporan yang jelas dan lengkap mengenai bagaimana dana publik digunakan disebut:
 - a. Transparansi
 - b. Keandalan
 - c. Komparabilitas
 - d. Akuntabilitas

Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

5. Proses pengelompokan transaksi dalam akun-akun yang relevan disebut:
 - a. Pencatatan Transaksi
 - b. Pelaporan Keuangan
 - c. Penggolongan Akun
 - d. Analisis dan Evaluasi

Komponen Laporan Keuangan Daerah

6. Laporan yang menunjukkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pendapatan dan belanja disebut:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan Arus Kas
 - d. Laporan Operasional

Sumber Pendapatan Daerah

7. Pajak yang dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor di wilayah tertentu disebut:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan

- b. Pajak Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Hotel
 - d. Pajak Restoran
8. Dana yang diberikan dengan ikatan penggunaan tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan prioritas nasional disebut:
- a. Dana Alokasi Umum
 - b. Dana Bagi Hasil
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - d. Dana Perimbangan
9. Pendapatan yang diperoleh dari penyewaan aset milik pemerintah daerah termasuk dalam:
- a. Retribusi Daerah
 - b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - c. Pajak Daerah
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
10. Apa yang dimaksud dengan Dana Perimbangan?
- a. Dana yang berasal dari pajak daerah
 - b. Dana yang merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
 - c. Dana yang berasal dari denda dan sanksi administrative
 - d. Dana yang diperoleh dari investasi daerah

AKUNTANSI KEUANGAN DESA

Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran

- ❖ Setelah membaca dan mempelajari *book chapter* ini pembaca dapat memahami tentang pengertian desa, tipe/kedudukan desa, ruang lingkup desa, dan SOTK Pemetintahan desa terkait dengan tugas dan fungsi aparatur desa.
- ❖ Setelah membaca dan mempelajari *book chapter* ini pembaca dapat mengetahui gambaran umum terkait dengan pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa

Capaian Pembelajaran

- ❖ Setelah membaca dan mempelajari *book chapter* ini pembaca dapat menjelaskan dan mendeskripsikan tentang pengertian desa, tipe/kedudukan desa, ruang lingkup desa, dan SOTK Pemerintahan desa terkait dengan tugas dan fungsi aparatur desa.
- ❖ Setelah membaca dan mempelajari *book chapter* ini pembaca dapat memiliki pemahaman dan mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa

DUMNMY

A. Akuntansi Keuangan Desa

1. Definisi Desa

Menurut definisi secara umum desa atau udik merupakan sebuah penyatuan permukiman di area perdesaan (*rural*). Dalam implementasinya desa mempunyai karakteristik yaitu: mempunyai nama, letak dan batas wilayah jelas sehingga dapat membedakan batas desa satu dengan desa lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. (Indra Bastian dkk, 2019) Untuk lebih jelasnya berikut disajikan pengertian desa menurut para ahli:

- a. Poerwadarminta (1976) dalam (Runa, 2017) berpendapat bahwa desa merupakan rumah yang berkelompok yang berada di lingkungan perdesaan. Dusun mempunyai arti suatu wilayah terpencil yang merupakan kebalikan dari kota, Pedesaan memiliki arti suatu wilayah pemukiman masyarakat yang dipengaruhi oleh keadaan tanah, cuaca, dan air sebagai persyaratan dalam mewujudkan kehidupan pertanian penduduk pada suatu wilayah
- b. Sutardjo Kartohadikusuma (1953:2) dalam (Dilahur, 1994) desa adalah satu kesatuan hukum yang dihuni oleh sekumpulan masyarakat yang mempunyai hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri.
- c. Desa menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, 2014) tentang desa. Desa merupakan satu kesatuan hukum yang mempunyai batas area dan mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan urusan negara yang bertumpu pada kepentingan masyarakat di wilayahnya

Berdasarkan uraian ahli dapat disimpulkan desa ialah masyarakat yang berkelompok yang menempati suatu area dengan batas-batas area yang jelas yang didalamnya terdapat aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pelayanan publik dapat berjalan efektif dan efisien.

2. Tipe/Kedudukan Desa

Tabel 11.1 Tipe/Kedudukan Desa

Tipe/Kedudukan	Azas	Deskripsi
Desa Adat	Pengakuan	Desa sebatas kesatuan masyarakat (<i>Self Governing Community</i>)
Desa Otonom	Pelimpahan Kewenangan	Desa sebatas suatu unit pemerintahan lokal yang berdiri-sendiri (<i>Local Self Government</i>)
Desa Administratif	Delegasi	Desa sebatas unit administarasi (<i>Local state Government</i>)

3. Ruang Lingkup Dan Nilai-Nilai Desa

Wilayah perdesaan merupakan sebuah wilayah yang dalam implementasinya melakukan aktivitas seperti pertanian, pengelolaan sumberdaya alam, pemerintahan maupun kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam menjalankan aktivitasnya di wilayah perdesaan menggunakan sistem persaudaraan masyarakat desa yang mana memiliki ciri khas yang kuat dan erat, nilai dan tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun. Berikut beberapa aspek penting dalam sistem persaudaraan masyarakat desa:

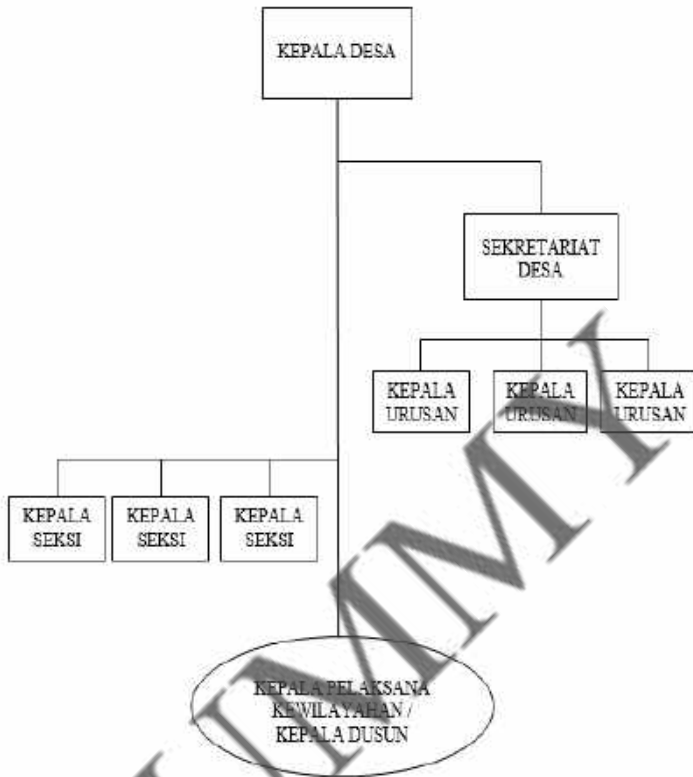
- 1) **Gotong Royong:** Masyarakat desa bahu-membahu saling bergotong royong dalam berkegiatan di lingkungan masyarakat, seperti bangun rumah, membersihkan lingkungan rumah, hingga panen tanaman padi di sawah. Nilai gotong royong ini menumbuhkan rasa kebersamaan, kekompakan, dan saling peduli antar sesama warga desa.

- 2) Tradisi Saling Tolong Menolong: Masyarakat desa selalu siap membantu tetangga yang membutuhkan, baik dalam hal materi maupun tenaga. Tradisi ini tertanam kuat dalam kehidupan mereka dan menjadi bagian dari norma sosial yang harus dipatuhi. Saling tolong menolong ini memperkuat rasa persaudaraan dan menciptakan suasana kekeluargaan yang erat di desa.
- 3) Sistem Kekeluargaan yang Kuat: Ikatan kekeluargaan di desa sangat kuat, bahkan seringkali dianggap lebih penting daripada hubungan individual. Anggota keluarga saling mendukung dan melindungi, serta memiliki rasa tanggung jawab bersama. Sistem kekeluargaan ini menjadi fondasi utama dalam menjaga keharmonisan dan kestabilan kehidupan di desa.
- 4) Tradisi dan Budaya Lokal: Tradisi turun-temurun juga berperan penting dalam memperkuat sistem persaudaraan di desa. Berbagai ritual adat, perayaan, dan kegiatan bersama lainnya menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk saling bersosialisasi, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.
- 5) Saling Menghormati dan Menghargai: nilai-nilai kesopanan dan menghormati sangat dijunjung tinggi masyarakat perdesaan. Mereka memahami pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga dan selalu berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai. Sikap saling menghargai ini menciptakan suasana yang harmonis dan penuh rasa kekeluargaan di desa.

Sistem persaudaraan masyarakat desa merupakan nilai-nilai historis bangsa yang dalam implementasinya seharusnya dijaga dan dilestarikan. Yang mana nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial membangun bangsa berkeadaban.

4. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Pada saat meyelenggarakan tugas pemerintahanya. Kepala Desa akan dibantu Perangkat Desa yang mana terdiri dari Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh staf yang mana Sekretariat Desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu tata usaha dan umum, keuangan dan perencanaan dan dipimpin oleh kepala urusan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati/ Walikota dan Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan dan dipimpin kepala seksi. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, 2015) Adapun struktur organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 11.1 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

Tugas dan Fungsi yang dimuat dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11.2 Tugas dan Fungsi Organisasi Pemerintahan Desa

No	Jabatan	Uraian Tugas dan Fungsi
1	Kepala Desa	Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan

		<p>Pemerintahan Desa. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa. b) Melaksanakan pembangunan. c) Pembinaan kemasyarakatan. d) Pemberdayaan masyarakat. seperti tugas sosialisasi dan motivasi e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
2	Sekretaris Desa	<ul style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan urusan ketatausahaan b) Melaksanakan urusan umum. c) Melaksanakan urusan keuangan d) Melaksanakan urusan perencanaan
3	Kepala Urusan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan lainnya b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

		<p>c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.</p>
4	Kepala Seksi	<p>a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.</p> <p>b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.</p> <p>c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi</p>

		terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
5	Kepala Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban dan penataan dan pengelolaan wilayah. b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan. d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

5. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut undang-undang merupakan hak dan kewajiban desa yang dalam implementasinya dapat dinilai dengan uang dan semuanya terkait pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang berdampak pada pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang perlu dikelola dengan baik dan benar. Adapun siklus pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 11.2 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Tahapan dalam mengelola keuangan desa memiliki ketentuan untuk dipatuhi dan dipahami serta diimplementasikan dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Untuk lebih jelasnya dalam memahami pengelolaan keuangan desa yang terkait pemerintah pusat/kabupaten/Kota, subjek pelaksana, APB Desa, laporan dan lingkungan strategisnya disertai dengan aturan yang ada ditunjukkan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 11.3 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk lebih jelasnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa (BPKP, 2016) dapat dijelaskan tahapan sebagai berikut:

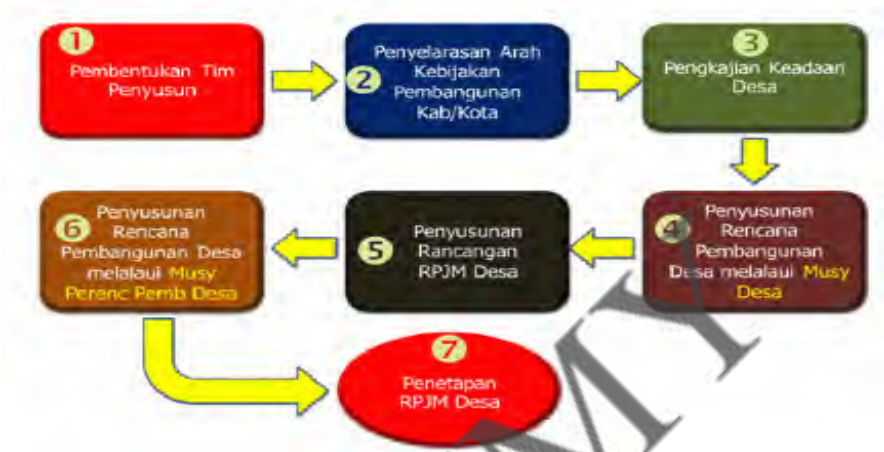
a. Perencanaan Desa

Perencanaan desa adalah suatu proses yang penting yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan stakeholder terkait untuk mencapai pembangunan desa yang efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa meliputi:

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) terdapat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan di semua bidang. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak kepala desa dilantik.

Adapun tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 11.4 Tahapan Penyusunan RPJM Desa

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa pada tahap awal membentuk tim penyusun RPJM Desa minimal 7 orang dan maksimal 11 orang yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala desa. Selanjutnya melakukan arah kebijakan pembangunan agar program terintegrasi dengan Kabupaten/Kota dan mempertimbangkan kondisi desa yang bermanfaat untuk masukan dalam musyawarah desa. Langkah selanjutnya penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa kemudian dituangkan dalam berita acara dan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM desa. Selanjutnya penyusunan rancangan RPJM Desa dan Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Setelah musyawarah perencanaan pembangunan desa dan rancangan RPJM Desa disepakati maka ditetapkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan turunan dari RPJM Desa yang mana dalam hal ini disusun berdasarkan informasi dari Kabupaten/Kota tentang pagu indikatif desa dan rencana kegiatan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. RKP Desa disusun pada bulan Juli dan paling lambat bulan September tahun berjalan. Adapun tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 11.5 Tahapan Penyusunan RKP Desa

Diawali dengan penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, kemudian dilanjutkan pembentukan tim penyusun, selanjutnya pencermatan pagu indikatif dan penyelarasan program disertai dengan pencermatan ulang RPJM Desa, kemudian menyusun rancangan RKP Desa dan menyelenggarakan

musyawarah perencanaan pembangunan desa dan diakhiri dengan penetapan RKP Desa.

Dokumen perencanaan tersebut berdasarkan atas dasar musyawarah desa dan dilaksanakan paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan. Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa merupakan bagian dari tahapan pengelolaan Dana Desa untuk menciptakan pengelolaan yang efektif dan akuntabel. Dana Desa yang bersumber dari APBN harus dikelola dengan baik dan transparan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan pendapatan desa adalah proses penerimaan berbagai sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan desa. Selanjutnya yaitu pelaksanaan belanja desa adalah proses pengeluaran dari rekening Kas Desa yang digunakan untuk membiayai program yang ditetapkan dan tercantum dalam APBDesa. Kemudian Penyelenggaraan kewajiban perpajakan atas transaksi keuangan yang wajib dikenakan pajak, bendahara desa memiliki kewajiban untuk melakukan kewajiban perpajakan untuk melakukan pemotongan/pemungutan. Adapun transaksi keuangan yang dikenakan pajak meliputi: pembayaran belanja barang, belanja jasa dan honor. Jenis-jenis pajak yang dipungut bendahara desa yaitu Pph 21, PPh 22, PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN serta Bea Materai. Selanjutnya tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam pasal 105 PP. nomor 43 tahun 2014 dan pelaksanaan pembiayaan desa yaitu proses penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa sebagaimana yang telah tercantum dalam APBDesa.

c. **Penatausahaan**

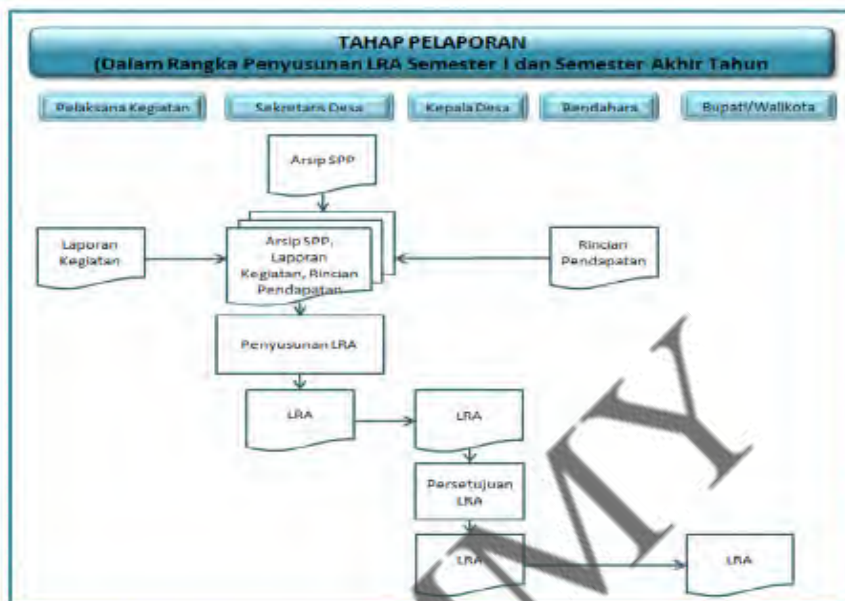
Penatausahaan keuangan desa yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa adalah proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa dengan menggunakan formulir/dokumen/buku yang dilakukan oleh bendahara desa, pelaksana kegiatan yang melibatkan pihak terkait lainnya. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada yaitu berupa **penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran belanja desa serta pembiayaan desa**. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan dengan cara sederhana yaitu berupa pembukuan dan belum menggunakan jurnal akuntansi.

d. **Pelaporan**

Prinsip akuntabilitas dan transparansi wajib dipenuhi oleh pemerintahan desa. Pemerintah Desa dalam hal ini kepala desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran/ tahunan dan tahunan yang disampaikan ke bupati/walikota. Adapun laporan yang disusun meliputi:

1) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan

Laporan ini mendeskripsikan terkait dengan implementasi pendapatan, belanja dan pembiayaan seluruh sumber dana yang dikelola oleh pemerintah desa selama satu semester yang dibandingkan dengan target/anggarannya. Adapun alur penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa adalah sebagai berikut:



Gambar 11.6 alur penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa

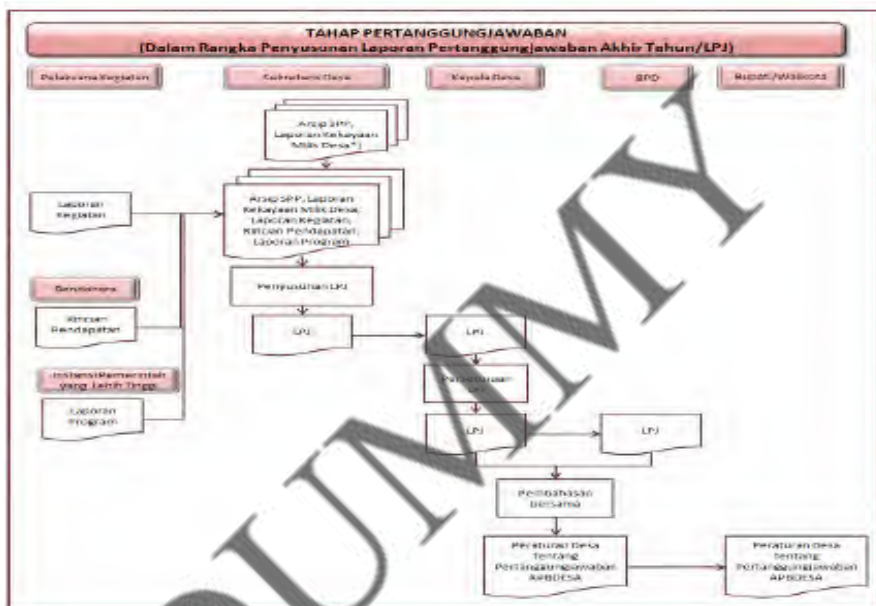
2) Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa.

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota sebagai persyaratan untuk setiap tahapan Peraturan Menteri Keuangan No 49/PMK.07/2016/. Laporan realisasi penggunaan dana desa terdiri dari: Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap 1

e. Pertanggungjawaban keuangan desa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa merupakan laporan yang disampaikan kepada BPD setiap tahun anggaran. Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun

anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa setelah dibahas dan di evaluasi bersama antara pemerintah desa dengan BPD selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Adapun alur penyusunan laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa adalah sebagai berikut:



Gambar 11.7 alur penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

Penetapan peraturan desa diatas perlu dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Rangkuman

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang definite, memiliki penduduk yang mempunyai potensi, sosial, budaya dan ekonomi yang hidup dan bekerja sama, serta memiliki pemerintahan desa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan berhak untuk memperjuangkan hak otonominya.

Adapun tahapan pengelolaan dana desa, meliputi:

1. **Perencanaan:**Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)
2. **Pelaksanaan:** Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAPBDes
3. **Penatausahaan:** Mencatat transaksi keuangan desa secara tertib dan teratur
4. **Pelaporan:** Menyusun laporan keuangan desa secara periodik
5. **Pertanggungjawaban:** Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada masyarakat desa dan pihak berwenang

Latihan Soal

1. Jelaskan definisi desa menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014?
2. Jelaskan ruang lingkup dan nilai-nilai masyarakat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa?
3. Sebutkan dan Jelaskan Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015?
4. Sebutkan dan Jelaskan Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa?
5. Apakah yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dalam tahapan perencanaan pengelolaa keuangan desa?

12

AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA

Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran

- ❖ Memahami apa yang dimaksud dengan karakteristik dan ruang lingkup organisasi nirlaba.
- ❖ Memahami tujuan penyampaian laporan keuangan organisasi nirlaba.
- ❖ Memahami laporan keuangan organisasi nirlaba.
- ❖ Memahami isi dan format laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas pada organisasi nirlaba.
- ❖ Memahami dan menerapkan bagaimana penerapan akuntansi pada organisasi nirlaba.

Capaian Pembelajaran

- ❖ Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan karakteristik dan ruang lingkup organisasi nirlaba.
- ❖ Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba.
- ❖ Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan laporan keuangan organisasi nirlaba.
- ❖ Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan bentuk laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas pada organisasi nirlaba.
- ❖ Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan penerapan akuntansi pada organisasi nirlaba seperti akuntansi yayasan, akuntansi LSM, akuntansi partai politik, akuntansi rumah sakit, akuntansi pendidikan, dan akuntansi perguruan tinggi.

A. Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang sehingga menyebabkan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pada organisasi laba maupun organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu yang menarik perhatian publik untuk suatu tujuan komersil tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Oleh karena itu, agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik maka perusahaan membutuhkan suatu informasi mengenai perusahaan tersebut dengan baik, benar, akurat, dan memiliki laporan keuangan yang dapat diandalkan. Penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba diatur oleh pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 45 yang bertujuan agar informasi lebih mudah dipahami dan lebih transparansi sehingga apa saja yang sudah dilaksanakan dapat mudah dipertanggungjawabkan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tahun 2017 dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al (2019) menyatakan bahwa definisi laporan keuangan sebagai berikut, “laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.” Salah satu fungsi utama informasi yang dihasilkan oleh penerapan akuntansi adalah pengendalian. Mengapa demikian? Karena informasi akuntansi dapat memberikan informasi yang bersifat kuantitatif sehingga dapat menjadi alat pengendalian yang penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan (Andarsari, 2016).

Organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu entitas nirlaba pemerintahan dan entitas nirlaba nonpemerintahan. Organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi komersial atau organisasi yang berorientasi kepada profit oleh pelanggan, donatur dan sukarelawan, pemerintah, anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu et al., 2019) memaparkan terjadinya kasus penipuan di daerah Jakarta Selatan yang oleh 2 orang paruh baya yang mengaku sebagai anggota Lembaga Kepedulian Masyarakat (LSM) Karawang, Jawa Barat. Mereka melakukan penipuan dengan modus meminta sumbangan untuk masjid dan yayasan. Ternyata saat dilakukan cek oleh petugas Dinas Sosial Jakarta Selatan terungkap bahwa semua dokumen yang dibawa oleh kedua paruh baya tersebut adalah dokumen palsu karena yayasan maupun alamat yang tercantum salah semua. Melihat kejadian tersebut, ternyata banyak oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan menyalahgunakan peluang besar tersebut untuk menjadikan dana sumbangan sebagai objek kejahatan. Oleh karena itu, untuk menghindari tindakan yang tidak bertanggungjawab maka organisasi nirlaba diharuskan untuk melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas sumbangan dana yang diberikan oleh penyumbang dana. Dalam hal ini, penyajian laporan keuangan adalah alasan yang sangat penting untuk terwujudnya akuntabilitas dan transparansi organisasi. Dengan adanya penyajian laporan keuangan dapat meminimalkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dan meningkatkan kredibilitas organisasi tersebut. Maka dari itu, penyajian laporan keuangan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku umum di Indonesia, yaitu PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam organisasi. Standar yang dibuat untuk memberikan kesetaraan

penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba dengan tujuan agar mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki daya banding yang tinggi dalam jangka panjang.

B. Karakteristik dan Ruang Lingkup Organisasi Nirlaba

1. Ruang Lingkup Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba didirikan dengan tujuan tidak mementingkan pendapatan suatu laba atau keuntungan dalam menjalankan kegiatannya. Menurut Costa et al (2014), sektor nirlaba menyatukan koperasi, asosiasi, perkumpulan bersama, yayasan, dan bentuk organisasi lainnya yang tujuan utamanya bukan pada maksimalisasi keuntungan. Menurut PSAK NO. 45 (2015:45.1) organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang memperoleh sumber daya dari pembeli sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Contoh organisasi nirlaba adalah organisasi keagamaan, rumah sakit, sekolah, organisasi swadaya masyarakat, serikat buruh, dan klinik publik. Organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan memupuk keuntungan memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Mahsun et al., 2011) :

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi

pembagian sumberdaya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Ada beberapa pandangan yang berbeda antara organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi komersil. Jika organisasi komersil memiliki tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan saat melaksanakan kegiatannya namun organisasi nirlaba tidak mementingkan adanya pendapatan atau keuntungan. Tujuan organisasi nirlaba adalah untuk melayani publik yang mana dalam hal ini untuk mengakses tempat umum yang diperuntukkan untuk publik. Terdapat perbedaan dalam pandangan donatur, pelanggan, pemerintah, anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba. Karyawan atau anggota yang terpilih dalam organisasi nirlaba memiliki tujuan yang tulus dalam mendukung organisasi untuk mencapai tujuannya. Bagi para donatur/ sukarelawan/*stakeholder* organisasi nirlaba meminta pertanggungjawab atas akuntansi dan laporan keuangan organisasi ke pengurus. Proses akuntansi bertujuan untuk memberikan informasi yang berkesinambungan hidup organisasi sebagai tempat berkarier karyawan. Oleh karena itu, laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi keuangan organisasi secara berkala dalam memberikan suatu gambaran kepada publik apakah visi misi organisasi tersebut direalisasikan.

Bagi para pelanggan atau pihak sasaran organisasi nirlaba berharap untuk memperoleh apa yang dijanjikan oleh organisasi sehingga mereka juga berhak mendapatkan informasi mengenai sasaran yang telah berhasil diraih. Bagi pemerintah, organisasi nirlaba wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diharapkan dapat menyumbangkan nilai positif bagi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya nasional. Selain itu, pentingnya laporan keuangan sebagai bahan umpan balik kepada pemerintah. Jika suatu saat terjadi berbagai harapan atau kepentingan yang berbenturan maka laporan keuangan dapat memberikan informasi bagi para pihak yang berkepentingan. Menurut Mahsun et.

al. (2011) sasaran utama laporan keuangan entitas nirlaba adalah untuk menyajikan informasi kepada penyedia sumber daya, yang ada pada masa berjalan dan pada saat yang akan datang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengambil keputusan rasional dalam pengalokasian sumber daya kepada entitas nirlaba. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan oleh publik, dan sumber daya dalam pengelolaan organisasi tersebut berasal dari publik, sehingga peruntukannya untuk kepentingan publik (Marlinah & Ibrahim, 2018). Menurut Andarsari (2016) terdapat tiga (3) perbedaan karakteristik antara organisasi nirlaba dengan organisasi bisnis atau perusahaan komersial yang dirangkum dalam tabel di bawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 12.1 Perbedaan Karakteristik Organisasi Nirlaba dan Organisasi Bisnis

Organisasi Nirlaba	Organisasi Bisnis
Didirikan untuk mewujudkan perubahan pada individu/ komunitas.	Didirikan untuk mencari keuntungan.
Tidak menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya.	Menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya.
Menerima kontribusi berupa sumber dana dalam jumlah signifikan dari donatur yang tidak mengharapkan pengembalian.	Menerima kontribusi sumber dana dari pemilik atau kreditor yang memiliki kepentingan untuk memiliki atau pembelian berupa keuntungan atau bunga.
Donatur/ pemberi dana tidak memiliki kepentingan terhadap organisasi.	Pemberi dana memiliki kepentingan untuk memiliki atau pengembalian dana.

Dikutip dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 (revisi 2011) dalam paragraf 01 disebutkan bahwa karakteristik organisasi nirlaba yaitu sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang/ donatur yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/ jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak adanya kepemilikan seperti pada organisasi bisnis. Organisasi nirlaba dimiliki oleh publik. Dengan kata lain kepemilikan organisasi nirlaba tidak dapat dijual atau dialihkan.

2. Dasar Pemikiran Akuntansi Organisasi Nirlaba

Badan yang menyusun standar akuntansi di Amerika Serikat yaitu *Financial Accounting Standard Board* (FASB) telah menyusun standar untuk laporan keuangan yang ditujukan bagi para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditor, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terlibat langsung atau tidak dalam manajemen entitas perusahaan. FASB juga berwenang untuk menyusun standar akuntansi bagi entitas nirlaba nonpemerintah, sementara *US Government Accounting Standard Board* (GASB) menyusun standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk pemerintah pusat dan federal AS. Di Amerika Serikat, organisasi nirlaba sudah ada sebelum pemerintah menangani masalah sosial dan organisasi nirlaba juga menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, jalan raya, serta barang, dan jasa lainnya selama berabad-abad yang lalu sebelum adanya pajak penghasilan (Falk, 2015).

Seluruh kegiatan organisasi nirlaba tidak ditujukan untuk mengumpulkan laba,

namun dalam prosesnya ternyata organisasi nirlaba dapat memperoleh keuntungan atas kinerja keuangan yang baik (surplus) karena aliran kas masuk melebihi aliran kas keluar (Rahayu et al., 2019). Surplus ini diperlukan organisasi nirlaba untuk memperbesar skala kegiatan pengabdian dan memperbaharui sarana organisasi yang rusak. Namun sebaliknya apabila surplus dinikmati oleh para pengurus dalam bentuk tantiem, gratifikasi, gaji, bonus, tunjangan perjalanan dinas, pinjaman bagi pendiri/ pengurus (setara dividen dalam entitas komersial) atau kenikmatan (mobil mewah, rumah tinggal, keanggotaan golf dan sebagainya), maka organisasi nirlaba menjadi berhakikat entitas komersial. Menurut Mahsun et al. (2011) organisasi nirlaba seringkali memfokuskan sumber dayanya kepada pelayanan tertentu, dengan inti yang berlapis dari dalam ke luar, berturut-turut melalui: (1) falsafah pelayanan, (2) budaya pelayanan, (3) citra pelayanan yang dirangkum menjadi (4) manajemen pelayanan; manajemen pelayanan meliputi (5) alasan pelayanan, (6) siapa yang dilayani, (7) apa bentuk pelayanan, di mana, kapan, dan bagaimana cara melayani. Peran akuntansi bagi organisasi nirlaba yaitu untuk memberikan sumbangan pada falsafah pelayanan. Selain itu juga berperan dalam media komunikasi yang dapat berpengaruh pada efektivitas sumber. Semakin tinggi keahlian dan reputasi para komunikator dalam hal ini adalah akuntan dan auditor maka semakin tinggi tingkat keandalan informasi atau pesan yang dihasilkan.

C. Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Laporan keuangan sangat berperan dalam membantu organisasi atau perusahaan untuk mengukur kinerjanya karena dapat memberikan informasi keuangan yang dipercaya kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Andarsari (2016) tujuan keuangan menurut PSAK No. 45 adalah menyediakan utama laporan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi

nirlaba. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2018):

1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumberdaya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumberdaya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
4. Memberikan informasi mengenai sumberdaya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
6. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.

7. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

Laporan keuangan dan pengungkapan memuat informasi yang digunakan bersama dapat membantu para donatur/ penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai dua aspek yaitu, (1) kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan (2) likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan kebutuhan dalam pendanaan eksternal.

D. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45, organisasi nirlaba perlu menyusun setidaknya empat (4) jenis laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut dijabarkan dalam penjelasan di bawah ini yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih pada waktu tertentu. Laporan aktivitas menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

2. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang tak

terpisahkan yang berisi penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan seperti informasi depresiasi aset, metode akuntansi yang digunakan, dan sebagainya. Organisasi nirlaba menggunakan basis akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan dan bebannya.

PSAK No. 45 mengelompokkan sumber daya organisasi nirlaba dalam 4 (empat) kategori yang masing-masing tergantung pada ada tidaknya pembatasan sebagai berikut (Andarsari, 2016):

- a. *Pembatasan permanen* adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya/ penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali agar sumber daya tersebut dapat dipertahankan secara permanen, tetapi entitas nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atas semua penghasilan atau manfaat ekonomi lain yang berasal dari sumber daya tersebut.
- b. *Pembatasan temporer* adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi sumber daya/ penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang menetapkan agar sumber daya tersebut dapat dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
- c. *Sumber daya terikat* adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya/ penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
- d. *Sumber daya tidak terikat* adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

E. Laporan Posisi Keuangan

Organisasi nirlaba dapat melaporkan masing-masing unsur aktiva seperti contoh kas dan setara kas; piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa lain; persediaan; sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar dimuka; surat berharga dan investasi jangka panjang; tanah, gedung, peralatan. Kas atau aktiva lain yang telah dibatasi penggunaannya oleh penyumbang haruslah disajikan secara terpisah dari kas atau aktiva lain yang tidak terikat penggunaannya. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing pada akun aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Sebagai contoh, aktiva bersih tidak terikat meliputi pendapatan dari jasa, dividen, penjualan barang, sumbangan dan dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aktiva bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akte pendirian serta dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur, dan pihak yang berkepentingan dengan organisasi (Mahsun et al., 2011).

F. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas memuat informasi mengenai bagaimana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam melaksanakan berbagai program/ jasa organisasi. Selain itu, informasi yang disajikan dalam laporan aktivitas dapat membantu para donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya dalam (1) mengevaluasi kinerja organisasi dalam suatu periode tertentu, (2) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasa, (3) menilai proses pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja para manajer. Penjelasan rinci mengenai informasi yang disajikan dalam laporan aktivitas adalah

sebagai berikut:

- 1) Laporan aktivitas menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode tertentu yang tercermin dalam aktiva bersih dalam laporan posisi keuangan.
- 2) Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat.
- 3) Dana sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer dimana tergantung pada ada tidaknya pembatasan.
- 4) Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.
- 5) Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto namun dapat juga disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- 6) Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental (peristiwa lain di luar pengendalian manajemen) seperti keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan gedung yang tidak terpakai lagi.
- 7) Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.

G. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bertujuan untuk menilai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas dan setara kas serta memberikan pandangan bagi para pemakai

untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai organisasi. Aktivitas pada laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas sebagai berikut ini:

- 1) Aktivitas pendanaan
 - a. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.
 - b. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (*endowment*).
 - c. Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
- 2) Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan nonkas sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

H. Akuntansi Sektor Yayasan

Menurut UU No. 16 Tahun 2001, pengertian yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuan dibentuknya yayasan guna melakukan aktivitas yang bersifat sosial keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan memiliki visi dan misi yang harapannya dapat diwujudkan oleh yayasan tersebut. Sumber pendanaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dapat berupa uang atau barang seperti sumbangan atau bantuan dari donatur. Dari sisi pertanggungjawabannya, dapat dibedakan menjadi pertanggungjawaban bersifat vertikal dan pertanggungjawaban bersifat horizontal. Pertanggungjawaban vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi misalnya pertanggungjawaban yayasan kepada Pembina. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana

kepada masyarakat luas sebagai bentuk dari proses akuntabilitas publik. Contoh perluasan dari akuntansi sektor yayasan yaitu akuntansi rumah sakit, akuntansi pendidikan, dan akuntansi perguruan tinggi yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Akuntansi Rumah Sakit

Akuntansi rumah sakit adalah salah satu bentuk kegiatan dari manajemen keuangan dimana memerlukan pengendalian yang terjadwal serta diperlukan pengawasan agar dapat memberikan data dan informasi yang mendukung dalam pengambilan keputusan. Siklus transaksi akuntansi rumah sakit digambarkan dalam bagan berikut (Biduri, 2018):



Gambar 12.1 Siklus Transaksi Akuntansi Rumah Sakit

Empat (4) laporan keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi yaitu:

- a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan rumah sakit tidak memiliki perbedaan mendasar dari proses sudut pandang penyusunan dan ilmu akuntansi jika dibandingkan dengan laporan posisi keuangan di sektor komersial. Terdapat beberapa catatan khusus yang

perlu diperhatikan yaitu antara lain sebagai berikut:

- Kas = Jumlah kas yang tercatat di laporan posisi keuangan tidak termasuk jumlah kas pada dana terikat yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi, sebagai contoh dana pembangunan.
- Piutang = Piutang dilaporkan pada jumlah yang diperkirakan dapat direalisasi. Dengan demikian, dibuat penyajian tentang “penyisihan piutang tak tertagih.
- Investasi = Investasi awal dicatat pada harga perolehan pada saat pembelian atau pada nilai wajar pada saat penerimaan apabila investasi diterima sebagai pemberian.
- Aktiva tetap = Aktiva tetap dilaporkan bersama dengan akumulasi depresiasinya dalam Dana Umum.
- Aktiva yang disisihkan = Klasifikasi aktiva terikat diberikan pada dana yang penggunaannya dibatasi oleh pihak eksternal rumah sakit yang mensponsori dana tersebut.
- Hutang jangka panjang = Hal ini berbeda dengan kebanyakan entitas pemerintahan yang melakukan pencatatan utang jangka panjangnya dalam suatu dana atau kelompok dana tertentu.
- Saldo dana = Saldo dana yang dimiliki oleh rumah sakit dipisahkan menjadi saldo dana (1) terikat, dapat digunakan dengan bebas sesuai kebijaksanaan dari rumah sakit, (2) terikat sementara waktu, baru dapat digunakan ketika kriteria tertentu dari pihak sponsor terpenuhi, dan (3) terikat permanen, hanya dikelola dan hanya dapat digunakan hasilnya saja.

b. Laporan Operasi

Hasil kegiatan operasi rumah sakit dilaporkan dalam laporan operasi. Mencakup informasi mengenai pendapatan, beban, untung dan rugi serta transaksi lainnya yang mempengaruhi saldo dana selama periode berjalan.

c. Laporan Perubahan Aktiva Bersih

Laporan ini menyajikan perubahan dalam ketiga kategori aktiva bersih yaitu tidak terikat, terikat sementara, dan terikat permanen.

d. Laporan Arus Kas

Format dari laporan arus kas rumah sakit serupa dengan yang digunakan untuk organisasi bisnis/ entitas komersial.

2) Akuntansi Pendidikan

Akuntansi pendidikan merupakan sektor yang tidak difokuskan untuk meraih profit dan melayani kepentingan publik. Pembangunan negara jangka panjang memiliki peran penting dalam pengelolaan akuntansi di sektor pendidikan. Menurut Biduri (2018) pengelolaan akuntansi yang tepat dan akurat akan memberikan informasi keuangan yang benar sehingga dapat menunjang proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan sekolah. Adanya pengelolaan akuntansi tersebut dapat menghasilkan efisiensi dalam sisi pembiayaan. Akuntansi berperan dalam dunia pendidikan karena menyediakan informasi kuantitatif bersifat keuangan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan. Siklus akuntansi dalam akuntansi pendidikan dikelompokkan ke dalam tiga (3) tahap yaitu antara lain:

- Tahap pencatatan = Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi serta bukti pencatatan.
- Tahap pengikhtisaran = Kegiatan berupa penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dan membuat ayat jurnal pembalik.
- Tahap pelaporan = Kegiatan berupa penyusunan Laporan Surplus Defisit,

Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Komponen laporan keuangan dalam akuntansi pendidikan yaitu terdiri laporan posisi keuangan (hanya melaporkan gambaran posisi keuangan pada saat tanggal neraca saja), laporan surplus defisit (menggambarkan kinerja keuangan suatu entitas), laporan arus kas (menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas investasi).

3) Akuntansi Perguruan Tinggi

Menurut Biduri (2018), akuntansi perguruan tinggi merupakan proses pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan dalam lembaga perguruan tinggi sebagai tolok ukur kinerja, media akuntabilitas, dan transparansi publik guna untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang terkait. Sumber pendanaan pada perguruan tinggi diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri. Sumber dana dari pemerintah meliputi anggaran pembangunan dan subsidi yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber dana dari masyarakat meliputi sumbangan pembinaan pendidikan (SPP); biaya seleksi masuk perguruan tinggi; sumbangan dan hibah baik perorangan, lembaga pemerintah maupun non pemerintah; hasil penjualan produk yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendidikan tinggi; serta penerimaan lainnya. Sedangkan sumber penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perguruan tinggi menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan akan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh

Pemerintah akan disetujui oleh senat perguruan tinggi. Jika sudah disetujui lalu akan diusulkan oleh Rektor/ Ketua/ Direktur melalui Menteri Pendidikan kepada Menteri Keuangan untuk kemudian disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi. Siklus proses akuntansi perguruan tinggi dimulai dari pencatatan transaksi sampai dengan tahap penyusunan laporan keuangan pada akhir periode, sama halnya dengan laporan keuangan operasi bisnis.

I. Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat dikategorikan sebagai organisasi nirlaba. Dalam kegiatan operasionalnya, LSM berupaya untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta meminimalisir dampak negatif atas aktivitasnya. Hal tersebut secara tidak langsung dapat membantu pada saat penganggaran. Akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang berperan penting dalam akhir proses pengendalian LSM sebagai proses akuntabilitas pada lembaga donor dan publik. LSM merupakan salah satu faktor yang berperan dalam proses penyelenggaraan pembangunan dalam pemberian layanan publik serta berkontribusi signifikan dalam menangani permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya LSM adalah organisasi swasta yang memiliki kegiatan dengan misi membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, menyediakan pelayanan dasar untuk masyarakat, melindungi lingkungan, serta menangani pengembangan masyarakat. Menurut Hall & O'Dwyer (2017), karakteristik akuntansi LSM yang nirlaba atau non-pemerintah dapat memberikan konteks yang bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita tentang berbagai isu yang menjadi perhatian para sarjana akuntansi.

LSM menyelenggarakan pembukuan berdasarkan peraturan yang berlaku dan diperiksa oleh peninjau organisasi dan pemberi dana. Menurut Mahsun et al (2011), laporan keuangan LSM sebaiknya disusun atas dasar akrual dengan begitu pengaruh

traksaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya serta dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Laporan keuangan LSM yang disusun atas dasar akrual akan memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas saja tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa mendatang serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Menurut PSAK No. 45, laporan keuangan yang dihasilkan untuk organisasi LSM adalah Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas.

J. Akuntansi Partai Politik

Akuntansi partai politik dibutuhkan adanya transparansi pertanggungjawaban keuangan sehingga partai politik dapat diselenggarakan secara adil, jujur, dan demokratis dalam membangun demokrasi yang berkredibilitas tinggi. Dalam akuntansi bagi partai politik, akuntansi sangat berperan penting dalam menyusun laporan keuangan yang baik agar dapat memperoleh opini WTP dari auditor eksternal, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan pada *stakeholders* bahwa tata kelola perusahaan telah berjalan baik dalam partai politik tersebut. Nilai yang harus ditanamkan dalam tata kelola perusahaan antara lain keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
- 2) Dalam memperoleh dukungan nasional dan internasional, para sponsorship dan donatur tidak ragu mengalirkan dana ke partai tersebut karena dinilai transparan dan bertanggung jawab dalam manajemen keuangan partai.
- 3) Meminimalisir kasus-kasus keuangan yang timbul dalam partai politik agar tidak menimbulkan preseden buruk atau kasus yang dapat menggoyangkan legitimasi kader partai.

Sumber dana partai politik dapat diperoleh dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan dari anggaran negara. Partai politik harus transparan karena telah menggunakan dana publik yang besar sehingga harus mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan dalam bentuk penyampaian Laporan Dana Kampanye serta laporan keuangan khusus untuk partai politik yang harus diaudit oleh akuntan publik dan disampaikan ke KPU serta dapat diakses terbuka oleh publik. Laporan keuangan yang disusun akan menjadi bentuk akuntabilitas atas dana-dana publik yang telah organisasi gunakan sebagai bentuk *compliance* (kepatuhan) terhadap ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2002. Dalam bukunya, Mahsun et al (2011) mengatakan bahwa hal khusus yang berkaitan dengan akuntansi keuangan partai politik adalah *form over substance*, bukan *substance over form*. Berdasarkan ketentuan *form over substance*, maka partai politik harus mencatat transaksi keuangannya berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh KPU, tetapi jika ada hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan KPU maka akuntansi partai politik dapat mengacu pada standar akuntansi yang berlaku umum.

Penyusunan laporan keuangan partai politik terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan dalam aktiviata neto/ ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Akuntansi berperan dalam lingkungan partai politik yang dapat dibedakan dalam dua pihak yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yaitu ketua partai politik dan para staf. Mereka menggunakan akuntansi untuk menyusun perencanaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha memenuhi tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Sedangkan pihak eksternal terdiri dari donatur, pemasok, dan konstituen/ basis masa. Mereka menggunakan akuntansi sebagai informasi keuangan mengenai keseriusan dan kredibilitas partai politik dalam menjalankan program-programnya. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat mendapatkan simpati besar yang positif dari masyarakat. Akuntansi dalam

organisasi nirlaba diklasifikasikan ke dalam tiga (3) sektor yaitu akuntansi sektor yayasan, akuntansi sektor lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan akuntansi sektor partai politik.

DUMNMY

Rangkuman

Terdapat perbedaan mendasar antara organisasi nirlaba dengan organisasi komersial yaitu organisasi nirlaba didirikan oleh publik dan sumber daya dalam pengelolaan organisasi tersebut berasal dari publik serta tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau menghasilkan laba. Dalam PSAK No. 45 telah mengatur tentang organisasi nirlaba dimana karakteristik entitas nirlaba ditandai dengan perolehan sumbangan untuk sumber daya utama (aset), penyumbang bukan pemilik entitas dan tak berharap akan hasil, imbalan, atau keuntungan komersial. Laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari empat (4) laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Terdapat perbedaan antara laporan keuangan organisasi nirlaba dengan laporan keuangan untuk organisasi bisnis pada umumnya.

Tidak terdapat perbedaan yang mencolok dari laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan antara organisasi bisnis dan organisasi nirlaba. Dalam menyusun laporan arus kas tetap menggunakan metode yang diterapkan sebagaimana pada organisasi bisnis lainnya, sedangkan catatan atas laporan keuangan merupakan catatan yang memuat informasi-informasi yang diperlukan sehubungan dengan laporan keuangan lainnya serta kegiatan tertentu yang diadakan oleh organisasi. Dalam penyusunan laporan keuangan, organisasi nirlaba perlu menyesuaikan dengan karakteristik organisasinya namun tetap mengacu kepada prinsip akuntansi berterima umum yang berlaku di Indonesia. Akuntansi organisasi nirlaba dapat diklasifikasikan ke dalam tiga (3) sektor yaitu akuntansi sektor yayasan, akuntansi sektor lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan akuntansi sektor partai politik.

Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan organisasi nirlaba dengan organisasi bisnis!
2. Jelaskan tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba!
3. Jelaskan tujuan laporan keuangan yang disusun oleh Yayasan!
4. Mengapa laporan keuangan organisasi LSM sebaiknya berbasis akrual?
5. Jelaskan manfaat bagi sektor partai politik apabila laporan keuangan mereka disusun dengan baik!

DUMMMY

KONSEP OTONOMI DAERAH

Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran

- ❖ Memahami Konsep Otonomi Daerah.
- ❖ Menganalisis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- ❖ Mengidentifikasi Kewenangan Daerah dalam Akuntansi Sektor Publik.
- ❖ Memahami Struktur Pemerintahan Daerah dalam Akuntansi Sektor Publik.

Capaian Pembelajaran

- ❖ Mahasiswa dapat menjelaskan tujuan dan manfaat dari otonomi daerah serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.
- ❖ Mahasiswa dapat menganalisis dampak otonomi daerah terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

- ❖ Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengusulkan kebijakan untuk mengatasi tantangan dalam implementasi otonomi daerah.
- ❖ Mahasiswa memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

DUMNMY

A. Pendahuluan

Otonomi daerah adalah konsep penting dalam tata kelola pemerintahan yang memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Dalam konteks akuntansi sektor publik, otonomi daerah memiliki implikasi signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, pelaporan keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah.

1. Konsep Dasar Otonomi Daerah

a) Definisi Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

b) Dasar Hukum Otonomi Daerah

Di Indonesia, otonomi daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah serta menetapkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

2. Tujuan Otonomi Daerah

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.
- Memperkuat demokrasi dan stabilitas politik di tingkat lokal.
- Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah.

3. Manfaat Otonomi Daerah

Otonomi daerah memberikan sejumlah manfaat penting dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi sektor publik. Berikut adalah beberapa manfaat utama:

a) Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan

- **Pengelolaan Anggaran yang Lebih Responsif**

Dengan kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah dapat merespons kebutuhan lokal secara lebih cepat dan tepat. Hal ini memungkinkan alokasi anggaran yang lebih efektif sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat.

- **Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas**

Desentralisasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran daerah. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

b) Pengembangan Potensi Lokal

- **Optimalisasi Sumber Daya Daerah**

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya lokal. Ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengembangan ekonomi lokal dan pengelolaan aset daerah yang lebih baik.

- **Pemberdayaan Ekonomi Lokal**

Dengan kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) serta industri lokal, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c) **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

- **Pelayanan yang Lebih Cepat dan Tepat**

Pemerintah daerah yang otonom memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan layanan publik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Ini dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

- **Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik**

Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mencoba pendekatan baru dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.

d) **Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat**

- **Partisipasi Aktif Masyarakat**

Desentralisasi memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dan pengelolaan keuangan daerah.

- **Penguatan Lembaga-Lembaga Lokal**

Otonomi daerah mendorong penguatan lembaga-lembaga lokal, termasuk dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan representatif.

e) **Pengurangan Ketergantungan pada Pemerintah Pusat**

- **Kemandirian Fiskal Daerah**

Dengan kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan sendiri, daerah dapat mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah

pusat. Ini mendorong daerah untuk lebih mandiri secara fiskal dan mengembangkan strategi pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.

- **Penguatan Otonomi Keuangan**

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan keuangan yang sesuai dengan kondisi lokal, yang pada akhirnya meningkatkan stabilitas dan kemandirian keuangan daerah.

4. Implikasi Otonomi Daerah dalam Akuntansi Sektor Publik

a) Pengelolaan Keuangan Daerah

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan mereka sendiri. Ini termasuk pengumpulan pendapatan, pengelolaan anggaran, dan pengalokasian dana untuk berbagai program dan proyek pembangunan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keuangan daerah dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

b) Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara periodik. Laporan keuangan ini harus mencerminkan kondisi keuangan daerah secara akurat dan dapat dipercaya. Standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan di tingkat daerah harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

c) Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Otonomi daerah meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Mekanisme

pengawasan dan audit, baik internal maupun eksternal, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

d) Pengaruh Terhadap Pembangunan Daerah

Dengan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Hal ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

5. Tantangan dalam Implementasi Otonomi Daerah

a) Kapasitas Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan utama dalam implementasi otonomi daerah adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal. Pemerintah daerah sering menghadapi kesulitan dalam mengelola keuangan dan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar.

b) Transparansi dan Pengawasan

Meskipun otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah, tetap diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Audit internal dan eksternal harus dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyimpangan.

c) Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat

Implementasi otonomi daerah harus tetap sinkron dengan kebijakan dan program pemerintah pusat. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang harmonis.

6. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah dalam Akuntansi Sektor Publik

a) Prinsip Desentralisasi

- Pengertian: Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
- Implikasi dalam Akuntansi: Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyusun anggaran, mengelola sumber daya keuangan, dan melaporkan keuangan secara mandiri. Akuntansi di tingkat daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan standar akuntansi nasional.

b) Prinsip Demokrasi

- Pengertian: Pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- Implikasi dalam Akuntansi: Penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan harus dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi dalam penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan diperlukan untuk memastikan akuntabilitas publik.

c) Prinsip Akuntabilitas

- Pengertian: Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas penggunaan dana publik dan pelaksanaan program.
- Implikasi dalam Akuntansi: Laporan keuangan daerah harus disusun secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme audit, baik internal maupun eksternal, diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku.

d) Prinsip Efisiensi dan Efektivitas

- Pengertian: Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan memaksimalkan hasil yang diperoleh dari sumber daya yang tersedia.
- Implikasi dalam Akuntansi: Pemerintah daerah harus menyusun anggaran dan mengelola keuangan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Setiap pengeluaran harus diukur berdasarkan manfaat yang diperoleh, dan penggunaan sumber daya harus dioptimalkan.

e) Prinsip Transparansi

- Pengertian: Informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah harus tersedia dan dapat diakses oleh publik.
- Implikasi dalam Akuntansi: Laporan keuangan daerah harus disusun secara transparan dan dipublikasikan untuk memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi keuangan daerah harus dirancang untuk memfasilitasi akses publik terhadap informasi keuangan.

f) Prinsip Kepastian Hukum

- Pengertian: Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Implikasi dalam Akuntansi: Pemerintah daerah harus mematuhi standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan hukum. Kepastian hukum diperlukan untuk menghindari penyimpangan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan benar.

g) Prinsip Kemandirian

- Pengertian: Pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya keuangan secara mandiri.
- Implikasi dalam Akuntansi: Pemerintah daerah harus mengembangkan kapasitas untuk mengelola keuangan secara mandiri, termasuk dalam penyusunan anggaran, pengelolaan pendapatan, dan pelaporan keuangan. Kemandirian dalam pengelolaan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

B. Kewenangan Daerah dalam Akuntansi Sektor Publik

Kewenangan daerah dalam akuntansi sektor publik adalah hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Kewenangan ini diberikan dalam rangka desentralisasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

1. Kewenangan Daerah dalam Akuntansi Sektor Publik

a) Penyusunan Anggaran Daerah (APBD)

- Deskripsi: Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencakup perencanaan pendapatan dan pengeluaran daerah.
- Implikasi: Proses penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran harus disusun secara transparan dan akuntabel untuk mencerminkan prioritas pembangunan daerah.

b) Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Deskripsi: Pemerintah daerah berwenang untuk mengelola berbagai sumber pendapatan, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dana transfer dari pemerintah pusat, dan sumber pendapatan lainnya.
- Implikasi: Pendapatan daerah harus dikelola dengan efektif dan efisien. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses pemungutan pendapatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melibatkan mekanisme pengawasan yang ketat.

c) Pengelolaan Belanja Daerah

- Deskripsi: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola belanja daerah yang mencakup belanja operasional, belanja modal, dan belanja lainnya.
- Implikasi: Pengelolaan belanja harus dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, serta mematuhi standar akuntansi pemerintah. Setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

d) Pengelolaan Aset Daerah

- Deskripsi: Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola aset yang dimiliki oleh daerah, termasuk tanah, bangunan, peralatan, dan aset lainnya.
- Implikasi: Aset daerah harus dikelola dengan baik untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu menyusun inventarisasi aset, melakukan pemeliharaan rutin, dan memastikan bahwa aset digunakan secara optimal.

e) Pelaporan Keuangan Daerah

- Deskripsi: Pemerintah daerah berwenang untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan daerah secara berkala.
- Implikasi: Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan mencerminkan kondisi keuangan daerah secara akurat dan transparan. Pelaporan keuangan yang baik akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

f) Audit dan Pengawasan Keuangan

- Deskripsi: Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur mekanisme audit dan pengawasan keuangan internal dan eksternal.
- Implikasi: Audit internal dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga independen lainnya bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan daerah.

g) Pengelolaan Utang Daerah

- Deskripsi: Pemerintah daerah dapat mengelola utang daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah.
- Implikasi: Pengelolaan utang harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa utang digunakan untuk kegiatan produktif dan memiliki kemampuan untuk membayar kembali utang tersebut.

h) Implementasi Teknologi Informasi

- Deskripsi: Pemerintah daerah berwenang untuk mengimplementasikan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

- Implikasi: Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Sistem informasi keuangan daerah (SIKD) harus dikembangkan dan digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan yang lebih baik.

C. Struktur Pemerintahan Daerah dalam Akuntansi Sektor Publik

Struktur pemerintahan daerah dalam akuntansi sektor publik merupakan rerangka organisasi yang mengatur dan mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Struktur ini mencakup berbagai tingkat pemerintahan dan unit kerja yang berperan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah. Pemahaman tentang struktur ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan peraturan yang berlaku.

Struktur Pemerintahan Daerah

1. Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi

- a. Gubernur: Kepala daerah yang memimpin pemerintahan tingkat provinsi dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.
- b. Wakil Gubernur: membantu gubernur dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pengelolaan keuangan.
- c. Sekretariat Daerah (Setda): mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keuangan daerah. Terdiri dari beberapa bagian seperti:
 - Bagian Keuangan
 - Bagian Perencanaan
 - Bagian Pengawasan

- e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): mengelola keuangan dan aset daerah, termasuk penyusunan laporan keuangan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi: Lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengesahan anggaran daerah.

2. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Bupati/Walikota: kepala daerah yang memimpin pemerintahan tingkat kabupaten/kota dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah.
- b. Wakil Bupati/Wakil Walikota: membantu bupati/walikota dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pengelolaan keuangan.
- c. Sekretariat Daerah (Setda): mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keuangan daerah di tingkat kabupaten/kota.
 - Bagian Keuangan
 - Bagian Perencanaan
 - Bagian Pengawasan
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): Mengelola keuangan dan aset daerah di tingkat kabupaten/kota, termasuk penyusunan laporan keuangan.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota: Lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengesahan anggaran daerah di tingkat kabupaten/kota.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

- Deskripsi: Unit kerja di bawah pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab spesifik dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Contoh: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan lain-lain.
- Tugas dan Fungsi: Menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan dan program kerja, melaksanakan anggaran yang telah disetujui, serta menyusun laporan keuangan untuk dilaporkan kepada kepala daerah dan DPRD.

4. Inspektorat Daerah

- Deskripsi: Lembaga pengawasan internal yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- Tugas dan Fungsi: Melakukan audit internal terhadap pengelolaan keuangan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD)

- Deskripsi: Unit kerja yang bertanggung jawab atas pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- Tugas dan Fungsi: Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan, melakukan pemungutan pajak dan retribusi, serta memastikan bahwa pendapatan daerah dikelola dengan efektif dan efisien.

6. Unit Pengelola Aset Daerah

- Deskripsi: Unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- Tugas dan Fungsi: Melakukan inventarisasi aset, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan aset daerah untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik.

D. Sumber Pendapatan Daerah dalam Akuntansi Sektor Publik

Pendapatan daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Berikut adalah sumber-sumber utama pendapatan daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

b) Retribusi Daerah

Biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada masyarakat, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir, dan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan atau pemanfaatan aset daerah, seperti dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil sewa aset daerah.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan, seperti pendapatan dari jasa giro, hasil penjualan aset daerah, dan pendapatan dari kerja sama dengan pihak ketiga.

2. Dana Perimbangan

a) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan umum pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah.

b) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional dan sesuai dengan kebutuhan daerah. DAK biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang dianggap penting.

c) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang berasal dari penerimaan negara dari sumber daya alam dan pajak tertentu yang dibagikan kepada daerah berdasarkan proporsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah DBH dari minyak dan gas bumi, kehutanan, perikanan, dan pajak penghasilan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a) Pendapatan Hibah

Bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga atau organisasi internasional, dan pihak swasta tanpa ikatan yang mengikat.

b) Pendapatan dari Kerja Sama Antar Daerah

Pendapatan yang diperoleh dari kerja sama antar pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, seperti kerja sama dalam pengelolaan sumber daya alam atau pembangunan infrastruktur bersama.

c) Pendapatan dari Sumber Lain yang Diatur oleh Peraturan Perundang-undangan

Sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pendapatan dari denda administrasi, penjualan barang milik daerah yang tidak digunakan, dan pendapatan dari pengelolaan limbah.

E. Evaluasi dan Pengawasan Otonomi Daerah dalam Akuntansi Sektor Publik

Evaluasi dan pengawasan otonomi daerah adalah aspek kritis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Berikut adalah beberapa aspek penting dari evaluasi dan pengawasan otonomi daerah dalam akuntansi sektor publik:

1. Evaluasi Otonomi Daerah

a) Kinerja Keuangan Daerah

Evaluasi dilakukan terhadap kinerja keuangan daerah, termasuk pendapatan asli daerah (PAD), efektivitas pengelolaan anggaran, dan rasio belanja terhadap

pendapatan. Indikator kinerja keuangan ini membantu mengukur sejauh mana daerah mampu mengelola keuangan secara mandiri dan efisien.

b) Penggunaan Dana Perimbangan

Evaluasi juga dilakukan terhadap penggunaan dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuannya adalah memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan.

c) Kualitas Layanan Publik

Evaluasi terhadap kualitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan administrasi. Ini melibatkan penilaian terhadap tingkat kepuasan masyarakat dan efektivitas program-program yang dijalankan.

2. Pengawasan Otonomi Daerah

a) Internal Audit

Pemerintah daerah memiliki satuan pengawasan internal yang bertugas melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja operasional. Internal audit ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan pertama untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan.

b) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

c) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK mengawasi dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi di tingkat daerah. KPK berperan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

3. Mekanisme Pengawasan Masyarakat

a) Transparansi dan Partisipasi Publik

Pemerintah daerah diharuskan untuk menginformasikan dan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran dan pengawasan penggunaan anggaran. Transparansi anggaran dan partisipasi publik meningkatkan akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyelewengan.

b) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Setiap pemerintah daerah wajib menyusun LAKIP yang memuat informasi mengenai kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan. LAKIP menjadi alat bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

c) Media dan LSM

Media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai watchdog yang mengawasi kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan daerah. Mereka memberikan laporan independen yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah daerah.

4. Penguatan Kapasitas Pengawasan

a) Pelatihan dan Pendidikan

Meningkatkan kapasitas aparatur pengawas internal melalui pelatihan dan pendidikan mengenai teknik-teknik audit dan pengawasan terbaru. Ini penting untuk

memastikan bahwa pengawas memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

b) Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Implementasi SIPKD yang terintegrasi untuk memfasilitasi proses pengawasan dan pelaporan keuangan secara real-time. Sistem ini membantu dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini.

DUMNMY

Rangkuman

Otonomi daerah merupakan konsep penting dalam tata kelola yang memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, otonomi daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah serta menetapkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Otonomi daerah memiliki implikasi signifikan dalam pengelolaan keuangan publik, pelaporan keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya finansial secara mandiri, termasuk pengumpulan pendapatan, pengelolaan anggaran, dan alokasi dana untuk berbagai program dan proyek pembangunan. Selain itu, otonomi daerah juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik dan pemerintah pusat melalui mekanisme pengawasan dan audit baik internal maupun eksternal.

Implementasi otonomi daerah dihadapkan pada beberapa tantangan, termasuk kapasitas sumber daya manusia yang terbatas di tingkat lokal, perlunya mekanisme pengawasan yang efektif, serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang harmonis. Meskipun demikian, otonomi daerah memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat ekonomi lokal, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta contoh masing-masing!
2. Apa yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam konteks pengelolaan keuangan daerah? Berikan contoh penggunaan DAK yang umum!
3. Sebutkan dan jelaskan salah satu mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah!
4. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah dalam konteks tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah?
5. Apa manfaat utama dari implementasi otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi sektor publik?
6. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah dalam akuntansi sektor publik?

REGULASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran

- ❖ Mahasiswa dapat memahami konsep dasar akuntansi sektor publik, termasuk perbedaan antara akuntansi berbasis kas dan berbasis akrual.
- ❖ Mahasiswa mampu mengaplikasikan standar akuntansi berbasis akrual, seperti IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik.
- ❖ Memahami dampak implementasi akuntansi akrual terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan entitas publik.
- ❖ Mahasiswa dapat mengevaluasi kebutuhan dan tantangan dalam transisi dari akuntansi kas ke akuntansi akrual di berbagai konteks negara.

- ❖ Membandingkan dan mengontraskan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta, termasuk penggunaan nilai wajar dan evaluasi aset.

Capaian Pembelajaran

- ❖ Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar akuntansi sektor publik, termasuk penyesuaian untuk kinerja keuangan dan posisi keuangan.
- ❖ Mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi sektor publik yang berlaku, dengan memperhatikan aspek nilai wajar dan evaluasi aset.
- ❖ Mahasiswa mampu menganalisis dampak implementasi akuntansi akrual terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dan keputusan kebijakan di entitas sektor publik.
- ❖ Dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan dalam penerapan akuntansi akrual di berbagai negara, serta memberikan solusi yang dapat diterapkan.
- ❖ Mampu membandingkan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik dengan praktik akuntansi sektor swasta, serta menganalisis kelebihan dan kekurangannya dalam konteks yang berbeda.

Standar Akuntansi Sektor Publik

Sebelumnya pemerintah tidak memiliki standar akuntansi internasional yang ditujukan untuk penyajian laporan keuangan dan hasil anggaran yang seragam. Berbagai pemerintah mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan anggaran mereka dari titik awal mereka sendiri. Hal ini menyebabkan beragamnya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sektor public. Meskipun demikian, ciri umum dalam menyiapkan akun adalah pembukuan berbasis kas atau berbasis kas yang dimodifikasi. Pemerintah telah menekankan pengendalian moneter dan anggaran serta penyajian perhitungan hasil anggaran alih-alih penyajian kinerja keuangan (laba rugi) dan posisi keuangan (Monsen, 2002, 2007).

Situasinya kemudian berubah secara signifikan. Pemikiran New Public Management (NPM) telah menyebabkan pemerintah semakin banyak menggunakan akuntansi berbasis akrual dan juga menyajikan laporan kinerja dan posisi keuangan. Sejak tahun 2000 IFAC telah merilis standar akuntansi berbasis akrual sektor publik internasional (IPSAS) untuk semua entitas sektor publik baik itu pemerintah pusat nasional maupun pemerintah daerah. Tujuan dari IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board) dari IFAC adalah untuk melayani kepentingan publik dengan mengembangkan standar akuntansi berkualitas tinggi untuk digunakan oleh entitas sektor publik di seluruh dunia dalam penyusunan laporan keuangan bertujuan umum (GPFS) (IFAC, 2008, 4). Pada akhir Juli 2012, IPSASB telah merilis 32 standar berbasis akrual untuk pemerintah.

Akuntansi berbasis akrual untuk sektor publik dapat menekankan evaluasi nilai wajar dan aset serta liabilitas (pendekatan neraca) atau biaya historis dan laporan laba rugi (pendekatan pendapatan-biaya) (Hintz, 2007, 328–330). IPSASB yakin ketika mulai merilis standar bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah sama untuk sektor publik dan sektor swasta. Oleh karena itu, IPSASB memilih standar IAS/IFRS sebagai dasar untuk standar sektor publik (Christiaens et al., 2010, 540).

Satu elemen penting lebih lanjut adalah bahwa IAS/IFRS sangat bergantung pada konsep dan pengukuran yang berasal dari akuntansi nilai wajar dan pendekatan neraca. Titik awal ini menyebabkan masalah dalam identifikasi, pengukuran, dan evaluasi aset dan kewajiban di sektor publik. Isu - isu yang bermasalah terkait dengan karakteristik barang publik (Musgrave dan Musgrave, 1988), monumen publik, aset warisan, aset infrastruktur, dan aset komunitas, yang jarang memiliki pasar likuid dan nilai pasar yang dapat ditoleransi serta menguntungkan masyarakat luas dan bukan pemiliknya (entitas publik) (Pallot, 1992 ; Barton, 2005; Lapsley et al ., 2009).

Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSASB) menyoroti pentingnya bergerak menuju basis akrual penuh IPSAS dan mengklaim bahwa hal itu akan meningkatkan kegunaan pelaporan keuangan dan proses pengambilan keputusan untuk semua pihak terkait dalam hal berbisnis dengan entitas publik (Fahmid et al., 2019). Mereka menambahkan bahwa basis akrual lebih baik daripada basis kas atau basis kas yang dimodifikasi dalam hal menyediakan informasi mengenai keputusan pembiayaan. IPSAS menjelaskan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi yang cukup kepada pengguna tentang aset dan liabilitas untuk menunjukkan akuntabilitas manajemen dalam mengenali aset dan liabilitas dalam laporan keuangan (Whitefield & Savvas, 2016). Hal ini akan membuat manajemen lebih mampu merencanakan dana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan atau penggantian aset. Beralih ke basis akrual mengharuskan entitas publik untuk menyimpan catatan aset dan liabilitas yang lengkap untuk memfasilitasi kontrol manajemen dan membantu manajer membandingkan biaya-manfaat dalam memberikan layanan (Brusca, Caperchione, Cohen, & Manes-Rossi, 2018).

Pendapat yang muncul adalah basis akrual lebih baik daripada basis kas dalam hal menyediakan informasi yang lebih relevan; misalnya, Bank Dunia (2004) menegaskan bahwa IPSAS dapat meningkatkan kualitas, konsistensi, dan

keterbandingan pelaporan keuangan pemerintah. Lebih jauh, IPSAS menyediakan sistem pelaporan keuangan yang lebih kuat dan berguna dalam reformasi sektor publik. Demikian pula, Mhaka (2014) mendesak pemerintah untuk mengadopsi IPSAS guna meningkatkan pelaporan keuangan entitas publik di Zimbabwe. Ia berpendapat bahwa adopsi tersebut akan membantu entitas publik mengelola utang internal dan eksternal serta meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap kinerja pemerintah. Untuk mencapai manfaat ini, Yordania mengadopsi IPSAS pada tahun 2016 (ACCA, 2018) dan berencana untuk mengadopsi penuh pada tahun 2020 dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan entitas sektor publik. AlZubi (2015) mengklaim bahwa Yordania belum mengadopsi IPSAS secara penuh. Ia menyoroti perlunya lebih banyak pelatihan bagi karyawan entitas publik dan peningkatan kerja sama di antara pihak-pihak terkait untuk meningkatkan transisi ke basis akrual penuh. Studi ini dimotivasi oleh kurangnya studi empiris tentang faktor-faktor kunci keberhasilan implementasi IPSAS. ACCA (2018) mengklaim bahwa, meskipun banyak negara berkembang bermaksud mengadopsi IPSAS, hanya sedikit negara yang berhasil menyelesaikan adopsi tersebut. Sungguh luar biasa bahwa adopsi penuh sulit dilakukan di banyak negara dan masih digambarkan sebagai 'pekerjaan yang masih dalam proses'.

Akuntansi kas versus akuntansi akrual di sektor publik

Reformasi akuntansi di sektor publik terutama ditandai oleh peralihan dari akuntansi kas ke akuntansi akrual (Lapsley et al., 2009 ; Mellett & Ryan, 2008). Oleh karena itu, perdebatan tentang perlunya seperangkat standar akuntansi global di sektor publik berpusat pada argumen akuntansi kas versus akuntansi akrual. Pendukung akuntansi akrual berpendapat bahwa akuntansi akrual memenuhi tuntutan demokratis masyarakat akan transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas yang lebih besar, sementara pemantauan kepatuhan hukum dan pengambilan

keputusan administratif adalah satu-satunya manfaat nyata dari sistem akuntansi kas (Pina et al., 2009).

Proses konvergensi IPSAS di suatu negara yang diawali oleh transisi dari sistem akuntansi kas ke sistem akuntansi akrual sering kali menyaksikan manifestasi argumen-argumen ini dalam berbagai bentuk negosiasi. India mengawali proses pengambilan keputusan untuk reformasi akuntansi akrual yang pada akhirnya bertujuan untuk konvergensi IPSAS di sektor publik sejak tahun 2002 sebagai respons terhadap beberapa skandal politik besar (Adukia, 2012 ; GASAB, 2004). Dua puluh satu dari 29 provinsi di negara tersebut memulai uji coba penerapan sistem akuntansi akrual di pemerintah daerah untuk mencapai tujuan ini. (GASAB, 2011).

Implementasi reformasi akuntansi sektor publik

Reformasi akuntansi sektor publik telah banyak dibahas dan diperdebatkan dalam konteks negara maju dan berkembang (Adhikari et al., 2013, 2016 ; Barton, 2004). Penerapan teori organisasi yang ditafsirkan ulang berdasarkan institusionalisme, legitimasi, dan jaringan pemangku kepentingan untuk menganalisis reformasi tersebut menambah pengetahuan empiris tentang praktik akuntansi di negara-negara non-Anglo-Saxon (Hopper et al., 2017 ; Oulasvirta, 2014). Perdebatan seputar relevansi IPSAS, (Lapsley et al., 2009 ; Oulasvirta, 2014), dampak faktor sosial, ekonomi, politik, dan birokrasi terhadap implementasi akuntansi akrual di sektor publik (Adhikari & Garseth-Nesbakk, 2016 ; Hopper et al., 2017 ; Komori & Humphrey, 2000 ; Ouda, 2004 ; Wickramasinghe et al., 2004), kesenjangan antara target implementasi dan pencapaian (Hyndman & Connolly, 2011 ; Lapsley et al., 2009) serta tantangan dan solusi seperti rerangka kerja implementasi adalah beberapa isu utama yang

dieksplorasi dalam literatur yang ada (Adhikari & Garseth-Nesbakk, 2016 ; Ouda, 2004 , 2011).

Sumber tekanan pada proses pengambilan Keputusan

Faktor-faktor lokal yang memengaruhi evolusi praktik akuntansi nasional telah banyak dibahas dan diperdebatkan (Lassou & Hopper, 2016 ; Patel, 2004 ; Wu & Patel, 2015). Pengaruh-pengaruh ini disalurkan melalui pengaturan kelembagaan yang sudah ada sebelumnya di dalam negeri, yang mengarah pada permintaan yang dirasakan untuk pelebagaan praktik-praktik baru (Adhikari et al., 2013 ; Goddard et al., 2016). Sementara pelebagaan ide-ide transnasional merupakan fase utama reformasi akuntansi akrual di sektor publik, deinstitutionalisasi memainkan peran yang sama pentingnya dalam konteks lokal (Lassou & Hopper, 2016 ; Oulasvirta, 2014). Deinstitutionalisasi merupakan penentu sejauh mana pelebagaan ide-ide tersebut. Resistensi yang kuat terhadap deinstitutionalisasi praktik akuntansi yang berakar dalam membuat pelebagaan reformasi akuntansi yang dipimpin IPSAS menjadi upaya yang menantang (Tolbert & Zucker, 1996 ; Tsunogaya & Patel, 2020). Oleh karena itu, deinstitutionalisasi lebih layak dalam konteks di mana praktik, tradisi, dan tatanan kelembagaan yang mapan dianggap tidak memadai atau usang (Rovik, 1996). Oleh karena itu, persepsi ide-ide baru sebagai sesuatu yang berguna dan perlu dapat mengarah pada pelebagaan ide-ide tersebut sementara secara bersamaan mengarah pada deinstitutionalisasi ide-ide dan praktik yang ada (Antipova & Bourmistrov, 2013 ; Wu & Patel, 2015).

Sementara tekanan politik bermula dari aktor-aktor yang kuat dari dalam atau luar arena lokal yang didorong oleh kepentingan tertentu, tekanan fungsional dapat terjadi karena ketidakcukupan teknis dan ekonomi dari sistem yang ada (Baskerville & Grossi, 2019 ; Oliver, 1991). Tekanan sosial sering terjadi karena fragmentasi lingkungan organisasi yang ada karena menurunnya konsensus mengenai aturan

normatif dan kelembagaan di antara para anggota. Situasi seperti itu menyebabkan deinstitutionalisasi parsial dari praktik-praktik yang ada diikuti oleh upaya untuk melembagakan praktik-praktik yang berhasil diterapkan untuk menyelesaikan masalah serupa di negara-negara lain (Djelic & Quack, 2008 ; Lassou & Hopper, 2016).

Tekanan politik, sosial, dan fungsional yang mendorong pelembagaan dan deinstitutionalisasi reformasi sektor publik sering kali saling terkait (Djelic & Quack, 2008 ; Oulasvirta, 2014). Misalnya, korupsi dan kegagalan kebijakan pemerintah menyebabkan penurunan kepercayaan publik dan kesadaran sosial terhadap hak publik untuk akuntabilitas dari pemerintah yang mengakibatkan reformasi NPM (Christiaens et al., 2015 ; Nye, 1997 ; Peters, 1999). Tuntutan publik berikutnya untuk akuntabilitas negara yang lebih besar menunjukkan adanya tekanan sosial-politik pada negara sementara reformasi NPM sebagai respon terhadap tuntutan tersebut, yang diwujudkan melalui perubahan kelembagaan berikutnya yang diberlakukan oleh pemerintah pada agensinya adalah contoh tekanan fungsional yang diberikan oleh negara pada agensinya sendiri (Goddard et al., 2016 ; Mutz & Flemming, 1999). Tekanan sosial-politik dalam konteks nasional juga sering muncul karena kebutuhan pemerintah untuk memperkuat legitimasinya di tingkat lokal (Ball & Craig, 2010 ; Dillard et al., 2004 ; Meyer & Rowan, 1977 ; Tsunogaya & Patel, 2020). Hal ini dapat mengakibatkan pemerintah suatu negara secara sukarela mengadopsi norma atau standar internasional yang dianggap sebagai simbol legitimasi (Djelic & Quack, 2008 ; Palmer et al., 1993 ; Tsunogaya & Patel, 2020).

Pada tahun 1994, Ikatan Akuntansi Indonesia melakukan revisi menyeluruh terhadap Prinsip Akuntansi Indonesia dan mengkodifikasikannya dalam buku Standar Akuntansi Keuangan yang mulai diselaraskan dengan standar akuntan keuangan internasional (Imawan et al., 2020). Perubahan nama dari Prinsip

Akuntansi Indonesia menjadi Standar Akuntansi Indonesia dilakukan dengan pertimbangan bahwa prinsip lebih bersifat baku dan memberikan konsep dasar penyusunan standar sedangkan standar lebih fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan dinamika bisnis. Atas perubahan nama tersebut, komite Prinsip Akuntansi Indonesia kemudian juga bekerja sama dengan komite Standar Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Sebagai tindak lanjut dari salah satu poin kesepakatan Anggota G-20 pada tahun 2009, Ikatan Akuntansi Indonesia telah mencanangkan penerapan program konvergensi Standar Akuntansi Keuangan ke Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS Standards) secara bertahap dengan dukungan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK), Bank Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Direktorat Jenderal Pajak, dan regulator lainnya. Dampak dari program konvergensi ini menyebabkan SAK menjadi berbasis prinsip, banyak menggunakan basis pengukuran nilai wajar, memerlukan pertimbangan profesional dan pengungkapan dalam laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Konvergensi tahap pertama telah dilakukan pada tahun 2012 dimana secara umum SAK per 1 Juni 2012 telah mengacu kepada Standar IFRS per 1 Januari 2009. SAK per 1 Juni 2012 terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), dan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) yang telah disahkan meliputi yang telah berlaku efektif per 2012 dan yang belum berlaku efektif per 2012. SAK per 1 Juni 2012 juga dilengkapi dengan Buletin Teknis (Bultek) yang merupakan salah satu produk yang diterbitkan oleh DSAK IAI namun bukan merupakan bagian dari standar (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Dalam rangka mengimbangi perkembangan standar akuntansi global yang sangat progresif, fase kedua konvergensi dilanjutkan pada tahun 2013 dan 2014.

Terhitung mulai 1 Januari 2015, SAK Indonesia secara umum telah konvergen dengan Standar IFRS yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2014 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

SAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2015 terdiri dari produk-produk yang berbasis pada Standar IFRS seperti PSAK dan ISAK baru, revisi, amandemen dan yang telah melalui proses penyesuaian. SAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2017 menambahkan PSAK/ISAK baru yang terdiri dari PSAK 70: Akuntansi Aset dan Kewajiban untuk Pengampunan Pajak, ISAK 30: Biaya, dan ISAK 31: Interpretasi Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi. SAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2017.

Pada tanggal 1 Januari 2018 ditambahkan PSAK/ISAK baru yaitu PSAK 69:

Pertanian. Selain itu, SAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2018 juga menambahkan beberapa PSAK yang telah diubah, yaitu PSAK 2: Laporan Arus Kas, PSAK 13: Properti Investasi, PSAK 16: Aset Tetap, PSAK 46: Pajak Penghasilan, dan PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham. Sementara itu, beberapa PSAK yang tunduk pada penyesuaian tahunan, yaitu PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama dan PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

SAK yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 menambahkan Rerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (disahkan oleh DSAK IAI sejak 11 Desember 2019) serta ISAK baru yang terdiri dari ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba dan ISAK 36: Interpretasi Interaksi Antar Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Pengaturan Standar Akuntansi Sektor Publik Indonesia

Pemerintah Indonesia memulai reformasi sektor publik setelah krisis mata uang Asia pada tahun 1998. Reformasi ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka hukum, yang sebelum krisis mata uang tidak efektif dalam mengatur sistem administrasi keuangan di sektor publik di Indonesia. Sistem ini merupakan warisan dari peraturan kolonial Belanda: (1) *Indische Comptabiliteitswet Stbl.* 1925 Nomor 448; (2) *Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl.* 1927 Nomor 419 jo. *Stbl.* 1936 Nomor 445; (3) *Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl.* 1933 Nomor 381. Meskipun Indonesia merdeka dari Belanda pada tahun 1945, beberapa peraturan Belanda yang diadopsi oleh Pemerintah Indonesia pada pergantian abad tetap ada. Administrasi pemerintah Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut (dalam urutan menurun) adalah: (1) Undang-Undang Dasar; (2) Undang-Undang Dasar; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (5) Peraturan Pemerintah Daerah (GOI, 2004). Undang-Undang Dasar hanya dapat diubah dengan persetujuan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (majelis tinggi). Undang-Undang, yang biasanya diprakarsai oleh Pemerintah Indonesia, hanya dapat disahkan setelah menerima pengesahan dari DPR. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden disusun oleh pemerintah pusat, dan tidak memerlukan konsensus dari DPR. Terakhir, peraturan pemerintah daerah disiapkan oleh pemerintah daerah, dan perlu disetujui oleh DPRD (Prabowo, Leung, & Guthrie, 2017).

Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, dan penyusunan laporan keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Akuntansi sektor publik digunakan sebagai alat pertanggungjawaban lembaga publik kepada masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan. Contoh organisasi publik seperti masjid, rumah

sakit, puskesmas, universitas/sekolah, partai politik, lembaga swadaya masyarakat hingga pemerintah pusat. Standar akuntansi keuangan sektor publik merupakan suatu pedoman atau kerangka kerja yang menjadi dasar bagi berjalannya tahapan siklus akuntansi sektor publik yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan akuntabilitas publik. Di Indonesia, standar akuntansi yang selama ini digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Profesi Akuntan Publik, dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar-standar tersebut merupakan acuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang kompeten dan berwenang di bidang terkait (Yuesti, Dewi, & Pramesti, 2020).

Sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk menjadi lebih efisien, dengan mempertimbangkan biaya ekonomi dan sosial, serta dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan. Akuntansi sektor publik memiliki hubungan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi di ranah publik. Ranah publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor privat. Luasnya wilayah publik tersebut tidak hanya disebabkan oleh luasnya jenis dan bentuk organisasi yang ada di dalamnya, tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga publik tersebut. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya ranah publik, sehingga setiap disiplin ilmu memiliki perspektif dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang kegiatannya terkait dengan upaya menghasilkan barang dan jasa publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Yuesti, Dewi, & Pramesti, 2020).

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya juga dapat dilaksanakan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis layanan publik, seperti layanan komunikasi, pemungutan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Namun, untuk tugas-tugas tertentu keberadaan sektor

publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik beberapa kali berbeda dengan akuntansi di sektor swasta. Sistem akuntansi yang dirancang dan digunakan dengan baik akan memastikan bahwa prinsip-prinsip penatalayanan dan akuntabilitas dijalankan dengan baik. Pemerintah atau satuan kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian transaksi keuangan, tetapi sistem akuntansi tersebut seharusnya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berikut ini adalah teori dan teknik akuntansi sektor publik (Yuesti, Dewi, & Pramesti, 2020):

1. Akuntansi Anggaran
2. Akuntansi Komitmen
3. Akuntansi Dana
4. Akuntansi Kas
5. Akuntansi Akrual

Fokus akuntansi sektor publik adalah penyediaan laporan keuangan kepada pihak eksternal organisasi. Dimensi kualitas laporan keuangan sektor publik sangat penting bagi mereka yang menjadikan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Masing-masing teknik akuntansi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, dan sebenarnya kelima teknik tersebut tidak saling eksklusif. Salah satu teknik akuntansi keuangan yang cukup mudah dan sederhana serta banyak digunakan adalah akuntansi kas. Namun seiring dengan reformasi sektor publik, terjadi pula pergeseran dari sistem akuntansi kas ke sistem akuntansi akrual atau modified accruals (Yuesti, Dewi, & Pramesti, 2020).

Tujuan pengaturan Akuntansi Sektor Publik di era reformasi adalah untuk mengelola keuangan negara/daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Bentuk reformasi yang ada antara lain (Nurfadhilahyani, 2022):

1. Penataan peraturan perundang-undangan
2. Penataan kelembagaan
3. Penataan sistem pengelolaan keuangan negara di daerah
4. Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan

Saat ini akuntansi sektor publik di Indonesia tengah mengalami perkembangan yang signifikan, salah satunya ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan akuntansi sektor publik khususnya di pemerintahan. Pengembangan akuntansi sektor publik meliputi bidang konsentrasi (Majid, 2019):

1. Akuntansi Keuangan
2. Akuntansi manajemen
3. Inspeksi

Perkembangan Regulasi Tekait Otonomi Daerah

Otonomi Daerah berkaitan dengan apa yang diatur dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dimana dinyatakan bahwa “Pemerintah daerah dinyatakan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Setelah itu pada Tahun 2001 atau setelah berlakunya UU No 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah, otonomi daerah difaksanakan oleh pemerintah guna penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif serta bertanggung jawab.

Pemerintah terus membenahi diri karena disadari terdapat banyak aspek yang masih menjadi kelemahan dan celah dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan sering memunculkan banyak kerancuan. Untuk itu, dikeluarkan Undnag-Undang berikut ini :

1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

UU ini adalah bentuk perubahan dan penyempurnaan terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 dengan perihal yang sama. Undang Undang ini mengatur mengenai pokok pokok tentang “(a) pembentukan daerah dan kawasan khusus,(b) pemabgian urusan pemerintah, (c) pemerintah daerah,(d) perangkat daerah, (e) keuangan daerah, (f) peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, (g) kepegawaian daerah, (h) pembinaan dan pengawasan, serta (i) desa”.

Jika dilihat mengenai pertanggungjawaban dan akuntabilitas keuangan, UU ini beriringan dengan UU 17/2003, dimana dalam UU tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa Sebagian besar dari kekuasaan pemerintah adalah kekuasaan dalam mengelola keuangan negara dan Sebagian besar penguasaannya diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota oleh Presiden untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah serta merupakan perwakilan dari pemerintah daerah untuk kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

2) Undang-undang Nomor 33 Tahun Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah

Perimbangan keuangan yang dimaksud dalam Undang Undang ini meliputi pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara adil, proporsional dan transparan dengan memperhatikan segala aspek yang menjadi kebutuh daerah.

Kebijakan Regulasi Yang Diterapkan Oleh Pemerintah Terhadap Praktik Bisnis Korporasi Di Indonesia

Larangan terhadap monopoli dan praktik anti-persaingan merupakan komponen krusial dalam hukum persaingan usaha, khususnya dalam rerangka hukum Indonesia yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Tujuan utama dari larangan ini adalah untuk memastikan persaingan yang adil dan sehat di pasar, yang esensial untuk inovasi, efisiensi, peningkatan kualitas produk atau layanan, dan kesejahteraan konsumen.⁸ Monopoli terjadi ketika satu entitas mendominasi pasar tertentu, hingga menghilangkan persaingan efektif. Hal ini bisa berdampak negatif, seperti harga yang tinggi, kualitas yang rendah, dan inovasi yang terhambat. Sementara itu, praktik anti-persaingan meliputi berbagai tindakan yang merugikan dinamika pasar sehat, seperti penetapan harga kartel, pembagian pasar, dan penyalahgunaan posisi dominan di Indonesia, UU No. 5/1999 melarang tegas praktik monopoli. Ini berarti sebuah entitas tidak boleh memiliki kontrol mutlak atas produksi atau distribusi suatu barang atau jasa yang mengeliminasi persaingan. Namun memiliki posisi dominan di pasar bukanlah sebuah pelanggaran, selama posisi tersebut tidak disalahgunakan. Sebagai contoh, perusahaan dengan pangsa pasar besar karena inovasi atau keunggulan produknya tidak melanggar hukum, tetapi akan berbeda jika perusahaan tersebut menghalangi pesaing baru untuk memasuki pasar atau berperilaku anti-persaingan.

Penegakan hukum anti-monopoli dan anti-persaingan di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU memiliki kewenangan untuk menyelidiki, mengadakan sidang, dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar hukum. Sanksi dapat berupa denda, perintah untuk mengubah praktik bisnis, atau dalam kasus yang serius, pembubaran perjanjian atau divestasi. Dalam mendorong persaingan yang sehat, hukum ini juga harus seimbang. Peraturan yang terlalu ketat bisa menghambat inovasi dan efisiensi, sementara yang terlalu longgar bisa memungkinkan perilaku merugikan pasar dan konsumen. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil oleh KPPU dan regulator lainnya harus fleksibel dan adaptif, memastikan bahwa hukum ini diterapkan dengan cara yang mendukung pertumbuhan ekonomi

yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan pesaing yang lebih kecil

DUMMYY

Rangkuman

Standar Akuntansi Sektor Publik (IPSAS) secara global serta transisi dari akuntansi kas ke akuntansi akrual dalam reformasi sektor publik:

Sebelum IPSAS, pemerintahan menggunakan sistem akuntansi yang beragam, umumnya berbasis kas atau modifikasi berbasis kas, yang kurang seragam dalam pelaporan keuangan. Gerakan Manajemen Publik Baru (NPM) mendorong penggunaan akuntansi akrual untuk melaporkan kinerja keuangan yang lebih baik.

IPSAS dikembangkan oleh IPSASB di bawah naungan IFAC sejak tahun 2000 untuk menstandarisasi pelaporan keuangan sektor publik secara global dengan berbasis akrual. IPSAS diarahkan untuk selaras dengan IAS/IFRS guna meningkatkan kualitas dan perbandingan pelaporan keuangan.

Penggunaan akuntansi akrual membawa manfaat dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan dengan menyediakan catatan lengkap mengenai aset dan kewajiban. Ini juga memfasilitasi perencanaan dan manajemen keuangan yang lebih baik. Namun, transisi dari akuntansi kas ke akrual menghadapi tantangan, seperti penilaian aset yang berbeda (misalnya barang publik) serta membutuhkan pelatihan dan kerjasama yang intens antara pemangku kepentingan. Banyak negara, termasuk Indonesia, mengadopsi IPSAS untuk meningkatkan manajemen keuangan sektor publik dan kredibilitasnya.

Di Indonesia, reformasi akuntansi sektor publik sejak tahun 1998 bertujuan untuk memodernisasi administrasi keuangan dengan beralih dari peraturan zaman kolonial Belanda ke kerangka hukum yang baru. Konvergensi dengan IFRS melalui Standar Akuntansi Keuangan (SAK) telah dilakukan secara bertahap sejak awal

tahun 2000-an. Kerangka regulasi akuntansi sektor publik di Indonesia terus disesuaikan dengan kebutuhan modern dan standar internasional, mencerminkan upaya untuk meningkatkan transparansi dan pengelolaan keuangan publik yang lebih baik.

DUMNMY

Latihan Soal

1. Sebutkan dan jelaskan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik yang digunakan di Indonesia!
2. Sebutkan dan jelaskan regulasi terkait keuangan Negara di Indonesia!
3. Bagaimana perkembangan regulasi Terkait Otonomi Daerah?
4. Jelaskan pentingnya reformasi sektor publik dalam pengembangan rerangka hukum akuntansi di Indonesia, terutama setelah krisis mata uang Asia tahun 1998!
5. Jelaskan peran akuntansi sektor publik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah di Indonesia. Sebutkan poin-poin utama yang dibahas dalam teks terkait dengan fungsi akuntansi sektor public!

15

KOMPARASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VS AKUNTANSI SWASTA

Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran:

- ❖ Memahami Peran Sektor Publik dalam Pembangunan.
- ❖ Mengerti Pentingnya Akuntansi Sektor Publik.
- ❖ Membandingkan Karakteristik Sektor Publik dan Swasta.
- ❖ Mengidentifikasi Asumsi-Asumsi Akuntansi Sektor Publik dan Swasta.

Capaian Pembelajaran

- ❖ Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah penggunaan istilah sektor publik serta perkembangan kegiatan pemerintahan dan organisasi non-profit sejalan dengan dinamika pembangunan, globalisasi, dan era informasi.
- ❖ Mahasiswa dapat menggambarkan keunikan praktik akuntansi sektor publik seperti kurang seragamnya sistem akuntansi, penggunaan basis kas, dan pentingnya laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban publik.
- ❖ Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan mendasar antara sektor publik dan sektor swasta dalam konteks tujuan organisasi, pengelolaan keuangan, dan sistem akuntansi yang digunakan.
- ❖ Mahasiswa dapat mengaitkan konsep-konsep akuntansi dengan pengelolaan sektor publik, termasuk bagaimana informasi keuangan dan non-keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja organisasi.

A. Sekilas Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik mempunyai cukup andil di dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi pembangunan pada tahun 1950-1960 an. Istilah sektor publik mulai dipergunakan secara resmi pada tahun 1952, hal ini terkait dengan sektor publik yang merupakan bagian dari manajemen ekonomi makro dalam pelaksanaan pembangunan negara.

Perkembangan kegiatan pemerintahan, Akuntansi Sektor Publik, dan organisasi non-profit terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan, globalisasi, dan era informasi. Pengelolaan kegiatan yang semakin kompleks, informasi menjadi semakin penting. Salah satu jenis informasi yang sangat diperlukan adalah informasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggungjawaban maupun manajerial.

Akuntansi Sektor Publik berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di lembaga pemerintah. Akuntan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan laporan akuntansi yang mencakup aspek keuangan dari administrasi pemerintah. Selain itu, bidang ini mencakup pengendalian pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk penyesuaian dengan peraturan yang berlaku.

B. Tujuan Komparasi Akuntansi Sektor Publik Versus Sektor Bisnis (Swasta)

Karakteristik masing-masing sektor baik sektor publik maupun sektor swasta sangat berbeda, sehingga metode akuntansi yang digunakan juga memiliki perbedaan yang unik. Penting untuk mendalami perbedaan karakter dan mekanisme pengelolaan organisasi agar kinerja masing-masing sektor dapat dioptimalkan. Maksud dari komparasi antara akuntansi sektor publik dan bisnis (swasta) adalah untuk mencapai optimalisasi peningkatan kinerja organisasi sektor publik.

C. Asumsi-Asumsi Akuntansi Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta)

Secara umum, organisasi dapat dikategorikan ke dalam dua sektor: sektor publik dan sektor bisnis (swasta). Kedua sektor ini mempunyai tujuan yang berbeda. Organisasi sektor publik berfokus pada pelayanan publik dan penyelenggaraan negara. Pada umumnya, organisasi sektor publik terdiri dari lembaga pemerintah atau entitas yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, organisasi sektor bisnis beroperasi dalam ranah bisnis komersial. Organisasi ini dapat berupa usaha perseorangan (*proprietorship*), persekutuan (*partnership*), atau perusahaan (*corporation*).

Realita dalam masyarakat akuntansi sektor publik maupun sektor bisnis (swasta), ada untuk memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat. Perbedaan yang paling kentara yaitu pada konsep tujuan yang dicapai. Tujuan akuntansi sektor swasta otomatis akan menetapkan strategi memperoleh keuntungan yang optimal dari proses operasional yang dilakukan. Berbeda dengan sektor publik, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat atau publik tanpa unsur memperoleh keuntungan material.

Sektor publik diperlukan karena beberapa alasan, diantaranya:

1. Sektor publik berperan dalam menyediakan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak disediakan oleh sektor swasta maupun sektor sosial.
2. Sektor publik diperlukan sebagai regulator. Luasnya cakupan sektor publik, dalam realita pelaksanaan, pelayanannya beberapa dikembalikan ke pasar, namun regulasi pemerintah tetap memegang peran penting dalam pengendaliannya.
3. Sektor publik diperlukan sebagai pengelola Negara dan pengemban amanah konstitusi melalui fungsi birokrasi pemerintahan.

Keberadaan akuntansi sektor publik tersendiri diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sektor publik. Selain hal itu peningkatan keseimbangan antara pembangunan fisik, reformasi, serta sistem keuangan yang menjadi salah satu fondasi transparansi ekonomi.

Perbedaan karakteristik mendasar antara akuntansi sektor publik dan sektor bisnis (swasta), menyebabkan keduanya memiliki keunikan masing-masing. Keunikan akuntansi sektor publik seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 15.1 Keunikan Akuntansi Sektor Publik

1. Kurang Uniform

Keragaman sektor publik menyebabkan akuntansi yang digunakan dalam sektor tersebut cenderung kurang seragam dibandingkan dengan sektor swasta, baik dari segi sistem maupun tekniknya.

2. Perumusan Standar Akuntansi Mengadaptasi Regulasi yang Sudah Ada

Standar akuntansi di sektor publik dirumuskan dan ditetapkan dengan memperhatikan berbagai regulasi yang sebelumnya sudah ada dalam sektor publik.

3. Akuntansi Basis Kas

Sebagian besar sektor publik menerapkan sistem akuntansi berbasis kas. Sistem akuntansi sektor publik diarahkan menggunakan accrual basis, untuk memastikan pelaporan keuangan yang berkualitas

4. Laporan Keuangan yang Dihasilkan Sebagai Media Akuntabilitas Publik

Laporan keuangan sektor publik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat, bukan hanya kepada pemilik, pemegang saham, seperti halnya sektor bisnis (Swasta).

D. Perbandingan Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta)

Sektor publik sebagai organisasi yang kompleks dan heterogen menimbulkan kebutuhan berbagai informasi yang lebih beragam untuk perencanaan dan pengendalian manajemen. Stakeholder sektor publik juga memerlukan informasi yang beragam, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi dan laporan keuangan di sektor publik melibatkan proses pengumpulan, pengolahan, dan komunikasi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja organisasi. Beragamnya informasi di sektor publik, maka informasi yang diperlukan tidak hanya terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi.

Informasi non-moneter, seperti ukuran output pelayanan, juga harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Sementara pada akuntansi sektor bisnis membedakan pengelolaan keuangan ke dalam dua jenis yaitu akuntansi keuangan (*financial accounting*) dan akuntansi manajemen (*management accounting*) yang akan menghasilkan suatu informasi akuntansi. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk mengevaluasi berbagai indikator kinerja keuangan,

seperti kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, serta posisi keuangan pada periode tertentu.

Pengertian tentang sektor publik telah menjadi topik perdebatan yang kompleks, terutama sejak disiplin ilmu akuntansi sektor publik mulai berkembang. Istilah "publik" sendiri memiliki konotasi yang beragam di berbagai bidang ilmu. Definisi publik dalam konteks ekonomi tentu berbeda dengan interpretasinya dalam ranah politik, hukum, atau disiplin lainnya. Keanekaragaman makna ini menjadikan tugas memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai sektor publik dalam konteks akuntansi sektor publik menjadi suatu tantangan yang tidak ringan

Ada beberapa faktor yang membedakan antara sektor publik dan sektor bisnis. Perbedaan tersebut mencakup tujuan organisasi, sumber pendanaan, kepemilikan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, pemangku kepentingan, dan sistem akuntansi yang digunakan.

Tabel 15.1 Perbandingan Sektor Publik Dan Sektor Swasta

Aspek Perbedaan	Sektor Bisnis	Sektor Publik
Tujuan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari laba (profit oriented) • Penyediaan barang dan jasa komersial 	<ul style="list-style-type: none"> • Nonprofit • Pelayan publik (<i>publik service oriented</i>)
Sumber Pendanaan	Setoran modal, laba ditahan, hasil penjualan, utang, penerbitan saham	Pajak, PNBP, retribusi, utang, bagian laba perusahaan Negara, hibah, penjualan asset
Kepemilikan	Pemegang saham (shareholder)	Negara atau seluruh rakyat

Pertanggungjawaban	Kepada pemegang saham dan investor	Kepada rakyat dan parlementer
Karakteristik Anggaran	Struktur organisasi bisnis	Struktur birokrasi (pemerintahan)
Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tertutup untuk publik • Merupakan dokumen rahasia (<i>confidential</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbuka untuk publik • Merupakan dokumen publik
Sistem Akuntansi	<i>Accrual Accounting</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cash accounting</i> • <i>Accrual accounting</i> • <i>Fund Accounting</i> • <i>Budgetary accounting</i> • <i>Commitment accounting</i>
Standar Akuntansi	Standar akuntansi bisnis (Standar Akuntansi Keuangan)	Standar Akuntansi Pemerintahan

Meskipun mempunyai perbedaan dengan keunikan-keunikan seperti tersebut, organisasi pemerintahan sebagai entitas ekonomi tetap memiliki kesamaan dengan entitas bisnis lainnya . Beberapa kesamaan tersebut adalah:

1. Sektor publik dan sektor bisnis (swasta) adalah dua komponen yang tak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Keduanya bersama-sama memanfaatkan sumber daya finansial, modal, dan manusia dalam sistem perekonomian tersebut.
2. Sektor publik dan sektor bisnis (swasta) sama-sama menghadapi keterbatasan sumber daya ekonomi (*scarcity of resources*), yang mengharuskan mereka

untuk mengelola sumber daya tersebut secara ekonomis, efisien, dan efektif. Karenanya, baik sektor publik maupun sektor bisnis memiliki kebutuhan yang sama untuk menjalankan manajemen keuangan dengan baik.

3. Baik sektor publik maupun sektor bisnis memiliki pola manajemen keuangan yang serupa, dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian. Dalam proses tersebut, penggunaan akuntansi menjadi suatu kebutuhan yang penting.
4. Akuntansi sektor publik dan sektor bisnis sama-sama menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi.
5. Baik akuntansi sektor publik maupun akuntansi sektor bisnis mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum.
6. Laporan keuangan yang dihasilkan sangat penting untuk manajemen organisasi dan proses pengambilan keputusan.

E. Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas

Konsep dasar yang digunakan dalam penilaian prestasi/ kinerja sektor publik yaitu fokus pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau sering dikenal dengan konsep *Value For Money*. Konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang menekankan pada pentingnya penghargaan atas setiap Rupiah yang dikeluarkan dengan cara memanfaatkannya secara ekonomis, efisien, dan efektif.

1. Ekonomi

Ekonomi berkaitan dengan transformasi input primer seperti anggaran atau kas menjadi input sekunder seperti tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang diperlukan dalam operasi organisasi. Konsep ekonomi menitikberatkan pada efisiensi penggunaan anggaran untuk memperoleh input tersebut. Dalam konteks ini, konsep ekonomi menuntut agar organisasi sektor publik menghindari pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan operasionalnya.

Prinsip ekonomi menegaskan bahwa sumber daya input harus diperoleh dengan hemat, dengan harga yang lebih rendah (mengeluarkan lebih sedikit biaya) atau dengan biaya yang lebih rendah namun tetap memperhatikan kualitas yang diperlukan.

Khematan harga biasanya diukur dengan harga pasar. Ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan nilai Rupiah (anggaran).

$$\mathbf{Ekonomi} = \frac{\mathbf{Input}}{\mathbf{Anggaran (Rp)}}$$

2. Efisiensi

Efisiensi merujuk pada keterkaitan antara hasil produksi berupa barang atau jasa dengan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut. Secara matematis, efisiensi dapat diukur melalui perbandingan antara output dengan input, atau dengan kata lain, *output* per unit input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dianggap efisien jika dapat mencapai hasil tertentu dengan penggunaan sumber daya seefisien mungkin, atau dengan menggunakan jumlah sumber daya yang diberikan, mampu menghasilkan hasil seoptimal mungkin. Efisiensi mengimplikasikan pengeluaran anggaran yang cermat (*spending well*).

$$\mathbf{Efisiensi} = \frac{\mathbf{Output}}{\mathbf{Input}}$$

Efisiensi sebuah organisasi dianggap meningkat ketika rasio efisiensinya cenderung berada di atas satu. Semakin tinggi angka rasio tersebut, semakin tinggi tingkat efisiensinya. Meskipun secara mutlak, rasio ini tidak memberikan gambaran

tentang posisi keuangan dan kinerja organisasi, namun dapat digunakan untuk membandingkan tingkat efisiensi berbagai program antara dua organisasi yang beroperasi dalam industri yang sama. Jika hasil rasio program di sebuah organisasi lebih besar dari satu dibandingkan dengan hasil rasio program yang sama di organisasi lain, maka program tersebut dapat disebut lebih efisien. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan 4 cara, yaitu:

- a) Meningkatkan output untuk input yang sama
- b) Meningkatkan output lebih besar dibandingkan proporsi peningkatan input.
- c) Mengurangi input untuk output yang sama.
- d) Mengurangi input lebih besar daripada proporsi penurunan output.

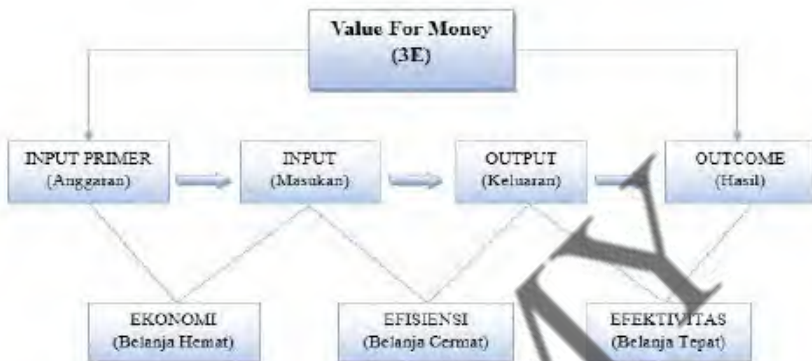
3. Efektivitas

Efektivitas adalah evaluasi dari seberapa baik hasil yang dicapai dibandingkan dengan target yang diinginkan. Target yang diharapkan disebut sebagai outcome, sementara hasil yang dicapai disebut output. Efektivitas mengukur perbandingan antara outcome dan output. Dalam konteks ekonomi, perhatian utamanya adalah pada penggunaan input yang efisien untuk mencapai output atau proses tertentu. Sebaliknya, fokus efektivitas adalah pada pencapaian outcome yang diinginkan. Sebuah organisasi, program, atau kegiatan dianggap efektif jika output yang dihasilkan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, dengan menggunakan anggaran yang sesuai (*spending wisely*).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}}$$

Value For Money menekankan bahwa organisasi sektor publik harus dapat menggabungkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara simultan.

Artinya, organisasi tersebut harus mampu menggunakan dana publik dengan cermat, hemat, dan tepat untuk mencapai target, sasaran, dan tujuan yang ditetapkan.



Gambar 15. 2 Konsep Value For Money Publik Sektor

F. Dasar Hukum Organisasi Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta)

Organisasi sektor publik maupun sektor swasta memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya. Berikut dasar hukum baik sektor publik maupun sektor swasta:

Tabel 15.2 Dasar Hukum Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta

Sektor Publik dan Sektor Swasta	
Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) PSAK adalah seperangkat pedoman, prinsip, dan prosedur yang mengatur bagaimana entitas harus mengukur, mengungkapkan, dan melaporkan informasi keuangan. Setiap entitas dengan ukuran dan prinsip yang berbeda, akan mengadopsi jenis SAK yang beda juga.	
Sektor Publik	Sektor Swasta

<p>SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)</p> <p>SAP digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah.</p>	<p>SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik)</p> <p>SPAP meliputi beberapa pernyataan standar teknik serta aturan etika yang meliputi pernyataan standar auditing, atestasi, jasa akuntansi dan reviu, jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu.</p>
<p>SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara)</p> <p>SPKN merupakan acuan mutu bagi pemeriksaa dan organisasi pemeriksa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab keuangan Negara.</p>	

G. Hal-Hal yang Dikomparasikan

1. Pengambilan Keputusan Dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (swasta)

Organisasi sektor publik, keputusan dibuat melalui proses formal yang telah diatur oleh organisasi, seperti dalam pemerintahan di mana musrenbang menjadi tahapan utama dalam menetapkan rencana pembangunan. Dalam musrenbang, partisipasi masyarakat adalah hal yang penting. Di samping itu, lembaga legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Misalnya, organisasi politik, yayasan, atau LSM mengambil keputusan melalui musyawarah antara pengurus dan perwakilan anggota.

Terdapat perbedaan yang cukup tipis antara organisasi publik dengan organisasi bisnis (swasta) dalam hal pembuatan keputusan, sektor bisnis seringkali

pembuatan keputusan berdasarkan hasil musyawarah/ diskusi meskipun ada kalanya pengambilan keputusan oleh pemilih secara langsung (secara individu). Pengambilan keputusan pada sektor bisnis (swasta) dilakukan antara pemilik (pemegang saham) dan pimpinan (manajemen).

Secara ringkas pengambilan keputusan dalam sektor publik dan sektor bisnis (swasta) tertuang pada table berikut ini:

Tabel 15.3 Pengambilan Keputusan dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)

Pengambilan Keputusan	
Sektor Publik	Sektor Bisnis (Swasta)
Mekanisme formal dan diputuskan secara terorganisir	Mekanisme formal maupun non formal
Pengambilan keputusan melalui hasil musyawarah.	Pengambilan keputusan melalui hasil musyawarah maupun diputuskan secara individualisme

2. Perencanaan dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)

Organisasi sektor publik maupun swasta, pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai dengan sumber daya yang dimiliki. Pencapaian tujuan tersebut, dibutuhkan suatu perencanaan. Perencanaan berdasarkan aspek waktu terdiri dari:

- a. Perencanaan jangka panjang, perencanaan dengan kurun waktu ke depan lima tahun atau lebih.
- b. Perencanaan jangka menengah, perencanaan dengan kurun waktu ke depan satu sampai lima tahun.
- c. Perencanaan jangka pendek, perencanaan dengan kurun waktu sampai satu tahun ke depan.

Informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dapat bersumber dari:

a. Penilaian Investasi

Suatu strategi yang diadopsi oleh manajemen untuk menyajikan informasi mengenai kemampuan organisasi dalam mengevaluasi potensi pengembalian modal serta kecocokan aset yang akan digunakan dalam operasi masa depan, termasuk apakah diperlukan perbaikan, pertukaran, atau bahkan pembelian yang baru. Terdapat beragam metode yang dapat digunakan untuk menilai opsi investasi, seperti rasio B/C, NPV, IRR, dan *Pay Back Period*.

b. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan

Proses perencanaan secara keseluruhan tidak terlepas dari sisi keuangan. Salah satu hal yang utama seperti keputusan investasi yang merupakan aspek dari akuntansi manajemen yang terdiri dari: perencanaan keuangan dan anggaran modal.

c. Anggaran Pendapatan

Dokumen perencanaan yang krusial dalam organisasi sektor publik adalah anggaran penerimaan tahunan. Anggaran pendapatan ini mencakup rencana pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh oleh organisasi selama satu tahun anggaran untuk membiayai kegiatan yang direncanakan.

d. Model keuangan

Perencanaan selalu berhubungan dengan ketidakpastian karena mencakup upaya meramalkan masa depan, yang penuh dengan ketidakpastian. Baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satu cara untuk mengatasi ketidakpastian ini adalah dengan menggunakan model keuangan. Model keuangan membantu dalam mengevaluasi setiap faktor yang relevan dan membuat proyeksi tentang kemungkinan situasi di masa mendatang.

e. Target perencanaan, dan penganggaran.

Target merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau program tertentu dalam bentuk kuantitatif, harus dicapai oleh manajemen pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Target dapat berupa target *output* dan target kinerja.

Tipe aktivitas perencanaan, terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

- a. Tipe perencanaan yang diperlukan untuk menetapkan semua target organisasi adalah perencanaan sasaran dan tujuan pokok.
- b. Tipe perencanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan pokok tersebut adalah perencanaan operasional.

Dua tipe perencanaan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Perencanaan operasional merupakan akar yang digunakan sampai dengan penetapan target organisasi, yang terdiri dari perencanaan manajerial dan siklus pengendalian. Tahap pokok perencanaan dan pengendalian sebagai berikut:

- a. Perencanaan sasaran dan tujuan dasar
- b. Perencanaan operasional
- c. Penganggaran
- d. Pengukuran dan pengendalian
- e. Pelaporan, analisa, dan umpan balik.

Perencanaan pada sektor publik, misal dalam hal ini pemerintahan, perencanaan dilakukan mulai dari perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan sistem dengan pembangunan nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pelaksana perencanaan ditingkat pemerintahan daerah provinsis, daerah kabupaten atau kota. Contoh lain organisasi sektor publik, seperti lembaga swadaya masyarakat, parta politik: staf pengelola

yang berperan dalam proses perencanaan yang menghasilkan dokumen perencanaan. Tujuan dari proses perencanaan yang dilakukan dalam sektor publik adalah untuk kesejahteraan masyarakat (publik).

Perencanaan pada organisasi bisnis (swasta), pegawai serta manajer yang berperan dalam proses perencanaan secara garis besar. Perencanaan dilakukan dengan orientasi profit, strategi apa yang akan dilakukan, disusun dalam suatu perencanaan, serta pengendalian dalam proses pelaksanaan rencana tersebut.

Secara ringkas perbedaan dalam proses perencanaan organisasi sektor publik dan organisasi bisnis (swasta) sebagai berikut:

Tabel 15.4 Proses Perencanaan Organisasi Sektor Publik Dan Organisasi Bisnis (Swasta)

Perencanaan	
Sektor Publik	Sektor Bisnis (Swasta)
Bagian perencanaan, pengelola organisasi sebagai penyusun perencanaan	Pegawai, manajem entitas sebagai penyusun perencanaan
Pengesahan berdasarkan regulasi public	Pengesahan berdasarkan aturan perusahaan atau kebijakan pemilik perusahaan
Kesejahteraan masyarakat (publik) menjadi orientasi sektor publik	Profit/laba menjadi orientasi dalam sektor bisnis

3. Penganggaran Dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)

Penyusunan anggaran sektor publik melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program, yang kemudian dituangkan dalam suatu anggaran. Masyarakat/publik diberikan hak untuk turut serta mengkritisi anggaran yang

dipublikasikan. Anggaran yang sudah diputuskan, kemudian disahkan oleh DPR, DPD atau DPRD sebagai wakil rakyat. Sedangkan, penyusunan anggaran organisasi bisnis (swasta) dilakukan oleh pegawai (bagian keuangan) dan pengelola perusahaan yang diberikan wewenang oleh pemilik/pemegang saham perusahaan.

Secara ringkas perbedaan penganggaran sektor publik dan sektor bisnis (swasta) sebagai berikut:

Tabel 15.5 Penganggaran Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta)

Penganggaran	
Sektor Publik	Sektor Bisnis (Swasta)
Penyusunan anggaran melibatkan partisipasi masyarakat	Penyusunan anggaran melibatkan bagian keuangan, pengelola atau pemilik perusahaan
Dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat	Tidak dipublikasikan
Disahkan oleh wakil masyarakat (DPR, DPRD, legislatif, dewan pengurus)	Disahkan oleh pemilik perusahaan

4. Realisasi Anggaran Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)

Proses pelaksanaan anggaran atau realisasi anggaran baik dalam sektor publik maupun sektor bisnis (swasta), kualitas merupakan tujuan yang akan dicapai. Sektor publik kualitas yang dimaksud yaitu seberapa besar pemenuhan tujuan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Pada entitas bisnis, kualitas yang dimaksud yaitu keuntungan yang didapatkan dari proses bisnis yang dilaksanakan.

Masyarakat sebagai pihak yang diberikan layanan berperan aktif dalam proses pelaksanaan anggaran/ realisasi anggaran sampai dengan menjadi pengawas

independen terlaksananya kegiatan dalam sektor publik. Pada entitas bisnis/swasta, masyarakat merupakan konsumen yang berperan menggunakan output yang dihasilkan dari kegiatan bisnis, masyarakat tidak berhak menjadi pengawas terlaksannua kegiatan sektor/entitas bisnis.

Secara ringkas perbedaan realisasi anggaran sektor publik dan sektor swasta sebagai berikut:

Tabel 15.6 Realisasi Anggaran Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta)

Realisasi Anggaran	
Sektor Publik	Sektor Bisnis (Swasta)
Pengukuran pencapaian kinerja/kualitas dari tujuan pelayanan ke msasyarakat/public	Pengukuran pencapaian kinerja/kualitas dari profit/laba yang diperoleh
Masyarakat berperan aktif dalam proses pengawasan pelaksanaan kegiatan sektor publik	Masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan produk yang dihasilkan, tanpa ada hak untuk melakukan pengawasan kegiatan sektor swasta

5. Pelaporan Dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)

Pelaporan antara sektor publik dan sektor bisnis (swasta) terdapat perbedaan dan persamaan di dalamnya. Karakteristik akuntansi sektor publik dipengaruhi oleh beberapa hal seperti sifat lembaga sktor publik, sistem pemerintahan suau Negara, mekanisme pengelolaan keuangan, dan sistem anggaran negara. Berdasar karakteristik tersebut, dapat dibedakan dan dibandingkan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta.

Menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor bisnis (swasta) terdapat beberapa perbedaan, diantaranya:

a. Fokus dan lingkup laporan keuangan

Laporan keuangan sektor publik menitikberatkan pada isu-isu finansial dan politik, sehingga evaluasi sektor publik melibatkan pertimbangan baik dari segi finansial maupun non-finansial. Di sisi lain, laporan keuangan sektor swasta fokus pada aspek keuangan.

b. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban atas laporan keuangan sektor publik kepada lembaga legislatif atau wakil masyarakat, sementara pertanggungjawaban atas laporan keuangan sektor swasta ditujukan kepada para pemegang saham atau kreditornya.

c. Orientasi laporan keuangan

Laporan keuangan sektor publik lebih menekankan pada perspektif jangka panjang karena terkait erat dengan prinsip-prinsip politik dan keberadaan negara, sementara laporan keuangan sektor swasta lebih fokus pada kelangsungan usaha jangka panjang.

d. Aturan laporan

Laporan keuangan sektor publik diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sementara laporan keuangan sektor swasta diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

e. Pihak pemeriksa

Laporan keuangan sektor publik diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sementara sektor swasta diperiksa oleh auditor independen.

f. Penggunaan dasar akuntansi

Penggunaan dasar akuntansi di sektor publik sebagian besar masih menggunakan dasar akuntansi kas, sedangkan di sektor swasta dasar akuntansi akrual berjalan lama.

Terdapat persamaan mendasar laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta dalam hal sebagai berikut:

- a. Kriteria Validitas dan rekiabilitas dokumen sumber
- b. Siklus akuntansi yang dapat diperbandingkan
- c. Standar akuntansi ditetapkan ooleh organisasi independen
- d. Laporan keuangan yang diakui sebagai dasar hukum/dasar pembuatan keputusan.

Secara ringkas perbedaan laporan keuangan antara sektor publik dan sektor bisnis (swasta) sebagai berikut:

Tabel 15.7 Laporan Keuangan Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta)

Laporan Keuangan	
Sektor Publik	Sektor Binis (Swasta)
Laporan keuangan berfokus pada masalah finansial dan politik	Laporan keuangan berfokus pada aspek keuangan dan kinerja
Pertanggungjawaban ke masyarakat yang diwakili pihak legislatif/parlemen	Pertanggungjawaban ke pemegang saham dan kreditor
Orientasi ke konsep politik dan kenegaraan	Orientasi ke laba (keberlangsungan usaha)

Acuan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Acuan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen
Sebagian besar masih menerapkan akuntansi kas (<i>cash basis</i>)-menuju <i>accrual basis</i>	Penggunaan dasar akuntansi akrual (<i>accrual basis</i>)

DUMNMY

Rangkuman

Secara umum, organisasi dapat dikategorikan ke dalam dua sektor: sektor publik dan sektor bisnis (swasta). Pemahaman karakteristik masing-masing sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, merupakan salah satu tujuan komparasi sektor publik dan swasta. Organisasi sektor publik berfokus pada pelayanan publik dan penyelenggaraan negara. Pada umumnya, organisasi sektor publik terdiri dari lembaga pemerintah atau entitas yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, organisasi sektor bisnis beroperasi dalam ranah bisnis komersial. Organisasi ini dapat berupa usaha perseorangan (*proprietorship*), persekutuan (*partnership*), atau perusahaan (*corporation*).

Realita dalam masyarakat akuntansi sektor publik maupun sektor bisnis (swasta), ada untuk memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat. Perbedaan yang paling kentara yaitu pada konsep tujuan yang dicapai. Tujuan akuntansi sektor swasta otomatis akan menetapkan strategi memperoleh keuntungan yang optimal dari proses operasional yang dilakukan. Berbeda dengan sektor publik, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat atau publik tanpa unsur memperoleh keuntungan material.

Beberapa faktor selain tujuan organisasi, yang membedakan antara sektor publik dan sektor bisnis mencakup sumber pendanaan, kepemilikan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, pemangku kepentingan, dan sistem akuntansi yang digunakan.

Latihan Soal

1. Jelaskan tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor bisnis (swasta)!
2. Jelaskan perbedaan karakteristik mendasar antara akuntansi sektor publik dan sektor bisnis (swasta), yang menyebabkan keduanya memiliki keunikan masing-masing!
3. Konsep dasar yang digunakan dalam penilaian prestasi/ kinerja sektor publik yaitu fokus pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau sering dikenal dengan konsep *Value For Money*. Jelaskan konsep *Value for Money* yang diterapkan pada sektor publik!
4. Jelaskan secara singkat proses penganggaran yang dilakukan pada sektor publik!
5. Terdapat perbedaan dan persamaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Sebutkan perbedaan dan persamaan tersebut!

KUNCI JAWABAN

BAB 1

1. Akuntansi sektor publik adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan dan pengukuran keuangan, termasuk penggunaan dan pengawasan sumber daya, dalam organisasi sektor publik seperti pemerintahan, lembaga sosial, dan organisasi non-profit. Akuntansi sektor publik juga meliputi analisis dan evaluasi keputusan keuangan dan strategis, serta pengembangan dan implementasi sistem informasi keuangan yang efektif.
2. Perbedaan masing-masing tiga konsentrasi utama dalam akuntansi sektor publik:
 - a. Akuntansi Publik (Public Accounting): Fokus pada pengelolaan dan pengawasan keuangan organisasi pemerintahan, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja negara.
 - b. Akuntansi Non-Publik (Non-Public Accounting): Fokus pada pengelolaan dan pengawasan keuangan organisasi non-pemerintahan, seperti lembaga sosial, organisasi non-profit, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - c. Akuntansi Pengawasan (Audit): Fokus pada penilaian independen terhadap kinerja keuangan organisasi, termasuk pengawasan keamanan dan integritas data.

3. Tujuan dari akuntansi sektor publik:
- a. Meningkatkan Transparansi: Akuntansi sektor publik bertujuan untuk membuat informasi keuangan dan sumber daya menjadi lebih transparan dan terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana dan sumber daya digunakan.
 - b. Meningkatkan Akuntabilitas: Akuntansi sektor publik bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi sektor publik terhadap penggunaan dana dan sumber daya, sehingga memungkinkan pengawasan dan kontrol lebih efektif.
 - c. Meningkatkan Efisiensi: Akuntansi sektor publik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, sehingga organisasi sektor publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi biaya.
 - d. Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya: Akuntansi sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi sektor publik dalam mengelola sumber daya, sehingga memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.
 - e. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Akuntansi sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akuntansi dan pengelolaan sumber daya yang baik, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.
 - f. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Akuntansi sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan efektif.
 - g. Meningkatkan Kemampuan Pengawasan: Akuntansi sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan terhadap

- penggunaan dana dan sumber daya, sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih efektif.
- h. Meningkatkan Kemampuan Menganalisis Data: Akuntansi sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi sektor publik dalam menganalisis data keuangan dan sumber daya, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik.
 - i. Meningkatkan Keselamatan Sumber Daya: Akuntansi sektor publik bertujuan untuk meningkatkan keselamatan sumber daya, sehingga memungkinkan organisasi sektor publik menjaga keamanan dan kelestarian dana dan sumber daya.
 - j. Meningkatkan Kemampuan Membuat Keputusan Keuangan: Akuntansi sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi sektor publik dalam membuat keputusan keuangan yang bijak dan strategis.
4. Faktor yang melatarbelakangi perkembangan akuntansi sektor publik:
- a. Kebutuhan akan Transparansi dan Akuntabilitas: Masyarakat ingin tahu bagaimana pemerintahan dan organisasi sektor publik menggunakan dana dan sumber daya, sehingga memerlukan akuntansi yang transparan dan akuntabel.
 - b. Perkembangan Teknologi Informasi: Teknologi informasi telah meningkatkan kemampuan pengolahan data dan analisis, sehingga memungkinkan akuntansi sektor publik menjadi lebih efektif dan efisien.
 - c. Perubahan Paradigma dalam Pandangan Masyarakat terhadap Pemerintahan: Masyarakat mulai memandang pemerintahan sebagai organisasi yang harus bertanggung jawab dan akuntabel, bukan hanya sebagai pengambil keputusan.

- d. Kebutuhan akan Pengawasan Keuangan yang Lebih Baik: Organisasi sektor publik membutuhkan pengawasan keuangan yang lebih baik untuk menjamin keamanan dan kelestarian dana, sehingga memerlukan akuntansi yang lebih efektif.
- e. Perkembangan Demokratisasi: Demokratisasi telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka, sehingga memerlukan akuntansi sektor publik yang lebih transparan dan akuntabel.
- f. Kebutuhan akan Pengelolaan Sumber Daya yang Efisien: Organisasi sektor publik membutuhkan pengelolaan sumber daya yang efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga memerlukan akuntansi yang lebih efektif.
- g. Perkembangan Globalisasi: Globalisasi telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya akuntansi sektor publik yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kemampuan organisasi sektor publik dalam berkompetisi di tingkat internasional.
- h. Kebutuhan akan Pengawasan Konstitusional: Konstitusi dan hukum telah menetapkan kewajiban pengawasan konstitusional terhadap penggunaan dana dan sumber daya, sehingga memerlukan akuntansi sektor publik yang lebih baik.
- i. Kebutuhan akan Pengelolaan Risiko: Organisasi sektor publik membutuhkan pengelolaan risiko yang lebih baik untuk menjamin keamanan dan kelestarian dana, sehingga memerlukan akuntansi yang lebih efektif.
- j. Kebutuhan akan Pengembangan Kapasitas: Organisasi sektor publik membutuhkan pengembangan kapasitas staf dan sistem informasi untuk meningkatkan kemampuan akuntansi, sehingga memerlukan dukungan dari teknologi informasi dan pendidikan.

5. Manfaat menggunakan sistem akuntansi modern dalam sektor publik adalah:
 - a. Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya: Sistem akuntansi modern memungkinkan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
 - b. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem akuntansi modern memungkinkan informasi keuangan dan sumber daya menjadi lebih transparan dan terbuka, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik.
 - c. Meningkatkan Kemampuan Membuat Keputusan Keuangan: Sistem akuntansi modern memungkinkan penggunaan data yang akurat dan real-time, sehingga dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam membuat keputusan keuangan yang bijak dan strategis.
 - d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Sistem akuntansi modern memungkinkan pengelolaan sumber daya secara efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
 - e. Meningkatkan Kemampuan Penilaian Independen: Sistem akuntansi modern memungkinkan penilaian independen terhadap kinerja keuangan organisasi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan efisiensi.
 - f. Meningkatkan Kemampuan Menganalisis Data: Sistem akuntansi modern memungkinkan penggunaan teknologi informasi untuk menganalisis data, sehingga dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menganalisis data dan membuat keputusan yang lebih baik.

- g. Meningkatkan Kemampuan Mengantisipasi Perubahan: Sistem akuntansi modern memungkinkan penggunaan data yang real-time, sehingga dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar.
- h. Meningkatkan Kemampuan Meningkatkan Efisiensi: Sistem akuntansi modern memungkinkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghemat biaya dan meningkatkan kinerja.

DUMNMY

BAB 2

1.

- a. Akuntansi manajemen sektor publik sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pendefinisian, penyajian dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, perencanaan dan pengendalian aktivitas, pengambil keputusan, pengoptimalan penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada stakeholders, Pengungkapan pada karyawan dan Perlindungan Aset. Akuntansi Manajemen sektor publik merupakan bagian yang integral dari sistem pengendalian manajemen. Akuntansi manajemen sektor publik cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif
- b. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Akuntansi manajemen sektor public merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang terintegrasi.
- c. AMS merupakan penyediaan dan analisis data akuntansi manajemen tentang bisnis dan pesaingnya, untuk digunakan dalam mengembangkan dan memantau strategi bisnis. Fokus AMS tidak hanya fokus pada informasi internal tetapi juga pada komponen eksternal yang berkaitan dengan operasi organisasi. Tujuan utama AMS adalah untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan kinerja organisasi. Penerapan AMS dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penetapan harga target, penghitungan biaya produk, analisis profitabilitas lini produk, analisis profitabilitas pelanggan, dan penetapan harga layanan. Manfaat AMS termasuk peningkatan pemahaman tentang biaya dan keuntungan, pengambilan keputusan yang lebih baik dan peningkatan kinerja organisasi.

2. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berperan pada pelaksanaan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pada tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program
3. Strategi manajemen sektor publik adalah rencana yang terkait dengan serangkaian tindakan dan mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tak kasat mata guna menjamin keberhasilan pencapaian kesejahteraan. Konsep kesejahteraan secara umum berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
4. Contoh organisasi sektor publik di Indonesia:
 - Organisasi Pemerintah Pusat
 - Organisasi Pemerintah Daerah
 - Organisasi Partai Politik
 - Organisasi LSM
 - Organisasi Yayasan
 - Organisasi Pendidikan
 - Organisasi Kesehatan
 - Organisasi Tempat Peribadatan.
5. Manajemen publik adalah ilmu pengelolaan, perencanaan, dan pelaksanaan seluruh fungsi yang berhubungan dengan sumber daya manusia, informasi dan politik. Pengelola utama dari Manajemen Sektor Publik adalah pemerintahan beserta seluruh stafnya.

6. Menurut Jones and Pendlebury (1996), proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu:
 - Perencanaan tujuan dan sasaran dasar
 - Perencanaan operasional
 - Penganggaran
 - Pengendalian dan pengukuran, dan
 - Pelaporan, analisis, dan umpan balik

7. Pada prinsipnya E-Government adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online. Sebenarnya sama halnya dengan etalane yang menampilkan data statistik, potensi wisata, indeks prestasi pemerintah, sumber daya yang dimiliki daerah tersebut kedalam situs resmi atau pada laman website pemerintahan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah kepada pelayanan publik.

BAB 3

1. Terdapat 8 fungsi :

Planning Tools (sebagai perencanaan)

Control Tools (sebagai pengendalian)

Fiscal Tools (sebagai alat kebijakan fiskal)

Political Tools

Coordination and Communication Tools (sebagai alat Koordinasi dan Komunikasi)

Performance Measurement Tools (Sebagai Alat Penilaian Kinerja)

Motivation Tool (Sebagai Alat Motivasi)

Public Share (Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik)

2. Empat karakteristik anggaran sektor publik:

Desentralisasi, Privatisasi, Kontinuitas, Fleksibilitas

3. Secara teknis, daerah harus mendasarkan anggaran mereka pada Rencana Pembangunan Tahunan yang diajukan pada bulan September setiap tahun. Sebagian besar daerah memilih untuk membuat Rencana Pembangunan Terpadu Daerah selama 5 tahun terlebih dahulu, sehingga hanya sedikit yang membuat Rencana Tahunan tahun ini.

Meskipun semua daerah seharusnya telah menyelesaikan CIDP mereka, belum semua daerah memiliki rencana yang telah disetujui oleh Majelis. Namun, semua daerah memiliki rancangan rencana yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Terdapat tantangan dalam menyusun rencana ini, dan kelemahannya adalah banyak Rencana Pembangunan Terpadu Daerah tidak terkait erat dengan rencana sektor daerah sebagaimana mestinya. Namun demikian, undang-undang mengharuskan anggaran didasarkan pada rencana

daerah, dan prioritas dalam CIDP (atau rencana apa pun yang tersedia saat ini) harus sama dengan prioritas dalam anggaran.

Artinya, jika rencana difokuskan pada kesehatan, pertanian, dan air, anggaran juga harus melakukan hal yang sama. Hal ini harus terlihat pada tingkat program dan proyek.

4. Sangat penting untuk memastikan alur dan mekanisme anggaran berjalan baik demi tercapainya tujuan yang baik pula.
5. Dalam beberapa anggaran, kita menemukan bahwa pengeluaran ini salah diklasifikasikan, yang juga menyebabkan penilaian yang salah terhadap porsi anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan. UU PFM 2012 mensyaratkan setidaknya 30 persen dari anggaran untuk pengeluaran pembangunan selama tahun anggaran. jangka menengah (3-5 tahun). Beberapa anggaran mengklasifikasikan obat-obatan sebagai pengeluaran pengembangan (ketika seharusnya bersifat berulang) dan aset seperti peralatan khusus sebagai pengeluaran berulang (ketika bersifat modal/pengembangan). Kami juga melihat adanya variasi klasifikasi dalam satu anggaran, tetapi di seluruh departemen (misalnya, peralatan diklasifikasikan sebagai pengeluaran berulang di beberapa departemen, dan pengembangan di departemen lain).

BAB 4

1. d
2. b
3. d
4. b
5. d
6. c
7. b
8. a
9. e
10. a
11. b
12. d
13. d
14. c
15. c
16. a
17. d

Esai

18. Perbedaan **fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam APBN:**

- **Fungsi Alokasi:** Menggunakan sumber pendapatan untuk menyediakan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- **Fungsi Distribusi:** Mendukung redistribusi pendapatan melalui *transfer payment*, seperti subsidi dan dana pensiun.
- **Fungsi Stabilisasi:** Menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter, seperti stabilitas harga dan nilai tukar.

19. Keseimbangan primer dalam APBN dan mengapa penting?

Keseimbangan Primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara, namun tidak termasuk pembayaran bunga utang. Penting karena menunjukkan kemampuan pemerintah untuk menutup pengeluaran tanpa harus bergantung pada utang.

20. Proses tahapan penyusunan APBN

- **Tahap Pendahuluan:** Penetapan pagu indikatif oleh Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan.
- **Penyusunan RKA-KL:** Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
- **Pembahasan:** Pemerintah dan DPR membahas Nota Keuangan dan RUU APBN.
- **Penetapan:** Presiden menetapkan rincian APBN dalam Keputusan Presiden.

21. Komponen utama dalam APBD dan peran PAD dalam APBD:

- **Komponen Utama APBD:** Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- **Peran PAD:** Sumber utama penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah tersebut. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain yang sah.

BAB 5

1. Tujuan utama dari akuntansi sektor publik adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana publik. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan badan legislatif mengenai penggunaan dana publik.
2. Perbedaan utama antara akuntansi sektor publik dan sektor swasta adalah:
 - Tujuan: Sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara sektor swasta bertujuan untuk mencapai keuntungan.
 - Sumber Dana: Sektor publik menggunakan dana publik seperti pajak dan hibah, sedangkan sektor swasta mendapatkan dana dari penjualan produk atau layanan.
 - Standar Akuntansi: Sektor publik mengikuti standar akuntansi sektor publik yang umumnya berbeda dengan standar yang digunakan oleh sektor swasta.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah kerangka kerja yang digunakan oleh entitas pemerintah untuk menyusun laporan keuangan. Tujuan penerapannya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas pemerintah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan. SAP membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
4. 4. a
5. 5. b
6. 6. a

7. 7. a

DUMMY

BAB 6

1. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merupakan merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta sebagai acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan , penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan masalah atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah.
2. Bentuk-bentuk laporan keuangan Badan Layanan Umum:
 - Laporan Realisasi Anggaran
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - Neraca
 - Laporan Operasional
 - Laporan Arus Kas
 - Laporan Perubahan Ekuitas
 - Catatan Atas Laporan Keuangan
3. Transaksi transitoris adalah transaksi yang tidak termasuk kedalam transaksi operasi, transaksi investasi dan transaksi pendanaan.
4. Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah:masyarakat, wakil rakyat, Lembaga pengawas, Lembaga pemeriksa, Donatur, Investor, Kreditor, Pemerintah, Pihak Lain.
5. Laporan konsolidasian adalah laporan keuangan gabungan antar entitas, baik antar entitas akuntansi maupun entitas pelaporan dalam hal ini adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

BAB 7

1. Laporan keuangan sektor publik adalah dokumen yang disusun oleh entitas publik untuk memberikan informasi transparan dan akuntabel tentang pengelolaan dan penggunaan sumber daya publik. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas publik dalam periode tertentu. Laporan ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Laporan keuangan sektor publik terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk:
 - **Laporan Realisasi Anggaran (LRA):** Membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
 - **Neraca:** Menunjukkan posisi keuangan entitas pada akhir periode, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas.
 - **Laporan Operasional:** Menggambarkan kinerja keuangan dengan mendetailkan pendapatan dan beban operasional.
 - **Laporan Perubahan Ekuitas:** Menyajikan perubahan ekuitas selama periode tertentu.
 - **Laporan Arus Kas:** Menunjukkan aliran kas masuk dan keluar, terbagi atas aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan.
 - **Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK):** Memberikan penjelasan tambahan terkait dengan pos-pos dalam laporan keuangan utama.

3. Ada dua tujuannya yakni:
 - **Tujuan Laporan Sektor Publik:** Memberikan informasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya publik, serta mendukung pengambilan keputusan oleh masyarakat dan pemerintah.
 - **Tujuan Laporan Sektor Swasta:** Menyediakan informasi kepada investor, kreditor, dan pemegang saham untuk mengevaluasi profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan, sehingga dapat diandalkan, relevan, dan dapat dibandingkan. SAP juga bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah.
5. Proses penyusunan LRA dimulai dengan pencatatan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. LRA penting karena memberikan gambaran tentang sejauh mana dana publik digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
6. Penggunaan basis akuntansi akrual penting karena mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Hal ini membantu menyajikan informasi keuangan yang lebih akurat dan relevan, serta memungkinkan perbandingan kinerja antar periode yang lebih baik.

BAB 8

1. Organisasi sektor publik adalah sebuah entitas dimana setiap aktivitasnya terkait dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses evaluasi kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya pada organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja dianggap penting karena pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada publik atau masyarakat.
3. Tujuan utama pengukuran kinerja sektor publik adalah:
 - a. Meningkatkan tingkat akuntabilitas lembaga atau instansi. Hal ini untuk memastikan bahwa lembaga atau instansi mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada publik atau masyarakat.
 - b. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu dengan mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.
 - c. Mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik.
4. **Tahapan** pertama dalam pengukuran kinerja adalah menetapkan tujuan dan sasaran (*Setting Goals and Objectives*) yang ingin dicapai oleh lembaga atau instansi publik. Tujuan haruslah **spesifik** (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), relevan (*relevant*), dan terbatas pada waktu tertentu (*Time-bound*) (SMART).

5. Indikator kinerja masukan (*input*) berkaitan dengan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan, sedangkan indikator kinerja keluaran (*output*) berkaitan dengan hasil langsung dari kegiatan tersebut. Input yang tepat dan cukup diharapkan menghasilkan *output* yang diinginkan.
6. Informasi non finansial merujuk adalah data atau metrik yang tidak terkait dengan angka keuangan, tetapi penting untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi. Ini mencakup aspek-aspek seperti kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, inovasi, keberlanjutan lingkungan, kualitas produk atau layanan, dan keterlibatan karyawan.
7. *Balanced Scorecard* adalah pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk mengukur kinerja organisasi dengan memperhatikan empat perspektif: keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. BSC dapat diadaptasi untuk sektor publik dengan menyesuaikan metrik dan tujuan yang relevan dengan misi dan tujuan organisasi pemerintah

BAB 9

1. Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat adalah serangkaian prosedur, perangkat, dan aturan yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan negara. Tujuan utama sistem ini adalah untuk meningkatkan transparansi keuangan, memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, mendukung pengelolaan keuangan yang efektif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, meningkatkan sistem pengendalian internal, dan menyajikan informasi keuangan yang lengkap dan dapat dipercaya.
2. Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat di Indonesia diatur oleh beberapa landasan hukum utama, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, serta Instruksi Presiden dan Surat Edaran terkait.
3. Prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan meliputi basis akuntansi (basis kas menuju akrual), entitas akuntansi, konsolidasi, penyajian wajar, konsistensi, relevansi, materialitas dan signifikansi, komparabilitas, keandalan, pengungkapan lengkap, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk memastikan bahwa

laporan keuangan pemerintah disusun dengan cara yang adil, akurat, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

4. Komponen utama dari Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat meliputi rencana akun (chart of accounts), dokumen sumber (source documents), buku harian (jurnal), buku besar (general ledger), buku pembantu (subsidiary ledgers), sistem pengendalian internal (internal control system), prosedur akuntansi (accounting procedures), laporan keuangan (financial statements), aplikasi perangkat lunak akuntansi (accounting software applications), pelaporan dan evaluasi (reporting and evaluation), serta audit dan pengawasan (audit and oversight).
5. Tahapan-tahapan utama dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat meliputi pengumpulan data dan dokumen sumber, pencatatan transaksi dalam jurnal, posting ke buku besar, rekonsiliasi akun, penyesuaian (adjusting entries), penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian (adjusted trial balance), penyusunan laporan keuangan, pengungkapan (disclosure), review dan audit internal, pengajuan untuk audit eksternal, penyampaian laporan keuangan, evaluasi dan tindak lanjut.
6. Jenis-jenis laporan keuangan pemerintahan pusat meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE), laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Laporan-laporan ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas dari entitas pemerintah, serta untuk memenuhi kebutuhan transparansi, akuntabilitas, pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi kinerja.

BAB 10

1. b
2. b
3. c
4. d
5. c
6. a
7. b
8. c
9. d
10. b

DUMMYY

BAB 11

1. Desa merupakan satu kesatuan hukum yang mempunyai batas area dan mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan urusan negara yang bertumpu pada kepentingan masyarakat di wilayahnya
2. Wilayah perdesaan merupakan sebuah wilayah yang dalam implementasinya melakukan aktivitas seperti pertanian, pengelolaan sumberdaya alam, pemerintahan maupun kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dalam menjalankan aktivitasnya di wilayah perdesaan menggunakan sistem persaudaraan masyarakat desa yang mana memiliki ciri khas yang kuat dan erat, nilai dan tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun, meliputi nilai gotong royong, tradisi saling tolong menolong, sistem kekeluargaan dan saling menghormati
3. Uraian Tugas dan Fungsi menurut Permendagri nomor 84 tahun 2015

No	Jabatan	Uraian Tugas dan Fungsi
1	Kepala Desa	Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: f) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa. g) Melaksanakan pembangunan. h) Pembinaan kemasyarakatan. i) Pemberdayaan masyarakat. seperti tugas sosialisasi dan motivasi j) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2	Sekretaris Desa	<p>e) Melaksanakan urusan ketatausahaan</p> <p>f) Melaksanakan urusan umum.</p> <p>g) Melaksanakan urusan keuangan</p> <p>h) Melaksanakan urusan perencanaan</p>
3	Kepala Urusan	<p>d. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan lainnya</p> <p>e. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.</p> <p>f. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.</p>

4	Kepala Seksi	<p>d) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.</p> <p>e) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.</p> <p>f) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.</p>

5	Kepala Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> e) Pembinaan ketentraman dan ketertiban dan penataan dan pengelolaan wilayah. f) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. g) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan. h) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
---	--------------------	--

4. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencanaan

Pada tahap ini, dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang merupakan acuan untuk pelaksanaan kegiatan desa selama satu tahun anggaran. RAPBDes disusun oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan masyarakat desa.

b. Pelaksanaan

Pada tahap ini, dilakukan pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RAPBDes. Pelaksanaan kegiatan desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan masyarakat desa.

c. Penatausahaan

Pada tahap ini, dilakukan pencatatan transaksi keuangan desa secara tertib dan teratur. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa dengan dibantu oleh petugas lainnya.

d. Pelaporan

Pemerintah Desa dalam hal ini kepala desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi penggunaan dana desa

e. Pertanggungjawaban

Pada tahap ini, dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada masyarakat desa dan pihak berwenang. Pertanggungjawaban dilakukan oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa lainnya.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) terdapat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan di semua bidang. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak kepala desa dilantik

BAB 12

1. Perbedaan organisasi nirlaba dan organisasi bisnis

Organisasi Nirlaba	Organisasi Bisnis
Didirikan untuk mewujudkan perubahan pada individu/komunitas.	Didirikan untuk mencari keuntungan.
Tidak menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya.	Menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya.
Menerima kontribusi berupa sumber dana dalam jumlah signifikan dari donatur yang tidak mengharapkan pengembalian.	Menerima kontribusi sumber dana dari pemilik atau kreditor yang memiliki kepentingan untuk memiliki atau pembelian berupa keuntungan atau bunga.
Donatur/ pemberi dana tidak memiliki kepentingan terhadap organisasi.	Pemberi dana memiliki kepentingan untuk memiliki atau pengembalian dana.

2. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba

- Laporan keuangan organisasi nirlaba dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
- Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pihak yang berkepentingan.
- Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan

sumberdaya tersebut.

- Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode.
3. Tujuan dibentuknya yayasan guna melakukan aktivitas yang bersifat sosial keagamaan dan kemanusiaan.
 4. Laporan keuangan LSM yang disusun atas dasar akrual akan memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas saja tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa mendatang serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.
 5. Laporan keuangan yang disusun dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas atas dana-dana publik yang telah digunakan serta sebagai bentuk compliance terhadap ketentuan Undang-Undang. Dengan begitu maka partai politik akan mendapatkan atensi positif yang besar dari masyarakat yang akan berdampak pada besarnya dana yang diperoleh dari para donatur untuk menjalankan kegiatan partai politik.

BAB 13

1. **Pajak Daerah:** Pajak Daerah merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada warga atau badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Retribusi Daerah: Retribusi Daerah adalah biaya yang dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan atau izin tertentu yang diberikan. Contoh: retribusi parkir, retribusi IMB, dan retribusi pelayanan kesehatan.

2. **Dana Alokasi Khusus (DAK):** DAK merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Contoh penggunaan DAK meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pusat kesehatan, dan sekolah-sekolah.
3. **Transparansi dan Partisipasi Publik:** Masyarakat memiliki peran dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah melalui transparansi anggaran dan partisipasi dalam proses penganggaran. Ini dilakukan dengan memastikan bahwa informasi anggaran dan penggunaan anggaran tersedia secara terbuka untuk publik, serta melibatkan masyarakat dalam diskusi dan pemantauan terhadap penggunaan anggaran.
4. **Otonomi daerah** adalah konsep yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengelolaan keuangan daerah, hal ini mengizinkan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya keuangan mereka secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas lokal.

5. Manfaat utama dari otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi sektor publik meliputi:
 - Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
 - Pemberdayaan ekonomi lokal melalui optimalisasi sumber daya daerah.
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pendekatan yang lebih responsif dan inovatif.
 - Penguatan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
 - Pengurangan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal sumber pendapatan dan kebijakan keuangan.

6. Tantangan utama dalam implementasi otonomi daerah dalam akuntansi sektor publik meliputi:
 - Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal dalam mengelola keuangan dan menyusun laporan keuangan yang sesuai standar.
 - Keharusan untuk memastikan transparansi dan pengawasan yang efektif meskipun dengan pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah.
 - Sinkronisasi kebijakan dan program antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang harmonis.

BAB 14

1. Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik yang digunakan di Indonesia meliputi:
 - a. **Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (SAK Pemerintah Pusat):** Standar ini mengatur penyusunan laporan keuangan entitas pemerintah pusat di Indonesia, termasuk Kementerian, Lembaga, dan Badan yang terkait dengan pemerintah pusat.
 - b. **Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD):** SAPD digunakan untuk entitas pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Standar ini menetapkan prinsip-prinsip akuntansi yang harus dipatuhi dalam pencatatan, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan pemerintah daerah.
 - c. **Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah (SPKP):** SPKP mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk memastikan konsistensi, keandalan, dan transparansi informasi keuangan.
2. Regulasi terkait keuangan Negara di Indonesia meliputi:
 - a. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:** Mengatur pengelolaan keuangan negara secara umum, termasuk perencanaan keuangan, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara.
 - b. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:** Menetapkan prinsip-prinsip dan tata cara pengelolaan perbendaharaan negara, termasuk pengumpulan, penatausahaan, penyaluran, dan pengeluaran keuangan negara.

- c. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:** Mengatur tata cara pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
3. Perkembangan regulasi terkait Otonomi Daerah di Indonesia meliputi:
 - a. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:** Merupakan landasan hukum utama yang mengatur sistem pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk pemberian wewenang dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam lingkup wilayahnya sendiri.
 - b. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:** Mengatur lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek organisasi, administrasi, keuangan, serta tugas dan wewenang pemerintah daerah.
 - c. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:** Memperkuat otonomi daerah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.
4. Reformasi sektor publik di Indonesia setelah krisis mata uang Asia tahun 1998 bertujuan untuk mengembangkan kerangka hukum yang efektif dalam mengatur sistem administrasi keuangan. Sebelum krisis, sistem tersebut terpengaruh oleh warisan peraturan kolonial Belanda yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan transparansi modern. Reformasi ini meliputi

pembentukan Undang-Undang Dasar baru, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang lebih memadai untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

5. Akuntansi sektor publik berperan penting sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah di Indonesia. Ini terwujud melalui pengumpulan, pencatatan, dan penyusunan laporan keuangan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh organisasi publik seperti masjid, rumah sakit, dan pemerintah daerah. Poin-poin utama yang dibahas meliputi berbagai teknik akuntansi seperti akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, dan akuntansi akrual yang mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan.

BAB 15

1. Tujuan komparasi antara akuntansi sektor publik dan bisnis (swasta) adalah untuk memahami dan menganalisis karakteristik masing-masing sektor baik sektor publik maupun sektor swasta, seperti metode akuntansi yang digunakan karena memiliki beberapa perbedaan yang unik. Penting untuk mendalami perbedaan karakter dan mekanisme pengelolaan organisasi agar kinerja masing-masing sektor dapat dioptimalkan.

2. Karakteristik mendasar antara akuntansi sektor publik dan sektor bisnis (swasta), yang menyebabkan keduanya memiliki keunikan masing-masing yaitu:

a. Kurang Uniform

Keragaman sektor publik menyebabkan akuntansi yang digunakan dalam sektor tersebut cenderung kurang seragam dibandingkan dengan sektor swasta, baik dari segi sistem maupun teknik.

b. Perumusan Standar Akuntansi Mengadaptasi Regulasi yang Sudah Ada

Standar akuntansi di sektor publik dirumuskan dan ditetapkan dengan memperhatikan berbagai regulasi yang sebelumnya sudah ada dalam sektor publik.

c. Akuntansi Basis Kas

Sebagian besar sektor publik menerapkan sistem akuntansi berbasis kas. Sistem akuntansi sektor publik diarahkan menggunakan accrual basis, untuk memastikan pelaporan keuangan yang berkualitas

d. Laporan Keuangan yang Dihasilkan Sebagai Media Akuntabilitas Publik

Laporan keuangan sektor publik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat, bukan hanya kepada pemilik, pemegang saham, seperti halnya sektor bisnis (Swasta).

3. Konsep *Value for Money* yang diterapkan pada sektor menekankan bahwa organisasi sektor publik harus dapat menggabungkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara simultan. Artinya, organisasi tersebut harus mampu menggunakan dana publik dengan cermat, hemat, dan tepat untuk mencapai target, sasaran, dan tujuan yang ditetapkan. **Ekonomis;** konsep ekonomi menitikberatkan pada efisiensi penggunaan anggaran untuk memperoleh input tersebut. Dalam konteks ini, konsep ekonomi menuntut agar organisasi sektor publik menghindari pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan operasionalnya. **Efisien;** organisasi, program, atau kegiatan dianggap efisien jika dapat mencapai hasil tertentu dengan penggunaan sumber daya seefisien mungkin, atau dengan menggunakan jumlah sumber daya yang diberikan, mampu menghasilkan hasil seoptimal mungkin. Efisiensi mengimplikasikan pengeluaran anggaran yang cermat (*spending well*). **Efektif;** fokus efektivitas adalah pada pencapaian outcome yang diinginkan. Sebuah organisasi, program, atau kegiatan dianggap efektif jika output yang dihasilkan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, dengan menggunakan anggaran yang sesuai (*spending wisely*).
4. Proses penyusunan anggaran sektor publik melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program, yang kemudian dituangkan dalam suatu

anggaran. Masyarakat/publik diberikan hak untuk turut serta mengkritisi anggaran yang dipublikasikan. Anggaran yang sudah diputuskan, kemudian disahkan oleh DPR, DPD atau DPRD sebagai wakil rakyat. Sedangkan, penyusunan anggaran organisasi bisnis (swasta) dilakukan oleh pegawai (bagian keuangan) dan pengelola perusahaan yang diberikan wewenang oleh pemilik/pemegang saham perusahaan.

5. Perbedaan dan persamaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta sebagai berikut:

Laporan Keuangan	
Sektor Publik	Sektor Binis (Swasta)
Laporan keuangan berfokus pada masalah finansial dan politik	Laporan keuangan berfokus pada aspek keuangan dan kinerja
Pertanggungjawaban ke masyarakat yang diwakili pihak legislatif/parlemen	Pertanggungjawaban ke pemegang saham dan kreditor
Orientasi ke konsep politik dan kenegaraan	Orientasi ke laba (keberlangsungan usaha)
Acuan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Acuan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen
Sebagian besar masih menerapkan akuntansi kas (<i>cash basis</i>)-menuju <i>accrual basis</i>	Penggunaan dasar akuntansi akrual (<i>accrual basis</i>)

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, T. (2019). **E-reporting dan E-governance dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Publik**. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ahweru, L. (2021). Penganggaran dan pengendalian anggaran: Instrumen dasar untuk pengendalian keuangan dan kinerja organisasi. **Jurnal Ekonomi dan Manajemen**, 25(3), 123-138.
- Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Ambarwati, L. (2022). PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KUALITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) SE-KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL. *Jurnal TAMBORA*, 6(3), 118–125. <https://doi.org/10.36761/jt.v6i3.2092>
- Ambarwati, L., & Zuraida, L. (2021). Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Desa Tirtosari Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 30(1), 15–25. <https://doi.org/10.32477/jkb.v30i1.302>
- Andarsari, P. R. (2016). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*, 1(2), 143–152.

- Anessi, P., et al. (2016). Studi penganggaran publik di Eropa: Pengaruh NPM dan gerakan modernisasi. **Journal of Public Administration Research**, 14(2), 76-89.
- Azhar, M. (2018). Pengantar Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2020). Laporan Pemeriksaan Keuangan Daerah: Pedoman dan Implementasi. Jakarta: BPK.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2020). Pedoman Teknis Pemeriksaan Keuangan Sektor Publik. Jakarta: BPK.**
- Bappenas. (2009). **Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja**. Jakarta: Bappenas.
- Barbera, C., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2016). Bentuk-bentuk baru pemberian layanan publik dan demokrasi partisipatoris. **Public Administration Review**, 76(4), 559-573.
- Barbieri, M., Girosante, G., & Valotti, G. (2017). *Comparative Analysis of the Performance Evaluation Systems of Public Sector Employees*. OCAP Cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche.
- Bastian, I. (2014). **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (Ketiga)*. Erlangga.
- Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Biduri, S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (S. B. Sartika & F. Megawati (eds.); 1st ed., Vol. 1). UMSIDA Press.

- Bolivar, M. P. R., Muñoz, Laura Alcaide, González, & Francisco Javier Alcaide. (2019). The Use of Balanced Scorecard for Performance Evaluation of Public Sector Organizations. *Public Performance & Management Review*, 42(2), 315–342.
- Bovaird, T. (2007). Produksi bersama dan perencanaan bersama dalam layanan publik. *Journal of Public Administration*, 85(1), 234-248.
- BPKP. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Bracci, E., et al. (2015). Sentralisasi ulang proses penganggaran di tengah krisis keuangan global. *Financial Accountability & Management*, 31(2), 105-123.
- Caiden, G. E. (2010). Penganggaran berbasis akrual sebagai alat analitis. *Public Budgeting & Finance*, 30(1), 1-15.
- Chitra Ariesta dan Iwan Taufiq, Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010), Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XII di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010.
- Coen, D., & Roberts, A. (2012). Kesenjangan paradigma dalam manajemen publik. *Journal of Public Policy*, 32(3), 291-309.
- Costa, E., Parker, L. D., & Andreaus, M. (2014). Accountability and Social Accounting for Social and Non-Profit Organizations. *Emerald Insight*, 17(3). <https://doi.org/10.1108/s1041-706020140000017021>
- Cristofoli, D., et al. (2010). Penganggaran dalam pengaturan antar-organisasi. *Journal of Management Studies*, 47(3), 437-460.

- de Queiroz Alves, F. (2022). Anggaran dinamis dalam organisasi publik. **Journal of Public Sector Management**, 15(4), 202-219.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2020). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
- Dharma, T. (2015). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Dilahun. (1994). Geografi Desa dan Pengertian Desa. *Forum Geografi No 14 Dan 15 Th VIII*.
- Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Penyusunan APBN. 2014. Dasar- Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia Edisi II.
- Direktorat Jenderal Anggaran. Pokok-Pokok Proses Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Negara.
- Direktorat Penyusunan APBN, Buku Manual Penerimaan Negara Bukan Pajak, Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran: 2011
- Direktorat Penyusunan APBN, Buku Manual Penerimaan Perpajakan, Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran: 2011
- Ditillo, A., et al. (2015). Alat baru dalam penganggaran publik. **Public Administration Review**, 75(3), 321-333.
- Elim, I., Wangkar, A., Wangkar, A., Runtu, T., Runtu, T., Latjandu, L. D., & Latjandu, L. D. (2022). Public Sector Accounting and Organizational Performance: Study in Indonesian Health Care Industry. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 5(3), 77. <https://doi.org/10.26487/hebr.v5i3.3410>

Ezzamel, M., et al. (2007). Penganggaran berbasis akrual dan pengambilan keputusan politik. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 20(3), 403-435.

Faisal, M. (2018). Akuntabilitas Keuangan Daerah: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Gramedia.

Falk, H. (2015). Towards a Framework for Not-for-profit Accounting. *Contemporary Accounting Researches*, 1(2), 468-499. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1992.tb00855.x>

Fanggidae, H. C., Hartati, A., & Binawati, E. (2022). *Pengukuran Kerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi*. Media Sains.

Ferrer, Delfina, Navarro, Carmen, Pelegrin-Borondo, & Jorge. (2020). Key Performance Indicators for Public Services: A Systematic Review and Proposal of a Framework for their Selection and Use. *Public Management Review*, 22(1), 67-91.

Gaspersz, V. (2016). Sistem Manajemen Mutu Terpadu dalam Industri Publik. Gramedia Pustaka Utama.

Governmental Accounting Standards Board (GASB). (2022). Codification of Governmental Accounting and Financial Reporting Standards.

Hadiyati, E. (2014). Impact of Service Quality on Customer Satisfaction in Indonesian Public Sector Organizations. *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 3(12), 92-99.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

- Hall, M., & O'Dwyer, B. (2017). Accounting, Non-governmental Organizations and Civil Society: The Importance of Nonprofit Organizations to Understanding Accounting, Organizations and Society. *Accounting, Organizations and Society*, 63(November), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.11.001>
- Haris, S., & Susi, I. (2020). **Akuntansi Keuangan Publik: Teori dan Praktik**. Bandung: Alfabeta.
- Hartati, A., Contantia, H., Binawati, E., Aisyah, S., Oscar F. F., Marlin, H., & Rosari, R. (2022). Performance Measurement/Pengukuran Kinerja. In *Teori dan Aplikasi*. Media Sains Indonesia.
- Hartini, S., & Hery. (2018). **Akuntansi Sektor Publik: Konsep dan Aplikasi**. Rajawali Pers.
- Hartoto, Tatmimah, I., Endraria, Sriyani, & Dewi, M. S. (2023). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Harun, H., An, Y., & Robinson, P. (2015). **Public Sector Accounting, Accountability and Governance: Globalising the Experiences of Australia and New Zealand**. London: Routledge.
- Haryanto, T. (2016). **Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Herwiyanti, E., Sukirman, S., & Sufi Aziz, F. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1), 13–23. <https://doi.org/10.9744/jak.19.1.13-23>

Hodge, Timothy R., Dawson, & Gregory S. (2018). Benchmarking Public Sector Performance: Lessons from International Experience. *Public Performance & Management Review*, 42(2), 329–357.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2018). Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar. Jakarta: IAI.

Indra Bastian (2009), Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Indra Bastian dkk. (2019). *Akuntansi Kecamatan Dan Desa* (Kesatu). Universitas Terbuka.

Indriani, L. (2017). **E-budgeting dan Implementasinya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**. Jakarta: PT Gramedia.

Instruksi Presiden dan Surat Edaran terkait yang dikeluarkan oleh Presiden dan kementerian terkait.

International Federation of Accountants (IFAC). (2019). International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Jatmiko, B., Haya, B. S., & Utami, T. P. (2022). Enhancing Value For Money Performance In Local Government Organizations: The Role Of Public Financial Accountability And Internal Control. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 245–259. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.22143>

Jones, Rowan and Pendlebury, Maurice (1996). *Public Sector Accounting*, 4th Ed., London: Pitman Publishing.

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI. (2003). *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Khusaini, M., Ashar, K., & Maski, G. (2021). *Manajemen Belanja Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting: IFRS Edition*. John Wiley & Sons Inc.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2022). *Standar Akuntansi Pemerintah 2022*.
- Kowalski, R., Esteve, M., & Jankin M, S. (2020). Improving Public Services by Mining Citizen Feedback: An Application of Natural Language Processing. *Public Administration*, 98(4), 1–17.
- Lumbanbatu, J. (2020). Implementasi BSC (Balanced Scorecard) dalam Pendidikan. In *Bunga Rampai Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Zifatama Jawa.
- Mahaini, M. F. (2023). ADOPTION STRATEGY OF IFRS SUSTAINABILITY DISCLOSURE STANDARDS TOWARD REALIZATION OF COMPREHENSIVE CORPORATE REPORTING. *IPSAR (International Public Sector Accounting Review)*, 1(2), 11–19. <https://doi.org/10.31092/ipsar.v1i2.2132>
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mahsun, M., Firma Sulistiyowati, A., & Heribertus Andre Purwanugraha, Q. (2011). Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik EDISI KETIGA. In *Jl.*

Gambiran No (Vol. 37, Issue 0274).

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit, Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.)) ANDI.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

Mardiasmo. (2018). **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Marlinah, A., & Ibrahim, A. (2018). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 (Studi Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf). *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 1–19.

Mosesova, A., & Kota, S. (2005). Public Project Evaluation and Selection. *Skyline Business Journal*, 2(1), 13–17.

Pemerintah Republik Indonesia. (2005). **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan dalam Badan Layanan Umum diatur dalam Pasal 10 dan 11

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran nomor PER-7/AG/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-4/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, (2015).

Peraturan Menteri Keuangan No 49/PMK.07/2016 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar PP 23 Tahun 2005

Rahayu, D. R., Halim, M., & Nuha, G. A. (2019). Penerapan Akuntansi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 (Studi Kasus Pada Masjid Al-Baitul Amien Di Jember). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jauj.v17i1.11195>

Rangkuti, F. (2008). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

GLOSARIUM

Akrual: Prinsip akuntansi di mana pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan.

Akuntabilitas: Mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat, memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntansi Berbasis Akrual: Metode pencatatan transaksi keuangan sektor publik berdasarkan pengakuan pendapatan saat diterima dan pengakuan beban saat terjadi, tidak tergantung pada penerimaan atau pembayaran kas.

Akuntansi Berbasis Kas yang Dimodifikasi: Metode yang menggabungkan elemen-elemen akuntansi berbasis kas dan akrual, di mana beberapa transaksi dicatat berdasarkan kas, sementara yang lain berdasarkan akrual.

Akuntansi Berbasis Kas: Metode pencatatan transaksi keuangan sektor publik berdasarkan kas yang diterima dan dibayarkan pada periode tertentu.

Akuntansi Keuangan Daerah: Proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan yang terjadi di pemerintah daerah untuk memastikan akurasi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

Amortisasi: Penyusutan atau depresiasi untuk aktiva tak berwujud (ATB)

Analysis and Data Interpretation: Analisis data untuk mengevaluasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Anggaran Gabungan/Konsolidasi: Anggaran yang menyatukan sumber daya dan tanggung jawab dari berbagai entitas atau organisasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): Dokumen yang memuat perkiraan pendapatan dan pengeluaran desa yang disusun dan ditetapkan oleh kepala desa

Anggaran Publik: Dokumen yang mencerminkan rencana pengeluaran pemerintah dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan, serta berfungsi sebagai alat tawar-menawar, perencanaan, pengendalian, dan memastikan transparansi serta keterlibatan pemangku kepentingan.

Anggaran Tahunan: Anggaran yang dibuat setiap tahun untuk menentukan dan mengendalikan pengeluaran untuk tahun mendatang.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah): Dokumen perencanaan keuangan daerah yang disusun untuk mengalokasikan pendapatan dan belanja daerah dalam satu tahun anggaran.

APBD: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

APBN: Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Apropriasi: Penetapan anggaran melalui hukum, yang memberikan legislator kata akhir tentang perpajakan dan pengeluaran.

Aset: Sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan.

ATB: Aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa

Audit Eksternal: Pemeriksaan yang dilakukan oleh badan independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menilai kewajaran laporan keuangan daerah.

Audit Internal: Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Audit: Pemeriksaan terhadap pengeluaran untuk memastikan pengeluaran dilakukan dengan benar dan sesuai anggaran.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): Instansi daerah yang bertanggung jawab mengelola keuangan dan aset daerah, termasuk penyusunan laporan keuangan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Lembaga perwakilan rakyat desa yang bertugas membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan desa dan APBDes

Balanced Scorecard (BSC): Pendekatan holistik untuk mengukur kinerja organisasi dengan memperhatikan empat perspektif: keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan.

Basis Akrual: Metode pencatatan transaksi keuangan pada saat terjadinya, untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan pemerintah.

Belanja: Pengeluaran atau beban yang diakui oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

Benchmarking: Metode perbandingan kinerja antara organisasi yang sejenis atau terbaik dalam industri yang sama untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area perbaikan.

Benefit: Terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Cakupan: Ruang lingkup atau area yang diliputi oleh akuntansi sektor publik, termasuk pemerintahan pusat dan daerah serta lembaga nirlaba yang menggunakan dana publik.

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK): Informasi tambahan dan penjelasan terkait laporan keuangan utama, mencakup kebijakan akuntansi, rincian pos-pos laporan keuangan, dan informasi relevan lainnya.

Comparative Performance Analysis (CPA): Metode perbandingan kinerja sektor publik dengan entitas lain atau standar terbaik.

Continuous Improvement and Development: Perbaikan dan pengembangan berkelanjutan berdasarkan hasil analisis kinerja.

Cost-Benefit Analysis (CBA): Metode penilaian efisiensi dan efektivitas dengan membandingkan manfaat yang diperoleh dari suatu tindakan dengan biaya yang dikeluarkan.

Cost-Effectiveness Analysis (CEA): Perbandingan biaya dengan hasil yang diperoleh dari program atau kebijakan sektor publik.

Customer Satisfaction Index (CSI): Metode pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

Dana Alokasi Khusus (DAK): Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan ikatan penggunaan tertentu untuk mendanai kegiatan prioritas nasional..

Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa ada ikatan penggunaan tertentu, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal.

Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang dibagikan kepada pemerintah daerah berdasarkan proporsi dari pendapatan negara tertentu, seperti sumber daya alam atau pajak tertentu.

Dana Desa: Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

Dana Perimbangan: Transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Pusat/Perbendaharaan: Sumber dana pusat untuk semua pendapatan, yang memungkinkan keputusan pengeluaran dilakukan secara terpusat.

Data Collection: Pengumpulan data yang diperlukan untuk mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Defisit: Kekurangan dalam anggaran belanja.

Desentralisasi: Proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Distribusi: Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.

Dividen: Pembagian laba atau keuntungan bersih PT (Perseroan Terbatas) kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki.

Donatur: Pihak yang memberikan sumbangan dana ke organisasi nirlaba

E-budgeting: Proses penganggaran yang dilakukan secara elektronik untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Economic Impact Assessment (EIA): Pengukuran dampak kegiatan atau kebijakan sektor publik terhadap perekonomian.

Effectiveness: Kemampuan suatu program atau kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efficiency: Penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan minimal pemborosan.

E-Government: Penggunaan teknologi informasi yang dilakukan pemerintahan dalam rangka pemenuhan layanan terhadap warganya.

Ekonomi makro: Cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan.

Ekuitas: Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah

Endowment: Asuransi yang manfaatnya akan dibayar hanya jika bertanggung pada saat kontrak berakhir masih hidup.

Entitas Akuntansi: Setiap entitas pemerintahan yang mengelola keuangan negara wajib menyusun laporan keuangan tersendiri.

Entitas Sektor Publik: Organisasi atau badan yang sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah, yang diharuskan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Sektor Publik.

Entitas: Prinsip bahwa laporan keuangan harus mencerminkan kegiatan ekonomi dari entitas yang menyusunnya dan tidak boleh mencampurkan dengan kegiatan ekonomi entitas lain.

E-reporting: Pelaporan yang dilakukan secara elektronik untuk mempermudah pengumpulan, analisis, dan penyebaran data keuangan.

Expenditure Variance: Perbedaan antara jumlah pengeluaran aktual dengan jumlah yang direncanakan atau dianggarkan.

FASB: Badan penyusun standar akuntansi di Amerika Serikat

Fleksibilitas keuangan: Tingkat kapasitas dan kecepatan perusahaan untuk dapat memobilisasi sumber daya keuangannya atau mengambil tindakan secara preventif, reaktif, dan eksploitatif agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan.

Form over substance: Suatu formalitas/ legalitas mengungguli kejadian/ transaksi.

Format Laporan Keuangan: Tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang ditetapkan oleh standar akuntansi.

Fungsi Akuntabilitas Anggaran: Memastikan organisasi publik bertanggung jawab kepada masyarakat umum.

Fungsi Ekonomi Anggaran: Mendefinisikan batas-batas intervensi publik dalam ekonomi dan tingkat redistribusi kekayaan dalam sistem ekonomi.

Fungsi Manajerial Anggaran: Meminta pertanggungjawaban manajer atas pencapaian hasil dan penggunaan sumber daya publik.

Fungsi Pelaporan: Peran yang dimainkan oleh laporan keuangan dalam memberikan informasi yang relevan dan andal kepada pemangku kepentingan.

Fungsi Politik Anggaran: Menggambarkan preferensi dan posisi kekuasaan para pemangku kepentingan serta hasil keputusan dan tawar-menawar masa lalu.

GASB: Badan penyusun standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk pemerintah pusat dan federal Amerika Serikat

GDP: atau *Gross Domestic Product*, nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu dan merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara.

Good Governance: Konsep tata kelola yang baik untuk swasta ataupun pemerintahan.

Hak: Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu; kepemilikan atau keharusan yang wajib didapatkan diri kita dari orang lain.

Identification of Performance Indicators: Mengidentifikasi indikator kinerja yang dapat mengukur pencapaian tujuan.

IFAC (International Federation of Accountants): Organisasi internasional yang mengembangkan standar akuntansi internasional, termasuk IPSAS untuk sektor publik.

Impact: Dampak yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif, berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Indikator: Sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan.

Informasi Keuangan: Data yang dihasilkan dari sistem akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan melaporkan keuangan entitas publik.

Input: Faktor-faktor yang diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan dan menghasilkan keluaran yang diinginkan.

Integrasi Data: Penggabungan data dari berbagai sumber ke dalam basis data terpusat untuk memastikan informasi yang konsisten dan terintegrasi.

Internal Audit: Audit yang dilakukan oleh unit internal pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan efektivitas pengelolaan keuangan.

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS): Standar akuntansi internasional yang dirancang untuk entitas sektor publik guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik secara global.

Investor: Orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

IPSAS (International Public Sector Accounting Standards): Standar akuntansi internasional untuk entitas sektor publik yang dikeluarkan oleh IPSASB, mencakup

prinsip dan praktik yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik.

IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board): Organisasi independen yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengeluarkan IPSAS.

Keandalan: Penyajian informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja.

Kebijakan fiskal: Strategi pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara.

Kelangsungan Usaha: Asumsi bahwa entitas pemerintah akan terus beroperasi dalam jangka panjang dan tidak ada niat atau kebutuhan untuk melikuidasi atau secara material mengurangi skala operasi.

Kemandirian Fiskal: Kemampuan daerah untuk mengelola sumber pendapatan sendiri, mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Kepatuhan terhadap Peraturan: Memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM): Kerangka kerja yang mengarahkan pengeluaran pemerintah selama beberapa tahun ke depan untuk mencapai tujuan jangka menengah.

Keseimbangan Anggaran: Merencanakan pendapatan dan pengeluaran di muka untuk memastikan keduanya seimbang.

Keuangan Desa: Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Kewajiban: Hutang atau komitmen yang harus dipenuhi oleh entitas sebagai hasil dari transaksi masa lalu.

Kewajiban: Kewajiban finansial atau non-finansial entitas sektor publik yang timbul dari transaksi masa lalu dan diharapkan memerlukan pengeluaran sumber daya ekonomi di masa mendatang.

Kewarganegaraan Aktif: Konsep di mana warga negara dilihat sebagai peserta aktif dalam tata kelola publik, terlibat langsung dalam perencanaan dan penyediaan layanan.

Key Performance Indicators (KPIs): Metrik kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi atau program.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Organisasi yang bertugas untuk mengawasi dan menindaklanjuti dugaan korupsi di tingkat daerah.

Komparabilitas: Kemampuan membandingkan informasi keuangan antar periode dan antar entitas untuk menilai kinerja dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Komparasi: suatu konsep untuk mempelajari guna menemukan sebuah persamaan dan perbedaan dalam suatu objek dengan cara membandingkan.

Konsistensi: Prinsip yang mendorong penggunaan metode akuntansi yang sama dari periode ke periode untuk memastikan perbandingan laporan keuangan yang bermakna.

Konsolidasi: Penggabungan laporan keuangan dari semua entitas di bawahnya untuk memberikan gambaran keuangan yang holistik.

Kredibilitas: perihal yang dapat dipercaya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP): Laporan yang memuat informasi mengenai kinerja dan pencapaian target pemerintah daerah.

Laporan Arus Kas: Laporan yang menunjukkan aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu, dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan.

Laporan Keuangan Bertujuan Umum (GPFS): Laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas entitas sektor publik.

Laporan Keuangan Desa: Laporan yang berisi informasi tentang kondisi keuangan desa pada periode tertentu.

Laporan Keuangan Sektor Publik: Laporan yang disusun oleh entitas publik untuk memberikan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel mengenai penggunaan dan pengelolaan sumber daya publik.

Laporan Operasional: Laporan yang menunjukkan hasil operasional pemerintah daerah selama periode tertentu, meliputi pendapatan operasional dan beban operasional.

Laporan Perubahan Ekuitas: Laporan yang menyajikan perubahan ekuitas entitas publik selama periode tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Laporan yang menginformasikan mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.

Likuiditas: Kemampuan suatu bisnis atau perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan melunasi utang-utang dalam jangka pendek.

Manajemen Publik Baru (NPM): Pendekatan manajemen publik yang mengadopsi praktik-praktik dari sektor swasta, termasuk penganggaran berbasis kinerja dan akrual.

Materialitas: Prinsip bahwa informasi yang disajikan harus cukup penting untuk mempengaruhi keputusan pengguna laporan.

Neraca: Laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas.

Opini WTP: Opini wajar tanpa pengecualian, yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Organisasi bisnis: Organisasi yang besaran pokok untuk tujuan komersil dan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan/ laba

Organisasi nirlaba: Organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu yang menarik perhatian publik untuk suatu tujuan komersil tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba.

Otomatisasi Proses: Implementasi teknologi untuk memungkinkan proses otomatis dalam pencatatan transaksi keuangan dan pembuatan laporan.

Otonomi Daerah: Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Outcome: Dampak atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.

Output: Hasil yang diharapkan secara langsung dari suatu kegiatan.

Pajak Daerah: Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, dan lain-lain.

Pajak: Pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

PDB: Produk Domestik Bruto; Nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Pelaksanaan: Kegiatan realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Penatausahaan: Kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengukuran transaksi keuangan desa.

Pencatatan Transaksi: Proses mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis dalam jurnal umum dan jurnal khusus.

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang sah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Hibah: Bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau pihak lain tanpa ikatan yang mengikat.

Pendapatan LO: hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA: Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan: Hasil kerja atau upah dari usaha seseorang.

Penganggaran Berbasis Kinerja: Sistem penganggaran yang menekankan pencapaian hasil yang diukur dengan indikator kinerja tertentu.

Penganggaran Mikro dan Makro: Penganggaran mikro berfokus pada pengendalian anggaran dan pencapaian hasil di tingkat organisasi, sedangkan penganggaran makro berfokus pada stabilitas keuangan dan keseimbangan fiskal di tingkat nasional.

Penganggaran Tradisional: Proses yang digunakan pemerintah untuk memutuskan pengeluaran, membatasi pengeluaran sesuai dengan pendapatan, dan mencegah pengeluaran berlebih.

Pengelolaan Keuangan Desa: Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan yang Efektif: Menggunakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan keuangan negara.

Pengendalian Fisik: Langkah-langkah untuk melindungi aset fisik pemerintah, seperti brankas dan sistem keamanan.

Pengendalian Intern: Serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai, termasuk keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efisiensi operasional.

Pengendalian Intern: Sistem dan prosedur yang dirancang untuk meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Pengendalian Manajemen

Penggolongan Akun: Langkah mengelompokkan transaksi keuangan dalam akun-akun yang relevan untuk memudahkan pelaporan dan analisis.

Pengukuran Biaya Historis: Metode pengukuran aset dan kewajiban berdasarkan biaya perolehan atau biaya historisnya, digunakan dalam beberapa konteks akuntansi berbasis akrual.

Pengukuran Nilai Wajar: Metode pengukuran aset dan kewajiban di pasar utama atau transaksi setara, digunakan dalam akuntansi berbasis akrual.

Penyajian Informasi Keuangan: Menyajikan laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk evaluasi kinerja keuangan pemerintah.

Perencanaan: Kegiatan penyusunan rencana keuangan desa yang meliputi penetapan tujuan, sasaran, strategi, dan program.

Performance Management System: Sistem yang digunakan untuk mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja organisasi.

Performance Measurement in the Public Sector: Proses evaluasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK): Dokumen yang mengatur pencabutan standar akuntansi keuangan yang sudah tidak relevan atau tidak lagi berlaku.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK): Standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mengatur penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pertanggungjawaban: Kewajiban untuk menjelaskan dan membuktikan penggunaan keuangan desa kepada publik.

Piutang: Hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk/jasa tapi belum membayarnya dengan lunas.

Prinsip Akuntansi: Aturan dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan.

Program dan Project Evaluation (PPE): Evaluasi pencapaian tujuan dan dampak dari program atau proyek sektor publik.

Prudence: Prinsip kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian, untuk memastikan bahwa aset dan pendapatan tidak dilebih-lebihkan dan kewajiban serta beban tidak diremehkan.

PSAK: seperangkat pedoman, prinsip, dan prosedur yang mengatur bagaimana entitas harus mengukur, mengungkapkan, dan melaporkan informasi keuangan.

Public Resources: Anggaran, tenaga kerja, dan waktu yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan program dan kebijakan.

Qualitative Analysis (QA): Pengumpulan, interpretasi, dan evaluasi data deskriptif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sektor publik.

Realisasi: Usaha atau upaya perwujudan planning menjadi kenyataan.

Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Proses perubahan dari sistem akuntansi berbasis kas ke akrual untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan dalam entitas sektor publik.

Regulasi: Peraturan yang ditetapkan oleh otoritas untuk mengatur pelaporan keuangan entitas publik.

Reporting: Pelaporan hasil analisis kinerja kepada pemangku kepentingan.

Retribusi Daerah: Biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pelayanan atau penggunaan fasilitas daerah, seperti retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Revenue Variance: Selisih antara pendapatan aktual dengan perkiraan atau anggaran pendapatan yang telah ditetapkan.

SAP: seperangkat pedoman, prinsip, dan prosedur yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah.

SAP: Standar Akuntansi Pemerintahan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): Unit kerja di bawah pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan berdasarkan bidang tugas masing-masing.

Setting Goals and Objectives: Penetapan tujuan dan sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu (SMART).

Siklus Akuntansi: Proses yang melibatkan pencatatan transaksi, penggolongan akun, penyusunan laporan keuangan, dan analisis serta evaluasi kinerja keuangan daerah.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Sistem yang mengatur pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan transaksi keuangan entitas sektor publik, sesuai dengan standar yang berlaku.

Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP): Sistem yang digunakan oleh entitas pemerintah untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat: Rangkaian prosedur, perangkat, dan aturan yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan negara.

Sistem Informasi dan Teknologi (SI/TI): Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam akuntansi pemerintahan.

Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMDA): Sistem yang digunakan untuk mengelola informasi keuangan dalam entitas publik secara efisien.

Sistem Pengendalian Intern: Proses, prosedur, dan mekanisme yang diterapkan oleh entitas sektor publik untuk memastikan pencapaian tujuan, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan.

SPAP: beberapa pernyataan standar teknik serta aturan etika yang meliputi pernyataan standar auditing, atestasi, jasa akuntansi dan reuiu, jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu.

SPKN: acuan mutu bagi pemeriksan dan organisasi pemeriksa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab keuangan Negara.

Stabilisasi: Usaha atau upaya membuat stabil.

Stakeholders: Para pemangku kepentingan dalam organisasi

Standar Akuntansi Indonesia (SAK): Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan negara, termasuk dalam proses konvergensi dengan IFRS.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): Kerangka kerja yang digunakan oleh entitas pemerintah untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang mencakup relevansi, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): Prinsip-prinsip dan prosedur yang ditetapkan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Standar IFRS (International Financial Reporting Standards): Standar akuntansi keuangan internasional yang diterbitkan oleh IASB, digunakan sebagai dasar untuk pengembangan IPSAS dan standar nasional seperti SAK di Indonesia.

Substance over form: Suatu kejadian/transaksi mengungguli formalitas/legalitasnya.

Suku bunga: Balas jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak yang meminjam kepada yang meminjamkan dana atau uang.

Surplus: Kenaikan dalam anggaran belanja.

Surveys dan Public Feedback (SPF): Metode untuk mendapatkan umpan balik mengenai kinerja sektor publik melalui survei, wawancara, dan kelompok fokus.

SWOT Analysis: Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi kinerja organisasi.

Tantiem: Bagian keuntungan yang diberikan kepada Direksi dan Komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu prosentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.

Transfer: Penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ke entitas pelaporan lainnya, termasuk dana peimbangan dan dana bagi hasil

Transparansi Anggaran: Prinsip dimana pemerintah daerah harus terbuka dan transparan mengenai penggunaan anggaran publik.

Transparansi Keuangan: Meningkatkan keterbukaan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah untuk memungkinkan akses dan pemahaman yang lebih baik oleh publik.

Transparansi: Keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yang dapat diakses dan dievaluasi oleh publik.

Transparansi: Penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara jujur dan terbuka.

Transparansi: Penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang pengelolaan keuangan entitas publik kepada masyarakat.

Transparansi: Prinsip yang menuntut keterbukaan dan aksesibilitas informasi keuangan kepada publik dan pemangku kepentingan.

Transparency Measurement Method (TMM): Metode evaluasi tingkat transparansi dan akuntabilitas sektor publik dalam pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya.

Value added: Nilai tambah

Value Chain Analysis (VCA): Analisis kinerja sektor publik melalui perspektif rantai nilai dari program atau kegiatan yang dilakukan.

Value for Money: Indikator penilaian sektor publik dengan cara memberikan informasi apakah dana yang digunakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat.

Value for Money: penekanan organisasi sektor publik harus dapat menggabungkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara simultan. Artinya, organisasi tersebut harus mampu menggunakan dana publik dengan cermat, hemat, dan tepat untuk mencapai target, sasaran, dan tujuan yang ditetapkan.

Wajib pajak: Orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak.

DUMMYY

TENTANG PENULIS



Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT., kelahiran Pamekasan, Jawa Timur. Penulis memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Trunojoyo Madura (2021). Penulis juga memperoleh gelar Magister Sains di Universitas Gadjah Mada pada tahun (2024). Selama menempuh pendidikan, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi yaitu Ketua Divisi Hubungan Masyarakat GenBI (2019-2020), Ketua Umum Pengurus Asrama UTM (2019-2020), dan Organisasi Mahasiswa Daerah Pamekasan (2019-2020). Selain itu, penulis juga memperoleh berbagai penghargaan yaitu Juara 2 *Call For Paper* tingkat regional di IAIN Tulungagung (2017), Juara 2 Olimpiade Ekonomi di Universitas Trunojoyo Madura (2017), Juara Harapan 1 *Call For Paper* Universitas Pendidikan Indonesia, dan Juara 1 Lomba Dakwah Islami Fesyar Bank Indonesia (2020). Saat ini penulis juga aktif sebagai Junior Auditor KAP Moh Wildan dan Adi Darmawan, serta membuka jasa kursus akuntansi.

Email: abdulgafurrinaldi@gmail.com

Kontribusi: Bab 3, 5, 7, 9, 13, dan 14



Wukuf Dilvan Rafa, M.Ak., lahir di Pontianak, 26 September 1996, menyelesaikan studi dari MIN Bangka Belitung Pontianak, SMPN 6 Pontianak, SMA Muhammadiyah 1 Pontianak S1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak, dan Magister Akuntansi di Universitas Tanjungpura Pontianak. Saat ini, penulis merupakan dosen Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dengan bidang keahlian pada Sistem Informasi Akuntansi. Beberapa mata kuliah yang pernah diampuh diantaranya adalah Statistik Ekonomi dan Bisnis Lanjutan, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Manajemen, Audit, Analisis *Big Data* dan Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Selain aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis juga aktif di organisasi Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA) sebagai kepala bidang media dan IT.
Email : wukuf.dilvan@ekonomi.untan.ac.id

Kontribusi: Bab 1



ZULKIFLI, S.E., M.M., adalah Dosen Tetap di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Bersertifikat Pendidik No.101236415620112, Keputusan Mendiknas Nomor: 108/P/2009 dengan NIDN 0515036601 dan Dosen Tidak Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Menyelesaikan Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1991. Kemudian melanjutkan Prodi Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada tahun 1994 dan selesai tahun 1996. Selain mengajar, beliau aktif melakukan Penelitian dan

hasilnya dimuat di Jurnal Kajian Bisnis (JKB) dan Jurnal Riset Manajemen (JRM) terbitan STIE Widya Wiwaha, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI) terbitan FE UII. Kesibukan lain sebagai Anggota Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP) hingga sekarang dan sebagai Pemerhati Akuntansi Publik. Beliau juga sebagai pemateri pada Bimbingan Teknis yang merupakan bentuk Pengabdian Masyarakat untuk Organisasi Perangkat Daerah di berbagai Pemda. Buku yang pernah ditulis adalah Akuntansi Biaya dilengkapi isu-isu Kontemporer bersama Dra. Sulastiningsih, M.Si dan Manajemen Biaya bersama Drs. Harnanto, M.Soc, Ak. dan Sistem Pengendalian Manajemen bersama Prof. Hadri Kusuma, MBA, Ak. dan Dra. Sulastiningsih, M.Si.

Email: zulstieww@gmail.com

Kontribusi: Bab 2



Dr. Priyastiwi, SE, MSi, Ak, CA., lahir pada 22 Oktober 1968 di Yogyakarta, Indonesia. Penulis merupakan Dosen di Perguruan Tinggi Swasta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta (STIE WW). Pernah mengajar di kampus UNY, UIN, UST, dan UMY. Penulis memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Gadjah Mada (1993), melanjutkan studi S2 Akuntansi di Universitas Gadjah Mada (2001), kemudian melanjutkan studi S3 Akuntansi di Universitas Gadjah Mada (2020). Penulis juga merupakan anggota IAI. Kompartemen Akuntansi Pendidik (2000-sekarang). Selama menempuh pendidikan, penulis aktif mengikuti pelatihan profesi yang diselenggarakan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta diantaranya, Pelatihan Auditing (2001), Pelatihan Pasar Modal (2005), Pelatihan Statistik SEM dan LISREL (2006), Pelatihan Brevet Pajak A dan B (2007), Pelatihan Metodologi

Penelitian (2008), Pelatihan Pembuatan Materi Kuliah (2012), Pelatihan Pembimbingan Tesis (2012), Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif penyelenggara Universitas Gadjah Mada (UGM) (2014), dan Pelatihan Metode Penelitian Eksperimen di Surabaya (2015). Terhitung dari 1994, ia diamanahkan menjadi Tenaga Ahli Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Bappeda DIY. Menjadi konsultan dan sebagai trainer bidangn Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan, dan Perencanaan di Pemerintah Daerah.

Email: priyastawi@stieww.ac.id

Kontribusi: Bab 4



Dr. Maria Magdalena Pur Dwiastuti, S.E., M.M., kelahiran Kulon Progo, 14 Mei 1976. Penulis adalah Dosen Tetap Program Studi Akuntansi STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta. Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Nusa Megarkencana tahun 2000, selanjutnya penulis memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada program Magister di Universitas Gunadarma Jakarta dan menyelesaikan pendidikan S2 tahun 2003. Sedangkan pendidikan S3 ditempuh pada tahun 2016-2020 pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma. Mata kuliah yang diampu oleh penulis adalah: Akuntansi Pengantar 1, Akuntansi Pengantar 2, Akuntansi Keuangan Menengah 1, dan Akuntansi Keuangan Menengah 2. Selain mengejar, tridarma perguruan tinggi juga harus dilaksanakan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan diantaranya adalah: (1). Peta Digital Klasifikasi Tanah Sebagai Dasar Penetapan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), (2). Analisis Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bantul, (3). Pendeteksian Fraudulent

Financial Reporting Dengan Pendekatan Beneish M-Score Index Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019, (4). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019, dan beberapa penelitian lainnya. Beberapa Pengabdian Masyarakat yang pernah dilaksanakan yaitu: (1). Pendampingan Pengembangan Desa Wisata “Kembaran Tour,” (2) Pendampingan Akuntansi Komputer Dengan Software ZAHIR PADA CV. Gracia Teknologi Infikom, (3). Pelatihan Penghitungan Biaya Produksi pada Pengrajin Mendong di Sleman.

Email: mariastienus@gmail.com

Kontribusi: Bab 6



Dra. Sapinah, M.Si., merupakan dosen tetap LLDIKTI IX yang dipekerjakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Patompo Makassar. Penulis menyelesaikan studi S1 di Jurusan Pendidikan Dunia Usaha Program Studi Pendidikan Akuntansi IKIP Ujung Pandang pada tahun 1992. Kemudian penulis menyelesaikan studi Magister Sains di Prodi Manajemen Keuangan UNHAS tahun 2000. Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi dan Manajemen Keuangan. Sebagai dosen tetap di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Patompo, penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat baik pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Saat ini penulis menduduki jabatan Wakil Dekan FKIP Universitas Patompo. Penulis juga sebagai Asesor Nasional Beban Kinerja Dosen dan Tim Penilai PAK internal Universitas

Patompo. Selain itu penulis merupakan anggota Asosiasi Dosen Republik Indonesia (ADRI) dan juga aktif dalam organisasi sosial keagamaan.

Email: sapinah37@gmail.com

Kontribusi: Bab 8



Dr. Emi Yulia Siska, S.E., M.Si., Ak. Dilahirkan di Palembang Sumatera Selatan, penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada program studi peranakan syariah. Selain mengajar yang bersangkutan juga tergabung sebagai salah satu tenaga ahli bidang keuangan di *Share-E Management*. Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi Universitas IBA Palembang (1997), dan mengambil studi profesi Akuntan di FE Unsri (2021), memperoleh gelar Magister Sains di Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2002), serta memperoleh gelar Doktor dari jurusan program Doktoral Ilmu Ekonomi kekhususan Akuntansi Keuangan di Universitas Sriwijaya Palembang (2024).

Email: emiyuliasiska_uin@radenfatah.ac.ig

Kontribusi: Bab 10



Andri Widiyanto, S.E., M.Si., Ak. Seorang dosen Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama Tegal dengan Konsentrasi Keilmuan Akuntansi Sektor Publik dan Sistem Informasi Akuntansi. Selain menjadi seorang pengajar, penulis aktif sebagai tenaga ahli system informasi dan keuangan di berbagai organisasi publik. Penulis mencurahkan ide dalam berbagai buku dengan judul Praktikum Perancangan Sistem Akuntansi Manual, Desain Sistem Informasi KAS (Si-Kas) Organisasi Non Laba, serta Buku Pengantar Akuntansi Sektor Publik: Ragam Entitas dan Standar Akuntansinya. Akuntansi Keuangan Daerah: Konsep dan Terapan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Selain itu, penulis mendapatkan HAKI atas Sistem Informasi KAS pada organisasi non laba dan SI-MOSQUE sistem informasi manajemen masjid.

Email: andriwidi29@gmail.com

Kontribusi: Bab 11



Dra. Sulastiningsih, M.Si., adalah dosen tetap Program Studi Akuntansi di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Menyelesaikan S1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Gelar Magister Sain (M.Si.) diperoleh dari Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini mendapat amanah sebagai Editorial Board Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha dan Asesor BKD. Sebagai peneliti, publikasi hasil penelitiannya dimuat di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks scopus. Hasil karya berupa buku yang telah dipublikasikan secara luas

adalah (1) Buku Lab/ Praktikum Akuntansi Pengantar 1 dan 2 (bersama Drs. Achmad Tjahjono, M.M., Akt), (2) Akuntansi Biaya Dilengkapi Dengan Isu-isu Kontemporer (bersama Zulkifli, SE., M.M.), (3) Akuntansi Pengantar Pendekatan Terpadu Buku 1 (bersama Drs. Achmad Tjahjono, M.M., Akt.); (4) Akuntansi Pengantar Pendekatan Terpadu Buku 2 (bersama Drs. Achmad Tjahjono, M.M., Akt.) (5) Akuntansi Manajemen (bersama Prof Hadri Kusuma dan Zulkifli SE, MM), (6) Sistem Pengendalian Manajemen (bersama Prof Hadri Kusuma dan Zulkifli SE, MM), (7) Cerdas Mengelola Keuangan Keluarga (8) Book Chapter Akuntansi Pengantar (9) Book Chapter Akuntansi Biaya (10) Book Chapter Akuntansi Keuangan Menengah. Selain sebagai dosen juga sebagai trainer bidang Akuntansi dan Keuangan serta aktif dalam pembinaan UMKM.

Email: sulastiningsih@stieww.ac.id

Kontribusi: Bab 12



Lilik Ambarwati, S.E., M.M., lahir di Bantul, 26 April 1993, menempuh pendidikan di STIE Widya Wiwaha, S1 Program Studi Akuntansi lulus pada tahun 2015, S2 Magister Manajemen Kebidangan Keuangan Daerah lulus tahun 2017. Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap di STIE Widya Wiwaha. Selain mengajar, ia juga aktif melakukan kegiatan tridharma lainnya. Aktif dalam penelitian, pengabdian, dan aktif dalam pertemuan ilmiah. Pada bidang sektor publik, penulis berpartisipasi langsung dalam organisasi desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta menganalisis pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk Pengabdian kepada Masyarakat untuk berbagai desa.

Email: ambar@stieww.ac.id

Kontribusi: Bab 15

DUMMY

SISTEM AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor publik adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengelolaan dan pelaporan keuangan dalam organisasi pemerintah dan nirlaba, dengan berbagai aspek yang unik dibandingkan sektor swasta. Ini mencakup proses perencanaan, pengalokasian, dan pengendalian sumber daya keuangan untuk mendanai kegiatan pemerintah dengan penekanan pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Instrumen utama seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Daerah (APBD) melibatkan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan legislatif. Teknik akuntansi sektor publik meliputi pencatatan transaksi, pengakuan pendapatan dan beban, serta penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengadopsi prinsip-prinsip dari IPSAS untuk memastikan keseragaman dan transparansi.

Laporan keuangan sektor publik menyediakan informasi relevan untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas, termasuk laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Pengukuran kinerja sektor publik mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam pelayanan publik, dengan berbagai indikator dan metode untuk meningkatkan transparansi. Sistem akuntansi pemerintahan pusat dan daerah mencakup mekanisme pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan yang memastikan pengelolaan keuangan negara yang baik dan transparan, sementara akuntansi desa mengelola keuangan tingkat desa. Akuntansi organisasi nirlaba mencakup pencatatan dan pelaporan keuangan untuk organisasi non-profit dengan tantangan khusus. Konsep otonomi daerah menekankan pengelolaan keuangan daerah yang mandiri dan akuntabel, dan regulasi profesi akuntan di sektor publik mencakup sertifikasi, kode etik, dan peran akuntan dalam memastikan transparansi keuangan. Perbandingan dengan akuntansi sektor swasta menunjukkan perbedaan dalam tujuan, prinsip, standar, dan praktik, dengan sektor publik lebih menekankan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana. Akuntansi sektor publik penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik, serta mendukung pemerintahan yang baik dan akuntabel.